

**PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Dalam Pelaksanaan dan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah pada Lampiran III dan IV, maka pemerintah daerah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak ditetapkannya peraturan tersebut di atas. Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Fakfak.

Sebagai komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan Tahun 2024, yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Di samping itu, 47 entitas akuntansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menyusun pula laporan keuangan SKPD Tahun 2024 yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Fakfak disusun sebagai bagian dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi perencanaan anggaran, penetapan anggaran bersama-sama dengan DPRD, pelaksanaan anggaran dan pelaporan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi Pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.
2. Manajerial
Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana.
3. Transparansi
Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2024 disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 23 ayat 1, khususnya bagian yang mengatur tentang keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana telah beberapa

- Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
 5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lampiran III dan IV dicabut);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Fakfak Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
21. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 45 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Fakfak;
22. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
24. Keputusan Bupati Fakfak Nomor 900.1.2.4-1 Tahun 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
25. Keputusan Bupati Fakfak Nomor 900.1.2.4-334 Tahun 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai berikut.

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2 Pencapaian program Pemerintah Daerah Terkait *Mandatory Spending*
- 3.3 Pencapaian Program Pemerintah Daerah terkait Dana Otonomi Khusus
- 3.4 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP Pemerintah Daerah

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3 Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
- 5.4 Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1 Kegiatan Operasional
 - 5.4.2 Kegiatan Non Operasional
- 5.5 Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.5.1 Laporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2 Laporan Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3 Laporan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.5.4 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas

5.5.5 Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendaharan Penerimaan

5.5.6 Saldo Akhir Kas

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

6.3 Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Tahun 2024

Bab VII PENUTUP

Memuat uraian penutup berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Kabupaten Fakfak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Ibukota Kabupaten ini terletak di Kota Fakfak. Kabupaten Fakfak mempunyai luas wilayah 14,320 Km² terletak pada 131°53'03" BT - 133°29'19" BT dan 2°30'58" - 3°57'51" LS. Dalam perkembangannya telah mengalami pemekaran wilayah Distrik, Kelurahan maupun Kampung. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penghapusan Kampung dan Pengesahan Pembentukan Kampung-Kampung Baru Dalam Distrik Se Kabupaten Fakfak dan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Distrik Pariwari, Wartutin, Fakfak Timur Tengah, Arguni, Mbahamdandara, Kayauni, Furwagi dan Tomage, maka secara keseluruhan kabupaten Fakfak memiliki 17 Distrik, 7 Kelurahan dan 142 Kampung. Secara umum batas wilayah Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Teluk Bintuni;
- Sebelah Selatan : Laut Arafura dan Kabupaten Kaimana;
- Sebelah Barat : Laut Seram dan Teluk Berau;
- Sebelah Timur : Kabupaten Fakfak.

Kabupaten ini secara administrasi terbentuk pada tanggal 16 November 1900. Oleh karenanya, setiap tanggal 16 November diperingati sebagai hari jadi Kota Fakfak yang dirayakan secara meriah dengan berbagai festival adat dan budaya serta *expo* pembangunan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Disertai dengan digelarnya pameran-pameran pembangunan dan budaya sebagai upaya menggali dan mempromosikan daerah dalam mendorong kreatifitas daerah dan investasi.

Sejak lama, Kabupaten Fakfak terkenal dengan berbagai sebutan. Sebutan sebagai Kota Tua, Kota Sejarah dan Kota Perjuangan, Kota Pemerintahan dan Kota Pala karena terkenal dengan komoditasnya. Dikenal sebagai Kota Tua karena keberadaannya telah disebutkan sejak lama pada beberapa masehi yang lalu hingga di masa Kerajaan Majapahit dalam kitab klasik Negara Kertagama (1365 M) yang menyatakan sejumlah nama daerah yang terletak di bagian Timur Indonesia disebut nama Wanin, Sran dan Timur. Wanin menurut ahli Jawa Kuno adalah nama lain daerah Onin (Jazirah Onin) di Fakfak sehingga saat ini menjadi salah satu kabupaten tertua di Tanah Papua. Disebut sebagai kota sejarah dan perjuangan karena memiliki sejarah perjuangan masa lalu yang dibuktikan dengan banyaknya peninggalan di zaman perang dunia II. Disebut sebagai Kota Pemerintahan karena pada zaman dahulu telah

menjadi pusat pemerintahan dan pendidikan yang dikenal mulai dari zaman kerajaan atau petuanan yang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, hingga dijadikan sebagai kota pemerintahan pertama pada masa pemerintahan Kolonial Belanda di West Nieuw Guinea (Irian Barat/Irian Jaya/Tanah Papua sekarang). pada tahun 1898 sebagai karesidenan atau *afdeeling* bersama dengan Manokwari.

Sesuai dengan peta Pulau Papua, posisi Kabupaten Fakfak berada tepat di kawasan Kepala Burung Papua bagian selatan Provinsi Papua Barat yang berdekatan dengan beberapa kabupaten seperti, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Sorong. Dengan luasan yang dimiliki, mempunyai kondisi bervariasi, relatif berbukit-bukit sehingga berpengaruh pada perkembangannya. Keberadaannya menjadi terkenal dengan sebutan sebagai Kota yang memiliki Moto “*Satu Tungku Tiga Batu*” sebagai alat pemersatu dalam membangun ikatan kekeluargaan dan harmonisasi dalam mendukung proses pembangunan yang berjalan secara aman, nyaman dan damai. Dalam era otonomi daerah, pembangunan terus diarahkan kepada tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera, sebagaimana Visi Kabupaten Fakfak 2022-2026 “*Terwujudnya Fakfak yang Terdepan Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Mandiri*”. Atau dikenal dengan Moto pembangunan “Fakfak Tersenyum”. Untuk itu partisipasi masyarakat, perangkat daerah dan pihak-pihak tertentu (*stakeholder*) mempunyai peranan yang sangat dominan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Fakfak.

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, Kabupaten Fakfak, yaitu (minimal):

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 20,86%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,28%
3. Gini Ratio sebesar 0,36%
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,52%
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 1,63%
6. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRBADHB) sebesar 6.310,53 juta rupiah.

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan nonpangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin provinsi/kabupaten/kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Fakfak

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1	Kabupaten Fakfak (%)	21,38	20,86	Turun
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	17,84	17,67	Turun
3	Provinsi Papua Barat (%)	20,49	21,66	Naik
4	Nasional (%)	9,36	8,57	Turun
5	Peringkat Provinsi	8	5	Naik
6	Peringkat Nasional	52	52	Naik

Sumber Dokumen: BPS Fakfak

Persentase penduduk miskin Kabupaten Fakfak pada Tahun 2023 sebesar 21,38% mengalami penurunan pada Tahun 2024 dimana persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 20,86% dan diharapkan pada Tahun 2025 terus menurun hingga angka 20,00%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Fakfak sudah berada di bawah provinsi namun masih di atas nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Fakfak

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Fakfak	4,92%	4,60%	Turun
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	4,94%	4,35%	Turun
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,53%	1,46%	Turun
4	Peringkat Provinsi	8	5	Naik
5	Peringkat Nasional	35	32	Naik

Sumber Dokumen: BPS Fakfak

Tabel 3. Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Fakfak

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	1,62%	1,35%	Turun
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	1,71%	1,28%	Turun
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38%	0,35%	Turun
4	Peringkat Provinsi	7	4	Naik
5	Peringkat Nasional	27	28	Turun

Sumber Dokumen: BPS Fakfak

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat/Kabupaten Fakfak Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Fakfak Tahun 2024 adalah sebesar 6,28%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Fakfak

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	6,52%	6,28%	Turun
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	5,38%	4,13%	Turun
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,32%	4,91%	Turun
4	Peringkat Provinsi	2	1	Naik
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Fakfak

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Fakfak Tahun 2024 menurut data BPS sebesar 6,28% , sedangkan TPT pada Tahun 2023 adalah sebesar 6,52%. TPT Provinsi Papua Barat Tahun 2024 sebesar 4,13%, sedangkan Tahun 2023 sebesar 5,38% dan TPT Nasional Tahun 2024 sebesar 4,91%, sedangkan Tahun 2023 sebesar 5,32%.

2.1.3. Indek Gini (*Gini Ratio*)

Indek Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase

kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Indeks Gini

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun
1	Kabupaten Fakfak	0,330%	0,359%	Naik
2	Tingkat Provinsi	0,370%	0,370%	Tetap
3	Tingkat Nasional	0,384%	0,388%	Naik
4	Peringkat Nasional	24	38	Turun

Sumber Dokumen: BPS Pusat, BPS Fakfak

(Sampai dengan Laporan ini dibuat, Pemerintah Daerah belum mendapatkan data Indeks Gini (*Gini Ratio*) Kabupaten Fakfak Tahun 2024 dari BPS kabupaten Fakfak sehingga data yang disajikan adalah data tahun sebelumnya).

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

1. Rendah (< 60);
2. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
3. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$);
4. SangatTinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Fakfak realisasi pencapaian IPM Kabupaten Fakfak Tahun 2024 adalah sebesar 71,52 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun
1	Kabupaten Fakfak	70,85	71,52	Naik
2	Provinsi Papua Barat	67,47	67,69	Naik
3	Indonesia/Nasional	74,39	75,02	Naik
4	Peringkat Provinsi	3	2	Naik
5	Peringkat Nasional	335	338	Turun

Sumber Dokumen BPS Fakfak

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Fakfak Tahun 2024 adalah sebesar 71,52poin, dibandingkan Tahun 2023 sebesar 70,85 poin mengalami kenaikan sebesar 0,67 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir

(AHH), dan harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS), atau standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 69,16 tahun pada Tahun 2024, lebih lama 0,14 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian rata-rata lama sekolah 9,32 tahun dengan harapan lama sekolah 14,79 tahun. Sementara, Standar Hidup, PDRB per tahun senilai 6.310,53 Juta atau menurun 490,88 Juta dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Kabupaten Fakfak pada saat ini berada pada urutan 2 dari Kab/Kota yang ada di Provinsi Papua Barat dan berada pada urutan 338 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 514 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Fakfak (miliar rupiah)

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	3.474,01	3.545,46	3.503,35	64.964,02	12.301.393.60
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,97	2,06	1,63	2,01	5,31
3	Peringkat Provinsi	9	6	10	-	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Fakfak

Selama kurun waktu Tahun 2021 - Tahun 2023 perekonomian Kabupaten Fakfak mengalami kenaikan sebesar 0,66. pada periode Tahun 2021 – Tahun 2022 pertumbuhan perkonomian Kabupaten Fakfak sebesar 1,09 dan pada kurun waktu Tahun 2022 - 2023 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Fakfak sebesar -0,43. (Sampai dengan Laporan ini dibuat, Pemerintah Daerah belum mendapatkan data Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Fakfak Tahun 2024 dari BPS Kabupaten

Fakfak sehingga data yang disajikan adalah data tahun sebelumnya)

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Fakfak dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

1. Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*), ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
2. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*). Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
3. Inflasi Berat (*High Inflation*), mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.
4. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*). Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Tingkat Inflasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Tingkat Inflasi

No	Uraian	Desember 2023	Desember 2024	Naik/Turun
1	Tingkat Provinsi (%)	2,93	2,53	Turun
2	Tingkat Nasional (%)	2,61	1,57	Turun
3	Peringkat Nasional	-	3	-

Sumber Dokumen: BPS Fakfak

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Fakfak

Struktur perekonomian Provinsi Kabupaten Fakfak dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(juta rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	868,51	902,73	901,49	907,01	934,33
2	Pertambangan dan penggalan	62,44	66,34	64,90	67,27	96,88

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
3	Industri pengolahan	171,46	177,03	188,43	191,15	222,15
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,05	3,32	3,55	3,51	3,80
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah	9,73	9,92	9,69	9,70	10,01
6	Konstruksi	1.409,84	1.453,43	1.515,51	1.533,01	1.672,42
7	Pengadaan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil	648,80	675,65	731,21	763,56	780,15
8	Transportasi & Pergudangan	256,17	264,91	324,84	345,02	372,05
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	62,56	65,36	76,43	82,72	91,38
10	Informasi & Komunikasi	170,55	171,95	174,81	185,86	186,05
11	Jasa Keuangan & Asuransi	87,55	86,99	89,06	99,41	93,93
12	Real Estate	123,23	125,81	127,21	129,66	136,27
13	Jasa Perusahaan	9,69	9,87	10,48	10,84	11,18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial	992,55	993,02	1.032,17	1.138,96	1.358,96
15	Jasa Pendidikan	236,27	238,56	244,63	254,04	268,30
16	Jasa Kesehatan & Sosial	72,33	79,36	77,09	77,37	77,08
17	Jasa Lainnya	16,21	18,20	19,39	20,52	22,14
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		5.200,93	5.340,48	5.590,94	5.819,65	6.310,53
PDRB Provinsi Papua Barat		84.356,97	83.588,64	85.078,42	91.292,02	-
PDRB Nasional (Milyar Rupiah)		15.832,66	15.443,35	16.976,69	19.588,45	-
Peringkat Provinsi		5	5	5	5	-
Peringkat Nasional		-	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Fakfak

2.2. Kebijakan Keuangan

2.2.1. Pendapatan Daerah

Dengan memperhatikan potensi, permasalahan serta tantangan yang mungkin akan dihadapi dan berpotensi menjadi hambatan maupun peluang serta realisasi PAD tahun anggaran 2023, maka target pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan PAD tahun anggaran 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 2023 dari senilai Rp63.635.103.931,00 menjadi senilai Rp31.997.172.335,00 di Tahun 2024 atau turun senilai Rp31.637.931.596,00; sedangkan penerimaan daerah lainnya dari sektor non-PAD yaitu pendapatan transfer Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp1.458.340.443.342,00 mengalami kenaikan senilai Rp46.687.006.850,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang hanya dianggarkan senilai Rp1.411.653.436.492,00.

Terkait gambaran proyeksi pendapatan di atas, maka pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi, mendorong ke arah *full employment* sehingga jumlah pengangguran bisa menurun dan akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

2.2.2. Belanja Daerah

Pada sisi belanja daerah dari tahun ke tahun Pemerintah Kabupaten Fakfak selalu melakukan perbaikan dan peningkatan *quality spending* diharapkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada sisi belanja daerah semakin baik. Untuk Tahun 2024 jumlah total anggaran belanja mencapai Rp1.597.995.247.846,00. Sehubungan dengan aspek belanja daerah ini, maka penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong *empowerment* sehingga mampu menjadi pengungkit terhadap penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor pertanian, sektor perdagangan-hotel-restoran, sektor industri pengolahan (pendukung sektor jasa), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa.

Penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan infrastruktur serta fasilitas sosial.

Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut di atas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2022-2026. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi, yaitu sebagai berikut:

1. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran Tahun 2022 - 2026 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan.

3. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

5. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya. Belanja daerah harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektivitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi). Sehingga pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).

2.2.3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain

digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan APBD. Untuk menutup defisit dan surplus yang diperlukan pembiayaan daerah. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Fakfak juga memberikan penguatan terhadap Bank Papua dalam bentuk penyertaan modal dan terbagi dalam lembar saham biasa, juga selalu ditingkatkan sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah khusus pendapatan Deviden dari Bank Papua, dapat mengalami peningkatan yang dapat memberikan dampak pada kinerja pendapatan daerah semakin tinggi.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Fakfak menganut anggaran surplus/defisit.

Anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Fakfak pada Tahun 2024 senilai Rp1.558.381.740.870,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp31.997.172.335,00, Pendapatan Transfer senilai Rp1.458.340.443.342,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp68.044.125.193,00. Jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan daerah sebelum perubahan maka mengalami kenaikan senilai Rp82.793.288.839,00 atau naik sebesar 5,61%. Anggaran PAD mengalami kenaikan senilai Rp4.100.369.700,00 atau naik sebesar 14,70% jika dibandingkan dengan anggaran PAD sebelum perubahan yang hanya senilai Rp27.896.802.635,00. Anggaran Pendapatan Transfer mengalami kenaikan senilai Rp43.537.385.139,00 atau naik sebesar 3,08% jika dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer sebelum perubahan yang hanya senilai Rp1.414.803.058.203,00. Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan senilai Rp35.155.534.000,00 atau naik sebesar 106,89% jika dibandingkan dengan anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebelum perubahan yang hanya senilai Rp32.888.591.193,00.

Sedangkan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Fakfak pada Tahun 2024 adalah senilai Rp1.531.522.264.917,50 atau ekuivalen 98,28% yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp22.118.794.392,50 ekuivalen 69,13%, Pendapatan Transfer senilai Rp1.448.698.606.250,00 ekuivalen 99,34%, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp60.704.864.275,00 ekuivalen 89,21. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya senilai Rp1.430.219.550.381,59, maka terjadi kenaikan senilai Rp101.302.714.535,91 atau naik sebesar 7,08% diantaranya

dipengaruhi oleh kenaikan pada realisasi Pendapatan Transfer dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dimana pada tahun 2023 realisasi pendapatan transfer hanya senilai Rp1.383.364.704.514,00 dan pada tahun 2024 realisasinya naik senilai Rp65.333.901.736,00 menjadi Rp1.448.698.606.250,00 atau naik sebesar 4,72%. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah naik menjadi senilai Rp60.704.864.275,00 atau naik sebesar 100% dimana pada tahun 2023 tidak ada realisasi pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah karena komponennya yaitu Pendapatan Dana JKN dianggarkan pada akun PAD; sehingga dari sektor PAD, realisasinya mengalami penurunan senilai Rp24.736.051.475,09 atau turun sebesar 52,79% jika membandingkan antara realisasi tahun 2023 senilai Rp46.854.845.867,59 dan realisasi tahun 2024 senilai Rp22.118.794.392,50. Penurunan ini terjadi karena Pendapatan Dana JKN pada tahun 2023 dianggarkan dalam akun PAD sedangkan di tahun 2024 pendapatan tersebut dianggarkan ke dalam akun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Fakfak pada Tahun 2024 senilai Rp1.597.995.247.846,00 yang terdiri dari Anggaran Belanja Operasi senilai Rp1.062.579.810.580,07, anggaran Belanja Modal senilai Rp320.000.577.189,93, anggaran Belanja Tak Terduga adalah senilai Rp12.510.101.045,00, dan anggaran Belanja Transfer senilai Rp202.904.759.031,00. Jika dibandingkan dengan anggaran belanja daerah sebelum perubahan maka mengalami kenaikan senilai Rp59.604.653.304,00 atau naik sebesar 3,87%. Anggaran Belanja Operasi mengalami kenaikan senilai Rp45.090.807.447,07 atau naik sebesar 4,43% jika dibandingkan dengan nilai anggaran Belanja Operasi sebelum perubahan yang hanya senilai Rp1.017.489.003.133,00. Anggaran Belanja Modal mengalami kenaikan senilai Rp11.373.362.373,93 atau naik 3,69% jika dibandingkan dengan nilai anggaran Belanja Modal sebelum perubahan yang hanya senilai Rp308.627.214.816,00. Anggaran Belanja Tak Terduga mengalami kenaikan senilai Rp2.510.101.045,00 atau naik sebesar 25,10% jika dibandingkan dengan nilai anggaran Belanja Tak Terduga sebelum perubahan yang hanya senilai Rp10.000.000.000,00. Anggaran Belanja Transfer mengalami kenaikan senilai Rp630.382.438,00 atau naik sebesar 0,31% jika dibandingkan dengan nilai anggaran Belanja Transfer sebelum perubahan yang hanya senilai Rp202.274.376.593,00.

Sedangkan realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 adalah senilai Rp1.500.365.448.694,08 atau ekuivalen 93,89% yang terdiri dari realisasi Belanja Operasi senilai Rp987.983.268.523,00 atau ekuivalen 92,98%, realisasi Belanja Modal senilai

Rp294.198.345.514,08 atau ekuivalen 91,94%, realisasi Belanja Tak Terduga senilai Rp12.465.499.000,00 atau ekuivalen 99,64% dan realisasi Belanja Transfer senilai Rp205.718.335.657,00 atau ekuivalen 101,39%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah tahun 2023 senilai Rp1.506.021.842.520,79, maka terjadi penurunan senilai Rp5.656.393.826,71 atau turun sebesar 0,38% diantaranya dipengaruhi oleh penurunan pada realisasi Belanja Operasi dan Belanja Tak Terduga. Realisasi Belanja Operasi mengalami penurunan senilai Rp40.783.658.387,05 atau turun 3,96% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi tahun 2023 yang tercatat senilai Rp1.028.766.926.910,05 dan Realisasi Belanja Tak Terduga mengalami penurunan senilai Rp1.604.866.920,00 atau turun 11,41% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2023 yang tercatat senilai Rp14.070.365.920,00. Sedangkan realisasi Belanja Modal dan Belanja Transfer mengalami kenaikan. Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan senilai Rp14.975.658.575,34 atau naik 5,36% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2023 yang hanya senilai Rp279.222.686.938,74 dan realisasi Belanja Transfer mengalami kenaikan senilai Rp21.756.472.905,00 atau naik 11,83% jika dibandingkan dengan jumlah realisasi Belanja Transfer tahun 2023 yang hanya senilai Rp183.961.862.752,00.

Dengan demikian terjadi surplus senilai Rp31.156.816.223,42 jika dibandingkan antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja. Sedangkan realisasi pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak, yaitu realisasi penerimaan pembiayaan senilai Rp41.938.506.975,73 dan realisasi pengeluaran pembiayaan senilai Rp2.325.000.000,00, sehingga pembiayaan netto menjadi senilai Rp39.613.506.975,73.

Secara ringkas realisasi APBD Kabupaten Fakfak Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023
4	Pendapatan	1.558.381.740.870,00	1.531.522.264.917,50	98,28	1.430.219.550.381,59
4.1	Pendapatan Asli Daerah - LRA	31.997.172.335,00	22.118.794.392,50	69,13	46.854.845.867,59
4.2	Pendapatan Transfer - LRA	1.458.340.443.342,00	1.448.698.606.250,00	99,34	1.383.364.704.514,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	68.044.125.193,00	60.704.864.275,00	89,21	0,00
5	Belanja	1.597.995.247.846,00	1.500.365.448.694,08	93,89	1.506.021.842.520,79
5.1	Belanja Operasi	1.062.579.810.580,07	987.983.268.523,00	92,98	1.028.766.926.910,05
5.2	Belanja Modal	320.000.577.189,93	294.198.345.514,08	91,94	279.222.686.938,74
5.3	Belanja Tak Terduga	12.510.101.045,00	12.465.499.000,00	99,64	14.070.365.920,00
5.4	Belanja Transfer	202.904.759.031,00	205.718.335.657,00	101,39	183.961.862.752,00
	Surplus / (Defisit)	(39.613.506.976,00)	31.156.816.223,42	(78,65)	(75.802.292.139,20)
6	Penerimaan Pembiayaan	41.938.506.976,00	41.938.506.975,73	100	118.740.799.114,93
6.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	41.938.506.976,00	41.938.506.975,73	100	118.740.799.114,93
7	Pengeluaran Pembiayaan	2.325.000.000,00	2.325.000.000,00	100	1.000.000.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023
7.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.325.000.000,00	2.325.000.000,00	100	1.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	39.613.506.976,00	39.613.506.975,73	100	117.740.799.114,93
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	70.770.323.199,15	0	41.938.506.975,73

3.2. Pencapaian program Pemerintah Daerah Terkait *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 3) Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 4) Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.
- 5) Alokasi dana Fungsi Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diatas Rp1.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 paling sedikit sebesar 0,75% dari total belanja daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berikut disajikan tingkat pemenuhan alokasi anggaran *mandatory spending* pada Pemerintah Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2024.

- 1) Alokasi Pendidikan Minimal Sebesar 20%

Pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menganggarkan alokasi untuk fungsi pendidikan senilai Rp385.714.333.617,00. Apabila dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah senilai Rp1.597.995.247.846,00 maka rasio

alokasi anggaran pendidikan terhadap total belanja daerah adalah sebesar 24,14%. Alokasi tersebut melebihi ketentuan alokasi anggaran yang diamanatkan peraturan perundangan yaitu minimal sebesar 20% untuk fungsi pendidikan.

2) Alokasi Kesehatan Minimal Sebesar 10%

Pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menganggarkan alokasi untuk fungsi kesehatan senilai Rp304.200.007.182,00. Apabila dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah senilai Rp1.597.995.247.846,00 maka rasio alokasi anggaran kesehatan terhadap total belanja daerah di luar gaji adalah sebesar 19,04%. Alokasi tersebut melebihi ketentuan alokasi anggaran yang diamanatkan peraturan perundangan yaitu minimal sebesar 10% untuk fungsi kesehatan.

3) Alokasi Infrastruktur Pelayanan Publik Sebesar 40%

Pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menganggarkan alokasi untuk infrastruktur pelayanan publik senilai Rp613.254.641.342,93. Apabila dibandingkan dengan total Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa senilai Rp746.965.471.125,00, maka rasio alokasi anggaran infrastruktur pelayanan publik terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum adalah 82,10%. Alokasi tersebut melebihi alokasi anggaran yang diamanatkan peraturan perundangan yaitu minimal sebesar 40% untuk infrastruktur pelayanan publik.

4) Alokasi Dana Desa Sebesar 10%

Pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah mengalokasikan dana desa senilai Rp83.115.125.638,00 dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah senilai Rp831.241.925.156,00, maka rasio alokasi dana desa terhadap total Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil adalah sebesar 10,00%. Alokasi tersebut telah memenuhi alokasi anggaran yang diamanatkan peraturan perundangan yaitu sebesar 10% untuk dana desa.

5) Alokasi Dana Fungsi Pengawasan

Pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah mengalokasikan dana untuk fungsi pengawasan senilai Rp13.916.606.185,00 dari total alokasi dana untuk belanja daerah senilai Rp1.597.995.247.846,00 sehingga rasio alokasi dana untuk fungsi pengawasan adalah sebesar 0,87%, maka jumlah alokasi dana tersebut telah memenuhi jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pengawasan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2024 bahwa paling sedikit 0,75% bagi Pemerintah Daerah yang besaran APBD-nya antara 1 triliun sampai dengan 2 triliun rupiah.

3.3. Pencapaian Program Pemerintah Daerah terkait Dana Otonomi Khusus

Pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Fakfak menerima pendapatan transfer Dana Otonomi Khusus Papua Barat senilai Rp210.393.369.484,00 yang terdiri dari:

No	Jenis Dana Otsus	Nilai
1	Dana Otsus 1%	37.695.114.000,00
2	Dana Otsus 1,25%	56.026.381.000,00
3	Dana Tambahan Infrastruktur	15.640.089.000,00
4	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	101.031.785.484,00
Jumlah		210.393.369.484,00

Berikut rincian transfer Dana Otonomi Khusus Papua Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

1) Dana Otsus 1% senilai Rp37.695.114.000,00 dengan rincian:

No	Jenis Dana Otsus	Periode	Tgl Transfer	Nilai	SK
1	Dana Otsus 1%	TAHAP 1	17-07-2024	11.308.534.200	Perpres Nomor 76 Tahun 2023
2	Dana Otsus 1%	TAHAP 2	10-12-2024	16.962.801.300	
3	Dana Otsus 1%	TAHAP 3	16-12-2024	9.423.778.500	
Jumlah				37.695.114.000,00	

2) Dana Otsus 1,25% senilai Rp56.026.381.000,00 dengan rincian:

No	Jenis Dana Otsus	Periode	Tgl Transfer	Nilai	SK
1	Dana Otsus 1,25%	TAHAP 1	17-07-2024	16.807.914.300	Perpres Nomor 76 Tahun 2023
2	Dana Otsus 1,25%	TAHAP 2	10-12-2024	25.211.871.450	
3	Dana Otsus 1,25%	TAHAP 3	16-12-2024	14.006.595.250	
Jumlah				56.026.381.000,00	

3) Dana Tambahan Infrastruktur senilai Rp15.640.089.000,00 dengan rincian:

No	Jenis Dana Otsus	Periode	Tgl Transfer	Nilai	SK
1	Dana Tambahan Infrastruktur	TAHAP 1	12-07-2024	4.692.026.700	Perpres Nomor 76 Tahun 2023
2	Dana Tambahan Infrastruktur	TAHAP 2	10-12-2024	7.038.040.050	
3	Dana Tambahan Infrastruktur	TAHAP 3	11-12-2024	3.910.022.250	
Jumlah				15.640.089.000,00	

4) DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus senilai Rp101.031.785.484,00 dengan rincian:

No	Jenis Dana Otsus	Periode	Tgl Transfer	Nilai	SK
1	DBH SDA Pertambangan Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	Tahap 4 TA 2021	04-09-2024	685.958.924,00	Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 30 Tahun 2024
2	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	TA 2022	04-09-2024	2.604.500.088,00	Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 30 Tahun 2024
3	DBH SDA Pertambangan Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	TA 2022	04-09-2024	23.323.751.005,00	Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 30 Tahun 2024

4	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	TW 4 Tahap 2 TA 2023	04-09-2024	1.055.511.689,00	Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 105 Tahun 2024
5	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	Triwulan 1 TA 2024	04-09-2024	2.485.720.619,00	Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 105 Tahun 2024
6	DBH SDA Pertambangan Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	Triwulan 1 TA 2024	04-09-2024	12.149.035.760,00	Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 105 Tahun 2024
7	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	Triwulan 2 dan Triwulan 3 TA 2024	22-10-2024	7.481.146.685,00	Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 213 Tahun 2024
8	DBH SDA Pertambangan Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	Triwulan 2 dan 3 TA 2024	16-12-2024	36.564.333.864,00	Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 213 Tahun 2024
9	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	Triwulan 4 TA 2024	19-12-2024	2.493.715.562,00	Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 292 Tahun 2024
10	DBH SDA Pertambangan Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	Triwulan 4 Tahun 2024	19-12-2024	12.188.111.288,00	Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 292 Tahun 2024
Jumlah				101.031.785.484,00	

Sedangkan dari sisi penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua Barat selama tahun 2024 mencapai Rp188.706.701.090 dengan rincian sebagai berikut:

No	Sumber Dana Otsus	TA 2024			Realisasi Tahun 2020 s/d 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dana Otsus	-	-	-	188.281.775.927
2	Dana Otsus 1%	37.695.114.000,00	35.522.399.367,00	94,24	115.255.546.583
3	Dana Otsus 1,25%	56.026.381.000,00	53.287.246.056,00	95,11	154.132.867.755
4	Dana Tambahan Infrastruktur	15.640.089.000,00	15.321.703.540,00	97,96	57.719.212.129
5	DBH SDA Otsus	100.064.804.152	84.575.352.127	84,52	259.129.659.384
Jumlah		209.426.388.152,00	188.706.701.090	90,11	774.519.061.778,00

3.4. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi terdapat dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

1. Transparansi penetapan formula pengalokasian dana-dana di luar DAU belum nyata (daerah kesulitan menentukan asumsi penerimaan untuk tahun yang akan datang);
2. Banyaknya dana dari pusat yang langsung diberikan kepada berbagai instansi sementara Pemerintah Kabupaten Fakfak tidak diberitahu berapa alokasi dana yang diberikan maupun peruntukannya;
3. Keuangan daerah masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dengan persentase PAD yang sangat kecil terhadap APBD.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan

beberapa upaya sebagai berikut.

1. Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari Pemerintah Pusat agar prediksi penerimaan daerah yang masuk ke dalam APBD makin realistis.
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan hukum masyarakat, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi serta peningkatan kualitas pelayanan dengan biaya yang murah.

Adapun permasalahan umum Belanja Daerah yang dihadapi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Pengeluaran yang digunakan untuk Belanja Program Prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengelolaan jalan, masih terbatas.
2. Pengeluaran untuk Belanja Pegawai Negeri dan Tenaga Honorer Daerah masih cukup besar dibanding penerimaan DAU.

Guna mengatasi permasalahan di atas maka belanja daerah harus disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam Laporan Keuangan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Fakfak adalah sebagai berikut.

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan keuangan.

Entitas akuntansi atau entitas pelaporan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun 2024 terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 7 (tujuh) Kelurahan dan 1 (satu) BUMD yaitu sebagai berikut.

4.1.1. SKPD

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Dinas Sosial
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kampung
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
14. Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
16. Dinas kearsipan dan Perpustakaan

17. Dinas Kelautan dan Perikanan
18. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
19. Dinas Perkebunan
20. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
22. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat DPRD
25. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
26. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Inspektorat
30. Distrik Arguni
31. Distrik Pariwari
32. Distrik Fakfak
33. Distrik Wartutin
34. Distrik Mbahamdandara
35. Distrik Karas
36. Distrik fakfak Barat
37. Distrik Kokas
38. Distrik Tomage
39. Distrik fakfak Timur Tengah
40. Distrik Furwagi
41. Distrik Bomberay
42. Distrik Fakfak Timur
43. Distrik Kramongmongga
44. Distrik Kayauni
45. Distrik Fakfak Tengah
46. Distrik Teluk Patipi
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.1.2 Kelurahan

1. Kelurahan Danaweria
2. Kelurahan Fakfak Utara
3. Kelurahan Fakfak selatan
4. Kelurahan Wagom

5. Kelurahan Wagom Utara
6. Kelurahan Dulanpokpok
7. Kelurahan Kokas

4.1.3 BUMD

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dalam Laporan Operasional, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan suatu laporan keuangan terdiri dari:

1. Pengukuran kas dan setara kas

2. Pengukuran persediaan
3. Pengukuran piutang, dana bergulir dan kerugian daerah
 - a. Pengukuran piutang
 - b. Pengukuran dana bergulir
 - c. Pengukuran kerugian daerah
 - d. Pengukuran kerugian daerah berdasarkan putusan pengadilan
4. Pengukuran aset tetap
5. Pengukuran aset lainnya
6. Pengukuran beban

4.3.1 Pengukuran kas dan setara kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Fafak.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan yang mempunyai jangka waktu kurang dari 3 (bulan) dari tanggal perolehannya.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.2 Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

Harga perolehan terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali.

Persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

4.3.3 Pengukuran Piutang, Dana Bergulir dan Kerugian Daerah

Piutang adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak ketiga atau entitas lainnya kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang ditimbulkan sebagai akibat adanya pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta perjanjian dan atau akibat lainnya yang sah.

Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

1. Pengukuran Piutang

- a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - 1) *Metode official assessment*
 - a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
 - 2) Untuk metode self assessment dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.

- 3) Dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang.
- b. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
- 1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - 2) Penjualan
Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - 3) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - 4) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
 - 5) Piutang Transaksi dibayar di muka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar pemerintah daerah.
- c. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
- 1) Dana Bagi Hasil (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat) disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

- 2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah;
 - 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar hak tagih yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.
 - 4) Dana Otonomi Khusus disajikan sebesar hak tagih yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
- e. Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- f. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
- g. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
2. Pengukuran Dana Bergulir
- Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
- Dana bergulir dicatat dengan harga perolehan yaitu sebesar dana yang digulirkan.
3. Pengukuran Kerugian Daerah
- Kerugian daerah adalah kekuarangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- a. Pengukuran nilai kerugian daerah karena bendahara terdiri dari :
- 1) Uang tunai diUkur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya;

- 2) Kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan bendahara dibanding dengan jumlah semestinya;
 - 3) Kerugian daerah berbentuk barang milik daerah diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik daerah di bawah pengawasan bendahara dibanding dengan jumlah semestinya.
- b. Pengukuran nilai kerugian daerah yang karena pegawai bukan bendahara:
- 1) Kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di bawah kekuasaan pegawai bukan bendahara dibanding dengan jumlah semestinya;
 - 2) Kerugian daerah berbentuk barang milik daerah diukur dengan nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh tim yang dibentuk untuk menangani kerugian daerah di bawah pengawasan pegawai negeri bukan bendahara dibanding dengan jumlah semestinya.
- c. Pengukuran nilai kerugian daerah berdasarkan putusan pengadilan
- Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena putusan pengadilan adalah sebagai berikut:
- 1) Beban kerugian daerah dan kekurangan aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh ahli;
 - 2) Piutang ganti kerugian daerah dan pendapatan LO diukur berdasarkan nilai putusan hakim;
 - 3) Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian daerah diukur sebesar jumlah yang diterima di kas Negara.

4.3.4 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

1. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
2. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.

Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biayaini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, pajak dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.
4. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
5. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
6. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
7. Atribusi biaya administrasi dan umum diatur sebagai berikut:
 - a. Pengadaankonstruksi berupa gedung atau jalan dan jaringan yang diadakan tersendiri (tunggal). Seluruh biaya administrasi dan umum yang meliputi honorarium, perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan biaya umum dan administrasi lainnya diatribusikan sebagai perolehan aset tersebut.
 - b. Pengadaan barang selain konstruksi yang hanya sejenis dalam suatu kegiatan. Seluruh biaya administrasi dan umum yang meliputi honorarium, perjalanan dinas, alat tulis kantor dan seluruh biaya umum dan administrasi lainnya diatribusikan sebagai perolehan aset tersebut.
 - c. Pengadaan barang/konstruksi yang terdiri dari berbagai jenis. Seluruh biaya administrasi dan umum yang meliputi honorarium, perjalanan dinas, alat tulis kantor dan seluruh biaya umum dan administrasi lainnya tidak diatribusikan sebagai perolehan aset tersebut.
8. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan

- membagi secara prorata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.
9. Atribusi biaya umum dan administratif yang terkait langsung dengan aset tetap mempertimbangkan biaya dan manfaat pelaporan. Misal biaya panitia lelang yang merupakan gabungan dari berbagai macam pengadaan barang modal yang jika harus diatribusikan ke masing- masing aset tetap jumlahnya tidak terlalu material dan menimbulkan kesulitan dalam pelaporan, maka dapat diatribusikan ke aset-aset tertentu yang memiliki nilai paling material yang dominan dalam pengadaan tersebut sepanjang tidak menyesatkan pembaca laporan.
 10. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
 11. Setiap potongan dagang/rabat dikurangkan dari harga pembelian.
 12. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
 13. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
 14. Perolehan aset tetap yang nilainya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetapi diberlakukan sebagai persediaan atau aset lainnya.
 15. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal
 - a. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.
 - b. Untuk menentukan nilai penyusutan aset tetap maka terlebih dahulu harus diketahui:
 - 1) Biaya perolehan, nilai wajar dan nilai penilaian kembali
 - 2) Umur ekonomis/masa manfaat
 - 3) Metode penyusutan yang digunakan
 - c. Suatu aset dianggap telah mempunyai umur ekonomis apabila saat perolehannya paling kurang 15 (lima belas) hari sebelum tanggal laporan, dan dikenakan menjadi 1 (satu) bulan.
 - d. Perolehan aset sampai dengan tanggal 15 dalam suatu bulan perolehan, maka dikenakan menjadi 1 (satu) bulan.

- e. Terhadap aset yang telah mempunyai umur ekonomis maka harus dihitung penyusutannya.
- f. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai penyusutan} = \frac{\text{Harga perolehan, nilai wajar, nilai penialian kembali}}{\text{Umur ekonomis/masa manfaat}}$$

- g. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

16. Pengukuran konstruksi dalam pengerjaan

- a. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- b. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - 3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- c. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - 1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - 2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - 3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan konstruksi;
 - 4) Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
 - 5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
- d. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - 1) Asuransi;
 - 2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - 3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- e. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- f. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya.
 - g. Setiap pembayaran termin kontrak konstruksi dicatat sebagai penambah nilai konstruksi dalam pengerjaan.
 - h. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
 - i. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
 - j. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
 - k. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
 - l. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
 - m. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
 - n. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

4.3.5 Pengukuran Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah/bendahara penerimaan BPKAD atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
4. Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari aset tetap.
5. Bangun Guna Serah (BGS) yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
6. Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:
 - a) Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
 - b) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
7. Bangun Serah Guna (BSG) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah daerah ditambah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut dikurangi penyusutan.
8. Aset Bangun Serah Kelola yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
9. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

10. Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus disesuaikan dengan kriteria masing-masing aset tetap tidak berwujud.
11. Aset tidak berwujud berupa *software computer* akan dihapus setelah benar-benar tidak memberikan lagi manfaat dan/atau tidak digunakan lagi dalam operasional suatu entitas.
12. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

4.3.6 Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Beban diukur sesuai dengan:

1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
3. Nilai buku atas aset yang tidak diketahui nilai perolehannya dan telah ditetapkan oleh Tim Penilai Aset Daerah.
4. Beban bantuan sosial diukur sebesar nilai bantuan sosial berupa uang/barang/jasa.
5. Bantuan sosial yang disalurkan melalui lembaga penyalur, beban bantuan sosial diukur sebesar yang telah disalurkan oleh lembaga penyalur tersebut.
6. Bantuan sosial dalam bentuk barang, beban bantuan sosial diukur sebesar nilai barang yang telah diserahkan kepada penerima. Sedangkan barang yang belum diserahkan kepada penerima akan dicatat sebagai persediaan dan dinilai dan disajikan sebesar:
 - a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) biaya standar apabila diproduksi sendiri;
 - c) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial

di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

1 Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar di muka dan persediaan.

a. Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak.
- 2) Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan membayar pengeluaran daerah.
- 3) Kas di bendahara pengeluaran/pemegang kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran/pemegang kas yang berasal dari uang persediaan (UP), ganti uang (GU) dan tambah uang (TU) yang belum disetor ke RKUD per tanggal neraca.
- 4) Kas di bendahara penerimaan merupakan saldo rekening di bank dan saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan bendahara penerimaan yang bersangkutan yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.
- 5) Kas lainnya adalah kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan (UP), ganti uang (GU), tambah uang (TU) yang belum disetor ke RKUD per tanggal neraca.
- 6) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Fakfak untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 7) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang

signifikan yang mempunyai jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

- 8) Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- 9) Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Fakfak yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktifitas.
- 10) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
- 11) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah sisa kas dari bantuan sosial yang sampai dengan akhir periode masih terdapat pada rekening penyalur dan akan diserahkan kepada penerima bantuan sosial pada periode berikutnya.
- 12) Secara berkala dilakukan rekonsiliasi antara kas di RKUD dengan kas di BUD, dan antara bendahara pengeluaran/penerimaan dengan BUD.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- 1) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) sampai 12 bulan;
- 2) Surat Utang Negara (SUN); dan
- 3) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

c. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah

dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Sesuai dengan PMK No. 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) pada bagan akun standar, piutang terbagi menjadi:

- 1) Piutang pendapatan;
- 2) Piutang Lainnya.

Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Pelaksanaan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih wajib dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yaitu:

- 1) Penilaian Kualitas Piutang;
- 2) Pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penyisihan piutang ditentukan berdasarkan kualitas piutang yang dibagi dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

- 1) Kualitas lancar

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dan umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun.

- 2) Kualitas kurang lancar

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu)

bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan dan umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun.

3) Kualitas diragukan

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan dan umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun.

4) Kualitas macet

Kualitas macet adalah piutang yang: 1) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau 2) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara dan umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- 1) 0,5% (nol perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar;
- 2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- 3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- 4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

d. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui:

- 1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.

Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih

dari 12 (dua belas) bulan. Menurut sifat penanaman, investasi jangka panjang terbagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut.

a. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksud untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi jangka panjang permanen berupa:

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, badan usaha milik negara, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksud untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi jangka panjang non permanen berupa:

- 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- 4) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi jangka panjang permanen yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Fakfak adalah:

- 1) Investasi pada PT. Bank Papua; dengan tingkat kepemilikan 2,13% (per 30 September 2023)
- 2) Investasi pada PD. Mbiah Pahi, dengan tingkat kepemilikan 100%; dan
- 3) Investasi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala, dengan tingkat kepemilikan 100%.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- 1) Metode Biaya;
- 2) Metode Ekuitas; dan
- 3) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.

Untuk penilaian investasi jangka panjang permanen yang saat ini dimiliki Pemerintah Kabupaten Fakfak dinilai dengan:

- 1) Metode biaya untuk investasi jangka panjang pada PT. Bank Papua;
- 2) Metode ekuitas untuk investasi pada PD. Mbiah Pohi dan PDAM Kabupaten Fakfak.

3. Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas (PSAP 07 Paragraf 7) yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.
 - 1) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
 - 6) Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode.

- c. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- d. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.
- e. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- f. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- g. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - 2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah;
 - 3) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 4) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 5) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - 6) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - 7) Memiliki nilai sebesar batas kapitalisasi ke atas.
- h. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.
- i. Untuk menentukan nilai penyusutan aset tetap maka terlebih dahulu harus diketahui:
 - 1) Biaya perolehan, nilai wajar dan nilai penilaian kembali;
 - 2) Umur ekonomis/masa manfaat;
 - 3) Metode penyusutan yang digunakan.

- j. Suatu aset dianggap telah mempunyai umur ekonomis apabila saat perolehannya paling kurang 15 (lima belas) hari sebelum tanggal laporan, dan dikenakan menjadi 1 (satu) bulan.
- k. Perolehan aset sampai dengan tanggal 15 dalam suatu bulan perolehan, maka dikenakan menjadi 1 (satu) bulan.
- l. Terhadap aset yang telah mempunyai umur ekonomis maka harus dihitung penyusutannya.
- m. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai penyusutan} = \frac{\text{Harga perolehan, nilai wajar, nilai penilaian kembali}}{\text{Umur ekonomis/masa manfaat}}$$

- n. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

- o. Tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan.
- p. Kebijakan akuntansi tentang penyusutan diterapkan setelah penataan aset tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fafak selesai dilaksanakan.
- q. Aset tetap dapat diakui apabila nilainya pada saat perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan mencapai batas minimal kapitalisasi aset tetap.
- r. Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Satuan Minimum Biaya Per Unit
2.	Peralatan Mesin	
2.1	Alat-alat Berat	≥ 50.000.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	≥ 5.000.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel	≥ 2.500.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/ Peternakan	≥ 2.500.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	≥ 700.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	≥ 1.500.000,00
2.7	Alat Ukur	≥ 1.500.000,00
2.8	Alat-alat Kedokteran	≥ 1.500.000,00
2.9	Alat-alat Laboratorium	≥ 1.500.000,00
2.10	Alat Keamanan/ persenjataan	≥ 1.500.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	
3.1	Bangunan Gedung	≥ 40.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	≥ 20.000.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	
5.1	Buku dan Perpustakaan	≥ 250.000,00

No	Uraian	Nilai Satuan Minimum Biaya Per Unit
5.2	Barang Kebudayaan/Olahraga	≥ 250.000,00
5.3	Hewan	≥ 1.500.000,00
5.4	Hewan Ternak Kecil	≥ 1.500.000,00
5.5	Hewan Ternak Besar	≥ 3.000.000,00
5.6	Aneka Ternak/ Unggas	≥ 500.000,00
5.7	Ikan	≥ 350.000,00
5.8	Tanaman	≥ 350.000,00

- s. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan awal (renovasi) diatur sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Satuan	Nilai (Rp)
1.	Tanah		≥ 0,00
2.	Peralatan Mesin, terdiri dari :		
2.1	Alat-alat Berat	Unit/buah	≥ 25.000.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	Unit/set	≥ 2.500.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel	Unit/set	≥ 2.500.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/ Peternakan	Unit/set	≥ 500.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Unit/set	≥ 500.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Unit/set	≥ 1.500.000,00
2.7	Alat Ukur	Unit/set	≥ 1.000.000,00
2.8	Alat-alat Kedokteran	Unit/set	≥ 1.000.000,00
2.9	Alat-alat Laboratorium	Unit/set	≥ 1.000.000,00
2.10	Alat Keamanan/ persenjataan	Unit/set	≥ 1.000.000,00
3.	Gedung dan Bangunan		
3.1	Bangunan Gedung	Unit	≥ 20.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	Unit	≥ 15.000.000,00
5.	Aset Lainnya		
5.1	Aset Tak Berwujud	-	≥ 3.000.000,00

4. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang termasuk aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan Pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Lainnya terdiri dari:

- Tagihan Jangka Panjang;
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- Aset Tidak Berwujud;

d. Aset Lain-lain.

Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. Kewajiban Jangka Pendek; dan
2. Kewajiban Jangka Panjang

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan LRA terdiri dari:

1. Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA;
2. Pendapatan Transfer – LRA; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan

- hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetorkan ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Kas atas pendapatan yang berasal dari Hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk menandai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
 5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan;
 6. Pendapatan telah diterima direkening penampungan penerimaan yang dibuka atas nama BUD.

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.

Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D nihil;
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan, dan dana bagi hasil. Pengakuan transfer masuk dan pendapatan transfer yaitu sebagai berikut.

1. Untuk kepentingan penyajian tranfer masuk pada laporan realisasi anggaran, pengakuan atas trnsfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk RKUD.
2. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada laporan operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
3. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengakuan transfer keluar dan beban transfer yaitu sebagai berikut.

1. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada laporan realisasi anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penusunan laporan operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Kabupaten Fakfak kepada Pemerintah daerah lainnya/Kampung.

Pengukuran transfer masuk dan pendapatan transfer yaitu sebagai berikut.

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada laporan realisasi anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD.
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada laporan operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

Pengukuran transfer keluar dan beban transfer yaitu sebagai berikut.

1. Untuk kepentingan penyusunan laporan realisasi anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

2. Untuk kepentingan penyusunan laporan operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Kabupaten Fakfak kepada Pemerintah Daerah lainnya/Kampung berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan, dan
2. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, Pendapatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan–LO dapat diakui:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pendapatan direalisasi, yaitu setelah adanya aliran masuk sumber daya ekonomi,

baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang.

Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban terdiri dari:

1. Beban Operasi;
2. Beban Transfer;
3. Beban Non Operasional; dan
4. Beban Luar Biasa.

Beban dapat diakui pada saat:

1. timbulnya kewajiban;
2. terjadinya konsumsi aset; dan
3. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan:

1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya;
3. Nilai buku atas aset yang tidak diketahui perolehannya dan telah ditetapkan oleh Tim Penilaian Aset Daerah.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

1. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 1. Kesalahan yang tidak berulang; dan
 2. Kesalahan yang berulang.

2. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun beban.
3. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun beban.
4. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
5. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
6. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 serta mengungkapkan perbandingan dengan periode yang lalu.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Lampiran I.

5.1.1. Pendapatan

Anggaran dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Fakfak, adalah sebagai berikut:

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
4	PENDAPATAN – LRA	1.558.381.740.870,00	1.531.522.264.917,50	98,28	1.430.219.550.381,59
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA	31.997.172.335,00	22.118.794.392,50	69,13	46.854.845.867,59
4.1.1	Pajak Daerah - LRA	9.346.366.073,00	8.382.090.750,00	89,68	9.023.874.467,00
4.1.2	Retribusi Daerah - LRA	3.531.390.987,00	3.901.106.693,97	110,47	3.446.922.122,51
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - LRA	6.299.000.024,00	4.983.034.575,00	79,11	4.169.644.947,00
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah - LRA	12.820.415.251,00	4.852.562.373,53	37,85	30.214.404.331,08
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.458.340.443.342,00	1.448.698.606.250,00	99,34	1.383.364.704.514,00
4.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	1.120.021.329.156,00	1.096.904.420.299,00	97,94	967.128.059.446,00
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil	112.710.825.156,00	106.316.332.000,00	94,33	129.012.569.375,00
4.2.1.2	Dana Alokasi Umum	718.531.100.000,00	713.877.302.514,00	99,35	655.353.979.578,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	288.779.404.000,00	276.710.785.785,00	95,82	182.761.510.493,00
4.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	329.068.744.954,00	332.514.144.484,00	101,05	401.512.601.334,00
4.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	210.440.439.954,00	210.393.369.484,00	99,98	280.193.556.334,00
4.2.2.2	Dana Desa	118.628.305.000,00	122.120.775.000,00	102,94	121.319.045.000,00
4.2.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	9.250.369.232,00	19.280.041.467,00	208,42	14.724.043.734,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	9.250.369.232,00	19.280.041.467,00	208,42	14.724.043.734,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA	68.044.125.193,00	60.704.864.275,00	89,21	0,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya	68.044.125.193,00	60.704.864.275,00	89,21	0,00

1. Pendapatan Asli Daerah - LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LRA sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp22.118.794.392,50 atau ekuivalen 69,13% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp31.997.172.335,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun sebelumnya senilai Rp46.854.845.867,59 maka terjadi penurunan senilai Rp24.736.051.475,09 atau turun 52,79%. Penurunan ini terjadi karena penerimaan dana JKN yang tahun sebelumnya penganggaran dan realisasinya dicatat pada akun Pendapatan Asli Daerah, namun di tahun 2024 penerimaan tersebut dicatat pada akun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Daerah	9.346.366.073,00	8.382.090.750,00	89,68	9.023.874.467,00
2	Retribusi Daerah	3.531.390.987,00	3.901.106.693,97	110,47	3.446.922.122,51
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.299.000.024,00	4.983.034.575,00	79,11	4.169.644.947,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	12.820.415.251,00	4.852.562.373,53	37,85	30.214.404.331,08
Jumlah		31.997.172.335,00	22.118.794.392,50	69,13	46.854.845.867,59

a. Pajak Daerah - LRA

Pendapatan pajak daerah – LRA sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp8.382.090.750,00 atau ekuivalen 89,68% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp9.346.366.073,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pajak daerah tahun sebelumnya senilai Rp9.023.874.467,00, maka terjadi penurunan senilai Rp641.783.717,00 atau turun 7,11%. Pendapatan Pajak Daerah - LRA menurut objek pendapatan terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak hotel - LRA	188.418.103,00	381.413.422,00	202,43	803.345.593,00
2	Pajak restoran - LRA	2.402.207.992,00	2.850.642.097,00	118,67	3.261.129.098,00
3	Pajak hiburan - LRA	12.479.350,00	31.313.319,00	250,92	19.786.365,00
4	Pajak reklame - LRA	113.571.050,00	10.225.000,00	9,00	127.824.000,00
5	Pajak penerangan jalan - LRA	3.301.544.666,00	3.205.423.867,00	97,09	2.449.118.928,00
6	Pajak mineral bukan logam dan batuan - LRA	112.278.000,00	2.896.000,00	2,58	5.858.320,00
7	Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan – LRA	1.515.777.236,00	1.399.390.020,00	92,32	1.596.637.213,00
8	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) – LRA	1.700.089.676,00	500.787.025,00	29,46	760.174.950,00
Jumlah		9.346.366.073,00	8.382.090.750,00	89,68	9.023.874.467,00

1) Pajak Hotel - LRA

Realisasi pendapatan pajak hotel - LRA sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp381.413.422,00 atau ekuivalen 202,43% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp188.418.103,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak hotel - LRA tahun sebelumnya senilai Rp803.345.593,00, maka terjadi penurunan senilai Rp421.932.171,00 atau turun 52,52%. Realisasi Pendapatan pajak hotel - LRA merupakan pendapatan atas setoran pajak hotel dan penginapan yang dipungut oleh Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah yang telah disetor ke RKUD sampai dengan 31 Desember 2024.

2) Pajak Restoran - LRA

Realisasi pendapatan pajak restoran - LRA sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp2.850.642.097,00 atau ekuivalen 118,67% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp2.402.207.992,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak restoran - LRA tahun sebelumnya senilai Rp3.261.129.098,00, maka terjadi penurunan senilai Rp410.487.001,00 atau turun 12,59%. Realisasi pendapatan pajak restoran - LRA merupakan pendapatan atas setoran pajak restoran dan rumah makan atau yang sejenisnya yang dipungut oleh Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah yang telah disetor ke RKUD sampai dengan 31 Desember 2024.

3) Pajak Hiburan - LRA

Realisasi pendapatan pajak hiburan - LRA sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp31.313.319,00 atau ekuivalen 250,92% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp12.479.350,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak hiburan - LRA tahun sebelumnya senilai Rp19.786.365,00, maka terjadi kenaikan senilai Rp11.526.954,00 atau naik 58,26%. Realisasi pendapatan pajak hiburan - LRA merupakan pendapatan atas setoran pajak hiburan dari diskotik, karaoke, klub malam, Kafe, dan sejenisnya yang dipungut oleh Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah yang telah disetor ke RKUD sampai dengan 31 Desember 2024.

4) Pajak Reklame - LRA

Realisasi pendapatan pajak reklame - LRA sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp10.225.000,00 atau ekuivalen 9,00% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp113.571.050,00. Jika dibandingkan dengan realisasi

pendapatan pajak reklame - LRA tahun sebelumnya senilai Rp127.824.000,00, maka terjadi penurunan senilai Rp117.599.000,00 atau turun 92,00%. Realisasi pendapatan pajak reklame – LRA merupakan pendapatan atas setoran pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron dari toko, kios, perusahaan (CV/PT), restoran, rumah makan dan sejenisnya yang dipungut oleh Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah yang telah disetor ke RKUD sampai dengan 31 Desember 2024.

5) Pajak Penerangan Jalan - LRA

Realisasi pendapatan pajak penerangan jalan - LRA sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp3.205.423.867,00 atau ekuivalen 97,09% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp3.301.544.666,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak penerangan jalan - LRA tahun sebelumnya senilai Rp2.449.118.928,00, maka terjadi kenaikan senilai Rp756.304.939,00 atau naik 30,88%. Realisasi pendapatan pajak penerangan jalan - LRA merupakan pendapatan atas transfer bagi hasil pajak penerangan jalan dari PLN Jayapura yang ditransfer langsung ke RKUD sampai dengan 31 Desember 2024.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA

Realisasi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan - LRA sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp2.896.000,00 atau ekuivalen 2,58% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp112.278.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan - LRA tahun sebelumnya senilai Rp5.858.320,00, maka terjadi penurunan senilai Rp2.962.320,00 atau turun 50,57%. Realisasi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan - LRA merupakan pendapatan atas setoran pajak usaha penumpukan pasir yang dipungut oleh Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah yang telah disetorkan ke RKUD sampai dengan 31 Desember 2024.

7) Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LRA

Realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) - LRA sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp1.399.390.020,00 atau ekuivalen 92,32% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp1.515.777.236,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

(PBBP2) - LRA tahun sebelumnya senilai Rp1.596.637.213,00, maka terjadi penurunan senilai Rp197.247.193,00 atau turun 12,35%. Realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) - LRA merupakan pendapatan atas setoran pajak tanah dan bangunan yang dipungut oleh Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah yang telah disetorkan ke RKUD sampai dengan 31 Desember 2024.

8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA

Realisasi pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp500.787.025,00 atau ekuivalen 29,46% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp1.700.089.676,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA tahun sebelumnya senilai Rp760.174.950,00, maka terjadi penurunan senilai Rp259.387.925,00 atau turun 34,12%. Realisasi pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA merupakan pendapatan atas setoran bea balik nama tanah dan/atau bangunan yang dipungut oleh Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah yang telah disetorkan ke RKUD sampai dengan 31 Desember 2024.

b. Retribusi Daerah - LRA

Pendapatan retribusi daerah - LRA sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp3.901.106.693,97 atau ekuivalen 110,47% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp3.531.390.987,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi daerah – LRA tahun sebelumnya senilai Rp3.446.922.122,51, maka terjadi kenaikan senilai Rp454.184.571,46 atau naik 13,18%. Pendapatan Retribusi Daerah - LRA menurut objek pendapatan terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	2.848.469.536,00	3.093.965.520,97	108,62	3.019.495.310,51
2	Retribusi Jasa Usaha	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	682.921.451,00	805.141.173,00	117,90	427.426.812,00
Jumlah		3.531.390.987,00	3.901.106.693,97	110,47	3.446.922.122,51

1) Retribusi Jasa Umum

Realisasi pendapatan dari Retribusi Jasa Umum sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp3.093.965.520,97 atau ekuivalen 108,62% dari target yang dianggarkan senilai Rp2.848.469.536,00. Jika dibandingkan

dengan realisasi pendapatan retribusi jasa umum tahun sebelumnya senilai Rp3.019.495.310,51, maka terjadi kenaikan senilai Rp74.470.210,46 atau naik 2,47% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.712.769.536,00	2.634.983.520,97	153,84	2.503.632.310,51
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	58.069.000,00	70.090.000,00	120,70	59.520.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	1.076.931.000,00	387.942.000,00	36,02	455.943.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	700.000,00	950.000,00	135,71	400.000,00
Jumlah		2.848.469.536,00	3.093.965.520,97	108,62	3.019.495.310,51

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Realisasi pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp2.634.983.520,97 atau ekuivalen 153,84% dari target yang dianggarkan senilai Rp1.712.769.536,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan tahun sebelumnya senilai Rp2.503.632.310,51, maka terjadi kenaikan senilai Rp131.351.210,46 atau naik 5,25% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	190.361.700,00	152.767.436,38	80,25	149.494.001,51
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1.522.407.836,00	2.482.216.084,59	163,05	2.354.138.309,00
Jumlah		1.712.769.536,00	2.634.983.520,97	153,84	2.503.632.310,51

i. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp152.767.436,38 atau ekuivalen 80,25% dari target yang dianggarkan senilai Rp190.361.700,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas tahun sebelumnya senilai Rp149.494.001,51, maka terjadi kenaikan senilai Rp3.273.434,87 atau naik 2,19%. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas merupakan setoran pendapatan retribusi atas biaya perawatan pasien yang dipungut di FKTP dan sudah disetorkan ke RKUD melalui Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2024.

ii. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

Realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp2.482.216.084,59 atau ekuivalen 163,05% dari target yang dianggarkan senilai Rp1.522.407.836,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah tahun sebelumnya senilai Rp2.354.138.309,00, maka terjadi kenaikan senilai Rp128.077.775,59 atau naik 5,44%. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah merupakan setoran pendapatan retribusi atas biaya perawatan pasien yang dipungut oleh Bendahara Penerimaan RSUD dan sudah disetorkan ke RKUD sampai dengan 31 Desember 2024.

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Realisasi pendapatan dari Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp70.090.000,00 atau ekuivalen 120,70% dari target yang dianggarkan senilai Rp58.069.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan dari retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan tahun sebelumnya senilai Rp59.520.000,00, maka terjadi kenaikan senilai Rp10.570.000,00 atau naik 17,76%. Realisasi pendapatan dari Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan merupakan setoran pendapatan retribusi atas biaya pengangkutan atau pembersihan sampah yang dipungut oleh Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang sudah disetorkan ke RKUD sampai dengan 31 Desember 2024.

c) Retribusi Pelayanan Pasar

Realisasi pendapatan dari Retribusi Pelayanan Pasar sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp387.942.000,00 atau ekuivalen 36,02% dari target yang dianggarkan senilai Rp1.076.931.000,00 yang merupakan retribusi los. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan dari Retribusi Pelayanan Pasar tahun sebelumnya senilai Rp455.943.000,00, maka terjadi penurunan senilai Rp68.001.000,00 atau turun 14,91%. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar

merupakan setoran pendapatan retribusi atas biaya pemakaian meja batu dan los yang dipungut oleh Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang sudah disetorkan ke RKUD sampai dengan 31 Desember 2024.

d) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Realisasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp950.000,00 atau ekuivalen 135,71% dari target yang dianggarkan senilai Rp700.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun sebelumnya senilai Rp400.000,00, maka terjadi kenaikan senilai Rp550.000,00 atau naik 137,50%. Realisasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan setoran pendapatan retribusi atas biaya pengujian kelayakan kendaraan bermotor yang dipungut oleh Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan yang sudah disetorkan ke RKUD sampai dengan 31 Desember 2024.

2) Retribusi Jasa Usaha

Realisasi pendapatan retribusi jasa usaha sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp2.000.000,00 atau ekuivalen 0,00% karena tidak dianggarkan di tahun 2024. Retribusi Jasa Usaha juga tidak ada realisasi di tahun 2023 karena tidak dianggarkan. Realisasi di tahun 2024 merupakan retribusi penyewaan bangunan pemerintah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp805.141.173,00 atau ekuivalen 117,90% dari target yang dianggarkan senilai Rp682.921.451,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu tahun sebelumnya senilai Rp427.426.812,00, maka terjadi kenaikan senilai Rp377.714.361,00 atau naik 88,37%. Realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	12.686.440,00	0,00	0,00	300.000,00
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan	541.785.247,00	245.427.000,00	45,30	206.965.100,00
3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	128.449.764,00	559.714.173,00	435,75	220.161.712,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Jumlah	682.921.451,00	805.141.173,00	117,90	427.426.812,00

a) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Realisasi pendapatan retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 atau ekuivalen 0,00% dari target yang dianggarkan senilai Rp12.686.440,00, sedangkan pada tahun sebelumnya realisasinya senilai Rp300.000,00.

b) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Realisasi Retribusi Izin Usaha Perikanan sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp245.427.000,00 atau ekuivalen 45,30% dari target yang dianggarkan senilai Rp541.785.247,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya senilai Rp206.965.100,00, maka mengalami kenaikan senilai Rp38.461.900,00 atau naik sebesar 18,58%. Retribusi Izin Usaha Perikanan tahun 2024 merupakan Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan.

c) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp559.714.173,00 atau ekuivalen 435,75% dari target yang dianggarkan senilai Rp128.449.764,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya senilai Rp220.161.712,00, maka mengalami kenaikan senilai Rp339.552.461,00 atau naik sebesar 154,23%.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp4.983.034.575,00 atau ekuivalen 79,11% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp6.299.000.024,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp813.389.628,00 atau naik sebesar 19,51% dari jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp4.169.644.947,00 bersumber dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.662.002.461,00	4.983.034.575,00	88,01	4.169.644.947,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	636.997.563,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		6.299.000.024,00	4.983.034.575,00	79,11	4.169.644.947,00

1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)

Pendapatan dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp4.983.034.575,00 atau ekuivalen 88,01% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp5.662.002.461,00 yang merupakan pendapatan deviden Tahun 2023 atas penyertaan modal pada Bank Papua yang diterima di RKUD KAB. FAK FAK pada tanggal 02 Mei 2024. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp813.389.628,00 atau naik sebesar 19,51% dari jumlah pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp4.169.644.947,00

2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)

Pendapatan dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) merupakan pendapatan deviden atas penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala yang sampai dengan Laporan ini dibuat belum menyetorkan deviden kepada pemerintah daerah. Deviden atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala yang belum disetorkan ke pemerintah daerah yaitu deviden tahun buku 2022, 2023, dan 2024.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah – LRA sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp4.852.562.373,53 atau ekuivalen 37,85%

dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp12.820.415.251,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp25.361.841.957,55 atau turun sebesar 83,94% dari jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah – LRA tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp30.214.404.331,08

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah – LRA menurut objek pendapatan Tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	130.732.688,00	0,00	990.543.980,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.941.084.498,00	465.253.163,00	15,82	419.936.445,00
3	Jasa Giro	3.696.850.269,00	712.468.332,30	19,27	1.370.278.751,24
4	Pendapatan Bunga	1.946.583.922,00	0,00	0,00	40.360.756,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	1.280.129.130,53	1.450.057.194,53	113,27	2.149.943.717,84
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	762.689.716,47	1.415.213.612,70	185,56	558.901.800,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	793.077.715,00	678.837.383,00	85,60	419.227.472,00
9	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	24.265.211.409,00
Jumlah		12.820.415.251,00	4.852.562.373,53	37,85	30.214.404.331,08

1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp130.732.688,00 atau ekuivalen 0,00% karena tidak dianggarkan di Tahun 2024. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp289.203.757,00 atau turun sebesar 68,87% dari jumlah Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp419.936.445,00.

Rincian realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	26.083.764,00	0,00	829.913.869,00
2	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	0,00	104.648.924,00	0,00	160.630.111,00
Jumlah		0,00	130.732.688,00	0,00	990.543.980,00

a) Hasil Penjualan Alat Angkutan

Hasil Penjualan Alat Angkutan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp26.083.764,00 atau ekuivalen 0,00% karena tidak dianggarkan di Tahun 2024. Realisasi Hasil Penjualan Alat Angkutan Tahun 2024 merupakan Hasil Penjualan Kendaraan Roda Dua.

b) Hasil Penjualan Bangunan Gedung

Hasil Penjualan Bangunan Gedung sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp104.648.924,00 atau ekuivalen 0,00% karena tidak dianggarkan di Tahun 2024. Bangunan gedung yang dijual merupakan bangunan gedung rumah dinas.

2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp465.253.163,00 atau ekuivalen 15,82% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp2.941.084.498,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp45.316.718,00 atau naik sebesar 10,79% dari jumlah pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp419.936.445,00, yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Sewa BMD	941.084.498,00	172.060.000,00	18,28	42.300.000,00
2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	2.000.000.000,00	293.193.163,00	14,66	377.636.445,00
Jumlah		2.941.084.498,00	465.253.163,00	15,82	419.936.445,00

a) Hasil Sewa BMD

Hasil Sewa BMD sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp172.060.000,00 atau ekuivalen 18,28% dari target yang dianggarkan senilai Rp941.084.498,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Sewa Alat	7.500.000,00
2	Hasil sewa gedung	6.100.000,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
3	Hasil sewa gedung diklat	17.000.000,00
4	Hasil sewa Gedung Koni/Lapangan Basket	11.500.000,00
5	Hasil sewa Gedung untuk Apotik Kimia Farma pada RSUD	5.000.000,00
6	Sewa Gedung Pemerintah Kab. Fakfak periode 2024 sd 2025 An. BRI Cabang Fakfak	120.360.000,00
7	Sewa Stadion 16 November	4.600.000,00
Jumlah		172.060.000,00

b) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD

Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp293.193.163,00 atau ekuivalen 14,66% dari target yang dianggarkan senilai Rp2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hasil pemanfaatan lahan pelabuhan	150.150.000,00
2	Hasil pemanfaatan lahan dengan PT. Rimbun Menara papua (lahan untuk Hotel Grand Papua Fakfak)	143.043.163,00
Jumlah		293.193.163,00

3) Pendapatan Jasa Giro

Pendapatan Jasa Giro sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp712.468.332,30 atau ekuivalen 19,27% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp3.696.850.269,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp657.810.418,94 atau turun sebesar 48,01% dari jumlah pendapatan Jasa Giro tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp1.370.278.751,24, yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.196.850.269,00	647.388.770,00	20,25	1.305.512.475,00
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	500.000.000,00	59.712.241,30	11,94	57.429.093,24
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	104.577,00	0,00	175.603,00
4	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	5.262.744,00	0,00	7.161.580,00
Jumlah		3.696.850.269,00	712.468.332,30	19,27	1.370.278.751,24

a) Jasa Giro pada Kas Daerah

Realisasi pendapatan Jasa Giro pada Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp647.388.770,00 atau ekuivalen 20,25% dari target yang dianggarkan senilai Rp3.196.850.269,00 dengan rincian sebagai berikut:

Periode	RKUD	Otsus 1%	Otsus 1,25%	DTI	DBH Otsus	Jumlah
Januari 2024	23.870.583,00	8.771.416,00	5.597.833,00	2.989.640,00	5.870.346,00	47.099.818,00
Februari 2024	4.667.682,00	8.222.399,00	5.245.515,00	2.812.922,00	3.638.023,00	24.586.541,00
Maret 2024	30.416.773,00	2.424.851,00	3.045.817,00	3.056.972,00	124.341,00	39.068.754,00
April 2024	48.384.011,00	2.195.118,00	2.259.286,00	2.960.250,00	67.766,00	55.866.431,00
Mei 2024	42.575.182,00	1.345.713,00	1.821.441,00	2.742.319,00	110.741,00	48.595.396,00
Juni 2024	41.056.571,00	437.313,00	1.308.499,00	1.890.400,00	629.418,00	45.322.201,00
Juli 2024	51.688.570,00	2.669.789,00	3.981.727,00	1.930.010,00	2.131.048,00	62.401.144,00
Agustus 2024	30.898.202,00	1.292.914,00	5.158.500,00	2.471.506,00	2.337.423,00	42.158.545,00
September 2024	37.165.958,00	519.225,00	879.800,00	1.389.168,00	12.523.152,00	52.477.303,00
Oktober 2024	58.070.283,00	1.081.678,00	427.050,00	195.986,00	15.916.204,00	75.691.201,00
November 2024	59.081.580,00	519.827,00	403.647,00	915.065,00	5.178.098,00	66.098.217,00
Desember 2024	36.120.879,00	6.547.365,00	7.113.781,00	4.324.345,00	11.991.847,00	88.023.219,00
Total	463.996.274,00	36.027.608,00	37.242.896,00	27.678.583,00	60.518.407,00	647.388.770,00

b) Jasa Giro pada Kas di Bendahara

Realisasi pendapatan Jasa Giro dari Kas di Bendahara sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp59.712.241,30 atau ekuivalen 11,94% dari target yang dianggarkan senilai Rp500.000.000,00 sudah termasuk dengan pendapatan jasa giro pada Kas di Bendahara dana BOS yang sudah disetorkan ke RKUD dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
1	PKM BOMBERAY	Setoran Pengembalian Dana JKN, Bunga Bank Dana JKN Bulan Januari sd Juni 2023	231.037,00
2	BAGIAN KESRA	Setoran atas jasa giro Bagian Kesra TA 2023	267.132,00
3	BAPENDA	Setoran Jasa Giro TA 2023	5.613,00
4		Setoran Jasa Giro Januari s.d September TA 2024	139.145,00
5	PKM FAKFAK	Setoran Pengembalian Dana JKN, Bunga Bank Dana JKN Bulan Oktober sd Desember 2023	1.045.193,00
6		Setoran Pengembalian Dana JKN, Bunga Bank Dana JKN Bulan Januari sd Juni 2023	2.450.638,00
7		Setoran Pengembalian Jasa Giro Dana JKN, Bunga Bank Dana JKN Bulan Juli sd November 2024	2.812.106,00
8	DINKES	Setoran Jasa Giro TA 2023	5.700.000,00
9		Setoran Uang Bunga Bank Tahun 2023 (JKN Non Kapitasi)	111.563,62
10		Setoran Uang Bunga Bank Tahun 2023 (JKN Non Kapitasi)	9.342,62



No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
11	RSUD	Setoran Jasa Giro RSUD Bulan Desember Tahun 2023	863.417,50
12		Setoran Jasa Giro RSUD untuk Januari sd Oktober Tahun 2024	39.695.753,70
13		Setoran Jasa Giro RSUD untuk Bulan November Tahun 2024	2.130.458,15
14	PKM SEKBAN	Sertoran Jasa Giro Tahun 2023	104.000,00
15		Sertoran Jasa Giro Tahun 2023	397,00
16	BPKAD	Setoran Jasa Giro (sisa saldo dari Penutupan rekening)	188.031,71
17	BOS (Dinas Pendidikan)	Setoran Pengembalian Bunga Bank Kegiatan Dana BOS Reguler SD Tahun 2024	120.056,00
18		Setoran Pengembalian Bunga Bank kegiatan Dana BOS Reguler SD FAUKIA Tahun 2024	513,00
19		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SD Inpres 3 Wagon Tahun 2023	23.602,00
20		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan Dana BOS Reguler Tahun 2023 pada SD Inpres Tanama	600.000,00
21		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan Dana BOS Reguler SD Inpres Ugar Tahun 2023	1.021,00
22		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan Dana BOS Reguler SD Negeri Kriawaswas Tahun 2023	35.618,00
23		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan Dana BOS Reguler Tahun 2023 Pada SD Inpres Ugar	188.757,00
24		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SD Inpres Sanggram Tahun 2022	221.231,00
25		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan Dana BOS Reguler SD Negeri 1 Fakfak Tahun 2023	51.251,00
26		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SD Negeri Kiat Tahun 2022	716.131,00
27		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SD Negeri Mananmur Tahun 2023	34.660,00
28		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan Dana BOS Reguler SD Negeri 1 Fakfak Tahun 2023	2.398,00
29		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SD Inpres 1 Bomberay Tahun 2023	71.276,00
30		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SD YPPK Torea Tahun 2023	106.521,00
31		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SD Negeri Kotam Tahun 2023	9.025,00



No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
32		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SD Negeri Tawar Tahun 2023	98.513,00
33		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SD Negeri Werpigan Tahun 2022	209.925,00
34		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SD Yapis Tahun 2023	227.071,00
35		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SMP N 1 Karas Tahun 2022	505,00
36		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SMP N 2 Kokas Tahun 2022	850,00
37		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SMP Negeri 3 Fakfak Tahun 2022	645,00
38		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SMP Negeri 3 Kokas Tahun 2022	228,00
39		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SMP N 5 Satap Tahun 2022	278.838,00
40		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SMP Negeri Fakfak Timur Tahun 2022	86.059,00
41		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SMP Negeri SATAP Kiat Tahun 2022	176,00
42		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SD Negeri Kiat Tahun 2023	83,00
43		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SMP Negeri 4 Fakfak Tahun 2022	73,00
44		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SD Negeri Selebes Tahun 2023	28.513,00
45		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SMP Negeri 1 Kokas Tahun 2022	182.476,00
46		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SD Inpres Sanggram Tahun 2023	31.859,00
47		Setoran Pengembalian Bunga Bank kegiatan Dana BOS Reguler SD Inpres Otoweri Tahun 2024	513,00
48		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SD Negeri Thessa Tahun 2023	3.513,00
49		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SD Negeri Werhiryang Tahun 2023	28.513,00



No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
50		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SMP Negeri Bomberay Tahun 2022	261,00
51		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SD Inpres 3 Bomberay Tahun 2023	5.513,00
52		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SD Inpres 7 Bomberay Tahun 2023	28.513,00
53		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SD Negeri Jarongga Tahun 2023	148,00
54		Setoran Pengembalian Bunga Bank kegiatan Dana BOS Reguler SD Negeri Kiaba Tahun 2024	128.513,00
55		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan Kegiatan Dana BOS Reguler SD Inpres Tanama Tahun 2023	29.083,00
56		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan Kegiatan Dana BOS Reguler SD Negeri Karas Tahun 2023	29.083,00
57		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan Kegiatan Dana BOS Reguler SD Negeri Sekru Tahun 2023	29.083,00
58		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan Kegiatan Dana BOS Reguler SD Negeri Tetar Tahun 2023	31.021,00
59		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan Dana BOS Reg SD Inpres 2 Fakfak Tahun 2023	18.636,00
60		Setoran Bunga Tabungan BOS SDN Negeri Tarak Kab. Fakfak	28.513,00
61		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan Dana BOS Reguler SD YPK Werba Tahun 2023	86.305,00
62		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan Dana BOS Reguler SD Negeri Kalamanuk Tahun 2023	513,00
63		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan Dana BOS Reguler SD Inpres Nemewikarya Tahun 2023	29.083,00
64		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan Kegiatan Dana BOS Reguler SD Inpres Tunasgain Tahun 2023	19.169,00
65		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SD YPPK ST Agustinus Fakfak Tahun 2023	29.083,00
66		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan Dana BOS Reguler SD Negeri Tibatibananam Tahun 2023	31.859,00
67		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SD IT Assalam Tahun 2023	300,00

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
68		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan Kegiatan Dana BOS Reguler SD-YPK RANGKENDAK Tahun 2023	4.971,00
69		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan kegiatan Dana BOS Reguler SD Negeri Werpigan Tahun 2022	29.636,00
70		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan Kegiatan Dana BOS Reguler SD Inpres 6/75 Tambaruni Tahun 2023	538,00
71		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan Kegiatan Dana BOS Reguler SD YPK Pikpik Tahun 2023	627,00
72		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan Kegiatan Dana BOS Reguler SD Inpres Weri Tahun 2023	21,00
73		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan Kegiatan Dana BOS Reguler SD YPK Kapaurtutin Tahun 2023	29.583,00
74		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan Kegiatan Dana BOS Reguler SD Inpres Degen Tahun 2023	1.859,00
75		Setoran Pengembalian Bunga Tabungan Kegiatan Dana BOS Reguler SD Negeri Kriawaswas Tahun 2023	6.086,00
Jumlah			59.712.241,30

c) Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOS

Realisasi Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOS sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp104.577,00 atau ekuivalen 0,00% karena tidak dianggarkan di Tahun 2024. Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOS merupakan saldo jasa giro yang berada pada Rekening Dana BOS yang belum disetorkan ke RKUD sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Nilai 2023 (Rp)
1	SD Inpres 3 Wagon	26.733,00
2	SD Negeri Mananmur	53.962,00
3	SD Inpres 1 Bomberay	23.882,00
Jumlah		104.577,00

Sampai dengan laporan ini disusun, belum ada penyetoran ke RKUD.

d) Pendapatan Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP

Realisasi Pendapatan Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp5.262.744,00 atau ekuivalen 0,00% karena tidak dianggarkan di Tahun 2024. Pendapatan Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP Tahun 2024 bersumber dari Jasa Giro Rekening JKN Puskesmas Fakfak. Sampai dengan laporan ini disusun

belum ada penyetoran ke Kas Daerah.

4) Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0,00 atau ekuivalen 0,00% dari target yang dianggarkan senilai Rp1.946.583.922,00. Untuk Pendapatan Bunga, pemerintah daerah berencana akan menempatkan sebagian uang pemerintah daerah pada deposito, namun sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 tidak terlaksana, sehingga pendapatan bunga dari deposito tidak sesuai dengan yang direncanakan.

5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0,00 atau ekuivalen 0,00% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp1.400.000.000,00. Tidak ada realisasi dikarenakan sampai dengan 31 Desember 2024, tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang merupakan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara maupun terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain tidak ada setoran.

6) Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain

Penerimaan komisi potongan atau bentuk lain sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.450.057.194,53 atau ekuivalen 113,27% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp1.280.129.130,53.

7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.415.213.612,70 atau ekuivalen 185,56% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp762.689.716,47 yang terdiri dari:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.109.394.087,34
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	13.998.634,00
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	36.938.708,78
4	Dinas Perhubungan	172.682.000,00
5	Dinas Kesehatan	30.367.509,67
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	51.832.672,91
Jumlah		1.415.213.612,70

a) **Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp1.109.394.087,34 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan penagangan longsegment (pemeliharaan rutin, berkala, peningkatan/rekonstruksi Lusiferi-Jalan Kokas) An. CV. Batufiafas Utama pada DPU(PR)2KP Kab. Fakfak TA 2023	12.279.000,00
2	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan penanganan Longsesgment (pemeliharaan Siboru - S. Nanam - Teluk patipi pada Dinas pupr An. CV ALMUKHALIS PRATAMA MANDIRI T.A 2023	215.687.000,00
3	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pemeliharaan periodik jalan di Fakfak pada Dinas pupr An. CV DUTA SEJAHTERA T.A 2023	23.302.000,00
4	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pemeliharaan periodik jalan Kabupaten Fakfak pada Dinas pupr An. CV ALMUKHALIS PRATAMA MANDIRI T.A 2023	20.281.000,00
5	Setoran Denda Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Pembangunan Saluran Pengadalan Wagom An. CV Citra Binaya Mandiri pada Dinas DPUPR TA 2022	3.000.000,00
6	Setoran Pengembalian kekurangan volume pekerjaan dan pengembalian denda keterlambatan pekerjaan an. CV. Cahaya Mboyan pada Dinas DPU(PR)2KP Kab. Fakfak TA 2022	18.600.000,00
7	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan gedung auditorium kantor KOI An. CV Taruwara Martana pada Dinas DPU(PR)2KP Kab. Fakfak TA 2023	36.131.787,34
8	Setoran pengembalian denda keterlambatan pekerjaan pembangunan tokoh masyarakat An. CV Syapma Indah pada Dinas DPU(PR)2KP Kab. Fakfak TA 2024	986.800,00
9	Setoran kelebihan pembayaran pekerjaan rehab dan pengadaan mebeulair Diklat dan BLK An. CV. Karori Tangan Perkasa pada DPU(PR)2KP TA 2020	500,00
10	Setoran Kekurangan Penerimaan atas Denda Keterlambatan Atas Pekerjaan Pembangunan Rehab Masjid Merapi, An. CV. RN pada DPU(PR)2KP Kab. Fakfak TA 2021	10.795.000,00
11	Setoran Denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan sport center dan kuliner tahap 2 An. CV.Ghina Jaya Sulbarindo TA 2023 pada Dinas DPU(PR)2KP	12.257.000,00
12	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan gedung auditorium kantor organisasi islam An. CV. Taruwara Martana TA 2023 pada Dinas DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	4.306.000,00
13	Setoran kekurangan pekerjaan pembangunan gedung auditorium kantor organisasi islam An. CV. Taruwara Martana TA 2023 pada Dinas DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	4.824.000,00
14	Setoran kekurangan volume atas pekerjaan Tribun Utama An. Merapi Jaya TA 2023 pada Dinas DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	2.947.000,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
15	Setoran Kekurangan Volume atas pekerjaan penanganan longsegment pemeliharaan rutin pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi lusiferi, jalan kokas An. CV Batufiafas TA 2023 pada DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	2.750.000,00
16	Setoran kekurangan volume atas pekerjaan penanganan longsegment pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi siboru-s.nanam-teluk patipi An. CV. Almukhalis Pratama mandiri TA 2023 pada DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	24.004.000,00
17	Setoran kekurangan volume atas pekerjaan pemeliharaan periodeik jalan di Fakfak An. CV. Duta Sejahtera TA 2023 pada Dinas DPU(PR)2KP	73.731.000,00
18	Setoran pengembalian denda keterlambatan pekerjaan atas pembangunan Kantor Distrik Fakfak Timur Tengah An. CV. Taruwara Martana pada Dinas DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	24.460.000,00
19	Setoran pengembalian denda keterlambatan pekerjaan atas pembangunan jalan Otoweri - Tomage Tahap 2 An. CV. Taruwara Martana pada Dinas DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	4.075.000,00
20	Setoran kekurangan volume atas pekerjaan rehabilitasi timbunan talud jalan Dr. Salasa Namudat An. CV. Matadoors Selebes TA 2023 pada dinas DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	16.409.000,00
21	Setoran kekurangan volume pekerjaan penataan jalan baru Fakfak An. CV. Aggaen Mutiara Gunung Ta 2023 pada Dinas DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	70.319.000,00
22	Setoran kekurangan volume pekerjaan penataan jalan baru Fakfak An. CV. Aggaen Mutiara Gunung Ta 2023 pada Dinas DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	46.872.000,00
23	Setoran denda keterlambatan penyelesaian atas pekerjaan ruang terbuka hijau Jalan Salasa Namudat An. CV. ADITYA KARYA KONSTRUKSI, pada DPU(PR)2KP Kab. Fakfak TA 2023	40.239.000,00
24	Setoran Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Ruang Terbuka Hijau Jalan Salasa Namudat An. CV Aditya Karya Konstruksi pada Dinas PU(PR)2KP TA 2023	13.620.000,00
25	Setoran Kekurangan Volume atas pekerjaan pembangunan jalan desa strategis Mumbre-Siboru An. CV.Fijar Jaya TA 2023 pada DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	10.000.000,00
26	Setoran Denda Keterlambatan penyelesaian atas pekerjaan pembangunan jalan desa strategis Mumbre-Siboru An. CV.Fijar Jaya TA 2023 pada DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	10.000.000,00
27	Setoran Keterlambatan atas pekerjaan penanganan longsegment (pemeliharaan rutin, berkala, peneingkatan /rekonstruksi) jalan pala-wagom-torea An. CV. Sinar Karya TA 2023 pada DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	10.000.000,00
28	Setoran Keterlambatan atas pekerjaan penanganan longsegment (pemeliharaan rutin, berkala, peneingkatan /rekonstruksi) jalan pala-wagom-torea An. CV. Sinar Karya TA 2023 pada DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	10.000.000,00
29	Setoran Denda Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Penanganan Longsegment Jalan Pala-Wagom-Torea An. CV Sinar Karya pada Dinas DPU(PR)2KP TA 2023	93.435.000,00
30	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan penanganan longsegment Jalan Pala-Wagom-Torea An. CV Sinar Karya pada Dinas DPU(PR)2KP TA 2023	87.824.000,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
31	Setoran Denda Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Strategis Mumre-Siboru An. CV Fijar Jaya pada Dinas DPU(PR)2KP TA 2023	20.000.000,00
32	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan Jalan Desa Strategis Mumre-Siboru An. CV Fijar Jaya pada Dinas DPU(PR)2KP TA 2023	30.000.000,00
33	Setoran Denda Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Strategis Mumre-Siboru An. CV Fijar Jaya pada Dinas DPU(PR)2KP TA 2023	43.218.000,00
34	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan Jalan Desa Strategis Mumre-Siboru An. CV Fijar Jaya pada Dinas DPU(PR)2KP TA 2023	113.041.000,00
Jumlah		1.109.394.087,34

b) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp13.998.634,00 yang merupakan setoran denda keterlambatan pekerjaan pembangunan Pasar Sorpeha Distrik Fakfak Tengah TA 2023.

c) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp36.938.708,78 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Setoran Pengembalian Kekurangan Volume atas pekerjaan pembangunan gedung sekolah PAUD Khalifah Kab. Fakfak An. CV. Norma Jaya TA 2023 pada Diknas Kab. Fakfak	10.682.726,95
2	Setoran Pengembalian Kekurangan Volume atas pekerjaan pembangunan 2 unit rumah Guru SD YPK SUM An. CV. Fijar Jaya TA 2023 pada Diknas Kab. Fakfak	3.260.707,83
3	Setoran Pengembalian Kekurangan Volume atas pekerjaan pembangunan pagar SD YPK Werba Kab. Fakfak An. CV. Konstruksi Ufuk Timur TA 2023 pada Diknas Kab. Fakfak	16.294.000,00
4	Setoran Pengembalian Kekurangan Volume atas pekerjaan pembangunan gedung sekolah PAUD Khalifah An. CV. Norma Jaya TA 2023 pada Diknas Kab. Fakfak	274,00
5	Setoran pengembalian kekurangan volume pekerjaan pembangunan 1 ruang laboratorium SMP PGRI Fakfak beserta isinya An. CV. Taruwara Martana	6.701.000,00
Jumlah		36.938.708,78

d) Dinas Perhubungan

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Perhubungan sampai dengan 31 Desember 2024 senilai

Rp172.682.000,00 yaitu setoran kekurangan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (Distrik Wartutin) An. CV Putra Balam Jaya.

e) Dinas Kesehatan

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp30.367.509,67 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Setoran Kekurangan Volume atas pekerjaan pembangunan rumah dokter Puskesmas Fakfak Timur Tengah An. CV. Sari Wani TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	183.434,48
2	Setoran pengembalian kekurangan volume pembangunan rumah kopel paramedis puskesmas kayauni An. CV. Wagom Permata Abadi pada DINKES Kab. Fakfak TA 2023	4.484.707,99
3	Setoran pengembalian keterlambatan denda pematangan lahan Puskesmas Fakfak Timur Tengah An. CV. Spesialisasi Teknik Tunggal pada DINKES Kab. Fakfak TA 2023	500.000,00
4	Setoran Kekurangan Volume atas pekerjaan pematangan lahan Puskesmas Kayauni An. CV. Mbaham Sejahtera TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	6.365.538,00
5	Setoran Kekurangan Volume atas pekerjaan pembangunan Bak Air Puskesmas Fakfak Timur Tengah An. CV. Putra Mas Leng TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	3.233.512,00
6	Setoran Kekurangan Volume atas pekerjaan pembangunan rumah dokter Puskesmas Fakfak Timur Tengah An. CV. Sari Wani TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	502.000,00
7	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pematangan lahan Puskesmas Kayauni An. CV. Mbaham Sejahtera TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	462,00
8	Setoran Kekurangan Volume atas pekerjaan pembangunan rumah dokter Puskesmas Fakfak Timur Tengah An. CV. Sari wani TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	565,52
9	Setoran Kekurangan Volume atas pekerjaan pembangunan rumah Kopel Paramedis Puskesmas Kayauni An. CV. Syapma Indah TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	6.396.765,02
10	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan Rumah Kopel Paramedis Puskesmas Kayauni An. CV. Syapma Indah TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	1.706.328,00
11	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan bak air Puskesmas Fakfak Timur Tengah An. CV. Putra Mas Leng TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	488,00
12	Setoran Kekurangan Volume atas pekerjaan pembangunan rumah Kopel Paramedis Puskesmas Fakfak Timur Tengah An. CV. Sariwani TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	292,01
13	Setoran Kekurangan Volume atas pekerjaan pembangunan rumah dokter Puskesmas Kayauni An. CV. Sarawiki TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	2.890.000,00
14	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan Rumah Kopel Paramedis Puskesmas Kayauni An. CV. Syapma Indah TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	237,98
15	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan Rumah Kopel Paramedis Puskesmas Kayauni An. CV. Syapma Indah TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	672,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
16	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan Bak Air Puskesmas Fakfak Timur Tengah An. CV. Yami Nua Nigi TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	1.212.513,00
17	Setoran Pengembalian Kekurangan Volume atas pekerjaan pembangunan rumah Dokter Puskesmas Kayauni An. CV. Rehan Onim Jaya TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	2.889.993,67
Jumlah		30.367.509,67

f) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp51.832.672,91 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan kios Cinderamata An. CV Ohnis Jaya pada Dinas PARBUD TA 2024	18.234.215,31
2	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan Menara Pandang An. CV Marapi Jaya pada Dinas PARBUD TA 2024	33.598.457,60
Jumlah		51.832.672,91

8) Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari pengembalian sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp678.837.383,00 atau ekuivalen 85,60% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp793.077.715,00 yang merupakan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.

2. Pendapatan Transfer - LRA

Pendapatan Transfer – LRA sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp1.448.698.606.250,00 atau 99,34% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp1.458.340.443.342,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp65.333.901.736,00 atau naik sebesar 4,72% dari jumlah pendapatan Transfer – LRA tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp1.383.364.704.514,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.120.021.329.156,00	1.096.904.420.299,00	97,94	967.128.059.446,00
2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	329.068.744.954,00	332.514.144.484,00	101,05	401.512.601.334,00
3	Transfer Provinsi	9.250.369.232,00	19.280.041.467,00	208,42	14.724.043.734,00
Jumlah		1.458.340.443.342,00	1.448.698.606.250,00	99,34	1.383.364.704.514,00

a. Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sampai dengan

31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.096.904.420.299,00 atau ekuivalen 97,94% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp1.120.021.329.156,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp129.776.360.853,00 atau naik sebesar 13,42% dari jumlah pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp967.128.059.446,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan menurut objek pendapatan Tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil	112.710.825.156,00	106.316.332.000,00	94,33	129.012.569.375,00
2	Dana Alokasi Umum	718.531.100.000,00	713.877.302.514,00	99,35	655.353.979.578,00
3	Dana Alokasi Khusus	288.779.404.000,00	276.710.785.785,00	95,82	182.761.510.493,00
Jumlah		1.120.021.329.156,00	1.096.904.420.299,00	97,94	967.128.059.446,00

1) Dana Bagi Hasil

Pendapatan Transfer dari Dana Bagi Hasil sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp106.316.332.000,00 atau ekuivalen 94,33% dari target yang dianggarkan senilai Rp112.710.825.156,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp22.696.237.375,00 atau turun sebesar 21,35% dari jumlah pendapatan Transfer dari Dana Bagi Hasil tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp129.012.569.375,00.

Pendapatan daerah dari Transfer Dana Bagi Hasil terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	42.649.033.387,00	38.201.677.000,00	89,57	10.880.484.375,00
2	DBH PPh 21	3.437.266.000,00	3.270.080.000,00	95,14	2.623.363.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	66.874.400,00	167.186.000,00	250	99.061.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.880.262.369,00	0,00	0,00	0,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	49.869.414.000,00	3.456.702.000,00	6,93	30.350.633.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	46.412.712.000,00	0,00	63.293.325.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	9.387.732.000,00	10.387.732.000,00	110,65	13.856.713.000,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	4.420.243.000,00	4.420.243.000,00	100	5.095.765.000,00

	Perikanan				
10	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00	1.813.225.000,00
Jumlah		112.710.825.156,00	106.316.332.000,00	94,33	129.012.569.375,00

2) Dana Alokasi Umum

Pendapatan Transfer dari Dana Alokasi Umum sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp713.877.302.514,00 atau ekuivalen 99,35% dari target yang dianggarkan senilai Rp718.531.100.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp58.523.322.936,00 atau naik 8,20% dari jumlah pendapatan Transfer dari Dana Alokasi Umum tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp655.353.979.578,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	DAU	545.450.770.000,00	544.757.799.626,00	99,87	633.549.125.578,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100	1.400.000.000,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	15.664.518.000,00	11.703.690.888,00	74,71	20.404.854.000,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	79.101.182.000,00	79.101.182.000,00	100	0,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	34.968.562.000,00	34.968.562.000,00	100	0,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	41.946.068.000,00	41.946.068.000,00	100	0,00
Jumlah		718.531.100.000,00	713.877.302.514,00	99,35	655.353.979.578,00

3) Dana Alokasi Khusus

Pendapatan transfer dari Dana Alokasi Khusus sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp276.710.785.785,00 atau ekuivalen 95,82% dari target yang dianggarkan senilai Rp288.779.404.000,00, Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp93.949.275.292,00 atau naik sebesar 51,41% dari jumlah pendapatan transfer Dana Alokasi Khusus tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp182.761.510.493,00, yang terdiri dari:

a) Dana Alokasi Khusus Fisik

Pendapatan transfer dari dana Alokasi Khusus Fisik sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp185.599.668.432,00 atau ekuivalen

82,61% dari target yang dianggarkan senilai Rp196.456.244.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp83.961.611.584,00 atau naik sebesar 82,61% dari jumlah pendapatan transfer dana alokasi khusus fisik tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp101.638.056.848,00, yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	250.658.000,00	247.640.000,00	98,80	0,00
2	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD	5.299.763.000,00	5.249.371.000,00	99,05	7.919.994.290,00
3	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP	5.539.429.000,00	4.836.886.000,00	87,32	4.762.597.360,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	3.460.230.000,00	3.448.832.000,00	99,67	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.731.548.000,00	1.720.170.000,00	99,34	761.521.685,00
6	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	3.800.792.000,00	3.789.471.438,00	99,70	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	2.015.978.000,00	1.906.047.400,00	94,55	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	47.352.145.000,00	46.276.023.450,00	97,73	27.902.000.000,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	119.207.131.000,00	110.426.736.129,00	92,63	199.900.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan	7.798.570.000,00	7.698.491.015,00	98,72	7.481.318.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	52.610.725.513,00
Jumlah		196.456.244.000,00	185.599.668.432,00	94,47	101.638.056.848,00

b) Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Pendapatan transfer dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp91.111.117.353,00 atau ekuivalen 98,69% dari target yang dianggarkan senilai Rp92.323.160.000,00, Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp9.987.663.708,00

atau turun sebesar 12,31% dari jumlah pendapatan ransfer dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp81.123.453.645,00, terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	29.513.800.000,00	29.162.426.155,00	98,81	26.194.466.567,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.210.000.000,00	1.210.000.000,00	100,00	1.402.500.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	29.262.929.000,00	29.262.929.000,00	100,00	26.341.918.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.267.500.000,00	2.522.500.000,00	199,01	1.136.250.000,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	7.955.182.000,00	7.952.874.000,00	99,97	6.493.064.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	819.920.000,00	762.290.000,00	92,97	872.578.850,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.009.154.000,00	4.804.796.676,00	95,92	4.785.857.105,00
8	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	1.103.085.000,00	1.035.716.960,00	93,89	3.819.687.919,00
9	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	355.089.000,00	231.449.000,00	65,18	958.967.000,00
10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	509.853.686,00	98,05	124.859.394,00
11	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.957.500.000,00	1.891.745.799,00	96,64	585.176.910,00
12	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	452.000.000,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.517.409.000,00	2.576.741.114,00	73,26	1.879.491.600,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	9.786.592.000,00	9.142.794.963,00	93,42	6.076.636.300,00
Jumlah		92.323.160.000,00	91.111.117.353,00	98,69	81.123.453.645,00

b. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp332.514.144.484,00 atau ekuivalen 101,05% dari target yang dianggarkan senilai Rp329.068.744.954,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp68.998.456.850,00 atau turun sebesar 17,18% dari jumlah pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp401.512.601.334,00, terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	210.440.439.954,00	210.393.369.484,00	99,98	280.193.556.334,00
2	Dana Desa	118.628.305.000,00	122.120.775.000,00	102,94	121.319.045.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Jumlah	329.068.744.954,00	332.514.144.484,00	101,05	401.512.601.334,00

1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur

Pendapatan transfer dari Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp210.393.369.484,00 atau ekuivalen 99,98% dari target yang dianggarkan senilai Rp210.440.439.954,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp69.800.186.850,00 atau turun sebesar 24,91% dari jumlah pendapatan transfer dari Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp280.193.556.334,00, terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat	194.800.350.954,00	194.753.280.484,00	99,98	244.634.217.334,00
2	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat	15.640.089.000,00	15.640.089.000,00	100,00	35.559.339.000,00
	Jumlah	210.440.439.954,00	210.393.369.484,00	99,98	280.193.556.334,00

a) Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat

Pendapatan transfer dari Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp194.753.280.484,00 atau ekuivalen 99,98% dari target yang dianggarkan senilai Rp194.800.350.954,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp49.880.936.850,00 atau turun sebesar 20,39% dari jumlah pendapatan transfer dari Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp244.634.217.334,00, terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Otonomi Khusus 1%	37.695.114.000,00	37.695.114.000,00	100	59.833.161.000,00
2	Dana Otonomi Khusus 1,25%	56.026.381.000,00	56.026.381.000,00	100	74.791.451.000,00
3	DBH SDA Otsus	101.078.855.954,00	101.031.785.484,00	99,95	110.009.605.334,00
	Jumlah	194.800.350.954,00	194.753.280.484,00	99,98	244.634.217.334,00

b) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat

Pendapatan transfer dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp15.640.089.000,00 atau ekuivalen 100% dari target yang dianggarkan senilai Rp15.640.089.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp19.919.250.000,00 atau turun sebesar 56,02% dari jumlah pendapatan transfer dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp35.559.339.000,00.

2) Dana Desa

Pendapatan transfer dari Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp122.120.775.000,00 atau ekuivalen 102,94% dari target yang dianggarkan senilai Rp118.628.305.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp801.730.000,00 atau naik sebesar 0,66% dari jumlah pendapatan transfer Dana Desa tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp121.319.045.000,00.

c. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp19.280.041.467,00 atau ekuivalen 208,42% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp9.250.369.232,00 yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp4.555.997.733,00 atau naik sebesar 30,94% dari jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp14.724.043.734,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor	1.492.826.717,00	2.120.891.636,00	142,07	1.502.077.822,00
2	Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor	1.048.601.394,00	1.296.974.296,00	123,69	1.094.431.715,00
3	Pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor	6.708.941.121,00	11.074.906.914,00	165,08	7.486.537.606,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	4.787.268.621,00	0,00	4.640.996.591,00
Jumlah		9.250.369.232,00	19.280.041.467,00	208,42	14.724.043.734,00

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor sampai dengan 31

Desember 2024 terealisasi senilai Rp2.120.891.636,00 atau ekuivalen 142,07% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp1.492.826.717,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp618.813.814,00 atau naik sebesar 41,20% dari jumlah pendapatan bagi hasil pajak tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp1.502.077.822,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal Transfer	Nilai (Rp)
1	DBH Pajak Kendaraan Bermotor/PKB TW 4 TA 2023 (Periode Okt sd Desember TA 2023 Sesuai SK Gub.PB No.92 TA 2024)	30-03-2024	616.197.337,00
2	DBH Pajak Kendaraan Bermotor/PKB TW 1 TA 2024 sesuai SK Gub. Papua Barat Nomor 146 Tahun 2024	05-08-2024	378.746.246,00
3	DBH Pajak Kendaraan Bermotor/PKB TW 2 TA 2023 (di bayarkan di Tahun 2024) Sesuai SK Gub.PB No.92 TA 2024	24-12-2024	331.444.854,00
4	DBH Pajak Kendaraan Bermotor/PKB TW 2 dan 3 TA 2024 sesuai SK Gub. Papua Barat Nomor 307 Tahun 2024	24-12-2024	794.503.199,00
Jumlah			2.120.891.636,00

2) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp1.296.974.296,00 atau ekuivalen 123,69% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp1.048.601.394,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp202.542.581,00 atau naik sebesar 18,51% dari jumlah pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp1.094.431.715,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal Transfer	Nilai (Rp)
1	DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBN-KB TW 4 TA 2023 (Periode Okt sd Desember TA 2023 Sesuai SK Gub.PB No.92 TA 2024)	30-05-2024	307.850.610,00
2	DBH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBN-KB TW 1 TA 2024 sesuai SK GUB. PB Nomor 146 Tahun 2024	05-08-2024	302.020.746,00
3	DBH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBN-KB TW 2 TA 2023 (di bayarkan di Tahun 2024) Sesuai SK Gub.PB No.92 TA 2024	24-12-2024	243.564.806,00
4	DBH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBN-KB TW 2 dan 3 TA 2024 Sesuai SK Gub.PB No.92 TA 2024	24-12-2024	443.538.134,00
Jumlah			1.296.974.296,00

3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp11.074.906.914,00 atau ekuivalen 165,08% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp6.708.941.121,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp3.588.369.308,00 atau naik sebesar 47,93% dari jumlah pendapatan

bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp7.486.537.606,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal Transfer	Nilai (Rp)
1	DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBB-KB TW 2 TA 2023 (di bayarkan di Tahun 2024) sesuai SK Gub. PB 900.1.14.3/198/9/2023	24-12-2024	2.242.758.847,00
2	DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBB-KB TW 4 TA 2023 (Periode Okt sd Desember TA 2023 Sesuai SK Gub.PB No.92 TA 2024)	30-05-2024	2.531.431.297,00
3	DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBB-KB TW 1 TA 2024 sesuai SK Gub.PB No. 146 Tahun 2024	05-08-2024	2.477.589.362,00
4	DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBB-KB TW 2 dan 3 TA 2024 sesuai SK Gub. PB 900.1.14.3/198/9/2023	24-12-2024	3.823.127.408,00
Jumlah			11.074.906.914,00

4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok

Pendapatan bagi hasil pajak rokok sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp4.787.268.621,00 atau ekuivalen 0,00% karena tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Fakfak TA 2024. Rincian transfer pendapatan bagi hasil pajak rokok. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp146.272.030,00 atau naik sebesar 3,15% dari jumlah pendapatan bagi hasil pajak rokok tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp4.640.996.591,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal Transfer	Nilai (Rp)
1	DBH Pajak Rokok TW 4 Periode Desember TA 2023 Sesuai SK Gub PB No 110 Tahun 2024	24-06-2024	738.184.181,00
2	DBH Pajak Rokok TW 1 Periode Januari sd Maret Tahun 2024 sesuai SK Gub PB No 110 Tahun 2024	24-06-2024	1.142.078.188,00
3	DBH Pajak Rokok TW 2 Periode April s/d Juni 2024 sesuai SK Gub PB No.167 Tahun 2024	27-08-2024	992.825.232,00
4	DBH Pajak Rokok TW 3 Periode Juli s/d September 2024 sesuai SK Gub PB No.252 Tahun 2024	06-12-2024	1.145.094.318,00
5	DBH Pajak Rokok TW 4 2024 sesuai SK Gub PB No.326 Tahun 2024 (Periode Oktober sd November 2024)	30-12-2024	769.086.702,00
Jumlah			4.787.268.621,00

3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - Pendapatan Lainnya

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp60.704.864.275,00 atau ekuivalen 89,21% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp68.044.125.193,00. Pada Tahun 2023 Lain-Lain Pendapatan yang Sah tidak dianggarkan sehingga tidak ada realisasi, namun komponennya yaitu Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dianggarkan pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	32.888.591.193,00	25.073.033.337,00	76,24	0,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
2	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat	35.155.534.000,00	35.631.830.938,00	101,35	0,00
Jumlah		68.044.125.193,00	60.704.864.275,00	89,21	0,00

a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp25.073.033.337,00 atau ekuivalen 76,24% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp32.888.591.193,00 dengan rincian sebagai berikut. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp807.821.928,00 atau naik sebesar 3,33% dari jumlah pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp24.265.211.409,00, yang terdiri dari:

4	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	0,00	98.400.000,00	0,00	0,00
2	Puskesmas Weri	401.291.057,00	209.630.512,00	52,24	208.048.675,00
3	Puskesmas Bomberay	340.704.075,00	359.077.347,00	105,39	227.355.355,00
4	Puskesmas Fakfak Kota	2.555.140.862,00	1.857.927.038,00	72,71	1.677.824.161,00
5	Puskesmas Fakfak Tengah	1.317.290.248,00	991.888.616,00	75,30	831.270.406,00
6	Puskesmas Werba	1.042.969.937,00	381.511.145,00	36,58	364.610.497,00
7	Puskesmas Sekban	906.696.237,00	1.029.345.453,00	113,53	770.804.298,00
8	Puskesmas Karas	366.680.879,00	202.286.097,00	55,17	212.342.307,00
9	Puskesmas Kokas	300.601.441,00	311.113.897,00	103,50	248.850.922,00
10	Puskesmas Kramongmongga	316.417.665,00	320.170.031,00	101,19	295.350.894,00
11	Puskesmas Degen	340.798.792,00	372.178.701,00	109,21	312.135.352,00
12	RSUD	25.000.000.000,00	18.939.504.500,00	75,76	0,00
13	BPKAD	0,00	0,00	0,00	19.116.618.542,00
Jumlah		32.888.591.193,00	25.073.033.337,00	76,24	24.265.211.409,00

Pendapatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada BPKAD Kabupaten Fakfak tahun 2023 merupakan pendapatan yang diterima oleh RSUD Fakfak, namun dikarenakan anggaran pendapatannya ada pada BPKAD maka realisasi pendapatannya diinputkan pada BPKAD

b. Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat

Pendapatan Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp35.631.830.938,00 atau

ekuivalen 101,35% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp35.155.534.000,00 yang merupakan dana *Treasury Deposit Facility (TDF)* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Periode	Tgl Transfer	Nilai
1	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Remunerasi TDF pada Rekening TDF-DBH	TRIWULAN II TA 2024	20-09-2024	73.956.835,00
2	Pengeluaran Non Anggaran Pokok TDF-DBH	TDF - GAJI 13	12-06-2024	7.550.528.889,00
3	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Remunerasi TDF pada Rekening TDF-DBH	TRIWULAN I TA 2024	12-06-2024	402.340.103
4	Pengeluaran Non Anggaran Pokok TDF-DBH	TDF ke-2	25-03-2024	27.605.005.111
Jumlah				35.631.830.938,00

Pendapatan transfer ini sesungguhnya merupakan pendapatan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) namun tidak diklasifikasikan ke dalam DBH karena penganggarnya pada akun Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat.

5.1.2. Belanja

1. Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi

Anggaran dan realisasi belanja daerah untuk Tahun 2024, berdasarkan klasifikasi ekonomi sebagai berikut:

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023
5	BELANJA DAERAH	1.597.995.247.846,00	1.500.365.448.694,08	93,89	1.506.021.842.520,79
5 1	Belanja Operasi	1.062.579.810.580,07	987.983.268.523,00	92,98	1.028.766.926.910,05
5 1 1	Belanja Pegawai	482.121.773.992,32	454.131.925.493,00	94,19	460.457.793.507,00
5 1 2	Belanja Barang dan Jasa	490.108.731.465,75	447.223.284.185,00	91,25	488.169.452.661,05
5 1 5	Belanja Hibah	80.099.961.122,00	77.072.714.845,00	96,22	62.029.323.242,00
5 1 6	Belanja Bantuan Sosial	10.249.344.000,00	9.555.344.000,00	93,23	18.110.357.500,00
5 2	Belanja Modal	320.000.577.189,93	294.198.345.514,08	91,94	279.222.686.938,74
5 2 1	Belanja Tanah	2.324.192.000,00	1.975.092.600,00	84,98	2.220.170.500,00
5 2 2	Belanja Peralatan dan Mesin	69.084.368.968,00	68.443.652.994,00	99,07	56.855.527.479,00
5 2 3	Belanja Gedung dan Bangunan	111.002.484.044,39	97.743.178.320,08	88,05	95.937.484.162,74
5 2 4	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	134.758.703.576,54	123.318.492.161,00	91,51	123.090.729.797,00
5 2 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	191.250.000,00	191.150.000,00	99,95	1.018.800.000,00
5 2 6	Belanja Aset Lainnya	2.639.578.601,00	2.526.779.439,00	95,73	99.975.000,00
5 3	Belanja Tak Terduga	12.510.101.045,00	12.465.499.000,00	99,64	14.070.365.920,00
5 3 1	Belanja Tak Terduga	12.510.101.045,00	12.465.499.000,00	99,64	14.070.365.920,00
5 4	Belanja Transfer	202.904.759.031,00	205.718.335.657,00	101,39	183.961.862.752,00
5 4 1	Belanja Bantuan Keuangan	202.904.759.031,00	205.718.335.657,00	101,39	183.961.862.752,00

a. Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi Tahun 2024 senilai Rp987.983.268.523,00 atau ekuivalen 92,98% dari target belanja operasi yang ditetapkan senilai Rp1.062.579.810.580,07. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp40.783.658.387,05 atau turun 3,96% dari jumlah realisasi belanja operasi tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp1.028.766.926.910,05. Belanja operasi Tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja pegawai	482.121.773.992,32	454.131.925.493,00	94,19	460.457.793.507,00
2	Belanja barang dan jasa	490.108.731.465,75	447.223.284.185,00	91,25	488.169.452.661,05
3	Belanja hibah	80.099.961.122,00	77.072.714.845,00	96,22	62.029.323.242,00
4	Belanja bantuan sosial	10.249.344.000,00	9.555.344.000,00	93,23	18.110.357.500,00
Jumlah		1.062.579.810.580,07	987.983.268.523,00	92,98	1.028.766.926.910,05

1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 senilai Rp454.131.925.493,00 atau ekuivalen 94,19% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp482.121.773.992,32. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp6.325.868.014,00 atau turun 1,37% dari jumlah realisasi belanja pegawai tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp460.457.793.507,00.

Belanja pegawai terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja gaji dan tunjangan ASN	342.842.966.480,00	329.173.690.789,00	96,01	293.790.576.162,00
2	Belanja tambahan penghasilan ASN	78.882.393.933,00	71.755.878.726,00	90,97	118.325.382.534,00
3	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	44.155.658.954,00	40.486.056.300,00	91,69	32.158.042.000,00
4	Belanja gaji dan tunjangan DPRD	15.445.198.342,32	11.980.366.246,00	77,57	11.591.773.419,00
5	Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH	187.345.655,00	161.333.432,00	86,12	161.638.323,00
6	Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	608.210.628,00	574.600.000,00	94,47	554.114.893,00
7	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	3.876.266.176,00
Jumlah		482.121.773.992,32	454.131.925.493,00	94,19	460.457.793.507,00

a) Belanja Gaji dan Tunjangan

Realisasi belanja gaji dan tunjangan Tahun 2024 senilai Rp329.173.690.789,00 atau ekuivalen 96,01% dari target yang telah

ditetapkan senilai Rp342.842.966.480,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp35.383.114.627,00 atau naik 12,04% dari jumlah realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp293.790.576.162,00. Belanja gaji dan tunjangan terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja gaji pokok ASN	231.382.964.591,00	227.480.505.659,00	98,31	202.687.667.195,00
2	Belanja tunjangan keluarga ASN	20.332.974.984,00	19.698.382.411,00	96,88	17.138.434.455,00
3	Belanja tunjangan jabatan ASN	7.565.720.737,00	7.012.864.585,00	92,69	7.370.426.500,00
4	Belanja tunjangan fungsional ASN	13.019.552.654,00	12.379.329.660,00	95,08	10.913.984.000,00
5	Belanja tunjangan fungsional umum ASN	3.785.066.025,00	3.168.983.950,00	83,72	3.661.440.851,00
6	Belanja tunjangan beras ASN	22.197.632.348,00	20.141.177.276,00	90,74	18.048.718.796,00
7	Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN	4.613.614.386,00	3.660.222.209,00	79,34	359.800.173,00
8	Belanja pembulatan gaji ASN	3.838.286,00	2.999.647,00	78,15	3.027.317,00
9	Belanja iuran jaminan kesehatan ASN	12.416.055.818,00	11.319.190.832,00	91,17	8.401.444.004,00
10	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN	539.677.486,00	468.519.784,00	86,81	413.821.149,00
11	Belanja iuran jaminan kematian ASN	1.610.456.714,00	1.405.374.309,00	87,27	1.219.435.214,00
12	Belanja tunjangan khusus	25.375.412.451,00	22.436.140.467,00	88,42	23.572.376.508,00
Jumlah		342.842.966.480,00	329.173.690.789,00	96,01	293.790.576.162,00

b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN Tahun 2024 senilai Rp71.755.878.726,00 atau ekuivalen 90,97% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp78.882.393.933,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp46.569.503.808,00 atau turun 39,36% dari jumlah realisasi belanja tambahan penghasilan ASN tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp118.325.382.534,00. Belanja tambahan penghasilan ASN terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Tambahan penghasilan	78.642.103.001,00	71.714.515.254,00	91,19	114.777.018.399,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	berdasarkan beban kerja ASN				
2	Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN	240.290.932,00	41.363.472,00	17,21	3.548.364.135,00
Jumlah		78.882.393.933,00	71.755.878.726,00	90,97	118.325.382.534,00

c) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Realisasi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN Tahun 2024 senilai Rp40.486.056.300,00 atau ekuivalen 91,69% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp44.155.658.954,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp8.328.014.300,00 atau naik 25,90% dari jumlah realisasi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp32.158.042.000,00. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN Tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD	32.132.157.740,00	31.809.714.300,00	99,00	23.577.785.200,00
2	Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD	9.061.874.200,00	6.811.032.000,00	75,16	5.411.986.800,00
3	Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD	1.283.500.000,00	566.500.000,00	44,14	1.524.500.000,00
4	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	199.604.223,00	0,00	-	0,00
5	Belanja honorarium	1.478.522.791,00	1.298.810.000,00	87,85	1.643.770.000,00
Jumlah		44.155.658.954,00	40.486.056.300,00	91,69	32.158.042.000,00

d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi belanja gaji dan tunjangan DPRD Tahun 2024 senilai Rp11.980.366.246,00 atau ekuivalen 77,57% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp15.445.198.342,32. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp388.592.827,00 atau naik 3,35% dari jumlah belanja gaji dan tunjangan DPRD tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp11.591.773.419,00. Rincian Belanja gaji dan tunjangan DPRD terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja uang representasi DPRD	650.000.000,00	457.800.000,00	70,43	453.524.400,00
2	Belanja tunjangan keluarga DPRD	59.214.015,00	31.634.400,00	53,42	28.606.200,00
3	Belanja tunjangan beras DPRD	123.493.874,32	42.727.800,00	34,60	40.844.880,00
4	Belanja uang paket DPRD	65.000.000,00	39.333.000,00	60,51	38.682.000,00
5	Belanja tunjangan jabatan DPRD	950.000.000,00	663.810.000,00	69,87	654.370.500,00
6	Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD	63.000.000,00	34.392.993,00	54,59	45.942.210,00
7	Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD	57.000.000,00	29.309.527,00	51,42	23.659.572,00
8	Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD	3.060.000.000,00	2.572.500.000,00	84,07	2.520.000.000,00
9	Belanja tunjangan reses DPRD	525.000.000,00	300.000.000,00	57,14	419.659.572,00
10	Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD	850.000.000,00	449.759.284,00	52,91	458.832.888,00
11	Belanja pembulatan gaji DPRD	1.000.000,00	0,00	-	0,00
12	Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD	4.483.080.453,00	3.315.989.242,00	73,97	3.640.736.304,00
13	Belanja tunjangan transportasi DPRD	4.365.000.000,00	3.856.000.000,00	88,34	3.264.000.000,00
14	Belanja uang jasa pengabdian DPRD	193.410.000,00	187.110.000,00	96,74	2.914.893,00
Jumlah		15.445.198.342,32	11.980.366.246,00	77,57	11.591.773.419,00

e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Realisasi belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH Tahun 2024 senilai Rp161.333.432,00 atau ekuivalen 86,12% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp187.345.655,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp304.891,00 atau turun 0,19% dari jumlah belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp161.638.323,00. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH Tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja gaji pokok KDH/WKDH	56.588.870,00	56.014.740,00	98,99	55.955.440,00
2	Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH	20.361.878,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
3	Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56	98.280.000,00
4	Belanja tunjangan beras KDH/WKDH	1.278.213,00	796.620,00	62,32	724.200,00
5	Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH	1.691.104,00	732.552,00	43,32	1.191.803,00
6	Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH	2.586,00	2.240,00	86,62	1.920,00
7	Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH	6.268.080,00	5.241.600,00	83,62	5.241.600,00
8	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH	134.316,00	112.320,00	83,62	102.960,00
9	Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH	283.608,00	153.360,00	54,07	140.400,00
Jumlah		187.345.655,00	161.333.432,00	86,12	161.638.323,00

f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2024 senilai Rp574.600.000,00 atau ekuivalen 94,47% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp608.210.628,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp20.485.107,00 atau naik 3,70% dari jumlah belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp554.114.893,00. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja dana operasional pimpinan DPRD	208.210.628,00	201.600.000,00	96,83	154.114.893,00
2	Belanja dana operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	373.000.000,00	93,25	400.000.000,00
Jumlah		608.210.628,00	574.600.000,00	94,47	554.114.893,00

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp447.223.284.185,00 atau ekuivalen 91,25% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp490.108.731.465,75. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp40.946.168.476,05 atau turun 8,39% dari jumlah belanja barang dan jasa tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp488.169.452.661,05. Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024, terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja barang	172.953.286.747,75	160.676.413.750,00	92,90	194.419.228.839,00
2	Belanja jasa	163.731.318.702,00	147.641.990.875,00	90,17	150.255.885.345,05

3	Belanja pemeliharaan	13.596.858.400,00	13.062.186.421,00	96,07	12.507.099.017,00
4	Belanja perjalanan dinas	104.826.299.920,00	91.918.360.552,00	87,69	106.487.111.424,00
5	Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	13.147.318.214,00	11.754.386.420,00	89,41	8.575.055.262,00
6	Belanja barang dan jasa BOS	19.945.000.000,00	14.557.004.379,00	72,99	10.492.306.778,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	0,00	74.124.321,00	0,00	0,00
8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.906.649.482,00	7.536.817.467,00	395,29	5.432.839.263,00
9	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	(73.267,00)
Jumlah		490.108.731.465,75	447.223.284.185,00	91,25	488.169.452.661,05

a) Belanja Barang

Realisasi belanja barang Tahun 2024 senilai Rp160.676.413.750,00 atau ekuivalen 92,90% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp172.953.286.747,75. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp33.742.815.089,00 atau turun sebesar 17,36% dari jumlah belanja barang tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp194.419.228.839,00. Realisasi belanja barang Tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	171.289.355.566,75	159.014.498.290,00	92,83	194.419.228.838,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	27.500.000,00	27.000.000,00	98,18	1,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.636.431.181,00	1.634.915.460,00	99,91	0,00
Jumlah		172.953.286.747,75	160.676.413.750,00	92,90	194.419.228.839,00

i. Belanja Barang Pakai Habis

Realisasi belanja barang Tahun 2024 senilai Rp159.014.498.290,00 atau ekuivalen 92,83% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp171.289.355.566,75. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp35.404.730.548,00 atau turun sebesar 18,21% dari jumlah belanja barang tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp194.419.228.838,00, yang terdiri dari:



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.425.945.082,50	1.333.516.129,00	93,52	1.664.888.495,00
2	Bahan Bakar dan Pelumas	21.026.765.379,16	20.900.602.746,00	99,40	21.355.968.685,00
3	Bahan/Bibit Tanaman	1.264.417.284,00	1.257.710.500,00	99,47	948.147.120,00
4	Alat Tulis Kantor	7.621.273.411,00	7.319.196.611,00	96,04	3.928.534.505,00
5	Kertas dan Cover	6.151.391.149,00	5.912.048.037,00	96,11	5.434.114.674,00
6	Bahan Cetak	9.351.631.960,00	8.855.549.409,00	94,70	9.700.653.129,00
7	Benda Pos	427.936.990,00	384.785.718,00	89,92	343.507.794,00
8	Bahan Komputer	0,00	11.059.996,00	0,00	3.743.107.995,00
9	Perabot Kantor	3.806.182.958,00	3.733.910.389,00	98,10	3.239.755.575,00
10	Alat Listrik	756.255.369,00	716.210.570,00	94,70	670.313.848,00
11	Perlengkapan Dinas	533.796.246,00	498.380.262,00	93,37	406.607.650,00
12	Perlengkapan Pendukung Olahraga	159.707.500,00	157.507.500,00	98,62	1.359.405.153,00
13	Suvenir/Cendera Mata	280.000.000,00	277.000.000,00	98,93	0,00
14	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.279.430.603,00	12.163.556.485,00	99,06	17.047.394.444,00
15	Obat-Obatan	11.110.682.995,00	10.926.355.925,00	98,34	8.673.561.834,00
16	Obat-Obatan Lainnya	160.959.028,00	147.187.440,00	91,44	132.090.000,00
17	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	44.296.886.336,00	37.782.010.487,00	85,29	45.706.325.651,00
18	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	6.826.967.261,09	6.676.450.050,00	97,80	21.669.813.319,00
19	Natura	4.796.316.494,00	4.695.989.050,00	97,91	7.532.852.338,00
20	Makanan dan Minuman Rapat	20.088.130.706,00	18.603.422.472,00	92,61	18.686.983.366,00
21	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.576.556.600,00	5.545.676.938,00	99,45	5.251.760.492,00
22	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	321.428.000,00	321.428.000,00	100,00	448.776.000,00
23	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	5.490.340.750,00	3.375.582.071,00	61,48	2.685.676.021,00
24	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	607.168.000,00	607.168.000,00	100,00	1.068.464.000,00
25	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.713.988.750,00	4.701.533.500,00	99,74	7.022.099.098,00
26	Pakaian Dinas KDH dan WKDH	44.400.000,00	44.000.000,00	99,10	33.300.000,00
27	Pakaian Sipil Harian (PSH)	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
28	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	11.100.000,00	11.000.000,00	99,10	11.000.000,00
29	Pakaian Dinas Harian (PDH)	140.838.000,00	140.680.000,00	99,89	518.849.840,00
30	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	311.430.000,00	310.890.000,00	99,83	753.781.500,00
31	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	63.492.710,00	63.492.710,00	100,00	13.492.710,00
32	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	118.500.000,00	118.500.000,00	100,00	191.852.000,00
33	Pakaian Batik Tradisional	127.500.000,00	127.500.000,00	100,00	1.051.793.535,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
34	Pakaian Olahraga	1.337.936.005,00	1.234.597.295,00	92,28	1.072.058.750,00
35	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	24.991.650,00
36	Pakan	0,00	0,00	0,00	329.656.200,00
37	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	122.975.000,00
38	Belanja Pakaian Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	45.701.676,00
39	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	724.476.000,00
40	Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00	436.388.956,00
41	Belanja Pakaian Jas/Safari	0,00	0,00	0,00	17.980.000,00
42	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
43	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	325.129.835,00
Jumlah		171.289.355.566,75	159.014.498.290,00	92,83	194.419.228.838,00

ii. Belanja Barang Tak Habis Pakai

Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai Tahun 2024 senilai Rp27.000.000,00 atau ekuivalen 98,18% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp27.500.000,00, yang merupakan Belanja Komponen-Komponen Peralatan.

iii. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun 2024 senilai Rp1.634.915.460,00 atau ekuivalen 99,91% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp1.636.431.181,00. Pada tahun 2023 tidak dianggarkan Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Peralatan dan Mesin Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	68.600.000,00	68.600.000,00	100	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	53.300.000,00	53.300.000,00	100	0,00
3	Belanja Peralatan dan Mesin Peralatan Studio Gambar	1.000.000.000,00	998.746.500,00	99,87	0,00
4	Belanja Peralatan dan Mesin Peralatan <i>Personal Computer</i>	13.889.001,00	13.800.000,00	99,36	0,00

5	Belanja Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Kantor	500.642.180,00	500.468.960,00	99,97	0,00
Jumlah		1.636.431.181,00	1.634.915.460,00	99,91	0,00

b) Belanja Jasa

Realisasi belanja jasa Tahun 2024 senilai Rp147.641.990.875,00 atau ekuivalen 90,17% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp163.731.318.702,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp2.613.894.470,05 atau turun 1,74% dari jumlah belanja jasa tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp150.255.885.345,05.

Belanja jasa Tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja jasa kantor	149.581.580.311,00	135.454.769.545,00	90,56	137.213.867.099,05
2	Belanja iuran jaminan/asuransi	800.759.736,00	799.879.736,00	99,89	728.435.468,00
3	Belanja sewa peralatan dan mesin	3.984.595.030,00	3.795.542.100,00	95,26	2.980.091.280,00
4	Belanja sewa gedung dan bangunan	4.224.150.000,00	2.701.727.862,00	63,96	6.481.013.498,00
5	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
6	Belanja beasiswa pendidikan PNS	2.368.250.000,00	2.339.850.000,00	98,80	404.000.000,00
7	Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan	2.501.983.625,00	2.280.360.632,00	91,14	2.448.478.000,00
8	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	250.000.000,00	249.861.000,00	99,94	0,00
Jumlah		163.731.318.702,00	147.641.990.875,00	90,17	150.255.885.345,05

c) Belanja Pemeliharaan

Realisasi belanja pemeliharaan Tahun 2024 senilai Rp13.062.186.421,00 atau ekuivalen 96,07% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp13.596.858.400,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp555.087.404,00 atau naik 4,44% dari jumlah belanja pemeliharaan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp12.507.099.017,00. Belanja Pemeliharaan Tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	12.324.234.400,00	11.990.002.088,00	97,23	12.492.099.017,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.172.624.000,00	1.072.184.333,00	91,43	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Jumlah		13.596.858.400,00	13.062.186.421,00	96,07	12.507.099.017,00

d) Belanja Perajalan Dinas

Realisasi belanja perajalan dinas Tahun 2024 senilai Rp91.918.360.552,00 atau ekuivalen 87,69% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp104.826.299.920,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp14.568.750.872,00 atau turun 13,68% dari jumlah belanja perajalan dinas tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp106.487.111.424,00. Realisasi ini merupakan belanja perajalan dinas dalam negeri/perajalan dinas biasa.

e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Tahun 2024 senilai Rp11.754.386.420,00 atau ekuivalen 89,41% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp13.147.318.214,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp3.179.331.158,00 atau naik 37,08% dari jumlah belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp8.575.055.262,00. Realisasi ini terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	969.032.294,00	916.195.500,00	94,55	690.412.500,00
2	Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	12.178.285.920,00	10.838.190.920,00	89,00	7.884.642.762,00
Jumlah		13.147.318.214,00	11.754.386.420,00	89,41	8.575.055.262,00

f) Belanja Barang dan Jasa BOS

Realisasi belanja barang dan jasa BOS Tahun 2024 senilai Rp14.557.004.379,00 atau ekuivalen 72,99% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp19.945.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp4.064.697.601,00 atau naik 38,74% dari jumlah belanja barang dan jasa BOS tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp10.492.306.778,00. Realisasi ini merupakan belanja barang dan jasa dari dana BOS pada Satuan Pendidikan SD Negeri, SLTP Negeri dan SLTA Negeri.

g) Belanja Barang dan Jasa BOSP

Realisasi belanja barang dan jasa BOSP Tahun 2024 senilai Rp74.124.321,00 atau ekuivalen 0,00% karena tidak dianggarkan selama tahun 2024. Realisasi ini merupakan belanja barang dan jasa dari dana BOSP pada Satuan Pendidikan PAUD Negeri dan Pendidikan Kesetaraan Negeri.

h) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Realisasi belanja barang dan jasa BOK Puskesmas Tahun 2024 senilai Rp7.536.817.467,00 atau ekuivalen 395,29% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp1.906.649.482,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp2.103.978.204,00 atau naik 38,73% dari jumlah belanja barang dan jasa BOK Puskesmas tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp5.432.839.263,00. Rincian belanja barang dan jasa BOK Puskesmas Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Puskesmas	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Puskesmas Weri	55.740.000,00	745.477.388,00	1.337,42	399.105.693,00
2	Puskesmas Fakfak Kota	680.450.000,00	892.170.258,00	131,11	662.799.000,00
3	Puskesmas Fakfak Tengah	0,00	941.477.126,00	0,00	643.411.800,00
4	Puskesmas Werba	118.933.482,00	694.241.020,00	583,72	447.931.098,00
5	Puskesmas Sekban	47.790.000,00	876.226.751,00	1.833,49	722.543.500,00
6	Puskesmas Karas	0,00	523.965.529,00	0,00	476.611.212,00
7	Puskesmas Kokas	631.886.000,00	888.540.500,00	140,62	545.807.200,00
8	Puskesmas Kramongmongga	215.750.000,00	724.325.297,00	335,72	511.282.833,00
9	Puskesmas Degen	156.100.000,00	536.418.789,00	343,64	361.582.401,00

10	Puskesmas Bomberay	0,00	713.974.809,00	0,00	661.764.526,00
Jumlah		1.906.649.482,00	7.536.817.467,00	395,29	5.432.839.263,00

i) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi belanja barang dan jasa BLUD Tahun 2024 senilai Rp2.000.000,00 atau ekuivalen 100% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp2.000.000,00. Realisasi ini merupakan belanja penyediaan jasa surat menyurat pada Kantor Distrik Fakfak Tahun anggaran 2024. Realisasi pada akun ini dikarenakan adanya kesalahan pada pembebanan anggaran.

Di antara belanja barang dan jasa di atas, terdapat belanja yang menjadi beban dibayar di muka yang telah terealisasi di tahun 2024 senilai Rp6.236.372.000,00 dengan total nilai pembiayaan senilai Rp20.994.090.915,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Sekolah	Periode PKS	Nilai PKS	Pembayaran Tahun Sebelumnya	Pembayaran TA 2024	Sisa Nilai PKS yang Belum Dibayarkan
1	UMI Makassar	2024-2029	1.500.100.000,00		1.500.100.000,00	0,00
2	Unimuda Sorong	2021-2026	2.494.800.000,00	1.067.400.000,00	503.700.000,00	923.700.000,00
3	Politeknik Penerbangan Jayapura	2023-2026	4.903.704.000,00	0,00	2.226.072.000,00	2.677.632.000,00
4	Daarut Tauhid Boarding School	2024-2026	1.198.800.000,00	0,00	500.000.000,00	698.800.000,00
5	SMA Pelita Nusantara	2024-2026	1.670.700.000,00	0,00	500.000.000,00	1.170.700.000,00
6	STKIP Nuwar	2022-2026	4.007.130.000,00	3.000.630.000,00	1.006.500.000,00	0,00
Jumlah			15.775.234.000,00	4.068.030.000,00	6.236.372.000,00	5.470.832.000,00

3) Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah Tahun 2024 adalah senilai Rp77.072.714.845,00 atau ekuivalen 96,22% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp80.099.961.122,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp15.043.391.603,00 atau naik 24,25% dari jumlah belanja hibah tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp62.029.323.242,00. Realisasi belanja ini terdiri dari:

No	Puskesmas	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada BUMN	5.830.262.369,00	5.830.262.369,00	100	0,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan	61.471.791.128,00	58.260.291.128,00	94,78	49.499.864.765,00

	Hukum Indonesia				
3	Belanja Hibah Dana BOS	9.666.060.000,00	10.018.450.199,00	103,65	12.122.770.852,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	406.687.625,00	357.645.350,00	87,94	406.687.625,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	2.725.160.000,00	2.606.065.799,00	95,63	0,00
Jumlah		80.099.961.122,00	77.072.714.845,00	96,22	620.293.323.242,00

a) Belanja Hibah kepada BUMN

Realisasi Belanja Hibah kepada BUMN Tahun 2024 senilai Rp5.830.262.369,00 atau ekuivalen 100% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp5.830.262.369,00. Realisasi belanja tersebut merupakan tagihan iuran BPJS untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Tahun 2024.

b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia

Realisasi belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia Tahun 2024 senilai Rp58.260.291.128,00 atau ekuivalen 94,78% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp61.471.791.128,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp8.760.426.363,00 atau naik 17,70% dari jumlah belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp49.499.864.765,00. Realisasi ini terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	43.571.006.200,00	43.451.006.200,00	99,72	25.761.270.800,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	15.419.784.928,00	13.163.284.928,00	85,37	23.716.093.965,00
3	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	1.011.000.000,00	981.000.000,00	97,03	22.500.000,00
4	Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat	1.470.000.000,00	665.000.000,00	45,24	0,00

	yang Berbadan Hukum Indonesia				
Jumlah		61.471.791.128,00	58.260.291.128,00	94,78	49.499.864.765,00

Berikut disajikan rincian hibah kepada Bawaslu dan KPU Kabupaten Fakfak Tahun 2024

No	Nama Satker	Nilai hibah diterima	Pengembalian Sisa	Tanggal Pengembalian
1	Bawaslu	20.000.000.000,00	3.736.252.914,00	05 Mei 2025
2	KPU	39.928.177.000,00	0,00	-
Jumlah		59.928.177.000,00	3.736.252.914,00	-

c) Belanja Hibah Dana BOS

Realisasi belanja hibah dana BOS Tahun 2024 senilai Rp10.018.450.199,00 atau ekuivalen 103,65% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp9.666.060.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp2.104.320.653,00 atau turun 17,36% dari jumlah realisasi belanja hibah dana BOS tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp12.122.770.852,00. Realisasi ini merupakan belanja hibah dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan swasta.

d) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Realisasi belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2024 senilai Rp357.645.350,00 atau ekuivalen 87,94% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp406.687.625,00. Jumlah Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp49.042.275,00 atau turun 12,06% dibandingkan dengan jumlah realisasi tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp406.687.625,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai Politik	Nilai (Rp)
1	Partai Gerindra	32.097.475,00
2	Partai Perindo	34.344.025,00
3	Partai Nasdem	50.733.225,00
4	Partai Hanura	0,00
5	Partai Bulan Bintang	27.849.450,00
6	Partai Keadilan Sejahtera	33.717.975,00
7	Pdi Perjuangan	35.257.450,00
8	Partai Demokrat	20.290.975,00
9	Partai Kebangkitan Bangsa	44.112.325,00
10	Partai Golkar	79.242.450,00
11	Partai Pan	0,00
Jumlah		357.645.350,00

e) Belanja Hibah Dana BOSP

Realisasi belanja hibah Dana BOSP Tahun 2024 senilai Rp2.606.065.799,00 atau ekuivalen 95,63% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp2.725.160.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai Politik	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.978.140.000,00	1.912.385.799,00	96,68
2	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	747.020.000,00	693.680.000,00	92,86
Jumlah		2.725.160.000,00	2.606.065.799,00	95,63

4) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja bantuan sosial Tahun 2024 senilai Rp9.555.344.000,00 atau ekuivalen 93,23% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp10.249.344.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp8.555.013.500,00 atau turun 47,24% dari jumlah belanja bantuan sosial tahun sebelumnya yang tercatat Rp18.110.357.500,00. Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 merupakan belanja bantuan sosial kepada individu yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Di antara realisasi belanja bantuan sosial tahun 2024 terdapat belanja yang menjadi beban dibayar di muka atas pembayara bantuan biaya pendidikan pada sejumlah perguruan tinggi.

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 senilai Rp294.198.345.514,08 atau ekuivalen 91,94% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp320.000.577.189,93. Realisasi ini mengalami kenaikan senilai Rp14.975.658.575,34 atau naik 5,36% dari jumlah belanja modal tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp279.222.686.938,74. Menurut objek, Belanja modal Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja tanah	2.324.192.000,00	1.975.092.600,00	84,98	2.220.170.500,00
2	Belanja peralatan dan mesin	69.084.368.968,00	68.443.652.994,00	99,07	56.855.527.479,00
3	Belanja gedung dan bangunan	111.002.484.044,39	97.743.178.320,08	88,05	95.937.484.162,74
4	Belanja jalan, jaringan, dan irigasi	134.758.703.576,54	123.318.492.161,00	91,51	123.090.729.797,00
5	Belanja aset tetap lainnya	191.250.000,00	191.150.000,00	99,95	1.018.800.000,00
6	Belanja Aset Lainnya	2.639.578.601,00	2.526.779.439,00	95,73	99.975.000,00
Jumlah		320.000.577.189,93	294.198.345.514,08	91,94	279.222.686.938,74

1) Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal tanah Tahun 2024 senilai Rp1.975.092.600,00 atau ekuivalen 84,98% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp2.324.192.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp245.077.900,00 atau turun 11,04% dari jumlah belanja modal tanah tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp2.220.170.500,00. Realisasi belanja modal tanah Tahun 2024 merupakan belanja modal tanah persil dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	1.813.118.000,00	1.613.100.000,00	88,97	825.000.000,00
2	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	511.074.000,00	361.992.600,00	70,83	100.050.000,00
3	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	459.660.000,00
4	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	0,00	0,00	0,00	353.748.000,00
6	Belanja Modal Tanah Lapangan Terbang	0,00	0,00	0,00	481.712.500,00
Jumlah		2.324.192.000,00	1.975.092.600,00	84,98	2.220.170.500,00

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2024 senilai Rp68.443.652.994,00 atau ekuivalen 99,07% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp69.084.368.968,00. Realisasi ini mengalami kenaikan senilai Rp11.588.125.515,00 atau naik 20,38% dari jumlah belanja modal peralatan dan mesin tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp56.855.527.479,00. Belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	11.345.407.323,00	11.069.715.650,00	97,57	942.302.024,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	13.126.728.664,00	8.735.772.100,00	66,55	12.740.080.178,00
3	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.197.018.693,00	8.552.529.732,00	92,95	8.088.539.963,00
4	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.112.224.718,00	1.104.882.424,00	99,34	7.316.821.692,00
5	Belanja Modal Alat dan Kesehatan	25.539.252.985,00	24.961.660.280,00	97,74	8.237.242.614,00
6	Belanja Modal Alat Laboratorium	633.137.100,00	632.937.000,00	99,97	0,00
7	Belanja Modal Komputer	5.232.008.539,00	10.593.099.453,00	202,47	12.950.562.245,00
8	Belanja Modal Rambu-Rambu	2.898.590.946,00	2.793.056.355,00	96,36	4.000.494.420,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
9	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	56.584.343,00
10	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	2.503.700.000,00
11	Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00
Jumlah		69.084.368.968,00	68.443.652.994,00	99,07	56.855.527.479,00

a) Belanja Modal Alat Besar

Realisasi belanja modal alat besar Tahun 2024 senilai Rp11.069.715.650,00 atau ekuivalen 97,57% dari target yang ditetapkan senilai Rp11.345.407.323,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp10.127.413.626,00 atau naik 1.074,75% dari jumlah belanja modal alat besar tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp942.302.024,00. Belanja modal alat besar Tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja modal <i>electric generating set</i>	48.707.623,00	18.481.500,00	37,94	5.550.000,00
2	Belanja modal pompa	184.815.000,00	184.800.000,00	99,99	34.597.024,00
3	Belanja modal alat bantu lainnya	11.111.884.700,00	10.866.434.150,00	97,79	11.655.000,00
4	Belanja Modal Excavator	0,00	0,00	0,00	890.500.000,00
Jumlah		11.345.407.323,00	11.069.715.650,00	97,57	942.302.024,00

b) Belanja Modal Alat Angkutan

Realisasi belanja modal alat angkutan Tahun 2024 senilai Rp8.735.772.100,00 atau ekuivalen 66,55% dari target yang ditetapkan senilai Rp13.126.728.664,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp4.004.308.078,00 atau turun 31,43% dari jumlah belanja modal alat angkutan tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp12.740.080.178,00. Realisasi belanja modal alat angkutan Tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan	946.830.000,00	866.200.000,00	91,48	5.786.593.600,00
2	Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua	3.424.055.973,00	2.884.600.000,00	84,25	4.269.700.000,00
3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	7.794.740.474,00	4.035.589.100,00	51,77	0,00
4	Belanja modal alat angkutan apung bermotor untuk penumpang	961.102.217,00	949.383.000,00	98,78	0,00

5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	709.900.000,00
6	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.973.886.578,00
Jumlah		13.126.728.664,00	8.735.772.100,00	66,55	12.740.080.178,00

c) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Realisasi belanja modal alat kantor dan rumah tangga Tahun 2024 senilai Rp8.552.529.732,00 atau ekuivalen 92,99% dari target yang ditetapkan senilai Rp9.197.018.693,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp463.989.769,00 atau naik 5,74% dari jumlah belanja modal alat kantor dan rumah tangga tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp8.088.539.963,00. Realisasi belanja modal alat kantor dan rumah tangga Tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja modal alat reproduksi (penggandaan)	255.526.210,00	255.420.648,00	99,96	35.750.664,00
2	Belanja modal alat kantor lainnya	808.397.161,00	701.435.760,00	86,77	681.051.858,00
3	Belanja modal mebel	4.942.936.140,00	4.682.387.690,00	94,73	2.608.997.940,00
4	Belanja modal alat pembersih	260.577.818,00	264.389.046,00	101,46	521.056.574,00
5	Belanja Modal Alat Pendingin	897.324.651,00	848.745.576,00	94,59	1.034.095.855,00
6	Belanja modal alat dapur	39.848.150,00	16.948.100,00	42,53	451.376.735,00
7	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.918.576.463,00	1.712.802.912,00	89,27	2.505.130.148,00
8	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.232.100,00	0,00	0,00	201.080.189,00
9	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	72.600.000,00	70.400.000,00	96,97	0,00
10	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Jumlah		9.197.018.693,00	8.552.529.732,00	92,99	8.088.539.963,00

d) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Realisasi belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar Tahun 2024 senilai Rp1.104.882.424,00 atau ekuivalen 99,34% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.112.224.718,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp6.172.855.705,00 atau turun 84,82% dari jumlah belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp7.277.738.129,00. Realisasi

belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar Tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja modal peralatan studio audio	77.800.523,00	75.552.447,00	97,11	121.968.000,00
2	Belanja modal peralatan studio video dan film	1.021.829.977,00	1.016.829.977,00	99,51	7.138.751.877,00
3	Belanja modal peralatan studio gambar	12.594.218,00	12.500.000,00	99,25	17.018.252,00
Jumlah		1.112.224.718,00	1.104.882.424,00	99,34	7.277.738.129,00

e) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Realisasi belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Tahun 2024 senilai Rp24.961.660.280,00 atau ekuivalen 97,74% dari target yang ditetapkan senilai Rp25.539.252.985,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp16.724.417.666,00 atau naik 203,03% dari jumlah belanja modal alat kedokteran dan kesehatan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp8.237.242.614,00. Realisasi belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja modal alat kedokteran umum	23.960.521.485,00	23.383.274.430,00	97,59	7.697.397.614,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	360.000.000,00	360.000.000,00	100	0,00
3	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.218.731.500,00	1.218.385.850,00	99,97	539.845.000,00
Jumlah		25.539.252.985,00	24.961.660.280,00	97,74	8.237.242.614,00

f) Belanja Modal Alat Laboratorium

Realisasi belanja modal alat laboratorium Tahun 2024 senilai Rp632.937.000,00 atau ekuivalen 99,97% dari target yang ditetapkan senilai Rp633.137.100,00. Realisasi belanja modal alat laboratorium Tahun 2024 merupakan belanja modal alat peraga praktek sekolah yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	195.670.000,00	195.582.000,00	99,96	0,00
2	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	37.467.100,00	37.400.000,00	99,82	0,00

3	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	400.000.000,00	399.955.000,00	99,99	0,00
Jumlah		633.137.100,00	632.937.000,00	99,97	0,00

g) Belanja Modal Komputer

Realisasi belanja modal komputer Tahun 2024 senilai Rp10.593.099.453,00 atau ekuivalen 202,47% dari target yang ditetapkan senilai Rp5.232.008.539,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp2.357.462.792,00 atau turun 18,20% dari jumlah belanja modal komputer tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp12.950.562.245,00. Realisasi belanja modal komputer Tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja modal <i>personal computer</i>	3.885.063.580,00	3.699.484.171,00	95,22	5.160.631.050,00
2	Belanja Modal Peralatan <i>Personal Computer</i>	1.160.122.059,00	1.106.558.955,00	95,38	1.882.030.598,00
3	Belanja Modal Peralatan Jaringan	186.822.900,00	186.147.000,00	99,64	1.910.789.440,00
4	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	5.600.909.327,00		3.997.111.157,00
Jumlah		5.232.008.539,00	10.593.099.453,00	202,47	12.950.562.245,00

h) Belanja Modal Rambu-Rambu

Realisasi belanja modal rambu-rambu Tahun 2024 senilai Rp2.793.056.355,00 atau ekuivalen 96,36% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.898.590.946,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp1.207.438.065,00 atau turun 30,18% dari jumlah belanja modal rambu-rambu tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp4.000.494.420,00. Realisasi belanja modal rambu-rambu Tahun 2024 merupakan belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun 2024 senilai Rp97.743.178.320,08 atau ekuivalen 88,05% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp111.002.484.044,39. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp1.805.694.157,34 atau naik 1,88% dari jumlah belanja modal gedung dan bangunan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp95.937.484.162,74. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun 2024 dirincikan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
----	--------	---------------	---------------------	---	---------------------

1	Belanja modal bangunan gedung	103.866.911.827,39	90.997.019.859,08	87,61	92.468.334.452,74
2	Belanja modal tugu titik kontrol/pasti	7.135.572.217,00	6.746.158.461,00	94,54	3.469.149.710,00
Jumlah		111.002.484.044,39	97.743.178.320,08	88,05	95.937.484.162,74

a) Belanja Modal Bangunan Gedung

Realisasi belanja modal bangunan gedung Tahun 2024 senilai Rp90.997.019.859,08 atau ekuivalen 87,61% dari target yang ditetapkan senilai Rp103.866.911.827,39. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp1.471.314.593,66 atau turun 1,59% dari jumlah belanja modal bangunan gedung tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp92.468.334.452,74. Realisasi belanja modal bangunan gedung Tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja modal bangunan gedung tempat kerja	92.014.584.353,39	80.293.612.238,08	87,26	91.627.861.322,74
2	Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal	11.852.327.474,00	10.703.407.621,00	90,31	840.473.130,00
Jumlah		103.866.911.827,39	90.997.019.859,08	87,61	92.468.334.452,74

(1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

Realisasi belanja modal bangunan gedung tempat kerja Tahun 2024 senilai Rp80.293.612.238,08 atau ekuivalen 87,26% dari target yang ditetapkan senilai Rp92.014.584.353,39. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp11.334.249.084,66 atau turun 12,37% dari jumlah belanja modal bangunan gedung tempat kerja tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp91.627.861.322,74. Realisasi belanja modal bangunan gedung tempat kerja Tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja modal bangunan gedung kantor	41.061.090.877,00	36.192.976.471,00	88,14	29.778.984.593,00
2	Belanja Modal Bangunan Gudang	595.406.364,00	595.331.000,00	99,99	0,00
3	Belanja modal bangunan kesehatan	12.243.987.676,39	10.221.927.729,00	83,49	42.174.531.313,74
4	Belanja modal bangunan	822.107.203,00	821.615.000,00	99,94	1.263.290.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	gedung tempat pertemuan				
5	Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan	33.031.226.372,00	28.087.604.510,00	85,03	7.342.657.585,00
6	Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga	3.380.172.610,00	3.494.079.207,08	103,37	2.336.710.500,00
7	Belanja modal bangunan gedung pertokoan / koperasi / pasar	744.257.955,00	744.150.950,00	99,99	2.826.201.085,00
8	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	136.335.296,00	135.927.371,00	99,70	0,00
9	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	1.795.690.000,00
10	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	0,00	3.233.548.000,00
11	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	876.248.246,00
Jumlah		92.014.584.353,39	80.293.612.238,08	87,26	91.627.861.322,74

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Realisasi belanja modal bangunan gedung tempat tinggal Tahun 2024 senilai Rp10.703.407.621,00 atau ekuivalen 90,31% dari target yang ditetapkan senilai Rp11.852.327.474,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp9.862.934.491,00 atau naik 1.173,50% dari jumlah belanja modal bangunan gedung tempat tinggal tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp840.473.130,00. Realisasi belanja modal bangunan gedung tempat tinggal Tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	9.405.194.902,00	8.816.003.621,00	93,74	840.473.130,00
2	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	2.447.132.572,00	1.887.404.000,00	77,13	
Jumlah		11.852.327.474,00	10.703.407.621,00	90,31	840.473.130,00

b) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

Realisasi belanja modal tugu titik kontrol/pasti Tahun 2024 senilai Rp6.746.158.461,00 atau ekuivalen 94,54% dari target yang ditetapkan senilai Rp7.135.572.217,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp3.277.008.751,00 atau naik 94,46% dari jumlah belanja modal tugu titik kontrol/pasti tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp3.469.149.710,00. Realisasi belanja modal tugu titik kontrol/pasti Tahun 2024 merupakan belanja modal tugu/tanda batas yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Pagar	7.082.072.217,00	6.692.713.461,00	94,50	3.469.149.710,00
2	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	53.500.000,00	53.445.000,00	99,90	
Jumlah		7.135.572.217,00	6.746.158.461,00	94,54	3.469.149.710,00

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Tahun 2024 senilai Rp123.318.492.161,00 atau ekuivalen 91,51% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp134.758.703.576,54. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp227.762.364,00 atau naik 0,19% dari jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp123.090.729.797,00. Realisasi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Tahun 2024 dirincikan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja modal jalan dan jembatan	109.355.130.088,70	98.494.510.000,00	90,07	96.175.699.680,00
2	Belanja modal bangunan air	17.208.568.398,84	16.765.982.161,00	97,43	16.228.827.404,00
3	Belanja Modal Instalasi	8.195.005.089,00	8.058.000.000,00	98,33	0,00
4	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	10.686.202.713,00
Jumlah		134.758.703.576,54	123.318.492.161,00	91,51	123.090.729.797,00

a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Realisasi belanja modal jalan dan jembatan Tahun 2024 senilai Rp98.494.510.000,00 atau ekuivalen 90,07% dari target yang ditetapkan senilai Rp109.355.130.088,70. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp2.318.810.320,00 atau naik 2,41% dari jumlah belanja modal jalan dan jembatan tahun sebelumnya yang

hanya senilai Rp81.465.442.280,00. Realisasi belanja modal jalan dan jembatan Tahun 2024 merupakan belanja modal jalan yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	97.488.713.073,05	86.692.509.000,00	88,93	63.209.852.672,00
2	Belanja Modal Jalan Desa	8.310.917.270,02	8.291.422.000,00	99,77	15.994.667.838,00
3	Belanja Modal Jalan Khusus	3.555.499.745,63	3.510.579.000,00	98,74	486.134.000,00
4	Belanja Modal Jalan Nasional	0,00	0,00	0,00	16.750.000,00
5	Belanja Modal Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.758.037.770,00
Jumlah		109.355.130.088,70	98.494.510.000,00	90,07	81.465.442.280,00

b) Belanja Modal Bangunan Air

Realisasi belanja modal bangunan air Tahun 2024 senilai Rp16.765.982.161,00 atau ekuivalen 97,43% dari target yang ditetapkan senilai Rp17.208.568.398,84. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp537.154.757,00 atau naik 3,31% dari jumlah belanja modal bangunan air tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp16.228.827.404,00. Realisasi belanja modal bangunan air Tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja modal bangunan air irigasi	6.016.392.665,96	5.853.959.800,00	97,30	665.112.346,00
2	Belanja modal bangunan pengairan pasang surut	2.640.144.675,00	2.637.745.600,00	99,91	6.529.663.266,00
3	Belanja modal bangunan air bersih/air baku	8.552.031.057,88	8.274.276.761,00	96,75	1.398.052.088,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	7.635.999.704,00
Jumlah		17.208.568.398,84	16.765.982.161,00	97,43	16.228.827.404,00

(1) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi

Realisasi belanja modal bangunan air irigasi Tahun 2024 senilai Rp5.853.959.800,00 atau ekuivalen 97,30% dari target yang ditetapkan senilai Rp6.016.392.665,96. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp5.188.847.454,00 atau naik 780,15% dari jumlah belanja modal bangunan air irigasi tahun

sebelumnya yang hanya senilai Rp665.112.346,00. Realisasi belanja modal bangunan air irigasi Tahun 2024 belanja modal bangunan pengaman irigasi

(2) Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut

Realisasi belanja modal bangunan pengairan pasang surut Tahun 2024 senilai Rp2.637.745.600,00 atau ekuivalen 99,91% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.640.144.675,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp3.891.917.666,00 atau turun 59,60% dari jumlah realisasi belanja modal bangunan pengairan pasang surut tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp6.529.663.266,00. Realisasi belanja modal bangunan pengairan pasang surut Tahun 2024 merupakan belanja modal saluran pembuang pasang surut.

(3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku

Realisasi belanja modal bangunan air bersih/air baku Tahun 2024 senilai Rp8.274.276.761,00 atau ekuivalen 96,75% dari target yang ditetapkan senilai Rp8.552.031.057,88. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp6.876.224.673,00 atau naik 491,84% dari jumlah belanja modal bangunan air bersih/air baku tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp1.398.052.088,00. Realisasi belanja modal bangunan air bersih/air baku Tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	4.504.348.349,00	4.229.119.761,00	93,89	349.955.900,00
2	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	4.047.682.708,88	4.045.157.000,00	99,94	1.048.096.188,00
Jumlah		8.552.031.057,88	8.274.276.761,00	96,75	1.398.052.088,00

c) Belanja Modal Instalasi

Realisasi belanja modal instalasi Tahun 2024 senilai Rp8.058.000.000,00 atau ekuivalen 98,33% dari target yang ditetapkan senilai Rp8.195.005.089,00. Realisasi belanja modal instalasi Tahun 2024 merupakan belanja modal instalasi air kotor dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	2.457.000.000,00	2.375.100.000,00	96,67	0,00
2	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	5.738.005.089,00	5.682.900.000,00	99,04	0,00
Jumlah		8.195.005.089,00	8.058.000.000,00	98,33	0,00

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun 2024 senilai Rp191.150.000,00 atau ekuivalen 99,95% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp191.250.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp827.650.000,00 atau turun 81,24% dari jumlah belanja modal aset tetap lainnya tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp1.018.800.000,00. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun 2024 merupakan belanja modal bahan perpustakaan yaitu belanja modal bahan perpustakaan tercetak yang terdiri dari

No	Uraian	Nilai
1	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Inpres 1 Fakfak, SD Inpres 2 Fakfak, SD Inpres Mandoni, SD Inpres Urat, SD Negeri Ubadari (DAK Fisik Reguler SD) Kab. Fakfak Tahun 2024	131.200.000,00
2	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SMP Negeri 1 Kokas, SMP Negeri 2 Kokas, SMP Negeri 3 Fakfak, SMP Negeri Girgir (DAK Fisik Reguler SMP) Kab. Fakfak Tahun 2024	59.950.000,00
Jumlah		191.150.000,00

6) Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi belanja modal aset lainnya Tahun 2023 senilai Rp2.526.779.439,00 atau ekuivalen 95,73% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.639.578.601,00. Realisasi belanja tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.426.804.439,00 atau naik 2.427,41% dari jumlah realisasi belanja tahun sebelumnya yang hanya Rp99.975.000,00. Belanja aset lainnya Tahun 2024 merupakan belanja modal aset tidak berwujud yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.771.078.601,00	1.686.439.439,00	95,22	0,00
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	868.500.000,00	840.340.000,00	96,76	0,00
3	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	99.975.000,00
Jumlah		2.639.578.601,00	2.526.779.439,00	95,73	99.975.000,00

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Total realisasi belanja tidak terduga sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp12.465.499.000,00 atau ekuivalen 99,64% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp12.510.101.045,00. Realisasi belanja tersebut mengalami penurunan senilai Rp1.604.866.920,00 atau turun 11,41% dari jumlah belanja tidak terduga tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp14.070.365.920,00. Realisasi belanja tidak terduga Tahun 2024 merupakan belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak yang seluruhnya direalisasikan untuk membiayai keperluan sebagai berikut:

- Keadaan darurat dan/atau keadaan siaga darurat;
- Keperluan mendesak;
- Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan
- bantuan sosial tidak direncanakan.

d Belanja Transfer – Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi belanja transfer sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp205.718.335.657,00 atau ekuivalen 101,39% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp202.904.759.031,00. Realisasi Belanja transfer Tahun 2024 merupakan transfer bantuan keuangan ke desa melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Alokasi Dana Kampung (APBN) (PMK NO. 108 TAHUN 2024)	118.628.305.000,00	122.120.775.000,00	102,94
2	Dana Perimbangan 10% Setelah dikurangi DAK untuk ADK (PERBUP NO. 12 TAHUN 2024)	83.115.125.638,00	82.440.955.274,00	99,19
3	Pajak 10% Untuk ADK (PERBUP NO. 13 TAHUN 2014)	817.598.637,00	817.175.040	99,95
4	Retribusi 10% Untuk ADK (PERBUP NO. 13 TAHUN 2014)	343.729.756,00	339.430.343	98,75
Jumlah		202.904.759.031,00	205.718.335.657,00	101,39

2. Belanja Menurut Klasifikasi Organisasi

Belanja berdasarkan klasifikasi organisasi untuk periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:



No	Unit Organisasi/SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)				%
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	366.247.446.616,00	294.233.729.175,00	50.276.630.105,00	0,00	0,00	94,06
2	Dinas Kesehatan	211.429.689.324,35	116.134.373.415,00	73.869.083.813,00	0,00	0,00	89,87
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	92.770.317.858,00	46.421.614.323,00	41.046.768.411,00	0,00	0,00	94,28
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	173.379.494.733,17	48.728.827.435,00	113.157.591.967,08	0,00	0,00	93,37
5	Satuan Polisi Pamong Praja	9.243.581.048,00	8.853.899.719,00	0,00	0,00	0,00	95,78
6	Dinas Sosial	10.726.932.416,00	10.165.400.378,00	79.780.000,00	0,00	0,00	95,51
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.508.025.590,00	6.650.623.288,00	597.063.500,00	0,00	0,00	96,53
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.593.637.657,00	15.392.907.938,00	28.632.148,00	0,00	0,00	98,90
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	7.863.482.728,00	7.619.944.698,00	0,00	0,00	0,00	96,90
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.278.991.996,00	5.956.761.694,00	82.141.070,00	0,00	0,00	96,18
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	15.547.416.639,00	9.078.959.891,00	249.666.254,00	0,00	0,00	60,00
12	Dinas Perhubungan	14.064.933.363,00	9.645.331.889,00	4.143.048.767,00	0,00	0,00	98,03
13	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	9.805.836.675,00	8.636.318.407,00	995.000.000,00	0,00	0,00	98,22
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.636.115.624,16	6.065.776.579,00	50.154.879,00	0,00	0,00	92,16
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.819.229.537,00	5.181.739.575,00	0,00	0,00	0,00	89,05
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.665.498.068,00	4.710.943.010,00	732.179.206,00	0,00	0,00	96,07
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	17.988.381.935,00	17.475.564.854,00	25.951.722,00	0,00	0,00	97,29
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12.798.888.933,00	11.959.635.783,00	66.039.218,00	0,00	0,00	93,96
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	24.369.131.301,00	23.177.812.089,00	0,00	0,00	0,00	95,11
20	Dinas Perkebunan	9.206.717.111,00	7.980.935.460,00	799.402.000,00	0,00	0,00	95,37
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.029.512.010,00	7.837.535.427,00	1.852.359.379,00	0,00	0,00	96,61
22	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5.543.085.732,00	5.101.826.412,00	0,00	0,00	0,00	92,04
23	Sekretariat Daerah	81.763.313.475,00	74.281.601.917,00	1.633.541.453,00	0,00	0,00	92,85
24	Sekretariat DPRD	55.729.632.539,32	43.401.104.040,00	779.334.885,00	0,00	0,00	79,28
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	17.550.780.603,00	15.266.926.466,00	398.379.939,00	0,00	0,00	89,26
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	243.991.792.737,00	25.625.796.624,00	1.240.902.134,00	12.465.499.000,00	205.718.335.657,00	100,43
27	Badan Pendapatan Daerah	7.579.573.820,00	7.328.746.145,00	154.079.978,00	0,00	0,00	98,72
28	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.277.547.761,00	14.270.799.532,00	173.104.400,00	0,00	0,00	94,54
29	Inspektorat	18.573.227.637,00	15.560.417.628,00	1.400.917.000,00	0,00	0,00	91,32



No	Unit Organisasi/SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)				%
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
30	Distrik Arguni	2.410.623.098,00	2.360.918.316,00	0,00	0,00	0,00	97,94
31	Distrik Pariwari	8.459.640.429,00	7.721.481.978,00	73.926.000,00	0,00	0,00	92,15
32	Distrik Fakfak	6.040.159.733,00	5.828.333.187,00	16.628.358,00	0,00	0,00	96,77
33	Distrik Wartutin	2.742.997.837,00	2.611.655.463,00	27.846.407,00	0,00	0,00	96,23
34	Distrik Mbahamdandara	2.290.280.556,00	2.150.661.550,00	0,00	0,00	0,00	93,90
35	Distrik Karas	3.542.276.131,00	3.485.887.732,00	0,00	0,00	0,00	98,41
36	Distrik Fakfak Barat	4.133.562.867,00	4.047.276.548,00	0,00	0,00	0,00	97,91
37	Distrik Kokas	4.993.105.189,00	4.732.577.962,00	0,00	0,00	0,00	94,78
38	Distrik Tomage	2.799.299.375,00	2.632.830.010,00	24.640.459,00	0,00	0,00	94,93
39	Distrik Fakfak Timur Tengah	3.026.688.485,00	2.898.766.575,00	0,00	0,00	0,00	95,77
40	Distrik Funwagi	2.798.903.351,00	2.524.289.204,00	87.468.000,00	0,00	0,00	93,31
41	Distrik Bomberay	2.580.732.237,00	2.468.515.024,00	0,00	0,00	0,00	95,65
42	Distrik Fakfak Timur	2.583.002.481,00	2.532.562.896,00	0,00	0,00	0,00	98,05
43	Distrik Kramongmongga	3.701.176.661,00	3.443.573.930,00	0,00	0,00	0,00	93,04
44	Distrik Kayauni	3.136.923.030,00	2.849.265.252,00	25.951.722,00	0,00	0,00	91,66
45	Distrik Fakfak Tengah	7.423.521.578,00	7.303.172.713,00	0,00	0,00	0,00	98,38
46	Distrik Teluk Patipi	4.018.956.039,00	3.934.090.664,00	0,00	0,00	0,00	97,89
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	52.331.183.302,00	51.711.555.728,00	110.132.340,00	0,00	0,00	99,03
Jumlah		1.597.995.247.846,00	987.983.268.523,00	294.198.345.514,08	12.465.499.000,00	205.718.335.657,00	93,89

3. Belanja Menurut Klasifikasi Fungsi

Belanja berdasarkan klasifikasi fungsi untuk periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

KODE	URAIAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
0		1.062.579.810.580,07	320.000.577.189,93	12.510.101.045,00	202.904.759.031,00
		987.983.268.523,00	294.198.345.514,08	12.465.499.000,00	205.718.335.657,00
0.1.01	PENDIDIKAN	308.956.911.029,00	50.480.167.963,00	0,00	0,00
		288.373.620.742,00	50.259.227.186,00	0,00	0,00
0.1.02	KESEHATAN	175.882.518.719,00	128.317.488.463,35	0,00	0,00
		162.555.987.738,00	114.915.852.224,00	0,00	0,00
0.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	40.595.684.294,02	120.588.461.853,39	0,00	0,00
		40.154.880.935,00	109.557.469.967,08	0,00	0,00
0.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	8.589.364.280,57	3.605.984.305,19	0,00	0,00
		8.573.946.500,00	3.600.122.000,00	0,00	0,00
0.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.371.650.882,00	0,00	0,00	0,00
		10.863.197.353,00	0,00	0,00	0,00
0.1.06	SOSIAL	15.348.970.297,00	757.917.875,00	0,00	0,00
		14.806.726.032,00	676.843.500,00	0,00	0,00
0.2.07	TENAGA KERJA	1.135.304.725,00	0,00	0,00	0,00
		843.798.295,00	0,00	0,00	0,00



0.2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.266.465.147,00	28.632.148,00	0,00	0,00
		7.139.677.721,00	28.632.148,00	0,00	0,00
0.2.09	PANGAN	5.090.132.984,00	0,00	0,00	0,00
		4.691.470.581,00	0,00	0,00	0,00
0.2.10	PERTANAHAN	1.201.455.965,00	0,00	0,00	0,00
		1.195.057.251,00	0,00	0,00	0,00
0.2.11	LINGKUNGAN HIDUP	6.662.026.763,00	0,00	0,00	0,00
		6.424.887.447,00	0,00	0,00	0,00
0.2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.191.262.651,00	87.729.345,00	0,00	0,00
		5.956.761.694,00	82.141.070,00	0,00	0,00
0.2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.274.946.652,00	272.469.987,00	0,00	0,00
		9.078.959.891,00	249.666.254,00	0,00	0,00
0.2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.298.540.362,00	0,00	0,00	0,00
		8.253.230.217,00	0,00	0,00	0,00
0.2.15	PERHUBUNGAN	9.806.883.153,00	4.258.050.210,00	0,00	0,00
		9.645.331.889,00	4.143.048.767,00	0,00	0,00
0.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	8.805.836.675,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
		8.636.318.407,00	995.000.000,00	0,00	0,00
0.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6.585.960.745,16	50.154.879,00	0,00	0,00
		6.065.776.579,00	50.154.879,00	0,00	0,00
0.2.18	PENANAMAN MODAL	5.819.229.537,00	0,00	0,00	0,00
		5.181.739.575,00	0,00	0,00	0,00
0.2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6.792.964.705,00	17.402.919,00	0,00	0,00
		5.860.108.433,00	17.402.919,00	0,00	0,00
0.2.23	PERPUSTAKAAN	689.348.993,00	733.639.092,00	0,00	0,00
		679.487.823,00	732.179.206,00	0,00	0,00
0.2.24	KEARSIPAN	4.242.509.983,00	0,00	0,00	0,00
		4.031.455.187,00	0,00	0,00	0,00
0.3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	17.962.430.213,00	25.951.722,00	0,00	0,00
		17.475.564.854,00	25.951.722,00	0,00	0,00
0.3.26	PARIWISATA	12.632.794.715,00	166.094.218,00	0,00	0,00
		11.959.635.783,00	66.039.218,00	0,00	0,00
0.3.27	PERTANIAN	27.683.434.669,00	802.280.759,00	0,00	0,00
		26.467.276.968,00	799.402.000,00	0,00	0,00
0.3.30	PERDAGANGAN	6.825.295.265,00	1.821.663.452,00	0,00	0,00
		6.569.506.411,00	1.816.819.379,00	0,00	0,00
0.3.31	PERINDUSTRIAN	1.319.053.293,00	63.500.000,00	0,00	0,00
		1.268.029.016,00	35.540.000,00	0,00	0,00
0.3.32	TRANSMIGRASI	4.407.781.007,00	0,00	0,00	0,00
		4.258.028.117,00	0,00	0,00	0,00
0.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	79.854.869.015,00	1.908.444.460,00	0,00	0,00
		74.281.601.917,00	1.633.541.453,00	0,00	0,00
0.4.02	SEKRETARIAT DPRD	54.940.709.136,32	788.923.403,00	0,00	0,00
		43.401.104.040,00	779.334.885,00	0,00	0,00
0.5.01	PERENCANAAN	16.441.788.704,00	441.068.479,00	0,00	0,00
		14.674.317.631,00	398.379.939,00	0,00	0,00
0.5.02	KEUANGAN	34.686.445.725,00	1.470.060.756,00	12.510.101.045,00	202.904.759.031,00
		32.954.542.769,00	1.394.982.112,00	12.465.499.000,00	205.718.335.657,00
0.5.03	KEPEGAWAIAN	14.968.271.137,00	309.276.624,00	0,00	0,00
		14.270.799.532,00	173.104.400,00	0,00	0,00
0.5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	667.923.420,00	0,00	0,00	0,00
		592.608.835,00	0,00	0,00	0,00

0.6.01	INSPEKTORAT KECAMATAN	17.120.334.508,00	1.452.893.129,00	0,00	0,00
		15.560.417.628,00	1.400.917.000,00	0,00	0,00
0.7.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	66.239.885.295,00	441.963.782,00	0,00	0,00
0.8.01		63.525.859.004,00	256.460.946,00	0,00	0,00
		52.220.825.936,00	110.357.366,00	0,00	0,00
		51.711.555.728,00	110.132.340,00	0,00	0,00

5.1.3. Surplus/(Defisit)

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Fakfak mengalami surplus senilai Rp31.156.816.223,42. Angka ini mengalami kenaikan senilai Rp44.645.475.915,78 atau naik sebesar 58,90% dari angka defisit tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp75.802.292.139,20. Surplus Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun 2024 dirincikan sebagai berikut:

A	Realisasi Pendapatan	1.531.522.264.917,50	
B	Realisasi Belanja	1.500.365.448.694,08	
C	Surplus / (Defisit)	31.156.816.223,42	C = A - B

5.1.4 Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	41.938.506.976,00	41.938.506.975,73	100,00
6.1.1	SiLPA Tahun Sebelumnya	41.938.506.976,00	41.938.506.975,73	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.325.000.000,00	2.325.000.000,00	100,00
6.2.2	Penyertaan modal pada BUMD	2.325.000.000,00	2.325.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETO		39.613.506.976,00	39.613.506.975,73	100,00

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2024 senilai Rp41.938.506.975,73 atau ekuivalen 100,00% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp41.938.506.976,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp76.802.292.139,20 atau turun 64,68% dari jumlah realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp118.740.799.114,93. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2024 bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Sumber Dana	SiLPA dari Tahun 2023 (Rp)
1	Dana OTSUS 1%	1.477.967.275,00
2	Dana OTSUS 1,25%	1.811.067.695,73
3	DBH Dalam Rangka Otsus	34.657.551.065,00
4	DAK Non Fisik	3.991.920.940
Jumlah		41.938.506.975,73

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp2.325.000.000,00 atau ekuivalen 100% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp2.325.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal pada Bank Papua. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp1.325.000.000,00 atau naik 132,5% dari jumlah realisasi pengeluaran pembiayaan daerah tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp1.000.000.000,00.

3. Pembiayaan Netto

Jika dibandingkan antara Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 senilai Rp41.938.506.975,73 dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 senilai Rp2.325.000.000,00, maka terdapat saldo Pembiayaan Netto Tahun 2024 senilai Rp39.613.506.975,73.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berkenaan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 senilai Rp70.770.323.199,15. Jumlah tersebut merupakan selisih antara realisasi pendapatan dengan belanja, dengan memperhitungkan pembiayaan netto selama satu tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

A	Realisasi Pendapatan	1.531.522.264.917,50	
B	Realisasi Belanja	1.500.365.448.694,08	
C	SURPLUS / (DEFISIT)	31.156.816.223,42	C = A - B
D	Penerimaan Pembiayaan	41.938.506.975,73	
E	Pengeluaran Pembiayaan	2.325.000.000,00	
F	Pembiayaan Netto	39.613.506.975,73	F = D - E
G	SILPA	70.770.323.199,15	G = C + F

Di antara SiLPA tersebut, terdapat SiLPA dari:

1. SiLPA Dana Otsus 1% (bersifat umum) senilai Rp2.172.714.633,00
2. SiLPA Dana Otsus 1,25% (ditentukan) senilai Rp2.739.134.944,00
3. SiLPA Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) senilai Rp318.385.460,00
5. SiLPA Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik senilai Rp10.520.864.739,00
6. SiLPA Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik senilai Rp5.526.949.819,00
7. SiLPA Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya senilai Rp11.731.500.526,00

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	41.938.506.975,73	118.605.565.491,93
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	41.938.506.975,73	118.740.799.114,93
3	Sub Total	0,00	(135.233.623,00)
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	70.770.323.199,15	41.938.506.975,73
5	Sub Total	70.770.323.199,15	41.803.273.352,73
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	135.233.623,00
7	Lain-lain	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	70.770.323.199,15	41.938.506.975,73

Penjelasan:

1. Saldo anggaran lebih awal tahun 2024 senilai Rp41.938.506.975,73.
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan senilai Rp41.938.506.975,73 merupakan penggunaan SILPA tahun anggaran 2023 yang digunakan seluruhnya untuk membiayai anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Fakfak di tahun anggaran 2024.
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2024 senilai Rp70.770.323.199,15 yang berasal dari Surplus/Defisit ditambah Pembiayaan Neto tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi (Rp)	Ket
1	Surplus/Defisit	31.156.816.223,42	
2	Pembiayaan Neto	39.613.506.975,73	
3	SILPA	70.770.323.199,15	3 = 1 + 2

5.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Fakfak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 secara umum sebagai berikut.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset	Rp2.709.868.834.671,11	Rp2.637.633.990.307,55
Kewajiban	Rp2.269.690.530,10	Rp191.282.066,00
Ekuitas	Rp2.707.599.144.141,01	Rp2.637.442.708.241,55

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (/Berkurang) (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	62.431.935.254,06	36.566.435.583,61	25.865.499.670,45
2	Kas di Bendahara Penerimaan	604.673.719,09	171.012.981,12	433.660.737,97
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.778.290.005,00	3.312.929.470,00	465.360.535,00
4	Kas di Bendahara FKTP	1.201.392.291,00	1.000.082.123,00	201.310.168,00
5	Kas di Bendahara BOSP	504.254.397,00	182.452.570,00	321.801.827,00
6	Kas di Bendahara BOK Puskesmas	2.249.774.533,00	643.797.037,00	1.605.977.496,00
7	Kas Lainnya	389.446.141,00	585.321.310,71	(195.875.169,71)
8	Piutang Pajak Daerah	11.734.448.149,52	10.909.115.418,10	825.332.731,42
9	Piutang Retribusi	593.802.000,00	593.802.000,00	0,00
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	269.896.097,00	0,00	269.896.097,00
11	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	6.273.247.751,00	(6.273.247.751,00)
12	Penyisihan Piutang	(10.463.612.774,93)	(9.754.230.578,01)	(709.382.196,92)
13	Piutang Lainnya	849.987.761,75	878.241.378,75	(28.253.617,00)
14	Persediaan	21.724.486.646,66	36.437.163.490,42	(14.712.676.843,76)
Jumlah		95.868.774.220,15	87.799.370.535,70	8.069.403.684,45

a. Kas di Kas Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp62.431.935.254,06	Rp36.566.435.583,61

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Kas di Kas Daerah senilai Rp62.431.935.254,06 merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang tersimpan di beberapa rekening Kas Daerah pada Bank Papua yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak, sebagai berikut:

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)		
			Rekening Koran	Pencatatan di SIPANDA	Selisih
1	RKUD KABUPATEN FAK FAK	6000106000078	8.944.985.051,46	8.947.590.456,46	(2.605.405,00)
2	KASDA DANA OTSUS 1% KABUPATEN FAKFAK	6000106000136	14.601.310.041,00	14.601.310.041,00	0,00
3	KASDA DANA OTSUS 1,25% KABUPATEN FAKFAK	6000106000140	11.474.829.691,60	11.474.829.691,60	0,00
4	KASDA DTI KABUPATEN FAKFAK	6000106000151	5.949.606.548,00	5.949.606.548,00	0,00
5	KASDA TAMBAHAN DBH DALAM RANGKA OTSUS KABUPATEN FAKFAK	6000106000162	21.458.598.517,00	21.458.598.517,00	0,00
Jumlah			62.429.329.849,06	62.431.935.254,06	(2.605.405,00)

Terdapat selisih senilai Rp2.605.405,00 pada Rekening Kas Umum Daerah

(RKUD) Kabupaten Fak Fak dikarenakan adanya SP2D yang pajaknya telah didebit senilai Rp2.605.405,00 atas SP2D Nomor: 07417/SP2D-LS/SILPA/PPKD/APBD/2023 (Pembayaran tagihan 100% penyelesaian pembangunan Masjid Tanjung Wagom Distrik Pariwari) tetapi pokoknya senilai Rp144.600.000,00 tidak terdebit sampai dengan 31 Desember 2023. SP2D tersebut telah dihapus dari Aplikasi Keuangan (FMIS) Tahun 2023 dan menjadi hutang belanja Pemerintah Daerah.

Rinciannya selisih Kas Daerah Kabupaten Fakfak bisa dilihat pada tabel berikut.

No	Nomor SP2D	Uraian	Nilai SP2D	Terdebit	Saldo Debit di RK	Keterangan	Status
1	07417/SP2D-LS/SILPA/PPKD/APBD/2023	Pembayaran tagihan 100% penyelesaian pembangunan Masjid Tanjung Wagom Distrik Pariwari	144.600.000,00	2.605.405,00	2.605.405,00	Hanya Potongan SP2D yang terdebit	Sampai dengan Laporan ini dibuat, tagihan tersebut belum dibayarkan kembali
Jumlah					2.605.405,00		

b. Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp604.673.719,09	Rp171.012.981,12

Kas di Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp604.673.719,09 yang merupakan saldo akhir pada rekening penerimaan yang belum disetor ke RKUD sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nomor Rekening	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Keterangan
1	RSUD	1600001254107	602.673.719,09	Saldo Bank
2	DPUPR2KP	-	2.000.000,00	Saldo Tunai
Jumlah			604.673.719,09	

- Kas di Bendahara Penerimaan RSUD sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp602.673.719,09 yang merupakan saldo penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah sampai akhir tahun anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Penerimaan Klaim JKN/BPJS	522.681.500,00
2	Saldo Penerimaan <i>Medical Checup</i>	62.473.667,00
3	Saldo Pendapatan Bunga	958.552,09
4	Saldo Penerimaan Lain-Lain	16.560.000,00
Jumlah		602.673.719,09

- Kas di Bendahara Penerimaan Dinas PUPR2KP sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp2.000.000,00 yang merupakan saldo penerimaan retribusi sewa gedung pemerintah yang belum disetor ke Kas Daerah sampai akhir tahun anggaran 2024.

Informasi mutasi rekening pada Kas di Bendahara Penerimaan RSUD bisa dilihat dalam lampiran 19; sedangkan untuk Bendahara Penerimaan DPUPR2KP tidak membuka rekening penerimaan karena setoran retribusi yang diterima hanya secara tunai.

Berikut adalah rincian penyetoran saldo Kas di Bendahara Penerimaan ke RKUD:

No	SKPD	Penerimaan		Setor ke RKUD		Ket
		Nilai	Tanggal	Nilai	Tanggal	
1	RSUD	16.560.000,00	2023	0,00	-	Penerimaan Lain-lain
2		24.884.000,00	20-12-2024	522.681.500,00	23-01-2025	Klaim JKN/BPJS Tahun 2024
3		90.215.000,00	20-12-2024			
4		336.940.100,00	20-12-2024			
5		396.000,00	23-12-2024			
6		70.246.400,00	23-12-2024			
7		28.132.667,00	21-12-2024	62.473.667,00	23-01-2025	Retribusi Medical Checkup
8		25.356.000,00	24-12-2024			
9		8.985.000,00	30-12-2024			
10			958.552,09	31-12-2024	958.552,09	23-01-2025
11	DPUPR2KP	2.000.000,00	15-10-2024	2.000.000,00	09-07-2025	Retribusi sewa gedung
Jumlah		604.673.719,09		588.113.719,09		

- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan RSUD sampai dengan 31 Desember 2024 Rp602.673.719,09, yang sudah disetor di Tahun 2025 Rp586.113.719,09, masih tersisa Rp16.560.000,00 yang sampai dengan Laporan ini disusun belum disetor ke RKUD karena belum diketahui mekanisme penyetorannya. Saldo ini merupakan transferan dari Kemenkes Tahun 2023 yang diperuntukkan untuk membayar biaya honorarium pendampingan Mahasiswa Akper Poltekes Kesehatan Kemenkes Sorong yang mengikuti kegiatan praktek belajar di RSUD Fakfak.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp3.778.290.005,00	Rp3.312.929.470,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening SKPD atas nama bendahara pengeluaran SKPD. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp3.778.290.005,00. Jumlah tersebut adalah saldo Kas di bendahara pengeluaran yang telah disetor ke Kas Daerah di Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Saldo (Rp)	Tanggal Setor	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	101.254.095,00	22-01-2025	101.254.095,00
2	Dinas Kesehatan	1.395.196.974,00	17-02-2025	1.200.000.000,00
3			26-02-2025	184.179.594,00
4			03-03-2025	11.017.380,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	452.727.666,00	10-01-2025	452.727.666,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	193.024.270,00	06-01-2025	193.024.270,00
7	Sekretariat Daerah	536.115.575,00	10-07-2025	536.115.575,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	973.405.239,00	15-04-2025	973.405.239,00
9	BADAN PENDAPATAN DAERAH	126.065.890,00	23-01-2025	126.065.890,00
10	Distrik Mbahamdandara	500.296,00	06-01-2025	58.000,00
11			06-01-2025	180.000,00
12			06-01-2025	366,00
13			06-01-2025	160.000,00
14			06-01-2025	19.000,00
15			21-02-2025	82.000,00
16			21-02-2025	930,00
Jumlah		3.778.290.005,00		3.778.290.005,00

Rincian perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada lampiran 1.

d. Kas di Bendahara FKTP	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp1.201.392.291,00	Rp1.000.082.123,00

Kas di Bendahara FKTP merupakan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menggunakan sistem kapitasi atau transfer langsung dana JKN dari Pemerintah Pusat ke 10 Rekening Puskesmas di Pemerintah Kabupaten Fakfak. Saldo kas di bendahara FKTP sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp1.201.392.291,00. Jika dibandingkan dengan saldo tahun

sebelumnya senilai Rp1.000.082.123,00, maka terjadi kenaikan senilai Rp201.310.168,00 atau naik sebesar 20,13% dengan rincian sebagai berikut:

No	FKTP	No. Rekening	Saldo 2024	Saldo 2023	Bertamba / (Berkurang)
1	Puskesmas Fakfak Kota	6000202266991	445.732.042,00	389.764.807,00	55.967.235,00
2	Puskesmas Fakfak Tengah	6000202167178	138.850.435,00	4.463.675,00	134.386.760,00
3	Puskesmas Sekban	6000201004523	342.366.176,00	278.605.960,00	63.760.216,00
4	Puskesmas Weri	6000202166927	617.233,00	221.666,00	395.567,00
5	Puskesmas Karas	6000202166915	15.061.362,00	16.784.265,00	(1.722.903,00)
6	Puskesmas Werba	6000202167026	17.436.418,00	107.466.964,00	(90.030.546,00)
7	Puskesmas Kramongmongga	6000202166939	44.850.922,00	33.398.680,00	11.452.242,00
8	Puskesmas Degen	6000202166941	36.931.401,00	5.532.574,00	31.398.827,00
9	Puskesmas Kokas	6000202166952	56.026.088,00	177.812,00	55.848.276,00
10	Puskesmas Bomberay	6000202167014	103.520.214,00	163.665.720,00	(60.145.506,00)
Jumlah			1.201.392.291,00	1.000.082.123,00	201.310.168,00

Rincian mutasi rekening pada kas di Bendahara FKTP bisa dilihat dalam lampiran 20.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
e. Kas di Bendahara BOSP	Rp504.254.397,00	Rp182.452.570,00

Kas di Bendahara BOSP merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan bagi Sekolah Negeri. Saldo Kas di Bendahara BOSP sampai 31 Desember 2024 senilai Rp504.254.397,00. Jika dibandingkan dengan saldo kas di Bendahara BOSP tahun sebelumnya senilai Rp182.452.570,00, maka mengalami kenaikan senilai Rp321.801.827,00 atau naik sebesar 176,38% dengan rincian sebagai berikut:

No	Satuan Pendidikan Negeri	Saldo 2024	Saldo 2023	Bertambah/ (Berkurang)
1	Pendidikan Kesetaraan Negeri	145.294,00	20.294,00	125.000,00
2	Pendidikan Anak Usia Dini Negeri	0,00	0,00	0,00
	Sekolah Dasar (SD) Negeri	298.959.439,00	98.379.707,00	200.579.732,00
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)/SLTP Negeri	17.965.215,00	84.052.569,00	(66.087.354,00)
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)/SLTA Negeri	187.184.449,00	0,00	187.184.449,00
Jumlah		504.254.397,00	182.452.570,00	321.801.827,00

Rekapan untuk saldo awal, pendapatan, delanja, dan saldo akhir Kas di Bendahara BOSP bisa dilihat dalam lampiran 2.

f. Kas di Bendahara BOK Puskesmas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp2.249.774.533,00	Rp643.797.037,00

Puskesmas merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan bagi Puskesmas yang ditransfer langsung ke 10 Rekening Puskesmas di Pemerintah Kabupaten Fakfak. Saldo kas Dana BOK Puskesmas sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp2.249.774.533,00. Jika dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara BOK Puskesmas tahun sebelumnya senilai Rp643.797.037,00, maka mengalami kenaikan senilai Rp1.605.977.496,00 atau naik sebesar 249,45% dengan rincian sebagai berikut:

No	PUSKESMAS	No. Rekening	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
1	Puskesmas Fakfak Kota	1590055061	377.131.863,00	17.700,00	377.114.163,00
2	Puskesmas Fakfak Tengah	1590055049	159.173.933,00	15.592.000,00	143.581.933,00
3	Puskesmas Sekban	1590055072	415.748.964,00	28.364.000,00	387.384.964,00
4	Puskesmas Weri	1590054986	101.324.666,00	76.188.007,00	25.136.659,00
5	Puskesmas Karas	1590055038	332.884.414,00	135.906.988,00	196.977.426,00
6	Puskesmas Werba	1590054997	218.863.560,00	63.950.202,00	154.913.358,00
7	Puskesmas Kramongmongga	1590055016	214.896.237,00	80.882.867,00	134.013.370,00
8	Puskesmas Degen	1590055005	223.787.348,00	219.517.699,00	4.269.649,00
9	Puskesmas Kokas	1590055027	37.033.911,00	16.822.000,00	20.211.911,00
10	Puskesmas Bomberay	1590055050	168.929.637,00	6.555.574,00	162.374.063,00
Jumlah			2.249.774.533,00	643.797.037,00	1.605.977.496,00

- Kas di Neraca senilai Rp70.768.353.968,15 dan SiLPA di LRA senilai Rp70.770.323.199,15, sehingga terdapat selisih senilai Rp94.331.597,15 yang merupakan selisih antara kas dan kompensasi piutang PFK atas kelebihan pembayaran iuran dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No	Akun	Saldo	Formula
1	Kas di Kas Daerah	62.431.935.254,06	
2	Kas di Bendahara Penerimaan	604.673.719,09	
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.778.290.005,00	
4	Kas di Bendahara FKTP	1.201.392.291,00	
5	Kas di Bendahara BOSP	504.254.397,00	
6	Kas di Bendahara BOK Puskesmas	2.249.774.533,00	
7	Utang PFK Berjalan	94.328.597,00	
8	Kas di Neraca	70.770.320.199,15	8 = 1 + 2 + ... + 7
9	SiLPA - LRA	70.770.323.199,15	
10	Selisih	94.331.597,15	10 = 8 - 9

Penjelasan selisih :

1. Rp3.000,00 merupakan Koreksi ekuitas atas pembayaran BPJS tahun sebelumnya.
2. Rp94.328.597,00 merupakan Koreksi kesalahan pembayaran iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan tidak sesuai dengan kode rekening.

g. Kas Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp389.446.141,00	Rp585.321.310,71

Saldo Kas Lainnya Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2024 senilai Rp389.446.141,00. Jika dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya tahun sebelumnya senilai Rp585.321.310,71, maka terjadi penurunan senilai Rp195.875.169,71 atau turun sebesar 33,46%. Rincian setoran Kas lainnya sebagai berikut:

No	SKPD	Keterangan	Nilai	Setoran		Sisa (Saldo per 31 Des 2024)
				Tgl Setor	Nilai	
1	Dinas Sosial	Saldo Rekening Bank BNI No. 2013166661* a.n. Dinas Sosial Kabupaten Fakfak yang dibuka sejak tanggal 16 Desember 2013 dan sampai dengan 31 Desember 2024 belum ditutup.	33.769,00	-	0,00	33.769,00
2	Satpol PP	Sisa pembayaran gaji pegawai tidak tetap di lingkungan Satpol PP TA 2023 yang belum sempat dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2023	23.573.297,00	-	23.573.297,00	0,00
3		Sisa pembayaran gaji pegawai tidak tetap di lingkungan Satpol PP TA 2024 yang belum sempat dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2024	21.660.000,00	-	0,00	21.660.000,00
4	Sekretariat Daerah	Sisa dana bansos yang tidak berhasil disalurkan kepada 21 orang	63.000.000,00	22-02-2024	63.000.000,00	0,00
5		Penyaluran Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat melewati Tahun Anggaran 2024	273.000.000,00	-	0,00	273.000.000,00
6	Badan Pengelolaan	Dana bansos yang tidak direncanakan yang	423.688.031,71	21-03-2024	423.500.000,00	0,00

7	Keuangan dan Aset Daerah	tidak berhasil disalurkan		18-07-2024	188.031,71	
8	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan Jasa giro yang masih ada di rekening yang belum di setor per 31 Desember 2023.	5.613,00	02-02-2024	5.613,00	0,00
9	Distrik Bomberay	Sisa pembayaran gaji pegawai tidak tetap di lingkungan Distrik Bomberay	600,00	13-07-2024	600,00	0,00
10	Kelurahan Danaweria	Kas di Rekening Prospek Otsus yang masih ada sejak tahun 2021 dan belum diakui pada laporan keuangan	20.000,00	12-07-2024	20.000,00	0,00
11	Kelurahan Fakfak Utara	Kas di Rekening Prospek Otsus yang masih ada sejak tahun 2021 dan belum diakui pada laporan keuangan	37.500.000,00	05-07-2024	37.500.000,00	0,00
12	Kelurahan Kokas	Kas di Rekening Prospek Otsus yang masih ada sejak tahun 2021 dan belum diakui pada laporan keuangan	37.500.000,00	05-07-2024	37.500.000,00	0,00
13	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Sisa dana pembayaran Tunjangan Guru ASND yang belum disalurkan senilai Rp94.752.372,00 pada Dinas Pendidikan (TP B.1)	94.752.372,00	-	0,00	94.752.372,00
Jumlah			974.733.682,71	-	585.287.541,71	389.446.141,00

- Untuk poin nomor 2 tidak disetorkan ke Kas Daerah namun dibayarkan kepada Pegawai Kontrak sebagai penerima hak.
- Untuk poin nomor 7 senilai Rp188.031,71 sesungguhnya merupakan sisa saldo pada rekening Bank Mandiri No. Rek 154-00-0115569-0 a.n. Pemda Kabupaten Fakfak yang dibuka sejak tanggal 03 Agustus 2021 dan sudah tercatat sebagai Kas lainnya pada LKPD *Audited* TA 2022. Rekening tersebut sudah tidak digunakan lagi namun sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 belum ditutup sehingga tercatat kembali sebagai Kas Lainnya pada LKPD *Audited* TA 2023 dan 2024.

Mutasi penambahan dan pengurangan Kas lainnya bisa dilihat dalam tabel berikut:

Dinas Sosial			
Saldo Awal			33.769,00
Penambahan	0,00		



Pengurangan		0,00	
Saldo Akhir			33.769,00
Satpol PP			
Saldo Awal			23.573.297,00
Penambahan sisa pembayaran gaji pegawai tidak tetap di lingkungan Satpol PP TA 2024 yang belum sempat dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2024	21.660.000,00		
Pengurangan sisa pembayaran gaji pegawai tidak tetap di lingkungan Satpol PP TA 2023 yang belum sempat dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2023		23.573.297,00	
Saldo Akhir			21.660.000,00
Sekretariat Daerah			
Saldo Awal			63.000.000,00
Penambahan penyaluran bantuan sosial pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat melewati Tahun Anggaran 2024	273.000.000,00		
Pengurangan sisa dana bansos yang tidak berhasil disalurkan kepada 21 orang		63.000.000,00	
Saldo Akhir			273.000.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
Saldo Awal			423.688.031,71
Penambahan	0,00		
Pengurangan setoran dana bansos yang tidak direncanakan yang tidak berhasil disalurkan		423.688.031,71	
Saldo Akhir			0,00
Badan Pendapatan Daerah			
Saldo Awal			5.613,00
Penambahan	0,00		
Pengurangan setoran pendapatan Jasa giro yang masih ada di rekening yang belum di setor per 31 Desember 2023.		5.613,00	
Saldo Akhir			0,00
Distrik Bomberay			
Saldo Awal			600,00
Penambahan	0,00		
Pengurangan setoran sisa pembayaran gaji pegawai tidak tetap di lingkungan Distrik Bomberay		600,00	
Saldo Akhir			0,00
Kelurahan Danaweria			
Saldo Awal			20.000,00
Penambahan	0,00		
Pengurangan Kas di Rekening Prospek Otsus yang masih ada sejak tahun 2021 dan belum diakui pada laporan keuangan		20.000,00	

Saldo Akhir			0,00
Kelurahan Fakfak Utara			
Saldo Awal			37.500.000,00
Penambahan	0,00		
Pengurangan Kas di Rekening Prospek Otsus yang masih ada sejak tahun 2021 dan belum diakui pada laporan keuangan		37.500.000,00	
Saldo Akhir			0,00
Kelurahan Kokas			
Saldo Awal			37.500.000,00
Penambahan	0,00		
Pengurangan Kas di Rekening Prospek Otsus yang masih ada sejak tahun 2021 dan belum diakui pada		37.500.000,00	
Saldo Akhir			0,00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			
Saldo Awal			0,00
Penambahan Sisa dana pembayaran Tunjangan Guru ASND yang belum disalurkan senilai Rp94.752.372,00 pada Dinas Pendidikan (TP B.1)	94.752.372,00		
Pengurangan		0,00	
Saldo Akhir			94.752.372,00
Total saldo akhir per 31 Des 2024			389.446.141,00

h. Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp11.734.448.149,52	Rp10.909.115.418,10

Piutang Pajak Daerah adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 diakui senilai Rp11.734.448.149,52 yang terdiri dari:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Bertambah / (berkurang)
1	Piutang Pajak Reklame	2.400.000,00	2.450.000,00	(50.000,00)
2	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	811.929.620,10	811.929.620,10	0,00
3	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.920.118.529,42	10.094.735.798,00	825.382.731,42
Jumlah		11.734.448.149,52	10.909.115.418,10	825.332.731,42

Rincian piutang pajak daerah tahun 2020 s.d 2024 bisa dilihat pada tabel berikut:

No	Objek	Piutang Pajak Tahun (n) di Tahun Berjalan					Jumlah
		s/d 2020	2021	2022	2023	2024	
1	Piutang Pajak Reklame	50.000,00	1.250.000,00	50.000,00	1.050.000,00	0,00	2.400.000,00
2	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	811.929.620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	811.929.620,10
3	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.640.803.518,28	779.343.731,12	848.696.604,88	762.795.751,30	888.478.923,84	10.920.118.529,42
Jumlah		8.452.783.138,38	780.593.731,12	848.746.604,88	763.845.751,30	888.478.923,84	11.734.448.149,52

- 1) Piutang pajak reklame sampai dengan Tahun 2024 senilai Rp2.400.000,00. jika dibandingkan dengan jumlah piutang pajak reklami sampai dengan Tahun 2023, maka berkurang senilai Rp50.000,00 karena adanya pelunasan piutang.
- 2) Piutang pajak mineral bukan logam dan batuan senilai Rp811.929.620,10 sudah termasuk ke dalam piutang macet sejak dikelurkannya Ketetapan Pajak oleh Dinas Pertambangan karena yang dikenakan sebagai objek pajak adalah pembeli, bukan penambang sehingga piutang pajak tersebut tidak tertagih. Sampai dengan laporan ini disusun belum diambil langkah untuk penghapusan.
- 3) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sampai dengan Tahun 2024 senilai Rp10.920.118.529,42, mengalami kenaikan senilai Rp825.382.731,42 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang hanya senilai Rp10.094.735.798,00 karena adanya piutang tahun berjalan.

i. Piutang Retribusi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp593.802.000,00	Rp593.802.000,00

Piutang Retribusi Daerah merupakan hak tagih atau klaim retribusi Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang timbul dari Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dibayar oleh pihak ketiga sampai dengan masa SKRD berakhir, diharapkan dapat dijadikan kas dalam masa satu periode akuntansi. Piutang Retribusi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31

Desember 2024 adalah senilai Rp593.802.000,00 yang merupakan piutang retribusi jasa umum, yaitu piutang retribusi pasar dari tahun 2019 ke bawah.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
j. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Rp269.896.097,00	Rp0,00

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp269.896.097,00 yang merupakan kurang saji atas saldo Piutang Lainnya yaitu kurang saji piutang penjualan tanah senilai Rp175.567.500,00 dan koreksi atas kesalahan pembayaran iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan tidak sesuai kode akun mengakibatkan kurang saji Piutang Lainnya atas kelebihan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan (1%) senilai Rp94.328.597,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
k. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Rp0,00	Rp6.273.247.751,00

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan piutang atas bagi hasil dari Provinsi Papua Barat yang belum disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan. pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Fakfak tidak memiliki Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.

Rincian pelunasan piutang transfer pemerintah daerah lainnya bisa dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Saldo Aawal	Transfer di Tahun 2024		Sisa Piutang
			Tgl	Nilai	
I	Triwulan II				
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	331.444.854,00	24-12-2024	331.444.854,00	0,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	243.564.806,00	24-12-2024	243.564.806,00	0,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.242.758.847,00	24-12-2024	2.242.758.847,00	0,00
II	Triwulan IV				
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	616.197.337,00	30-05-2024	616.197.337,00	0,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	307.850.610,00	30-05-2024	307.850.610,00	0,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.531.431.297,00	30-05-2024	2.531.431.297,00	0,00

No	Uraian	Saldo Aawal	Transfer di Tahun 2024		Sisa Piutang
			Tgl	Nilai	
	Jumlah	6.273.247.751,00	-	6.273.247.751,00	0,00

I. Penyisihan Piutang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp(10.463.612.774,93)	Rp(9.754.230.578,01)

Sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Fakfak Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, terhadap Piutang dilakukan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan umur piutang dan jenis piutang.

Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp2.725.666.515,34 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp11.734.448.149,52 dikurangi dengan penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp9.008.781.634,18.

Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp(10.463.612.774,93), yang terdiri dari:

No	Piutang		Penyisihan Piutang	
	Uraian	Nilai	Uraian	Nilai
1	Piutang Pendapatan	12.328.250.149,52	Penyisihan Piutang Pendapatan	(9.602.583.634,18)
2	Piutang Lainnya	861.029.140,75	Penyisihan Piutang Lainnya	(861.029.140,75)
	Jumlah	13.189.279.290,27		(10.463.612.774,93)

1) Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 senilai Rp(9.602.583.634,18) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(785.000,00)	(160.500,00)
2	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(811.929.620,10)	(811.929.620,10)
3	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	(8.196.067.014,08)	(7.478.245.666,66)
4	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	(593.802.000,00)	(593.802.000,00)
	Jumlah	(9.602.583.634,18)	(8.884.137.786,76)

Rincian perhitungan penyisihan piutang pendapatan dapat dilihat pada **Lampiran 3 dan 4**.

2) Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp(861.029.140,75) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(634.761.639,00)	(643.825.289,50)
2	Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka	(226.267.501,75)	(226.267.501,75)
Jumlah		(861.029.140,75)	(870.092.791,25)

a) Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran terdiri dari:

- i. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas senilai Rp(415.875.597,00);
- ii. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Dinas senilai Rp(218.886.042,00).

b) Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka terdiri dari:

- i. Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp(20.190.000,00);
- ii. Kelebihan Pembayaran SP2D senilai Rp(5.025.452,00);
- iii. Piutang Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan senilai Rp(201.052.049,75).

Rincian perhitungan penyisihan piutang lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

m. Piutang Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp849.987.761,75	Rp878.241.378,75

Saldo Piutang Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Fakfak sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp849.987.761,75. Jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu, maka mengalami penurunan senilai Rp28.253.617,00 karena adanya pelunasan.

Rincian Piutang Lainnya Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	620.844.618,00	651.973.877,00
2	Uang Muka	229.143.143,75	226.267.501,75
Jumlah		849.987.761,75	878.241.378,75

1) Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 senilai Rp620.844.618,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	401.579.322,00
2	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	219.265.296,00
Jumlah		620.844.618,00

2) Piutang Uang Muka

Piutang Uang Muka per 31 Desember 2024 senilai Rp229.143.143,75 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Uang muka pengadaan barang/jasa	20.190.000,00
2	Kelebihan pembayaran SP2D	5.025.452,00
3	Piutang pengembalian kekurangan volume pekerjaan	201.052.049,75
4	Piutang kelebihan setoran iuran pegawai pada PT. Taspen	2.875.642,00
Jumlah		229.143.143,75

a) Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa

Piutang uang muka merupakan permintaan uang muka kegiatan belanja barang/jasa dan ataupun belanja modal yang dicatat sebagai piutang dan akan disetor kembali melalui pemotongan nilai pada tagihan termin pertama dan seterusnya.

Piutang uang muka per 31 Desember 2021 senilai Rp20.190.000,00 berupa Tagihan uang muka pekerjaan pembangunan papan nama promosi dan informasi sumber daya kelautan di Distrik Fakfak dan Distrik Pariwari oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak dengan Nomor SP2D: 3295/SP2D-LS/OTSUS/PPKD/APBD/2018 tanggal 30 Oktober 2018, namun belum sempat disetor kembali karena tagihan termin pertama atas pekerjaan tersebut belum ditagih sampai dengan 31 Desember 2018.

b) Kelebihan Pembayaran SP2D

Kelebihan Pembayaran SP2D Non Anggaran untuk Penyetoran PFK senilai Rp5.025.452,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyesuaian nilai saldo PFK IWP Taspen yang kelebihan setor	2.820.800,00
2	Penyesuaian nilai saldo PFK Taperum yang kelebihan setor	60.000,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
3	Penyesuaian saldo PFK PPh Pasal 21 yang kelebihan setor	2.144.652,00
Total		5.025.452,00

c) Piutang Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan

Piutang Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan senilai Rp201.052.049,75 merupakan piutang kepada pihak ketiga atas temuan BPK terhadap kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan pekerjaan di tahun 2017, yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Saldo Awal Piutang (Rp)	Setoran s.d 31 Desember 2023 (Rp)	Setoran Tahun 2024 (Rp)	Sisa Piutang 31 Des 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	305.256.422,94	185.000.000,00	0,00	120.256.422,94
2	Dinas Kesehatan	31.612.721,82	16.501.161,00	0,00	15.111.560,82
3	Rumah Sakit Umum Daerah	33.646.828,71	5.000.000,00	0,00	28.646.828,71
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	139.405.564,39	102.368.326,62	0,00	37.037.237,77
Total		509.921.537,86	308.869.487,62	0,00	201.052.049,75

d) Piutang Kelebihan Setoran Iuran Pegawai pada PT. Taspem

Piutang kelebihan setoran iuran pegawai pada PT. Taspem senilai Rp2.875.642,00 merupakan kelebihan penyetoran iuran THT dan iuran pensiun pada pegawai yang telah meninggal dunia Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Pegawai Meninggal	Bulan	Iuran THT (Rp)	Iuran Pensiun (Rp)	Jumlah (Rp)
1	AMADIA WORETMA	September	155.337,53	227.031,47	382.369,00
2		Oktober	155.337,53	227.031,47	382.369,00
3		November	155.337,53	227.031,47	382.369,00
4		Desember	155.337,53	227.031,47	382.369,00
5	NATALIS GINUNI	September	0,00	0,00	0,00
6		Oktober	182.293,00	266.429,00	448.722,00
7		November	182.293,00	266.429,00	448.722,00
8		Desember	182.293,00	266.429,00	448.722,00
Total			1.168.229,12	1.707.412,88	2.875.642,00

Rincian piutang lainnya Tahun 2020 s.d 2024 bisa dilihat pada tabel berikut:

No	Objek	Piutang Pajak Tahun (n) di Tahun Berjalan					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rumah	415.875.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.875.597,00

No	Objek	Piutang Pajak Tahun (n) di Tahun Berjalan					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Dinas						
2	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Dinas	218.886.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.886.042,00
3	Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa	20.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.190.000,00
4	Kelebihan Pembayaran SP2D	5.025.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025.452,00
5	Piutang Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan	201.052.049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	201.052.049,75
6	Piutang kelebihan setoran iuran JKK dan JKM pada PT. Taspen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875.642,00	2.875.642,00
Jumlah		861.029.140,75	0,00	0,00	0,00	2.875.642,00	863.904.782,75

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas sesungguhnya terakumulasi dengan data piutang dari tahu 2019, sedangkan Piutang Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan tahun 2020 juga terakumulasi dengan data piutang dari tahun 2017.

n. Persediaan

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp21.724.486.646,66

Rp36.437.163.490,42

Persediaan adalah barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2024 senilai Rp21.724.486.646,66 yang terdiri dari:

No	Uraian	Saldo (Rp)
1	Bahan	1.202.252.938,00
2	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	7.355.178.243,00
3	Obat-obatan	12.887.366.027,66
4	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	279.689.438,00
Jumlah		21.724.486.646,66

Rincian Persediaan Kabupaten Fakfak sampai dengan 31 Desember 2024 per SKPD yaitu sebagai berikut:

No	SKPD	Bahan (Rp)	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor (Rp)	Obat-obatan (Rp)	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	848.712.174,00	5.029.243.454,00	3.935.640.346,00	0,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	976.544.825,00	7.594.387.519,66	0,00
3	Puskesmas Weri	13.254.690,00	34.982.473,00	38.361.038,00	0,00
4	Puskesmas Bomberay	654.500,00	109.391.273,00	78.230.074,00	0,00
5	Puskesmas Fakfak Kota	22.079.300,00	148.307.008,00	232.743.303,00	0,00
6	Puskesmas Fakfak Tengah	0,00	261.190.188,00	102.620.949,00	0,00
7	Puskesmas Werba	37.713.514,00	207.290.831,00	69.410.065,00	0,00
8	Puskesmas Sekban	0,00	78.875.385,00	130.020.346,00	0,00
9	Puskesmas Karas	0,00	43.350.985,00	83.862.745,00	0,00
10	Puskesmas Kokas	0,00	203.735.259,00	432.546.435,00	0,00
11	Puskesmas Kramongmongga	0,00	43.383.478,00	42.782.710,00	0,00
12	Puskesmas Degen	1.136.364,00	116.266.784,00	99.221.948,00	0,00
13	Dinas Perkebunan	278.702.396,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	101.681.300,00	0,00	0,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	935.000,00	0,00	279.689.438,00
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	47.538.549,00	0,00
Jumlah		1.202.252.938,00	7.355.178.243,00	12.887.366.027,66	279.689.438,00

Rincian Persediaan dapat dilihat pada Lampiran 6.

1) Bahan

Saldo bahan per 31 Desember 2024 senilai Rp1.202.252.938,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bahan Kimia	923.550.542,00
2	Bahan/Bibit Tanaman	278.702.396,00
Jumlah		1.202.252.938,00

2) Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

Saldo alat/bahan untuk kegiatan kantor per 31 Desember 2024 senilai Rp7.355.178.243,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bahan Cetak	102.616.300,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
2	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.252.561.943,00
Jumlah		7.355.178.243,00

3) Obat-obatan

Saldo obat-obatan per 31 Desember 2024 senilai Rp12.885.643.878,66 dengan rincian sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	3.935.640.346,00
2	RSUD	7.594.387.519,66
3	Puskesmas Weri	38.361.038,00
4	Puskesmas Bomberay	78.230.074,00
5	Puskesmas Fakfak Kota	232.743.303,00
6	Puskesmas Fakfak Tengah	102.620.949,00
7	Puskesmas Werba	69.410.065,00
8	Puskesmas Sekban	130.020.346,00
9	Puskesmas Karas	83.862.745,00
10	Puskesmas Kokas	432.546.435,00
11	Puskesmas Kramongmongga	42.782.710,00
12	Puskesmas Degen	99.221.948,00
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	47.538.549,00
Jumlah		12.887.366.027,66

4) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

Saldo persediaan untuk dijual/diserahkan per 31 Desember 2024 senilai Rp279.689.438,00 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa barang/peralatan industri yaitu:

No	Barang/Peralatan	Merek	Nilai (Rp)
1	Blender	Philips	17.998.650,00
2	Cup Sealer	Penyegel 02	16.198.200,00
3	Blender Chooper Bumbu	Michociba	2.510.598,00
4	Gelas	Porto	397.380,00
5	Kompur Hock 30 Sumbu	Hock	1.283.160,00
6	Panci Stainless 50 Cm	Stainless Steel	10.336.320,00
7	Prassmanan	-	305.250,00
8	Sendok Makan	Super Doll	599.400,00
9	Termos Nasi 30 Liter	Maspion	902.874,00
10	Wajan Pengorengan Alumunium 60 Cm	Lokal	1.286.490,00
11	Meja Jualan	Goto Flipper	30.479.400,00
12	Payung Jualan	Winpu	30.479.400,00
13	Oven Listrik	Kirin	37.692.270,00
14	Stand Mixer	Samono	52.508.106,00
15	Aquarium Es Buah	Lokal	12.567.420,00
16	Coolbox	Tanaga	34.445.520,00
17	Pengadaan Spiner Meja	Lokal	3.653.000,00

No	Barang/Peralatan	Merek	Nilai (Rp)
18	Kompore Hook	Hock	7.146.000,00
19	Loyang Kue	Lokal	5.715.000,00
20	Oven Hook	Hock	13.185.000,00
Jumlah			279.689.438,00

Nilai akhir yang diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik akhir tahun di SKPD.

2. Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp76.218.880.918,35	Rp73.893.880.918,35

Nilai investasi jangka panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Fakfak per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp76.218.880.918,35. Jumlah tersebut merupakan nilai investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal pada BUMD dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Pengurangan) (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% tase Kepemilikan
1	PT Bank Papua	58.425.000.000,00	2.325.000.000,00	60.750.000.000,00	2,14%
2	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala	15.468.880.918,35	0,00	15.468.880.918,35	100%
Jumlah		73.893.880.918,35	2.325.000.000,00	76.218.880.918,35	-

Saldo investasi jangka panjang mengalami penambahan di Tahun 2024 senilai Rp2.325.000.000,00 jika dibandingkan dengan saldo investasi jangka panjang di Tahun 2023, yang terdiri dari:

- Penambahan senilai Rp2.325.000.000,00 dimaksudkan untuk tambahan penyertaan modal pada Bank Papua sesuai SP2D Nomor: 01918/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024 tanggal 22 Juli 2024. Diharapkan penambahan tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya pendapatan deviden dari Bank Papua. Jumlah penambahan modal pada Bank Papua naik dari yang sebelumnya senilai Rp58.425.000.000,00 menjadi senilai Rp60.750.000.000,00.
- Untuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala, tidak terdapat perubahan nilai investasi pada Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Fakfak menyajikan saldo senilai Rp15.468.880.918,35 yang merupakan saldo awal un-audited Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala TA 2023. Saldo awal un-audited tersebut sama dengan saldo akhir LK Audited PDAM TA 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Yaniswar dan Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material. Sampai dengan laporan ini dibuat,

perusahaan tersebut belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 dan 2024 kepada pemerintah daerah.

Pencatatan Investasi Pemerintah Daerah pada Bank Papua Cabang Fakfak menggunakan metode biaya sedangkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala menggunakan metode ekuitas.

3. Aset Tetap	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp2.459.687.433.744,58	Rp2.372.512.567.153,18

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2024 senilai Rp2.459.687.433.744,58 atau mengalami kenaikan senilai Rp87.174.866.591,40 atau naik sebesar 3,67% jika dibandingkan dengan nilai aset tetap per 31 Desember 2023 yang hanya senilai Rp2.372.512.567.153,18 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan/ (Pengurangan) (Rp)
1	Tanah	702.194.077.238,00	699.290.123.638,00	2.903.953.600,00
2	Peralatan dan Mesin	629.885.186.803,63	564.668.370.936,32	65.216.815.867,31
3	Gedung dan Bangunan	1.157.654.325.016,17	1.082.321.594.688,91	75.332.730.327,26
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.306.940.630.557,00	2.233.195.659.570,68	73.744.970.986,32
5	Aset Tetap Lainnya	19.821.099.145,06	18.724.781.742,06	1.096.317.403,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	163.760.916.616,93	96.583.389.795,33	67.177.526.821,60
7	Akumulasi Penyusutan	(2.520.568.801.632,21)	(2.322.271.353.218,12)	(198.297.448.414,09)
Jumlah		2.459.687.433.744,58	2.372.512.567.153,18	87.174.866.591,40

a. Tanah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp702.194.077.238,00	Rp699.290.123.638,00

Nilai Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2024 senilai Rp702.194.077.238,00, terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tanah Persil	360.110.039.804,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
2	Tanah Non Persil	41.591.462.960,00
3	Lapangan	300.492.574.474,00
Jumlah		702.194.077.238,00

Pada aset Tanah Pemerintah Kabupaten Fakfak terdapat beberapa yang belum bersertifikat. Aset tanah yang bersertifikat senilai Rp117.218.946,80 dan yang belum bersertifikat senilai Rp702.076.858.291,20. Untuk rincian dokumen kepemilikan tanah bisa dilihat pada lampiran 21.

Saldo Aset Tanah per 31 Desember 2023		699.290.123.638,00
Belanja modal aset tanah tahun 2024	1.975.092.600,00	
Penambahan Aset Tanah dari Reklasifikasi	928.861.000,00	
Penambahan Aset Tanah dari Hibah	0,00	
Pengurangan Aset Tanah karena Bukan Aset Tetap/ Persediaan		0,00
Saldo akhir aset tanah per 31 Desember 2024		702.194.077.238,00

Penjelasan atas mutasi aset tanah Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Penambahan aset tanah yang berasal dari belanja modal senilai Rp1.975.092.600,00,- merupakan belanja modal tanah dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	05428/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	Permintaan Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah pada Lokasi SD Negeri Wurkendik Distrik Fakfak Barat Kab. Fakfak Tahun 2024	105.000.000,00
2	05502/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	Permintaan Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah pada Lokasi Sekolah Luar Biasa (SLB) Kampung Tanama Distrik Pariwari Kab. Fakfak Tahun 2024 An. Yaprizal Weripih	154.056.000,00
3	05503/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	Permintaan Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah pada Lokasi Sekolah Luar Biasa (SLB) Kampung Tanama Distrik Pariwari Kab. Fakfak Tahun 2024 An. Abdul Salam Weripih	154.056.000,00
4	06264/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	Permintaan Pembayaran Biaya Pembebasan Lahan pada Lokasi Sekolah SMA Negeri Kampung Mbham Ma Youn Distrik Kramongmongga Kab. Fakfak Tahun 2024	499.996.000,00
5	06266/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	Permintaan Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah pada Lokasi SMA Negeri 3 Kampung Tanama Distrik Pariwari Kab. Fakfak Tahun 2024 A.n.	124.998.000,00

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
		Abubakar Rengen	
6	06267/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	Permintaan Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah pada Lokasi SMA Negeri 3 Kampung Tanama Distrik Pariwari Kab. Fakfak Tahun 2024	124.998.000,00
7	06268/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	Permintaan Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah pada Lokasi SMA Negeri 3 Kampung Tanama Distrik Pariwari Kab. Fakfak Tahun 2024, A.n. Hamid Rengen	124.998.000,00
8	06275/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	Permintaan Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah pada Lokasi SMA Negeri 3 Kampung Tanama Distrik Pariwari Kab. Fakfak Tahun 2024, A.n. Ahmad Weripih	124.998.000,00
9	06737/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	Permintaan Pembayaran Biaya Pembebasan Lahan pada Lokasi Sekolah SMA Negeri Kampung Bisa Distrik Teluk Patipi Kab. Fakfak Tahun 2024	200.000.000,00
10	05078/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	Permintaan Pembayaran Biaya Pembebasan Lahan pada Lokasi Sekolah SD Negeri Pattukar Kampung Pattukar Distrik Kayuni Kab. Fakfak Tahun 2024	42.000.000,00
11	06269/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	Permintaan Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah pada Lokasi SMA Negeri Kampung Pirma Distrik Fakfak Tengah Kab. Fakfak Tahun 2024	229.992.000,00
12	00023/KOREKSI BELANJA/DIKPORA/XII/2024	Koreksi Belanja Dari Sub Kegiatan 2.2.01.3, Aktivitas 2.2.01.3.3, Rek 5.2.3.01.01.0010 Ke Sub Kegiatan 2.2.01.6, Aktivitas 2.2.01.6.1, Rek 5.2.1.01.01.0007	90.000.600,00
Jumlah			1.975.092.600,00

- 2) Penambahan Aset Tanah dari reklasifikasi senilai Rp928.861.000,00 merupakan penambahan aset tanah yang direklasifikasi dari belanja aset tetap yang lain di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan SP2D Nomor: 05443/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024, yaitu pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan pematangan lahan Asrama Mahasiswa Fakfak di Sorong (DAU-DBH) Kab. Fakfak Tahun 2024 an. CV. Tanjung Ginuni Indah.

b. Peralatan Dan Mesin	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp629.885.186.803,63	Rp564.668.370.936,32

Nilai Aset Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Fakfak per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp629.885.186.803,63 mengalami kenaikan senilai Rp65.216.815.867,31 atau naik sebesar 11,55% dibandingkan dengan nilai

aset peralatan dan mesin tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp564.668.370.936,32 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Alat Besar Darat	15.353.587.850,00
2	Alat Besar Apung	168.000.000,00
3	Alat Bantu	6.620.188.664,00
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	135.188.555.336,96
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	225.211.700,00
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	27.896.217.528,32
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	314.104.000,00
8	Alat Angkutan Bermotor Udara	303.668.580,00
9	Alat Bengkel Bermesin	3.508.008.873,00
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	429.432.054,00
11	Alat Ukur	2.089.917.769,84
12	Alat Pengolahan	10.450.750.929,51
13	Alat Kantor	32.994.453.253,67
14	Alat Rumah Tangga	86.303.892.073,03
15	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.685.168.977,65
16	Alat Studio	18.546.412.607,65
17	Alat Komunikasi	2.635.863.437,00
18	Peralatan Pemancar	27.422.289.159,00
19	Peralatan Komunikasi Navigasi	3.029.700,00
20	Alat Kedokteran	94.434.050.007,70
21	Alat Kesehatan Umum	13.195.449.766,60
22	Unit Alat Laboratorium	37.839.504.175,98
23	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	345.612.115,00
24	Alat Peraga Praktek Sekolah	4.065.300.242,70
25	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	3.540.013.558,00
26	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	110.830.000,00
27	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.146.777.243,00
28	Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	417.660.239,00
29	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	297.020.000,00
30	Senjata Api	9.092.750,00
31	Persenjataan Non Senjata Api	69.826.500,00
32	Alat Khusus Kepolisian	670.165.843,00
33	Komputer Unit	51.828.538.216,13
34	Peralatan Komputer	20.968.393.281,89
35	Alat Eksplorasi Geofisika	33.633.000,00
36	Sumur	1.792.495.399,00
37	Alat Pelindung	10.800.200,00
38	Alat Sar	1.597.808.718,00
39	Alat Kerja Penerbangan	843.363.235,00
40	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	910.358.600,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
41	Unit Peralatan Proses/Produksi	1.566.347.000,00
42	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	19.254.655.059,00
43	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	712.900.000,00
44	Peralatan Olah Raga	1.085.839.160,00
Jumlah		629.885.186.803,63

Ringkasan mutasi aset peralatan dan mesin selama Tahun 2024 sebagai berikut:

Saldo Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023		564.668.370.936,32
Belanja modal aset peralatan dan mesin tahun 2024	68.443.652.994,00	
Penambahan aset peralatan dan mesin yang direklasifikasi dari aset tetap yang lain	2.379.419.464,00	
Panambahan aset peralatan dan mesin yang direklasifikasi dari barjas	1.101.120.466,00	
Panambahan aset peralatan dan mesin dari hibah	926.058.000,00	
Pengurangan aset peralatan dan mesin yang direklasifikasi ke aset tetap yang lain		3.951.817.403,00
Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin yang direklasifikasi ke barjas		335.389.106,00
Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin yang dihibahkan		1.000.835.219,00
Buku Ekstra Kompatable		462.944.830,00
Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin Karena Bukan Aset tetap/Persediaan		1.520.590.620,00
Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin yang direklasifikasi ke Aset Lain-Lain		361.857.878,69
Saldo akhir aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2024		629.885.186.803,63

Penjelasan atas mutasi aset peralatan dan mesin Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Penambahan aset pelatan dan mesin yang berasal dari belanja modal Tahun 2024 senilai Rp68.443.652.994,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	779.334.885,00
2	Sekretariat Daerah	1.292.310.000,00
3	Distrik Fakfak	16.628.358,00
4	Distrik Kayauni	25.951.722,00
5	Distrik Pariwari	73.926.000,00
6	Distrik Wartutin	27.846.407,00
7	Distrik Furwagi	87.468.000,00
8	Distrik Tomage	24.640.459,00
9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	371.163.100,00

No	SKPD	Nilai (Rp)
10	Dinas Perhubungan	2.842.429.309,00
11	RSUD Type D	23.577.676.130,00
12	Dinas Kesehatan	19.056.857.885,00
12.1	Dinas Kesehatan (JKN)	482.464.491,00
13	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	9.813.214.271,00
13.1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dana BOS)	5.577.682.639
14	Dinas Sosial	14.780.000,00
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	597.063.500,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82.141.070,00
17	DP3AP2KB	28.632.148,00
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	249.666.254,00
19	Dinas Perkebunan	145.790.000,00
20	Dinas Perikanan dan Kelautan	25.951.722,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	159.729.000,00
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	50.154.879,00
23	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	860.727.134,00
24	Inspektorat	440.337.000,00
25	BP4D	199.698.819,00
26	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12.594.218,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	110.132.340,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	173.104.400,00
29	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	94.476.876,00
30	Dinas Komunikasi dan Informasika, Statistika dan Persanidan	995.000.000,00
31	Badan Pendapatan Daerah	154.079.978,00
Jumlah		68.443.652.994,00

- 2) Penambahan aset peralatan dan mesin yang direklasifikasi dari aset tetap yang lain senilai Rp2.379.419.464,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	819.000.000,00
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	259.800.006,00
3	Dinas Perhubungan	1.300.619.458,00
Jumlah		2.379.419.464,00

- a) Dinas Kesehatan

Pengakuan aset peralatan dan mesin yang direklasifikasi dari KIB D senilai Rp819.000.000,00 merupakan Peralatan Instalasi Pembuangan

Air Limbah (IPAL) Puskesmas Mbahamdandara dengan nomor SP2D: 06458/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024.

b) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pengakuan aset peralatan dan mesin yang direklasifikasi dari KIB C senilai Rp259.800.006,00 merupakan Pengadaan Meubelair pada SD Inpres Kayu Merah Kab. Fakfak Tahun 2024 dengan nomor SP2D: 06467/SP2D-LSDDBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024.

c) Dinas Perhubungan

Pengakuan aset peralatan dan mesin yang direklasifikasi dari aset tetap yang lain senilai Rp1.300.619.458,00 terdiri dari:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	03304/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PERENCANAAN BELANJA	9.109.986,00
2	03305/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PERENCANAAN BELANJA MODAL PAGAR PENGAMAN (KAMPUNG WARTUTIN I)	9.102.000,00
3	03306/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PERENCANAAN BELANJA MODAL PAGAR PENGAMAN JALAN (KAMPUNG WARTUTIN II)	9.109.986,00
4	03307/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PERENCANAAN BELANJA MODAL PAGAR PENGAMAN JALAN (KAMPUNG WARTUTIN III)	9.109.986,00
5	03418/SP2D-LS/DTI-OTSUS/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN UANG MUKA 50% ATAS PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAGAR PENGAMAN JALAN DISTRIK WARTUTIN (WARTUTIN I)	151.950.000,00
6	03419/SP2D-LS/DTI-OTSUS/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN UANG MUKA 50% ATAS PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAGAR PENGAMAN JALAN DISTRIK WARTUTIN (WARTUTIN II)	151.950.000,00
7	03498/SP2D-LS/DTI-OTSUS/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN UANG MUKA 50% ATAS PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAGAR PENGAMAN JALAN DISTRIK WARTUTIN (WARTUTIN III)	151.979.500,00
8	03504/SP2D-LS/DTI-OTSUS/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN UANG MUKA 50% ATAS PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAGAR PENGAMAN JALAN DISTRIK WARTUTIN (WERABUAN)	151.908.750,00
9	05085/SP2D-LS/DIT-OTSUS/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAGAR PENGAMAN JALAN DISTRIK WARTUTIN (WERABUAN)	151.908.750,00
10	05866/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAGAR PENGAMAN JALAN DISTRIK WARTUTIN (WARTUTIN III)	151.979.500,00
11	05973/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PENGAWASAN BELANJA MODAL KEGIATAN PAGAR	12.147.500,00

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
		PENGAMAN JALAN DISTRIK WARTUTIN (KAMPUNG WERABUJAN)	
12	05977/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PENGAWASAN BELANJA MODAL KEGIATAN PAGAR PENGAMAN JALAN (DISTRIK WARTUTIN I)	12.154.500,00
13	05978/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PENGAWASAN BELANJA MODAL KEGIATAN PAGAR PENGAMAN JALAN (DISTRIK WARTUTIN II)	12.154.500,00
14	05984/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAGAR PENGAMAN JALAN DISTRIK WARTUTIN (WARTUTIN I)	151.950.000,00
15	06090/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAGAR PENGAMAN JALAN DISTRIK WARTUTIN (WARTUTIN II)	151.950.000,00
16	06101/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PENGAWASAN BELANJA MODAL KEGIATAN PAGAR PENGAMAN JALAN (DISTRIK WARTUTIN III)	12.154.500,00
Jumlah			1.300.619.458,00

- 3) Panambahan aset peralatan dan mesin yang direklasifikasi dari barang dan jasa senilai Rp1.101.120.466,00 terdiri dari:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	102.373.966,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	998.746.500,00
Jumlah		1.101.120.466,00

- a) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Panambahan aset peralatan dan mesin yang direklasifikasi dari barang dan jasa pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp102.373.966,00 berupa pengadaan kursi kantor dengan nomor SP2D: 01466/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024.

- b) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Panambahan aset peralatan dan mesin yang direklasifikasi dari barang dan jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian senilai Rp998.746.500,00 yang terdiri dari:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	05544/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN BELANJA 100% PENGADAAN VIDEOTRON INDOOR LED PADA GEDUNG KANTOR PADA DINAS KOMINFO	778.800.000,00
2	05543/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN BELANJA 100% PENGADAAN DAN INSTALASI PERANGKAT MULTIMEDIA DAN AUDIO VIDEOTRON INDOOR PADA GEDUNG KANTOR PADA DINAS KOMINFO	219.946.500,00
Jumlah			998.746.500,00

- 4) Penambahan aset peralatan dan mesin dari hibah senilai Rp926.058.000,00, yaitu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mendapatkan hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 684/587/BASTH/MOBIL-TANGKI-AIR/BPBD-PB/2024 DAN 648/588/BASTH/PP-PK/BPBD-PB/2024 berupa:

No	Nama Barang	Volume	Nilai (Rp)
1	Truk Tangki Air	2	797.500.000,00
2	Handsprayer Mesin Pompa air Otomatis	10	40.189.000,00
3	Mesin Pom Air Sawah Alkom	4	18.401.000,00
4	Profil Tank Ukuran 1.100 Liter	10	31.468.000,00
5	Selang 100 Meter	1	38.500.000,00
Jumlah			926.058.000,00

- 5) Pengurangan aset peralatan dan mesin yang direklasifikasi ke aset tetap yang lain Tahun 2024 senilai Rp3.951.817.403,00 yaitu pada:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	3.046.650.000,00
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	905.167.403,00
Jumlah		3.951.817.403,00

a) Dinas Kesehatan

Pengurangan aset peralatan dan mesin yang dieklasifikasi ke aset tetap yang lain Tahun 2024 senilai Rp3.046.650.000,00 yaitu belanja solar cell pada 3 puskesmas (Wartutin, Mbahamdandara, Arguni) dimana barang sudah ada di gudang farmasi tapi belum dipasang dan diuji fungsi sehingga direklasifikasi menjadi KDP dengan rincian sebagai berikut:

No	No. SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	04062/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	Pembayaran tagihan 50% pekerjaan belanja solar cell 3 puskesmas (Wartutin, Mbahamdandara, Arguni) (DAK Fisik)	1.603.500.000,00
2	06454/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	Pembayaran tagihan 95% pekerjaan belanja solar cell 3 puskesmas (Wartutin, Mbahamdandara, Arguni) (DAK FISIK).	1.443.150.000,00
Jumlah			3.046.650.000,00

b) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pengurangan aset peralatan dan mesin yang direklasifikasi ke aset tetap yang lain Tahun 2024 senilai Rp905.167.403,00 yaitu:

- i. Pengurangan aset peralatan dan mesin yang direklasifikasi ke KIB E dari belanja dana BOS oleh Satuan Pendidikan senilai Rp867.767.403,00.
 - ii. Pengurangan aset peralatan dan mesin yang direklasifikasi ke KIB E dari belanja DAK Fisik senilai Rp37.400.000,00 berupa pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan alat pembelajaran TK dengan Nomor SP2D: 06598/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024.
- 6) Pengurangan aset peralatan dan mesin yang direklasifikasi ke barang dan jasa Tahun 2024 senilai Rp335.389.106,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yaitu:
- a) Pengurangan aset peralatan dan mesin yang direklasifikasi ke barang dan jasa dari belanja dana BOS oleh Satuan Pendidikan senilai Rp10.106.688,00.
 - b) Pengurangan aset peralatan dan mesin yang direklasifikasi ke barang dan jasa melalui Dinas Pendidikan senilai Rp325.282.418,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	No. SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	05278/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	Permintaan pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan pengadaan profile tank 2200 liter untuk sekolah (SDA-DBH-Otsus) Kab. Fakfak Tahun 2024 an. CV. Kombimur	189.921.000,00
2	06594/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Permintaan pembayaran belanja modal peralatan personal komputer (monitor led TV) pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Fakfak Tahun 2024	18.481.500,00
3	03134/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Permintaan pembayaran belanja modal personal komputer (PC) - belanja modal pengadaan alat penunjang ANBK tingkat sekolah menengah Tahun 2024	67.599.000,00
4	03166/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Permintaan pembayaran belanja modal personal komputer (laptop) - belanja modal pengadaan alat penunjang ANBK tingkat sekolah menengah tahun 2024	49.280.918,00
Jumlah			325.282.418,00

Pengurangan aset peralatan dan mesin yang direklasifikasi ke barang dan jasa melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. Item tersebut diberikan kepada sekolah swasta oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dengan rincian sebagai berikut:

- SMA YPPK St. Don Bosco Fakfak 1 Buah, SMK Yapis Fakfak 1

Buah, SMA YPK Fakfak 1 Buah, SMP YPK Imanuel Fakfak Distrik Fakfak 1 Buah, SMP YPPK St. Donbosco Distrik Fakfak 1 Buah, SMP Islam Terpadu (IT) Distrik Pariwari 1 Buah, MTs Nurul Falah Distrik Bomberay 1 Buah, SMP Yapis 2 Fakfak Distrik Fakfak Tengah 1 Buah, SD YPK Danaweria Distrik FakfakTengah 1 Buah, SD Yapis Merapi Distrik FakfakTengah 1 Buah, SD YPPK St. Yusuf Sorpeha Distrik FakfakTengah 1 Buah, SD YPPK T.Maha Kudus Distrik FakfakTengah 1 Buah, SD Yapis Fakfak Distrik Fakfak 1 Buah, SD YPPK Torea Fakfak Distrik Pariwari 1 Buah, SD YPPK Fatima Distrik Fakfak 1 Buah, SD YPPK St. Paulus Piahar Distrik Pariwari 1 Buah, SD YPPK Torea Fakfak Distrik Pariwari 1 Buah, SD YPK Kapaurtutin Distrik Pariwari 1 Buah, SD IT As-salaam Fakfak Distrik Pariwari 1 Buah,

- SMP YPK Imanuel Fakfak Distrik Fakfak - Personal Komputer / Monitor LED TV (Alat Penunjang ANBK), SMA YPK Fakfak Distrik Pariwari - Personal Komputer / Monitor LED TV (Alat Penunjang ANBK),
- SMA YPK Fakfak Distrik Pariwari - Personal Komputer / PC (Alat Penunjang ANBK), SMA YPPK Santo Donbosco Fakfak Distrik Fakfak - Personal Komputer / PC (Alat Penunjang ANBK), SMP YPK Imanuel Fakfak Distrik Fakfak - Personal Komputer / PC (Alat Penunjang ANBK), SMP Negeri Weri Distrik Fakfak Timur - Personal Komputer / PC (Alat Penunjang ANBK), SMP YPPK St. Donbosco Distrik Fakfak - Personal Komputer / PC (Alat Penunjang ANBK),
- SMP YPPK St. Donbosco Distrik Fakfak - Laptop (Alat Penunjang ANBK)

7) Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin yang dihibahkan Tahun 2024 senilai Rp1.000.835.219,00, yaitu dari beberapa SKPD berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Daerah	19.800.000,00
2	Distrik Pariwari	73.926.000,00
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	800.038.125,00
4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	94.476.876,00
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12.594.218,00

No	SKPD	Nilai (Rp)
Jumlah		1.000.835.219,00

a) Sekretariat Daerah

Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin yang dihibahkan Tahun 2024 dari Sekretariat Daerah senilai Rp19.800.000,00 berupa alat dapur (dispenser) senilai Rp7.500.000,00 dan Mebel (kursi sofa tamu) senilai Rp12.300.000,00.

b) Distrik Pariwari

Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin yang dihibahkan Tahun 2024 Distrik Pariwari senilai Rp73.926.000,00 berupa mesin babat/potong rumput dari Kelurahan Wagom.

c) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin yang dihibahkan Tahun 2024 oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp800.038.125,00 berupa Meubelair yang diserahkan ke beberapa sekolah swasta antara lain:

No	Satuan Pendidikan	Uraian	Nilai (Rp)
1	SD YPK EFRAT KWUHKANDA	Pengadaan Meubelair	121.977.900,00
2	SMP YAPIS 2 FAKFAK	Pengadaan Meubelair	88.730.625,00
3	TK ISLAM BAITUL MAKMUR	Pengadaan Meubelair	70.662.600,00
4	TK TUNAS PAKAR TANAMA	Pengadaan Meubelair	95.927.000,00
5	PAUD KUNCUP HENGGI	Pengadaan Meubelair	65.000.000,00
6	KB PAUD CAHAYA NUSANTARA	Pengadaan Meubelair	99.000.000,00
7	SD YPPK ST LUKAS MAMUR	Pengadaan Meubelair	258.740.000,00
Jumlah			800.038.125,00

- 8) Pengurangan aset pelatan dan mesin yang berasal dari Buku Ekstra Kompetable karena nilai di bawah kapitalisasi Tahun 2024 senilai Rp462.944.830,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Daerah	1.332.000,00
2	Dinas Perhubungan	175.310.000,00
3	Dinas Kesehatan	116.941.884,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40.189.000,00

No	SKPD	Nilai (Rp)
5	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	129.171.946,00
Jumlah		462.944.830,00

- 9) Pengurangan aset pelatan dan mesin karena bukan merupakan aset tetap Tahun 2024 dikarenakan terdapat penggabungan belanja antara belanja modal dan bukan belanja modal yang senilai Rp1.520.590.620,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	768.222.620,00
2	RSUD	752.368.000,00
Jumlah		1.520.590.620,00

a) Dinas Kesehatan

Pengurangan aset Peralatan dan Mesin karena bukan merupakan aset tetap Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan senilai Rp768.222.620,00 dikarenakan terdapat penggabungan belanja antara belanja modal dan bukan belanja modal berupa :

No	No. SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	05212/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	Pembayaran tagihan 100% belanja set rawat inap 3 puskesmas baru (DAK)	58.203.930,00
2	05215/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	Pembayaran tagihan 100% belanja set gawat darurat 3 puskesmas baru paket 1 (DAK)	141.277.500,00
3	05211/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	Pembayaran 100% belanja set laboratorium 3 puskesmas baru (DAK)	36.565.974,00
4	05213/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	Pembayaran 100% belanja set sterilisasi dan farmasi 3 puskesmas baru (DAK)	9.504.888,00
5	05893/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	Pembayaran tagihan 100% belanja set gawat darurat 3 puskesmas baru paket 2	177.554.625,00
6	05214/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	Pembayaran 100% belanja set pemeriksaan umum 3 puskesmas baru (DAK)	87.281.412
7	05892/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	Pembayaran tagihan 100% belanja set gawat darurat 3 puskesmas baru paket 4	96.921.900
8	05216/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	Pembayaran 100% belanja set persalinan 3 puskesmas baru (DAK)	86.946.663
9	05244/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	Pembayaran tagihan 100% belanja set pasca persalinan 3 puskesmas baru (DAK)	8.317.134
10	05217/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	Pembayaran 100% penyediaan alat pustu Bumi Muroh Indah (DAK)	23.242.000
11	03311/SP2D-TU/NIHIL/DAK-NF/PPKD/APBD/2024	Belanja Perjalanan Dinas	34.850.000
12	06080/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	pembayaran tagihan 100% belanja mebel rumah dokter paket 1 (DBH)	7.556.594
Jumlah			768.222.620,00

Contohnya :

pada nomor SP2D: 05215/SP2DLS/DAK/PPKD/APBD/2024 terdapat item barang habis pakai berupa sarung tangan medis, nasal oksigen kanula,

b) RSUD

Pengurangan aset Peralatan dan Mesin karena bukan merupakan aset tetap Tahun 2024 pada RSUD, berupa belanja service central oksigen, belanja instalasi pipa oksigen, belanja jasa oksigen central (JKN) yang senilai Rp752.368.000,00 dikarenakan terdapat belanja jasa yang tergabung dalam belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

No	No. SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	02057/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	Permintaan pembayaran pengadaan service central oksigen.	328.676.000,00
2	06292/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Belanja instalasi pipa oksigen (JKN)	94.744.000,00
3	06293/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Belanja service oksigen sentral (JKN)	328.948.000,00
Jumlah			752.368.000,00

10) Pengurangan aset pelatan dan mesin yang direklasifikasi ke Aset Lain-Lain Tahun 2024 senilai Rp361.857.878,69 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	12.972.972,96
2	Dinas Kesehatan	15.608.027,00
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	306.862.907,73
4	RSUD	1.086.156,00
5	BPKAD	25.327.815,00
Jumlah		361.857.878,69

a) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Pengurangan aset pelatan dan mesin yang direklasifikasi ke Aset Lain-Lain Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian senilai Rp12.972.972,96 karena kelebihan pembayaran atas pekerjaan belanja alat kantor lainnya.

b) Dinas Kesehatan

Pengurangan aset pelatan dan mesin yang direklasifikasi ke Aset Lain-Lain Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan senilai Rp15.608.027,00 karena kelebihan pembayaran atas belanja modal aset pelatan dan mesin dengan rincian:

No	Uraian	No. Kontrak	Penyedia	Nilai yang Dikoreksi (Rp)
1	Pengadaan Set Pemeriksaan Umum 3	440/21.01/Purch/DAK/PPK-IR/DK/VI/2024	CV Shangkuriang Medika Indonesia	11.427.027,00

No	Uraian	No. Kontrak	Penyedia	Nilai yang Dikoreksi (Rp)
	Puskesmas Baru			
2	Pengadaan Meubelair Puskesmas Arguni	440/10.02/KONTRAK/DAK/PPK-SS/DK/VII/2024	CV Nuri Perdana Mandiri	4.181.000,00
Jumlah				15.608.027,00

c) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pengurangan aset pelatan dan mesin yang direklasifikasi ke Aset Lain-Lain Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp306.862.907,73 dikarenakan kelebihan pembayaran atas belanja modal aset pelatan dan mesin dengan rincian:

No	Uraian	No. Kontrak	Penyedia	Nilai yang Dikoreksi (Rp)
1	Belanja Modal Kursi Pejabat	899.2/05/SPK/DAU/KURSIPEJABAT /DIKPORA/FF/2024	CV Jaya Abadi	29.729.729,73
2	Belanja Modal AC	899.2/01/SPK/DAU/PENDINGIN RUANGAN-AC/DIKPORA/FF/2024	CV Jaya Abadi	55.444.500,00
3	Belanja Modal Laptop	899.2/42/SPK/DAU/LAPTOP/DIKPORA/FF/2024	CV Jaya Abadi	148.462.500,00
4	Belanja Modal Personal Komputer pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Bidang Pendidikan Dasar	900/05/SPK/DAU/DIKPORA/2024	CV Fiad'Ma Jaya	3.098.945,00
5	Belanja Modal Personal Komputer pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Bidang Pendidikan Dasar	900/05/SPK/DAU/DIKPORA/2024	CV Fiad'Ma Jaya	3.199.945,00
6	Belanja Personal Komputer (Laptop) pada Sub Bidang Penatausahaan Barang dan Aset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	900/0081/SPK/DAU/DIKPORA/APB D/FF/2024	CV Mitra Karya Persada	15.099.007,50
7	Belanja Personal Komputer (Laptop) pada Sub Bidang Penatausahaan Barang dan Aset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	900/0081/SPK/DAU/DIKPORA/APB D/FF/2024	CV Mitra Karya Persada	17.299.007,50
8	Belanja Modal Personal Komputer pada Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Tingkat SD/MI	900/08/SPK/DAU/DIKPORA/2024	CV Fiad'Ma Jaya	9.133.750,00
9	Belanja Modal Personal Komputer pada Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Tingkat SD/MI	900/08/SPK/DAU/DIKPORA/2024	CV Fiad'Ma Jaya	9.933.750,00
10	Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Camera) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	900/0110/SPK/DAU/DIKPORA/APB D/FF/2024	CV Mitra Karya Persada	5.566.077,00
11	Belanja Modal Handycam Untuk Kegiatan KTU pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	899.2/107/SPK-ATK/DAU/DIKPORA/FF/2024	CV Permata Hopehi	3.395.696,00
12	Koreksi pencatatan kelebihan pembayaran atas realisasi belanja honorarium dan belanja modal pada Dana BOSP SMP Negeri Bomberay	-	-	6.500.000,00
Jumlah				306.862.907,73

d) RSUD

Pengurangan aset pelatan dan mesin yang direklasifikasi ke Aset Lain-Lain Tahun 2024 pada RSUD senilai Rp1.086.156,00 karena kelebihan pembayaran atas pekerjaan belanja modal pelatan dan mesin yaitu pengadaan pemasangan jaringan wifi oleh CV Brawijaya Konstruksi dengan Nomor Kontrak: 477/02.6/SPK/BARANG/PPK/PBJ-PL/RSUD/FF/V/2024.

e) BPKAD

Pengurangan aset pelatan dan mesin yang direklasifikasi ke Aset Lain-Lain Tahun 2024 pada BPKAD senilai Rp25.327.815,00 karena kelebihan pembayaran atas pekerjaan belanja modal pelatan dan mesin yaitu pengadaan belanja modal pekerjaan peralatan jaringan server oleh CV Metro Pratama dengan Nomor Kontrak: 000.3.2/02/SPK/PPK/BPKAD-FF/2024.

c. Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp1.157.654.325.016,17	Rp1.082.321.594.688,91

Nilai aset gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Fakfak per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp1.157.654.325.016,17 mengalami penambahan senilai Rp75.332.730.327,26 atau naik 6,96% dibandingkan dengan nilai aset Gedung dan Bangunan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp1.082.321.594.688,91 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	930.232.536.886,35
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	199.986.725.451,72
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	10.446.574.302,00
4	Bangunan Menara Perambuan	149.424.500,00
5	Tugu/Tanda Batas	16.839.063.876,10
Jumlah		1.157.654.325.016,17

Ringkasan mutasi aset Gedung dan Bangunan selama Tahun 2024 sebagai berikut:

Saldo Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023		1.082.321.594.688,91
Belanja modal aset Gedung dan bangunan Tahun 2024	97.743.178.320,08	
Penambahan aset Gedung dan bangunan yang direklasifikasi dari Aset yang Lain	7.335.682.233,00	
Penambahan aset Gedung dan bangunan yang direklasifikasi dari Barang dan Jasa	5.048.049.391,22	

Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke Aset yang Lain		13.135.535.062,00
Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang dihibahkan		5.900.083.521,00
Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke Aset Lain-Lain		699.109.464,44
Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke KDP		15.059.451.569,60
Saldo akhir aset Gedung dan bangunan per 31 Desember 2024		1.157.654.325.016,17

Penjelasan atas mutasi aset gedung dan bangunan Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Penambahan aset gedung dan bangunan yang berasal dari belanja modal Tahun 2024 senilai Rp97.743.178.320,08 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Daerah	341.231.453,00
2	Dinas PUPR2KP	3.907.258.467,08
3	Dinas Perhubungan	1.300.619.458,00
4	Dinas Kesehatan	45.547.831.676,00
5	RSUD	10.479.927.842,00
6	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	32.468.550.595,00
7	BP4D	198.681.120,00
8	Dinas Perkebunan	190.260.000,00
9	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.657.090.379,00
10	Inspektorat	960.580.000,00
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	53.445.000,00
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	637.702.330,00
Jumlah		97.743.178.320,08

- 2) Penambahan aset Gedung dan bangunan yang direklasifikasi dari Aset Tetap yang Lain Tahun 2024 senilai Rp7.335.682.233,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	DPUPR2KP	7.272.130.233,00
2	Dinas Perkebunan	63.552.000,00
Jumlah		7.335.682.233,00

- a) DPUPR2KP

Penambahan aset Gedung dan bangunan yang direklasifikasi dari KDP Tahun 2024 pada DPUPR2KP senilai Rp7.272.130.233,00 berupa pembangunan Sport Center dan Kuliner dari Tahun 2023 sudah selesai dikerjakan di Tahun 2024.

b) Dinas Perkebunan

Penambahan aset Gedung dan bangunan yang direklasifikasi dari KIB D Tahun 2024 pada Dinas Perkebunan senilai Rp63.552.000,00 yaitu kegiatan pemeliharaan jalan depan kantor oleh CV. Tanama Jaya dengan nomor SP2D: 00849/SP2D-LS/DTU-DBH/PPKD/APBD/2024. Dikarenakan Pembangunan jalan yang dimaksud masih di lingkungan gedung kantor oleh sebab itu jalan ini diklasifikasikan ke dalam KIB C.

3) Penambahan aset Gedung dan bangunan yang direklasifikasi dari Barang dan Jasa Tahun 2024 senilai Rp5.048.049.391,22, yaitu pada SKPD:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	500.468.960,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	699.612.633,00
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	93.766.700,00
4	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	3.754.201.098,22
Jumlah		5.048.049.391,22

a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penambahan aset Gedung dan bangunan yang direklasifikasi dari Barang dan Jasa Tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp500.468.960,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	03044/SP2D-LS/OTSUS-1%/PPKD/APBD/2024	Pembayaran uang muka 50% atas belanja pembangunan posko karhutlah Tahun 2024	232.725.000,00
2	05938/SP2D-LS/OTSUS-1%/PPKD/APBD/2024	Pembayaran 100% atas belanja pembangunan posko Tahun 2024	232.725.000,00
3	03048/SP2D-LS/OTSUS-1%/PPKD/APBD/2024	Pembayaran belanja perencanaan pembangunan posko mitigasi karhutlah Tahun 2024	14.000.000,00
4	05920/SP2D-LS/OTSUS-1%/PPKD/APBD/2024	Pembayaran pengawasan pembangunan posko mitigasi karhutlah Tahun 2024	21.018.960,00
Jumlah			500.468.960,00

b) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penambahan aset Gedung dan bangunan yang direklasifikasi dari Barang dan Jasa Tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp699.612.633,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	06684/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Pemeliharaan bangunan gedung kantor (perencanaan)	19.952.250,00
2	06647/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Pemeliharaan bangunan gedung kantor (fisik)	655.009.503,00
3	06730/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Pemeliharaan bangunan gedung kantor (pengawasan)	24.650.880,00

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
Jumlah			699.612.633,00

c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Penambahan aset Gedung dan bangunan yang direklasifikasi dari Barang dan Jasa Tahun 2024 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM senilai Rp93.766.700,00 berupa perbaikan jalan Gedung Diklat dengan Nomor SP2D: 06378/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024.

d) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Penambahan aset Gedung dan bangunan yang direklasifikasi dari Barang dan Jasa Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp3.754.201.098,22 yang merupakan reklasifikasi Aset Tetap Bangunan Gedung Sekolah.

4) Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke Aset yang Lain Tahun 2024 senilai Rp13.135.535.062,00, yaitu pada SKPD:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	DPUPR2KP	383.571.000,00
2	Dinas Perhubungan	1.300.619.458,00
3	Dinas Kesehatan	6.147.162.468,00
4	RSUD	3.231.620.930,00
5	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.072.561.206,00
Jumlah		13.135.535.062,00

a) DPUPR2KP

Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke Aset yang Lain Tahun 2024 pada DPUPR2KP senilai Rp383.571.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- i. Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke KDP senilai Rp199.800.000,00 merupakan pembangunan Gedung Serba Guna (PKK, Dharmawanita, dll) oleh CV. Multipola yang sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 belum selesai dikerjakan.
- ii. Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke KIB D senilai Rp183.771.000,00 merupakan Penataan Halaman Jalan Brawijaya dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	03794/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Pembayaran Tagihan Perencanaan Penataan Halaman Jalan Brawijaya untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV Idea Konsultan	8.565.000,00
2	03938/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Pembayaran Tagihan Uang Muka 50% Penataan Halaman Jalan Brawijaya untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV Karori Tagan Perkasa	84.393.000,00
3	06102/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Pembayaran Tagihan 100% Penataan Halaman Jalan Brawijaya untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. Karori Tagan Perkasa	84.393.000,00
4	06025/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Pembayaran Tagihan 100% Pengawasan Penataan Halaman Jalan Brawijaya Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. Buton Explore Consultant Cabang Fakfak	6.420.000,00
Jumlah			183.771.000,00

b) Dinas Perhubungan

Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke KIB

B Tahun 2024 pada Dinas Perhubungan senilai Rp1.300.619.458,00

dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	03304/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PERENCANAAN BELANJA	9.109.986,00
2	03305/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PERENCANAAN BELANJA MODAL PAGAR PENGAMAN (KAMPUNG WARTUTIN I)	9.102.000,00
3	03306/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PERENCANAAN BELANJA MODAL PAGAR PENGAMAN JALAN (KAMPUNG WARTUTIN II)	9.109.986,00
4	03307/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PERENCANAAN BELANJA MODAL PAGAR PENGAMAN JALAN (KAMPUNG WARTUTIN III)	9.109.986,00
5	03418/SP2D-LS/DTI-OTSUS/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN UANG MUKA 50% ATAS PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAGAR PENGAMAN JALAN DISTRIK WARTUTIN (WARTUTIN I)	151.950.000,00
6	03419/SP2D-LS/DTI-OTSUS/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN UANG MUKA 50% ATAS PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAGAR PENGAMAN JALAN DISTRIK WARTUTIN (WARTUTIN II)	151.950.000,00
7	03498/SP2D-LS/DTI-OTSUS/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN UANG MUKA 50% ATAS PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAGAR PENGAMAN JALAN DISTRIK WARTUTIN (WARTUTIN III)	151.979.500,00
8	03504/SP2D-LS/DTI-OTSUS/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN UANG MUKA 50% ATAS PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAGAR PENGAMAN JALAN DISTRIK	151.908.750,00

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
		WARTUTIN (WERABUAN)	
9	05085/SP2D-LS/DIT-OTSUS/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAGAR PENGAMAN JALAN DISTRIK WARTUTIN (WERABUAN)	151.908.750,00
10	05866/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/AP BD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAGAR PENGAMAN JALAN DISTRIK WARTUTIN (WARTUTIN III)	151.979.500,00
11	05973/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PENGAWASAN BELANJA MODAL KEGIATAN PAGAR PENGAMAN JALAN DISTRIK WARTUTIN (KAMPUNG WERABUAN)	12.147.500,00
12	05977/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PENGAWASAN BELANJA MODAL KEGIATAN PAGAR PENGAMAN JALAN (DISTRIK WARTUTIN I)	12.154.500,00
13	05978/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PENGAWASAN BELANJA MODAL KEGIATAN PAGAR PENGAMAN JALAN (DISTRIK WARTUTIN II)	12.154.500,00
14	05984/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAGAR PENGAMAN JALAN DISTRIK WARTUTIN (WARTUTIN I)	151.950.000,00
15	06090/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAGAR PENGAMAN JALAN DISTRIK WARTUTIN (WARTUTIN II)	151.950.000,00
16	06101/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PENGAWASAN BELANJA MODAL KEGIATAN PAGAR PENGAMAN JALAN (DISTRIK WARTUTIN III)	12.154.500,00
Jumlah			1.300.619.458,00

c) Dinas Kesehatan

Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke Aset yang Lain Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan senilai Rp6.147.162.468,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	02852/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	PEMATANGAN LAHAN DAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS WARTUTIN (DAK) (UANG MUKA 25%)	2.142.763.250,00
2	06744/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	PEMATANGAN LAHAN DAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS WARTUTIN (DAK) (TERMIN 50%)	2.142.763.250,00
3	04116/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	PERENCANAAN PEMATANGAN LAHAN DAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS WARTUTIN (DAK)	336.079.780,00
4	06781/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	PENGAWASAN PEMATANGAN LAHAN DAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS WARTUTIN (DAK)	199.902.675,00
5	02664/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	TAGIHAN UANG MUKA 25% PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH DOKTER	118.750.000,00

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
		PUSKESMAS WARTUTIN (DAKFISIK)	
6	05357/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	PEMBAYARAN TAGIHAN TERMIN 50% PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH DOKTER PUSKESMAS WARTUTIN (DAKFISIK)	118.750.000,00
7	05191/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUMAH DOKTER PUSKESMAS WARTUTIN (DAK)	38.004.513,00
8	06800/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUMAH DOKTER PUSKESMAS WARTUTIN (DAK)	28.529.000,00
9	02663/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	PEMBANGUNAN RUMAH PARAMEDIS PUSKESMAS WARTUTIN (DAK) (PAKET 1 UANG MUKA 25%)	203.750.000,00
10	06313/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	PEMBANGUNAN RUMAH PARAMEDIS PUSKESMAS WARTUTIN (DAK) (PAKET 1 TERMIN 50%)	203.750.000,00
11	02654/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	PEMBANGUNAN RUMAH PARAMEDIS PUSKESMAS WARTUTIN (DAK) PAKET 2 (UANG MUKA 25%)	203.775.000,00
12	06326/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	PEMBANGUNAN RUMAH PARAMEDIS PUSKESMAS WARTUTIN (DAK) PAKET 2 (TERMIN 50%)	203.775.000,00
13	02408/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	PEMBANGUNAN BAK AIR PUSKESMAS MBAHAMDANDARA PAKET 2 (UANG MUKA 25%)	73.775.000,00
14	04371/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	PEMBANGUNAN BAK AIR PUSKESMAS MBAHAMDANDARA PAKET 2 (TERMIN 50%)	132.795.000,00
Jumlah			6.147.162.468,00

d) RSUD

Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke Aset yang Lain Tahun 2024 pada RSUD senilai Rp3.231.620.930,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	02951/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	PENGADAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUANG NICU. CV. KAFFAH KARYA	96.885.462,00
2	02718/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	PEMBAYARAN UANG MUKA 30% PENGADAAN PEMBANGUNAN GEDUNG NICU RSUD FAKFAK TAHUN 2024. CV. ISKARIF	931.711.118,00
3	04814/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	PEMBAYARAN TERMIN 60% PENGADAAN PEMBANGUNAN GEDUNG NICU RSUD FAKFAK TAHUN 2024. CV. ISKARIF	931.711.119,00
4	05407/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN 75% PENGADAAN PEMBANGUNAN GEDUNG NICU, CV. ISKARIF	465.855.559,00
5	06408/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TERMIN AKHIR 90% PENGADAAN PEMBANGUNAN GEDUNG NICU	465.855.559,00
6	06497/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	PENGADAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG NICU	64.602.000,00
7	04486/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	PENGADAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TPS LIMBAH B3, CV MITRA PATRIA KONSULTAN	8.200.000,00
8	05268/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG MUKA 30% PENGADAAN PEMBANGUNAN TPS LIMBAH B3, CV. CAHAYA MBOYAN	76.740.034,00

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
9	06412/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN 100% PENGADAAN PEMBANGUNAN TPS LIMBAH B3, CV CAHAYA MBOYAN	179.060.079,00
10	06410/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	PENGADAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN TPS LIMBAH B3, CV. DARMA CITRA UTAMA	11.000.000,00
Jumlah			3.231.620.930,00

e) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke Aset yang Lain Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga senilai Rp2.072.561.206,00 dengan rincian sebagai berikut:

- i. Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke KIB A senilai Rp928.861.000,00 yaitu pematangan lahan Asrama Mahasiswa Fakfak di Sorong Tahun 2024 oleh CV. Tanjung Ginuni Indah
- ii. Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke KIB B senilai Rp259.800.006,00 yaitu pengadaan meubelair SD Inpres Kayu Mehrah Kab. Fakfak Tahun 2024 oleh CV. Barakah Konstruksi.
- iii. Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke KDP senilai Rp883.900.200,00 yaitu sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	06371/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ASRAMA PELAJAR FAKFAK DI KOTA SORONG TAHUN 2024 AN. CV. DESAIN MULTI DIMENSI KONSULTAN	26.570.000,00
2	04596/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN UANG MUKA 50% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN ASRAMA PELAJAR FAKFAK DI KOTA SORONG TAHUN 2024 AN. CV. NIAPI PAPIA	499.822.500,00
3	06742/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 76% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN ASRAMA PELAJAR FAKFAK DI KOTA SORONG TAHUN 2024 AN. CV. NIAPI PAPIA	259.907.700,00
4	06502/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA FAKFAK DI YOGYAKARTA TAHUN 2024 AN. CV. DESAIN MULTI DIMENSI KONSULTAN	59.600.000,00
5	06581/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PERENCANAAN REHABILITASI	38.000.000,00

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
		ASRAMA PELAJAR/MAHASISWA DI MAKAZAR TAHUN 2024 AN. PT. SKALA DIMENSI KONSULTAN	
Jumlah			883.900.200,00

- 5) Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke Hibah Tahun 2024 senilai Rp5.900.083.521,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	5.846.638.521,00
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	53.445.000,00
Jumlah		5.900.083.521,00

- a) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke hibah Tahun 2024 senilai Rp5.846.638.521,00 yang merupakan hibah kepada Satuan Pendidikan Swasta dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.387.573.040,00
2	Sekolah Dasar	3.745.924.101,00
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	713.141.380,00
Jumlah		5.846.638.521,00

- b) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke hibah Tahun 2024 senilai Rp53.445.000,00 yang merupakan hibah kepada pemerintah kampung dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	05889/SP2D-LS/OTSUS-1,25%/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100 (SERATUS) % ATAS PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAPURA DESTINASI WISATA	1.498.000,00
2	06011/SP2D-LS/OTSUS-1,25%/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100 (SERATUS) % ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN GAPURA DESTINASI WISATA	49.700.000,00
3	06539/SP2D-LS/OTSUS-1,25%/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100 (SERATUS) % ATAS PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN GAPURA DESTINASI WISATA	2.247.000,00
Jumlah			53.445.000,00

- 6) Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke Aset Lain-Lain Tahun 2024 senilai Rp699.109.464,44 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	156.235.496,86
2	Dinas Kesehatan	319.252.489,74
3	RSUD	214.794.079,85
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.827.397,99
Jumlah		699.109.464,44

a) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke Aset Lain-Lain tahun 2024 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp156.235.496,86 karena:

- i. Kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan senilai Rp55.155.904,78
- ii. Kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Belanja modal bangunan gedung kantor senilai Rp101.079.592,08.

b) Dinas Kesehatan

Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke Aset Lain-Lain tahun 2024 pada Dinas Kesehatan senilai Rp319.252.489,74 dikarenakan kelebihan pembayaran atas belanja modal gedung dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Kontrak	Penyedia	Nilai yang Dikoreksi (Rp)
1	Pematangan Lahan dan Pembangunan Puskesmas Arguni	020/SP/DAK/PPK/DINKES/2024	CV Pusaka Papua	179.723.757,37
2	Pematangan Lahan dan Pembangunan Puskesmas Mbahamdandara	021/SP/DAK/PPK/DINKES/2024	CV Bersatu Membangun Negeri	36.571.340,81
3	Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas Mbahamdandara	068/SP/DAK/PPK/DINKES/2024	CV Sibul	5.908.185,59
4	Pembangunan Rumah Paramedis Puskesmas Mbahamdandara Paket 1	076/SP/DAK/PPK/DINKES/2024	CV Solata Permai	17.413.500,99
5	Pembangunan Rumah Paramedis Puskesmas Mbahamdandara Paket 2 (DAK)	077/SP/DAK/PPK/DINKES/2024	CV Mutia Persada	15.938.817,51
6	Pembangunan Rumah Paramedis Puskesmas Mbahamdandara Paket 3	78/SP/DAK/PPK/DINKES/2024	CV Wagom Permata Abadi	16.122.267,83
7	Pembangunan Pagar Puskesmas Arguni (DAK)	035/SP/DAK/PPK/DINKES/2024	CV Iskarif	10.024.943,11
8	Pembangunan Pagar Puskesmas Mbahamdandara	036/SP/DAK/PPK/DINKES/2024	CV Tanama Jaya	4.471.936,95
9	Pembangunan Pagar Puskesmas Wartutin	037/SP/DAK/PPK/DINKES/2024	CV Kontruksi Ufuk Timur	1.496.608,84
10	Pembangunan Rumah Paramedis Puskesmas Wartutin Paket 3	74/SP/DAK/PPK/DINKES/2024	CV Wagom Permata Abadi	5.557.930,74
11	Koreksi atas lebih saji Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan kelebihan pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75/SP/DAK/PPK/DINKES/2024	-	26.023.200,00

No	Uraian	No. Kontrak	Penyedia	Nilai yang Dikoreksi (Rp)
Jumlah				319.252.489,74

c) RSUD

Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke Aset Lain-Lain tahun 2024 pada RSUD Kabupaten Fakfak senilai Rp214.794.079,85 dikarenakan kelebihan pembayaran belanja modal Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Kontrak	Penyedia	Nilai yang Dikoreksi (Rp)
1	Pembangunan Gedung Laundry	447/02.19/SPJ/KONSTRUKSI/PPK/PBJ-TENDER/RSUD/FF/VII/2024	CV Yaregas Jaya	1.248.688,32
2	Pembangunan Gedung Farmasi RSUD	447/02.21/SPJ/KONSTRUKSI/PPK/PBJ-TENDER/RSUD/FF/VII/2024	CV Iskarif	93.286.042,07
3	Pembangunan Gedung NICU	447/02.20/SPJ/KONSTRUKSI/PPK/PBJ-TENDER/RSUD/FF/VII/2024	CV Iskarif	26.475.799,24
4	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Rumah Sakit	477/29/SPK-PL/PPK/REHAB-GEDUNG/RSUD-FF/X/2024	CV Papua Cendrawasih Lestari	64.377.093,28
5	Pengadaan Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter	447/02.30/SPK/KONSTRUKSI/PPK/PBJ-PL/RSUD/FF/X/2024	CV Kayuni Mentirna	29.406.456,94
Jumlah				214.794.079,85

d) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke Aset Lain-Lain tahun 2024 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak senilai Rp8.827.397,99 dikarenakan kelebihan pembayaran belanja modal Gedung dan Bangunan yaitu pekerjaan pembangunan Pelataran Pasar SP 5 Bomberay oleh CV Bomberay Pratama dengan Nomor Kontrak: 00017/SP.17/FISIK BRY/OTSUS 1,25%/DPP-FF/IX/2024.

No	Uraian	No. Kontrak	Penyedia	Nilai yang Dikoreksi (Rp)
1	Pekerjaan Pembangunan Pelataran Pasar SP 5 Bomberay	00017/SP.17/FISIK BRY/OTSUS 1,25%/DPP-FF/IX/2024	CV Bomberay Pratama	8.827.397,99
Jumlah				8.827.397,99

- 7) Pengurangan aset gedung dan bangunan yang direklasifikasikan ke dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2024 senilai Rp15.059.451.569,60 yaitu:

- a) pekerjaan pematangan lahan pembangunan Puskesmas Mbahamdandara senilai Rp13.112.606.584,19
- b) Pembangunan rumah paramedis senilai Rp1.202.024.377,49
- c) Pembangunan Gedung Asrama Pelajar Fakfak di Kota Sorong senilai Rp744.820.607,92

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp2.306.940.630.557,00	Rp2.233.195.659.570,68

Nilai aset jalan, irigasi dan jaringan Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2024 senilai Rp2.306.940.630.557,00 terjadi penambahan senilai Rp73.744.970.986,32 atau naik 3,30% dari nilai aset jalan, irigasi dan jaringan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp2.233.195.659.570,68 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jalan	1.798.897.716.534,44
2	Jembatan	103.634.729.364,60
3	Bangunan Air Irigasi	57.486.119.618,82
4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	7.609.726.779,96
5	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	4.870.615.930,00
6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	166.966.686.858,24
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	7.770.516.330,00
8	Bangunan Air Bersih/Air Baku	43.431.467.574,68
9	Bangunan Air Kotor	1.328.510.000,00
10	Instalasi Air Bersih / Air Baku	31.838.207.551,66
11	Instalasi Air Kotor	6.796.244.000,00
12	Instalasi Pengolahan Sampah	275.000.113,00
13	Instalasi Pembangkit Listrik	1.837.963.450,00
14	Instalasi Gardu Listrik	490.375.000,00
15	Instalasi Gas	1.634.894.700,00
16	Instalasi Pengaman	32.452.000,00
17	Jaringan Air Minum	38.540.663.618,60
18	Jaringan Listrik	23.862.050.652,00
19	Jaringan Telepon	6.793.965.500,00
20	Jaringan Gas	2.842.724.981,00
Jumlah		2.306.940.630.557,00

Ringkasan mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan selama Tahun 2024 sebagai berikut:

Saldo aset jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023		2.233.195.659.570,68
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2024	123.318.492.161,00	
Penambahan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang	665.341.113,00	

direklasifikasi dari aset yang Lain		
Pengurangan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang direklasifikasi ke aset yang lain		47.245.194.000,00
Pengurangan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang dihibahkan		548.900.000,00
Pengurangan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang direklasifikasi ke Aset Lain-Lain		2.444.768.287,68
Saldo akhir aset jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2024		2.306.940.630.557,00

Penjelasan atas mutasi aset jalan, jaringan dan irigasi Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Mutasi penambahan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang berasal dari Belanja modal Tahun 2024 senilai Rp123.318.492.161,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas PUPR2KP	108.474.170.400,00
2	Dinas Kesehatan	8.781.929.761,00
3	RSUD	5.682.900.000,00
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	250.940.000,00
5	Dinas Sosial	65.000.000,00
6	Dinas Perkebunan	63.552.000,00
Jumlah		123.318.492.161,00

- 2) Penambahan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang direklasifikasi dari aset yang Lain Tahun 2024 senilai Rp665.341.113,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas PUPR2KP	183.771.000,00
2	Dinas Kesehatan	206.570.000,00
3	RSUD	275.000.113,00
Jumlah		665.341.113,00

- a) Dinas PUPR2KP

Penambahan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang direklasifikasi dari KIB C senilai Rp183.771.000,00, yaitu sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	03794/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Pembayaran Tagihan Perencanaan Penataan Halaman Jalan Brawijaya untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV Idea Konsultan	8.565.000,00
2	03938/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Pembayaran Tagihan Uang Muka 50% Penataan Halaman Jalan Brawijaya untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV	84.393.000,00

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
		Karori Tagan Perkasa	
3	06102/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Pembayaran Tagihan 100% Penataan Halaman Jalan Brawijaya untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. Karori Tagan Perkasa	84.393.000,00
4	06025/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Pembayaran Tagihan 100% Pengawasan Penataan Halaman Jalan Brawijaya Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. Buton Explore Consultant Cabang Fakfak	6.420.000,00
Jumlah			183.771.000,00

b) Dinas Kesehatan

Penambahan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang direklasifikasi dari KIB C senilai Rp206.570.000,00, yaitu sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	02408/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	PEMBANGUNAN BAK AIR PUSKESMAS MBAHAMDANDARA PAKET 2 (UANG MUKA 25%)	73.775.000,00
2	04371/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	PEMBANGUNAN BAK AIR PUSKESMAS MBAHAMDANDARA PAKET 2 (TERMIN 50%)	132.795.000,00
Jumlah			206.570.000,00

c) RSUD

Penambahan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang direklasifikasi dari KIB C senilai Rp275.000.113,00, yaitu sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	04486/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	PENGADAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TPS LIMBAH B3, CV MITRA PATRIA KONSULTAN	8.200.000,00
2	05268/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG MUKA 30% PENGADAAN PEMBANGUNAN TPS LIMBAH B3, CV. CAHAYA MBOYAN	76.740.034,00
3	06412/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN 100% PENGADAAN PEMBANGUNAN TPS LIMBAH B3, CV CAHAYA MBOYAN	179.060.079,00
4	06410/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	PENGADAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN TPS LIMBAH B3, CV. DARMA CITRA UTAMA	11.000.000,00
Jumlah			275.000.113,00

- 3) Pengurangan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang direklasifikasi ke aset yang lain Tahun 2024 senilai Rp47.245.194.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas PUPR2KP	44.806.542.000,00
2	Dinas Kesehatan	2.375.100.000,00
3	Dinas Perkebunan	63.552.000,00

No	SKPD	Nilai (Rp)
Jumlah		47.245.194.000,00

a) Dinas PUPR2KP

Pengurangan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang direklasifikasi ke KDP senilai Rp44.806.542.000,00, yaitu sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	02058/SP2D-LS/DAK/PPKD/APB D/2024	Pembayaran Tagihan Uang Muka 25% Pekerjaan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Siboru - Sipatnanam - Teluk Patipi untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV SASAR PAPUA UTAMA	3.286.020.000,00
2	04278/SP2D-LS/DAK/PPKD/APB D/2024	Pembayaran Tagihan Progres 50% Pekerjaan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Siboru - Sipatnanam - Teluk Patipi untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV SASAR PAPUA UTAMA	3.286.020.000,00
3	05346/SP2D-LS/DAK/PPKD/APB D/2024	Pembayaran Tagihan Progres 70% Pekerjaan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Siboru - Sipatnanam - Teluk Patipi untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV SASAR PAPUA UTAMA	2.628.816.000,00
4	06089/SP2D-LS/DAK/PPKD/APB D/2024	Pembayaran Tagihan Progres 90% Pekerjaan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Siboru - Sipatnanam - Teluk Patipi untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV SASAR PAPUA UTAMA	2.628.816.000,00
5	02113/SP2D-LS/DAK/PPKD/APB D/2024	Pembayaran Tagihan Uang Muka 25% Pengawasan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Siboru-Sipatnanam-Telukpatipi (DAK) untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV PIK'SMA CONSULTANT	131.479.500,00
6	06234/SP2D-LS/DAK/PPKD/APB D/2024	Pembayaran Tagihan Progress 100% Pengawasan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Siboru-Sipatnanam-Telukpatipi (DAK) untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV PIK'SMA CONSULTANT	394.438.500,00
7	02257/SP2D-LS/DAK/PPKD/APB D/2024	Pembayaran Tagihan Uang Muka 25% Pekerjaan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Waserat-Sanggram (DAK) untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. BERSATU MEMBANGUN NEGERI	2.694.625.000,00
8	05418/SP2D-LS/DAK/PPKD/APB D/2024	Pembayaran Tagihan Progress 70% Pekerjaan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Waserat-Sanggram untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. BERSATU MEMBANGUN NEGERI	4.850.325.000,00



No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
9	06259/SP2D-LS/DAK/PPKD/APB D/2024	Pembayaran Tagihan Progress 80% Pekerjaan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Waserat-Sanggram untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. BERSATU MEMBANGUN NEGERI	1.077.850.000,00
10	02059/SP2D-LS/DAK/PPKD/APB D/2024	Pembayaran Tagihan Uang Muka 25% Pengawasan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Waserat-Sanggram untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV TRIFAKON	109.769.250,00
11	06237/SP2D-LS/DAK/PPKD/APB D/2024	Pembayaran Tagihan Progres 100% Pengawasan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Waserat-Sanggram (DAK) untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV TRIFAKON	329.307.750,00
12	02333/SP2D-LS/DAK/PPKD/APB D/2024	Pembayaran Tagihan Uang Muka 25% Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Kokas-Batufiafas-Patimburak (DAK) untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV AGGAEN MUTIARA GUNUNG	2.813.825.000,00
13	04255/SP2D-LS/DAK/PPKD/APB D/2024	Pembayaran Tagihan Progres 50% Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Kokas-Batufiafas-Patimburak (DAK) untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV AGGAEN MUTIARA GUNUNG	2.813.825.000,00
14	05349/SP2D-LS/DAK/PPKD/APB D/2024	Pembayaran Tagihan Progres 70% Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Kokas-Batufiafas-Patimburak (DAK) untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV AGGAEN MUTIARA GUNUNG	2.251.060.000,00
15	06152/SP2D-LS/DAK/PPKD/APB D/2024	Pembayaran Tagihan Progres 90% Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Kokas-Batufiafas-Patimburak (DAK) untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV AGGAEN MUTIARA GUNUNG	2.251.060.000,00
16	02115/SP2D-LS/DAK/PPKD/APB D/2024	Pembayaran Tagihan Uang Muka 25% Pengawasan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Kokas-Batufiafas-Patimburak (DAK) untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV URAHA CONSULINDO	114.468.750,00
17	06235/SP2D-LS/DAK/PPKD/APB D/2024	Pembayaran Tagihan Progres 100% Pengawasan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Kokas-Batufiafas-Patimburak (DAK) untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV URAHA CONSULINDO	343.406.250,00
18	03303/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Pembayaran Tagihan 100% Perencanaan Rekonstruksi Jalan Tetar-Timar untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV MULTIPOLA	199.900.000,00
19	03470/SP2D-	Pembayaran Tagihan Uang Muka 30 %	1.583.520.000,00



No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
	LS/PPKD/APBD/2024	Rekonstruksi Jalan Tetar - Timar untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. ALMUKHALIS PRATAMA MANDIRI	
20	06704/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Pembayaran Tagihan Progres 60 % Rekonstruksi Jalan Tetar - Timar untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. ALMUKHALIS PRATAMA MANDIRI	1.583.520.000,00
21	06624/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Pembayaran Tagihan 100% Pengawasan Rekonstruksi Jalan Tetar-Timar Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. MITRA PATRIA KONSULTAN	161.630.000,00
22	04254/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Pembayaran Tagihan 100% Perencanaan BAK Reservoir Kapartutin Atas Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. BUTON EXPLORE CONSULTANT CABANG FAKFAK	31.000.000,00
23	04469/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Pembayaran Tagihan Uang Muka 50% Pembangunan BAK Reservoir Kapartutin Atas Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. PROTEKSI EKSAQILA UTAMA	385.925.000,00
24	06623/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Pembayaran Tagihan 100% Pengawasan Pembangunan Bak Reservoir Kapartutin Atas Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV IDEA KONSULTAN	23.400.000,00
25	04725/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSU S/PPKD/APBD/2024	Pembayaran Tagihan Uang Muka 30% Pembangunan Jalan Kampung Sum - Patipi Pulau (DBH MIGAS OTSUS) untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV FIJAR JAYA	2.967.930.000,00
26	06512/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSU S/PPKD/APBD/2024	Pembayaran Tagihan Progres 75% Pembangunan Jalan Kampung Sum - Patipi Pulau (DBH MIGAS OTSUS) untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV FIJAR JAYA	4.451.895.000,00
27	06506/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Pembayaran Tagihan 100% Pengawasan Pembangunan Jalan Kampung SUM-Patipi Pulau Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Untuk CV. FIGHTER	199.860.000,00
28	06701/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Pembayaran Progres 80% Pembangunan Talud Reservoir Kapartutin Atas Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. PROTEKSI EKSAQILA UTAMA	231.555.000,00
29	06166/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Pembayaran Tagihan Progres 100% Perencanaan Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Mandoni-Mambunibuni Untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV URAHA CONSULINDO	197.600.000,00
30	06344/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Pembayaran Tagihan 100% Perencanaan Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Otoweri-Tomage (DAU yang telah ditentukan penggunaannya) Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. MULTIPOLA	199.700.000,00
31	06238/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Pembayaran Tagihan Perencanaan Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Kinam-Batufafas untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV URAHA CONSULINDO	197.795.000,00
32	06151/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Pembayaran Tagihan 100% Perencanaan Pembangunan Jalan Di Kompleks Workshop untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV FIGHTER	186.600.000,00
33	06289/SP2D-LS/PPKD/APBD/202 4	Pembayaran Tagihan Perencanaan Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Kampung Duwat Lama Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. MULTIPOLA	199.600.000,00

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
Jumlah			44.806.542.000,00

b) Dinas Kesehatan

Pengurangan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang direklasifikasi ke aset yang lain senilai Rp2.375.100.000,00, yaitu sebagai berikut:

- i. Pengurangan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang direklasifikasi ke KIB B senilai Rp819.000.000,00, yaitu belanja peralatan IPAL Puskesmas Mbahamdandara dengan Nomor SP2D: 06458/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024.
- ii. Pengurangan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang direklasifikasi ke KDP senilai Rp1.556.100.000,00, yaitu sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	06457/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	PEMBAYARAN TAGIHAN TERMIN 95% BELANJA IPAL PUSKESMAS ARGUNI (DAK)	778.050.000,00
2	06452/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	PEMBAYARAN TAGIHAN TERMIN 95% BELANJA IPAL PUSKESMAS WARTUTIN (DAK)	778.050.000,00
Jumlah			1.556.100.000,00

c) Dinas Perkebunan

Pengurangan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang direklasifikasi ke KIB C senilai Rp63.552.000,00, yaitu kegiatan pemeliharaan jalan depan kantor oleh CV. Tanama Jaya dengan nomor SP2D: 00849/SP2D-LS/DTU-DBH/PPKD/APBD/2024.

- 4) Pengurangan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang dihibahkan Tahun 2024 senilai Rp548.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas PUPR2KP	297.960.000,00
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	250.940.000,00
Jumlah		548.900.000,00

a) Dinas PUPR2KP

Pengurangan aset jalan jaringan dan irigasi yang dihibahkan senilai Rp297.960.000,00 yaitu:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	03920/SP2D-LS/BBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	Pembayaran Tagihan Uang Muka 50% Pembangunan Talud Di Kabupaten Fakfak (Pembangunan Talud TPQ Nur AL-IMAN Jalan Kokas) (DBH MIGAS OTSUS) untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. CANBERAR	77.555.000,00
2	06617/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	Pembayaran Tagihan 100% Pembangunan Talud di Kabupaten Fakfak (Pembangunan	77.555.000,00

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
		Talud TPQ Nur AL-IMAM Jalan Kokas) Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. CANBERAR	
3	03921/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	Pembayaran Tagihan Uang Muka 50% Pembangunan Talud Di Kabupaten Fakfak (Pembangunan Talud Masjid AL-Fatah Dulanpokpok) (DBH MIGAS OTSUS) untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. FUNGKA PAPUA MANDIRI	71.425.000,00
4	04819/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	Pembayaran Tagihan Progres 100% Pembangunan Talud Di Kabupaten Fakfak (Pembangunan Talud Masjid AL-Fatah Dulanpokpok) (DBH MIGAS OTSUS) untuk Dinas PU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. FUNGKA PAPUA MANDIRI	71.425.000,00
Jumlah			297.960.000,00

b) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pengurangan aset jalan jaringan dan irigasi yang dihibahkan senilai Rp250.940.000,00 yaitu pekerjaan pengawasan pembangunan talud sekolah SD YPK Pikpik Kab. Fakfak Tahun 2024 oleh PT. Skala Dimensi Konsultan dengan nomor SP2D: 06731/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024.

- 5) Pengurangan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang direklasifikasi ke Aset Lain-Lain Tahun 2024 senilai Rp2.444.768.287,68 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas PUPR2KP	2.370.514.760,61
2	Dinas Kesehatan	74.253.527,07
Jumlah		2.444.768.287,68

a) Dinas PUPR2KP

Pengurangan aset jalan jaringan dan irigasi yang direklasifikasi ke Aset Lain-Lain Tahun 2024 pada Dinas PUPR2KP karena kelebihan pembayaran belanja modal jalan jaringan dan irigasi senilai Rp2.370.514.760,61 terdiri dari:

No	Uraian	No. Kontrak	Penyedia	Nilai yang Dikoreksi (Rp)
1	Alih Trase Jalan Tetar -Timar (Pasar Tetar ke Kampung Offie) Tahap II	05/SP/PK1.DTIBM/DPU(PR)2KP-FF/2024	CV Meka Mpuder Jaya	34.314.783,71
2	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan perpipaan di Kawasan Strategis (Fakfak Tengah) 1% BLOCKGRANT	01.5/PPK/SP-FSK-PDL/DPUPR2KP-FF/2024	CV Kombimur	16.916.593,40
3	Pekerjaan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Siboru - Sipatnanam - Teluk Patipi	06/SP/PK.4DAKBM/DPU(PR)2KP-FF/2024	CV Sasar Papua Utama	507.224.759,97

No	Uraian	No. Kontrak	Penyedia	Nilai yang Dikoreksi (Rp)
4	Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Bts. Kota Fakfak – Siboru	08.4/PPK/PLS-KONTR/YTK/DPU(PR)2KP-FF/IV/2024	CV Sinar Karya	228.970.906,75
5	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Kokas – Batufiafas – Patimburak	06/SP/PK2.DAKBM/DPU (PR)2KP-FF/2024	CV Aggaen Mutiara Gunung	528.427.693,97
6	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Di Kampung Tanama RT.4 (1% BlockGrant)	02.8/PPK-FSK/DPU(PR)2KP-FF/2024	CV Duta Sejahtera	185.354.094,60
7	Peningkatan/Rekonstruksi Ruas Jalan Provinsi Teluk Patipi (Kampung Adora – Us)	02.10/PPK-FSK-PRBHN/DPU(PR)2KP-FF/2024	CV Bersatu Membangun Negeri	140.296.030,26
8	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan SP 7 - SP 2 (STA 0+000 s/d 0+168)	02/SP/PK1.DTUDBHBM/DPU(PR)2KP/FF/2024	CV Duta Sejahtera	115.381.622,31
9	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan SP 7 - SP 2 (STA 0+168 s/d 0+380)	02/SP/PK2.DTUDBHBM/DPU(PR)2KP/FF/2024	CV Almukhalis Pratama Mandiri	145.082.539,99
10	Peningkatan Jalan Di Kampung Pinang Agung	02/SP/PK1.DTUDM-APBDP/DPU(PR)2KP-FF/2024	CV Naqi Kreasi Konstruksi	4.732.035,78
11	Pembangunan Jalan Kampung Sum - Patipi Pulau (DBH MIGAS OTSUS)	05/SP/PK1.DBHMOBBM-APBDP/DPU(PR)2KP-FF-2024	CV Fijar Jaya	223.350.985,80
12	Rekonstruksi Jalan Tetar - Timar (DAU)	02.9/PPK-FSK/DPU(PR)2KP-FF/2024	CV Almukhalis Pratama Mandiri	240.462.714,07
Jumlah				2.370.514.760,61

b) Dinas Kesehatan

Pengurangan aset jalan jaringan dan irigasi yang direklasifikasi ke Aset Lain-Lain Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan karena kelebihan pembayaran belanja modal jalan jaringan dan irigasi senilai Rp74.253.527,07 terdiri dari:

No	Uraian	No. Kontrak	Penyedia	Nilai yang Dikoreksi (Rp)
1	Pembangunan Bak Air Puskesmas Arguni Paket 1	043/SP/DAK/PPK/DINKES/2024	CV Omega Berkah Utama	5.955.963,05
2	Pembangunan Bak Air Puskesmas Arguni 2	044/SP/DAK/PPK/DINKES/2024	CV Mutia Persada	11.177.740,58
3	Pembangunan Bak Air Puskesmas Mbahamdandara Paket 2	047/SP/DAK/PPK/DINKES/2024	CV Dadi Group	5.949.565,21
4	Pembangunan Bak Air Puskesmas Mbahamdandara Paket 1	046/SP/DAK/PPK/DINKES/2024	CV Irfak Pujamangun	12.920.910,66
5	Pembangunan Bak Air Puskesmas Bomberay	52/SP/DAK/PPK/DINKES/2024	CV Yaregas Jaya	6.693.850,00
6	Pembangunan Bak Air Puskesmas Wartutin Paket 2	50/SP/DAK/PPK/DINKES/2024	CV Canberar	13.641.992,73
7	Pembangunan Bak Air Puskesmas Wartutin Paket 1	49/SP/DAK/PPK/DINKES/2024	CV Marapi Jaya	17.913.504,84
Jumlah				74.253.527,07

e. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp19.821.099.145,06	Rp18.724.781.742,06

Nilai Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2024 senilai Rp19.821.099.145,06. Mengalami penambahan senilai Rp1.096.317.403,00 atau naik 5,85% dari saldo Aset Tetap Lainnya Tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp18.724.781.742,06 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	13.175.324.366,06
2	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	47.111.500,00
3	Barang Bercorak Kesenian	1.064.643.431,00
4	Alat Bercorak Kebudayaan	330.833.151,00
5	Tanda Penghargaan	419.799.497,00
6	Ternak	949.831.000,00
7	Tanaman	376.532.200,00
8	Aset Tetap Dalam Renovasi	3.457.024.000,00
Jumlah		19.821.099.145,06

Ringkasan mutasi aset tetap lainnya selama Tahun 2024 sebagai berikut:

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2023		18.724.781.742,06
Penambahan aset tetap lainnya dari belanja modal Tahun 2024	191.150.000,00	
Penambahan aset tetap lainnya yang direklasifikasi dari aset yang lain Tahun 2024	905.167.403,00	
Pengurangan Aset Tetap lainnya dari Buku Ekstra Komptable		0,00
Saldo akhir aset tetap lainnya per 31 Desember 2024		19.821.099.145,06

Penjelasan atas mutasi aset tetap lainnya Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Penambahan aset tetap lainnya dari belanja modal Tahun 2024 senilai Rp191.150.000,00 yaitu pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berupa Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	03347/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	Permintaan Pembayaran Tagihan 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Inpres 1 FF, SD Inpres 2 Fakfak, SD Inpres Mandoni, SD Inpres Urat, SD Negeri Ubadari	131.200.000,00
2	03358/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024	Permintaan Pembayaran Tagihan 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SMP Negeri 1 Kokas, SMP Negeri 2 Kokas, SMP Negeri 3 Fakfak, SMP Negeri Girgir oleh CV. Matadoor"s Selebes	59.950.000,00
Jumlah			191.150.000,00

- 2) Penambahan aset tetap lainnya yang direklasifikasi dari aset yang lain Tahun 2024 senilai Rp905.167.403,00 yaitu:

- a) Penambahan aset tetap lainnya yang direklasifikasi yang merupakan belanja yang berasal dari dana BOS senilai Rp867.767.403,00.
- b) Penambahan aset tetap lainnya yang direklasifikasi dari KIB B senilai Rp37.400.000,00 yaitu pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan alat pembelajaran TK dengan nomor SP2D: 06598/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2024.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp163.760.916.616,93	Rp96.583.389.795,33

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum selesai dikerjakan. Nilai konstruksi dalam pengerjaan Kabupaten Fakfak pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp163.760.916.616,93. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan	104.911.819.041,01
2	Peralatan dan Mesin dalam Pengerjaan Tahun 2024	3.046.650.000,00
3	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan Tahun 2024	5.801.889.526,92
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Pengerjaan Tahun 2024	50.000.558.049,00
Jumlah		163.760.916.616,93

Rekapan Konstruksi Dalam Pekerjaan sampai dengan Tahun 2024 Kabupaten Fakfak per SKPD sebagai berikut:

1) Tanah Dalam Pengerjaan

Pencatatan tanah dalam pengerjaan dimulai dari tahun 2020 yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman senilai Rp22.988.239.000,00 dengan jumlah register 1:

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
Jenis barang / Nama Barang	Lokasi	Nilai
Tanah Bangunan Terminal Udara	Kamp. Siboru	22.988.239.000,00
Jumlah		22.988.239.000,00

2) Peralatan dan Mesin dalam Pengerjaan

Pencatatan Peralatan dan Mesin dalam pengerjaan dimulai dari tahun 2024 yaitu pada Dinas Kesehatan senilai Rp3.046.650.000 dengan jumlah register 1:

Dinas Kesehatan		
Jenis barang / Nama Barang	Lokasi	Nilai
Solar Cell 3 Puskesmas	Puskesmas Wartutin	1.015.550.000
	Puskesmas Mbahamdandara	1.015.550.000
	Puskesmas Arguni	1.015.550.000
Jumlah		3.046.650.000,00

3) Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan

Pencatatan Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan senilai Rp55.462.431.611,01 dengan rincian sebagai berikut:

a) Dinas Kesehatan		
Tahun	Register	Nilai
2014	1	914.755.000,00
2016	2	1.008.924.000,00
2024	5	5.940.592.468,00
Jumlah	8	7.864.271.468,00

b) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
Tahun	Register	Nilai
2014	1	73.656.000,00
2016	2	512.044.000,00
2024	4	1.628.720.807,92
Jumlah	7	2.214.420.807,92

c) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
Tahun	Register	Nilai (Rp)
2015	2	132.270.000,00
2017	5	1.281.182.119,52
2018	8	5.917.484.000,00
2019	7	8.173.840.000,00
2020	12	7.499.508.000,00
2021	1	198.950.000,00
2022	2	265.229.434,57
2024	1	199.800.000,00
Jumlah	38	23.668.263.554,09

d) Sekretariat Daerah		
Tahun	Register	Nilai (Rp)
2017	2	115.940.000,00
Jumlah	2	115.940.000,00

e) RSUD		
---------	--	--

Tahun	Register	Nilai (Rp)
2020	1	1.016.200.000,00
2021	1	1.013.072.000,82
2024	3	2.956.620.817,00
Jumlah	5	4.985.892.817,82

f) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Tahun	Register	Nilai (Rp)
2014	2	320.721.000,80
Jumlah	2	320.721.000,80

g) Dinas Perhubungan		
Tahun	Register	Nilai (Rp)
2020	1	1.978.291.000,70
Jumlah	1	1.978.291.000,70
Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan : a + b + ... + g = Rp54.717.611.003,09		

h) Puskesmas Mbahamdandara		
Tahun	Register	Nilai (Rp)
2024	1	14.314.630.961,68
Jumlah	1	14.314.630.961,68
Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan : a + b + ... + h = Rp55.462.431.611,01		

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan

Pencatatan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan dimulai dari tahun 2012 total senilai Rp82.263.596.005,92 dengan rincian sebagai berikut:

a) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
Tahun	Register	Nilai
2012	1	1.432.951.000,68
2013	2	2.398.236.000,70
2014	3	4.859.790.000,00
2016	3	3.084.650.000,00
2017	1	29.940.000,00
2018	2	345.520.000,00
2020	4	1.053.964.001,30
2021	4	17.093.620.001,31
2022	1	739.918.000,10
2023	8	3.637.915.001,05
2024	11	44.806.542.000,00
Jumlah	40	79.483.046.005,14

b) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
Tahun	Register	Nilai

b) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
2021	1	22.495.000,00
Jumlah	1	22.495.000,00

c) Dinas Kesehatan		
Tahun	Register	Nilai
2024	1	1.556.100.000,00
Jumlah	1	1.556.100.000,00

d) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Tahun	Register	Nilai
2013	1	441.655.000,78
2016	1	749.700.000,00
2018	1	10.600.000,00
Jumlah	3	1.201.955.000,78
Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan : a + b + c = Rp82.263.596.005,92		

Ringkasan mutasi aset Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2024 sebagai berikut:

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2023		96.583.389.795,33
Penambahan konstruksi dalam pengerjaan yang direklasifikasi dari aset yang lain	74.449.657.054,60	
Pengurangan konstruksi dalam pengerjaan yang direklasifikasi ke aset yang lain		7.272.130.233,00
Saldo akhir aset tetap lainnya per 31 Desember 2024		163.760.916.616,93

- 1) Penambahan konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2024 yang direklasifikasi dari aset tetap yang lain senilai Rp74.449.657.054,60 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas PUPR2KP	45.006.342.000,00
2	Dinas Kesehatan	10.543.342.468,00
3	Puskesmas Mbahamdandara	14.314.630.961,68
4	RSUD	2.956.620.817,00
5	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.628.720.807,92
Jumlah		74.449.657.054,60

- a) Dinas PUPR2KP

Penambahan konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2024 yang direklasifikasi dari aset yang lain pada Dinas PUPR2KP senilai Rp45.006.342.000,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Asal Mutasi
1	Pembangunan Gedung Serba Guna (PKK, DHARMAWANITA, DLL)	199.800.000,00	KIB C
2	Pekerjaan Penanganan Long Segment	12.355.590.000,00	KIB D

No	Uraian	Nilai (Rp)	Asal Mutasi
	(Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Siboru - Sipatnanam - Teluk Patipi		
3	Pekerjaan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Waserat-Sanggram	9.061.877.000,00	KIB D
4	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Kokas-Batufiafas-Patimburak	10.587.645.000,00	KIB D
5	Rekonstruksi Jalan Tetar-Timar	3.528.570.000,00	KIB D
6	Pembangunan Bak Reservoir Kapartutin Atas	440.325.000,00	KIB D
7	Pembangunan Jalan Kampung Sum - Patipi Pulau	7.619.685.000,00	KIB D
8	Pembangunan Talud Reservoir Kapartutin Atas	231.555.000,00	KIB D
9	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Mandoni-Mambunibuni	197.600.000,00	KIB D
10	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Otoweri-Tomage	199.700.000,00	KIB D
11	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Kinam-Batufiafas	197.795.000,00	KIB D
12	Pembangunan Jalan Di Kompleks Workshop	186.600.000,00	KIB D
13	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Kampung Duwat Lama	199.600.000,00	KIB D
Jumlah		45.006.342.000,00	

b) Dinas Kesehatan

Penambahan konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2024 yang direklasifikasi dari aset yang lain pada Dinas Kesehatan senilai Rp10.543.342.468,00 berupa:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Asal Mutasi
1	PENGADAAN SOLAR CELL 3 PUSKESMAS (WARTUTIN, MBAHAMDANDARA, ARGUNI)	3.046.650.000,00	KIB B
2	PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN DAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS WARTUTIN	4.821.508.955,00	KIB C
3	PEMBANGUNAN RUMAH DOKTER PUSKESMAS WARTUTIN	304.033.513,00	KIB C
4	PEMBANGUNAN RUMAH PARAMEDIS PUSKESMAS WARTUTIN	815.050.000,00	KIB C
5	IPAL PUSKESMAS ARGUNI	778.050.000,00	KIB D
6	IPAL PUSKESMAS WARTUTIN	778.050.000,00	KIB D
Jumlah		10.543.342.468,00	

c) Puskesmas Mbahamdandara

Penambahan konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2024 yang direklasifikasi dari aset yang lain pada Puskesmas Mbahamdandara senilai Rp14.314.630.961,68 yaitu:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Asal Mutasi
1	Pekerjaan pematangan lahan dan pembangunan Puskesmas Mbahamdandara	13.112.606.584,19	KIB C
2	Pembangunan rumah paramedis Puskesmas Mbahamdandara	1.202.024.377,49.	KIB C
Jumlah		14.314.630.961,68	

d) RSUD

Penambahan konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2024 yang direklasifikasi dari aset yang lain senilai Rp2.956.620.817,00 berupa:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Asal Mutasi
1	Pembangunan Ruang NICU RSUD	96.885.462,00	KIB C
2	Pembangunan Gedung NICU RSUD	2.859.735.355,00	KIB C
Jumlah		2.956.620.817,00	

e) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Penambahan konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2024 yang direklasifikasi dari aset tetap yang lain senilai Rp1.628.720.807,92 berupa:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Asal Mutasi
1	Pembangunan Gedung Asrama Pelajar Fakfak di Kota Sorong	744.820.607,92	KIB C
2	Pembangunan Asrama Pelajar Fakfak di Kota Sorong Tahun 2024	786.300.200,00	KIB C
3	Pembangunan Asrama Mahasiswa Fakfak di Yogyakarta Tahun 2024	59.600.000,00	KIB C
4	Rehabilitasi Asrama Pelajar/Mahasiswa di Makassar Tahun 2024	38.000.000,00	KIB C
Jumlah		1.628.720.807,92	

Beberapa informasi terkait Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2024 disajikan pada berikut ini, di antaranya adalah:

No	Nama Kegiatan	Nilai Kontrak	Sumber Dana	Jumlah yang telah dibayarkan	Nilai KDP	Persentase Penyelesaian (per 31 Desember 2024)
A	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN					
1	Perencanaan dan Pengawasan					
a	Pembangunan Gedung Serba Guna (PKK, DHARMAWANITA, DLL)	199.800.000,00	DAK	199.800.000,00	199.800.000,00	100%
b	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Mandoni-Mambunibun	197.600.000,00	DAU	197.600.000,00	197.600.000,00	100%
c	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Otoweri-Tomage	199.700.000,00	DAU	199.700.000,00	199.700.000,00	100%
d	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Kinam-Batufiafas	197.795.000,00	DAU	197.795.000,00	197.795.000,00	100%



No	Nama Kegiatan	Nilai Kontrak	Sumber Dana	Jumlah yang telah dibayarkan	Nilai KDP	Persentase Penyelesaian (per 31 Desember 2024)
e	Pembangunan Jalan Di Kompleks Workshop	186.600.000,00	DAU	186.600.000,00	186.600.000,00	100%
f	ekonstruksi/Peningkatan Jalan Kampung Duwat Lama	199.600.000,00	DAU	199.600.000,00	199.600.000,00	100%
2	Fisik					
a	Pekerjaan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Siboru - Sipatnanam - Teluk Patipi	13.669.998.000,00	DAK	12.355.590.000,00	12.355.590.000,00	90%
b	Pekerjaan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Waserat-Sanggram	11.217.577.000,00	DAK	9.061.877.000,00	9.061.877.000,00	80%
c	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Kokas-Batufiafas-Patimburak	11.713.175.000,00	DAU	10.587.645.000,00	10.587.645.000,00	90%
d	Rekonstruksi Jalan Tetar-Timar	5.639.930.000,00	DAU	3.528.570.000,00	3.528.570.000,00	60%
e	Pembangunan Bak Reservoir Kapartutin Atas	826.250.000,00	DAU	440.325.000,00	440.325.000,00	50%
f	Pembangunan Jalan Kampung Sum - Patipi Pulau	10.092.960.000,00	DAU	7.619.685.000,00	7.619.685.000,00	75%
g	Pembangunan Talud Reservoir Kapartutin Atas	231.555.000,00	DAU	231.555.000,00	231.555.000,00	80%
B	DINAS KESEHATAN					
1	Fisik					
a	PENGADAAN SOLAR CELL 3 PUSKESMAS (WARTUTIN, MBAHAMDANDARA, ARGUNI)	3207000000	DAK	3.046.650.000,00	3.046.650.000,00	95%
b	PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN DAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS WARTUTIN	9107035455	DAK	4.821.508.955,00	4.821.508.955,00	50%
c	PEMBANGUNAN RUMAH DOKTER PUSKESMAS WARTUTIN	541533513	DAK	304.033.513,00	304.033.513,00	50%
d	PEMBANGUNAN RUMAH PARAMEDIS PUSKESMAS WARTUTIN	1630100000	DAK	815.050.000,00	815.050.000,00	50%
e	IPAL PUSKESMAS ARGUNI	819000000	DAK	778.050.000,00	778.050.000,00	95%
f	IPAL PUSKESMAS WARTUTIN	819000000	DAK	778.050.000,00	778.050.000,00	95%
C	RSUD					
1	Perencanaan dan Pengawasan					
a	PEMBANGUNAN RUANG NICU RSUD	96.885.462,00	DAK	96.885.462,00	96.885.462,00	100%
2	Fisik					

Uraian	Akumulasi Penyusutan (Rp)			
	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah
Saldo 01-01-2024	(404.955.494.845,12)	(164.920.267.522,00)	(1.752.395.590.851,00)	(2.322.271.353.218,12)
Penambahan :				
- Penyusutan tahun 2024	(49.905.570.079,08)	(23.294.194.524,28)	(125.097.683.810,73)	(198.297.448.414,09)
Saldo per 31-12-2024	(454.861.064.924,20)	(188.214.462.046,28)	(1.877.493.274.661,73)	(2.520.568.801.632,21)

4. Aset Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp78.093.745.788,03	Rp103.428.171.700,32

Nilai aset lainnya Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2024 senilai Rp78.093.745.788,03 mengalami penurunan senilai Rp25.334.425.912,29 atau turun 24,49% jika dibandingkan dengan saldo aset lainnya tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp103.428.171.700,32. Aset lainnya Kabupaten Fakfak bisa dilihat pada rincian berikut:

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan / (Pengurangan) (Rp)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.708.764.242,99	7.710.764.242,99	(2.000.000,00)
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.133.520.000,00	1.133.520.000,00	0,00
3	Aset Tidak Berwujud Lainnya	17.349.746.929,00	15.038.327.490,00	2.311.419.439,00
4	Aset Lain-Lain	68.054.877.989,04	61.398.435.684,33	6.656.442.304,71
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(18.196.665.373,00)	(17.008.409.717,00)	(1.188.255.656,00)
6	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	2.043.502.000,00	35.155.534.000,00	(33.112.032.000,00)
	Jumlah	78.093.745.788,03	103.428.171.700,32	(25.334.425.912,29)

a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp7.708.764.242,99	Rp7.710.764.242,99

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara senilai Rp7.708.764.242,99 merupakan saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun 2014 dan tahun 2015 yang telah ditindaklanjuti dengan pembuatan SKTJM di tahun 2015 dan tahun 2019. Rincian Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Setoran s/d Tahun 2023 (Rp)	Setoran Tahun 2024 (Rp)	Sisa SKTJM (Rp)
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	307.803.416,00	0,00	0,00	307.803.416,00
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	47.250.000,00	(3.000.000,00)	0,00	44.250.000,00
3	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	183.544.869,00	0,00	0,00	183.544.869,00
4	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	742.824.250,00	0,00	0,00	742.824.250,00
5	BPPKAD (Badan Promosi dan Investasi)	75.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	65.000.000,00
6	BPPKAD (PPKD)	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
7	Sekretariat Daerah	790.297.326,99	(203.000.000,00)	0,00	587.297.326,99
8	Sekretariat DPRD	3.475.594.772,00	(131.045.000,00)	0,00	3.344.549.772,00
9	Badan Kepegawaian Daerah	137.150.025,00	(37.500.000,00)	(2.000.000,00)	97.650.025,00
10	Distrik Kokas	304.661.878,00	(2.000.000,00)	0,00	302.661.878,00
11	Kelurahan Wagom	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Badan Pemberdayaan Masyarakat	28.839.705,00	(28.839.705,00)	0,00	0,00
13	Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	5.512.500,00	(5.512.500,00)	0,00	0,00
14	Paskalis Rahangmetan	6.682.700,00	0,00	0,00	6.682.700,00
15	Edi Gunawan	26.500.006,00	0,00	0,00	26.500.006,00
Jumlah		8.131.661.447,99	(420.897.205,00)	0,00	7.708.764.242,99

- Pada Tahun 2024 ada setoran ke RKUD senilai Rp2.000.000,00 an. YOHANIS LEFAAN, SE dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Fakfak dengan rincian setoran sebagai berikut:

No	No. Bukti	Tgl Setoran	Nilai (Rp)
1	900.1.3.6/001/BKPSDM/FF/2023	19/02/2024	1.000.000,00
2	900.1.3.6/862/BKPSDM/FF/2024	19/12/2024	1.000.000,00
Jumlah		-	2.000.000,00

b. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2024	31 Desember 2024
	Rp1.133.520.000,00	Rp1.133.520.000,00

Pemerintah Kabupaten Fakfak telah melakukan kerja sama pemanfaatan dengan PT. Rimbun Menara Papua atas pengelolaan Hotel Grand Papua berupa Bangun Guna Serah (BGS) berdasarkan perjanjian kerja sama Pembangunan Hotel Grand Papua antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan PT. Rimbun Menara Papua nomor 556.2/558-b/BUP/2003 dan nomor 008/RMP-BD/VI/03 tanggal 26 Juni 2003 yang di-*addendum* dengan perjanjian

nomor 640/743/BUP/2003 dan nomor 56/RMP-BD/X/05 tanggal 31 Desember 2005 tentang perubahan perjanjian nomor 556.2/558-b/Bup/2003 dan nomor 008/RMP-BD/VI/03 serta perjanjian penyertaan terbatas dengan pola bagi hasil dalam pengelolaan hotel bintang tiga di Fakfak yang ditandatangani Bupati Fakfak selaku PIHAK PERTAMA dan Direktur Utama PT. Rimbun Menara Papua selaku PIHAK KEDUA. Dalam perjanjian kerja sama tersebut telah diatur beberapa hal yang intinya antara lain:

- 1) Pihak pertama memberi hak guna bangunan atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Fakfak seluas 4.723 m² senilai Rp1.133.520.000,00 kepada PIHAK KEDUA untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan hotel Grand Papua dengan jangka waktu 30 tahun terhitung sejak didaftarkan;
- 2) Apabila hak guna bangunan telah berakhir, maka segala bangunan yang berada di atasnya dan segala sesuatu yang melekat padanya menjadi milik PIHAK PERTAMA;
- 3) PIHAK PERTAMA akan menerima bagi hasil sebesar 5,4% dari laba bersih pengelolaan hotel setelah dikurangi pajak, dan akan diserahkan untuk pertama kalinya oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA terhitung sejak dicapai *Break Event Point* (BEP);
- 4) Pada Tahun 2024 PT. Rimbun Menara Papua telah menyeter hasil pengelolaan hotel Grand Papua senilai Rp143.043.163,00.

c. Aset Tidak Berwujud Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp17.349.746.929,00	Rp15.038.327.490,00

Sampai dengan 31 Desember 2024 saldo aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Fakfak senilai Rp17.349.746.929,00 terjadi kenaikan senilai Rp2.311.419.439,00 atau naik 15,37% dari saldo Tahun 2023 yang hanya senilai Rp15.038.327.490,00. Rincian saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

No	SKPD	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Penambahan / (Pengurangan)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00
2	RSUD	1.596.264.439,00	290.000.000,00	1.306.264.439,00

No	SKPD	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Penambahan / (Pengurangan)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	7.777.668.405,00	7.372.668.405,00	405.000.000,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	69.267.000,00	69.267.000,00	0,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	356.000.000,00	356.000.000,00	0,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	499.205.700,00	499.205.700,00	0,00
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	244.511.331,00	244.511.331,00	0,00
9	Dinas Perkebunan	457.625.000,00	57.825.000,00	399.800.000,00
10	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.320.995.328,00	1.320.995.328,00	0,00
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.350.470.426,00	3.150.115.426,00	200.355.000,00
12	Badan Pendapatan Daerah	649.000.000,00	649.000.000,00	0,00
13	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	581.839.300,00	581.839.300,00	0,00
14	Inspektorat	379.000.000,00	379.000.000,00	0,00
Jumlah		17.349.746.929,00	15.038.327.490,00	2.311.419.439,00

Ringkasan mutasi aset tak berwujud selama Tahun 2024 sebagai berikut:

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2023		15.038.327.490,00
Belanja modal aset tak berwujud Tahun 2024	2.526.779.439,00	
Pengurangan aset tak berwujud yang yang direklasifikasi ke barang dan jasa Tahun 2024		215.360.000,00
Saldo akhir aset tak berwujud per 31 Desember 2024		17.349.746.929,00

1) Penambahan aset tak berwujud yang berasal dari belanja modal Tahun 2024 senilai Rp2.526.779.439,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas PUPR2KP	405.000.000,00
2	RSUD	1.306.264.439,00
3	Dinas Perkebunan	399.800.000,00
4	Dinas Perdagangan	35.540.000,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	380.175.000,00
Jumlah		2.526.779.439,00

a) Dinas PUPR2KP

Penambahan aset tak berwujud yang berasal dari belanja modal pada Dinas PUPR2KP senilai Rp405.000.000,00 berupa Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	03502/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	Penyusunan AMDAL Jalan Alternatif Fakfak Siboru (Lanjutan) Pada Universitas Hasanudin	350.000.000,00
2	03507/SP2D-LS/DBH-DRK-OTSUS/PPKD/APBD/2024	Penyusunan AMDAL Jalan Alternatif Fakfak Siboru (DBH MIGAS OTSUS) Pada UNIVERSITAS HASANUDIN	55.000.000,00
Jumlah			405.000.000,00

b) RSUD

Penambahan aset tak berwujud yang berasal dari belanja modal pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp1.306.264.439,00 berupa Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	04872/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	PENGADAAN SOFTWARE SIMRS, PT. MEDION PRIMA SOLUSIN	292.500.000,00
2	05063/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	PENGADAAN HARDWARE SIMRS E CATALOG, PT. BELPIN BLESSIN INDONESIA	799.950.690,00
3	06413/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	PENGADAAN JASA KONSULTAN APLIKASI SIJASMED, SIKIN DAN SIREMUN, CV. PROQUA	120.000.000,00
4	06482/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	PENUNJANG SIMRS (PAKET 2), CV. FURWAGI YANAN	46.333.971,00
5	06491/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	PENUNJANG SIMRS (PAKET 1), CV. FURWAGI YANAN	47.479.778,00
Jumlah			1.306.264.439,00

c) Dinas Perkebunan

Penambahan aset tak berwujud yang berasal dari belanja modal pada Dinas Perkebunan senilai Rp399.800.000,00 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	03314/SP2D-LS/DTU-DBH/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 50% ATAS BELANJA MODAL PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH SAWIT BERKELANJUTAN, CV. CATUR KARSA ABHINAYA	99.950.000,00
2	03388/SP2D-LS/OTSUS-1,25%/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 50% ATAS BELANJA MODAL PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS	99.950.000,00

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
		RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS PERKEBUNAN PALA, CV. CATUR KARSA ABHINAYA	
3	04150/SP2D-LS/OTSUS-1,25%/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS BELANJA MODAL PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS PERKEBUNAN PALA, CV. CATUR KARSA ABHINAYA	99.950.000,00
4	04153/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAAN TAGIHAN 100% ATAS BELANJA MODAL PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH SAWIT BERKELANJUTAN, CV. CATUR KARSA ABHINAYA	99.950.000,00
Jumlah			399.800.000,00

d) Dinas Perdagangan

Penambahan aset tak berwujud yang berasal dari belanja modal pada Dinas Perdagangan senilai Rp35.540.000,00 berupa Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	03855/SP2D-LS/OTSUS-1,25%/PPKD/APBD/2024	PERMINTAAN PEMBAYARAN BIAYA FASILITASI SERTIFIKAT HALAL MUI UNTUK 4 PU TAHUN 2024	15.540.000,00
2	06752/SP2D-LS/OTSUS-1,25%/PPKD/APBD/2024	BELANJA PEMBAYARAN TAGIHAN SERTIFIKASI LABEL BPOM DAN LABEL PATEN MERK PADA KEMENKUM DAN HAM PAPUA BARAT (OTSUS 1,25%)	20.000.000,00
Jumlah			35.540.000,00

e) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penambahan aset tak berwujud yang berasal dari belanja modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp380.175.000,00 berupa Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	03438/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	BELANJA MODAL ASET TIDAK BERWUJUD (SOFTWARE) 100%	200.355.000,00
2	06034/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024	BELANJA SEWA DEDICATED SERVER / CLOUD SERVER UNTUK DUKUNGAN SISTEM KEUANGAN DAERAH	179.820.000,00
Jumlah			380.175.000,00

2) Pengurangan aset tak berwujud yang yang direklasifikasi ke barang dan jasa Tahun 2024 senilai Rp215.360.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	35.540.000,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	179.820.000,00
Jumlah		215.360.000,00

a) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pengurangan aset tak berwujud yang direklasifikasi ke barang dan jasa pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian senilai Rp35.540.000,00 berupa pembayaran tagihan sertifikasi label BPOM dan label paten merk pada Kemenkum dan Ham Papua Barat sesuai SP2D Nomor: 06752/SP2D-LS/OTSUS-1,25%/PPKD/APBD/2024.

b) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pengurangan aset tak berwujud yang direklasifikasi ke barang dan jasa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp179.820.000,00 berupa belanja sewa dedicated server / cloud server untuk dukungan sistem keuangan daerah sesuai SP2D Nomor: 06034/SP2D-LS/PPKD/APBD/2024.

d. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan reklasifikasi suatu aset yang belum ada bukti kepemilikan, aset yang akan dihibahkan kepada masyarakat/organisasi, atau aset yang akan dilakukan penghapusan.

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 senilai Rp68.054.877.989,04

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Investasi non permanen sapi gaduhan	1.788.925.000,00
2	Ganti rugi buka pemalangan aset instansi lain	50.000.000,00
3	Reklasifikasi dari aset peralatan mesin	2.176.387.628,00
4	Aset yang tercatat pada aset jalan namun bukan merupakan aset jalan	1.178.965.000,00
5	Aset tetap lainnya berupa hewan ternak	639.144.000,00
6	Aset tak berwujud yang sudah tidak dipergunakan lagi	10.015.650.400,00
7	Aset dalam kondisi rusak berat/hilang/lainnya	5.941.100.020,00
8	Aset yang sudah di bongkar namun belum dihapuskan	305.991.667,00
9	Aset Pasar Thumburuni yang akan dihapuskan	18.138.800.000,00
10	Aset Tetap yang akan dihibahkan	6.208.319.360,00
11	Temuan Kelebihan Pembayaran pada LHP BPK TA 2023	871.369.299,50
12	Investasi Jangka Panjang Permanen PD. Mbiah Pahi	14.343.243.599,33
13	Temuan Kelebihan Pembayaran pada LHP BPK TA 2024	6.396.982.015,21
Jumlah		68.054.877.989,04

Penjelasan saldo Aset Lain-Lain sebagai berikut:

- 1) Investasi non permanen Sapi Gaduhan senilai Rp1.788.925.000,00 merupakan investasi non permanen pada Dinas Pertanian dan Peternakan yang hingga saat ini sudah tidak lagi berada dalam penguasaan pengguna

barang atau masyarakat sehingga akan dihapuskan dari inventaris kekayaan daerah yang telah ditetapkan penghapusannya dengan Surat Keputusan Bupati Fakfak Nomor: 520-167 Tahun 2015 Tanggal 5 Juni 2015 tentang Penghapusan Sapi Gaduh/Sapi Gulir pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Fakfak. Penghapusan sapi gaduhan belum dapat dilakukan karena pada Surat Keputusan Bupati tersebut di atas belum dicantumkan nilai sapi gaduhannya. Pencatatan di neraca akan dilakukan setelah terbit SK perubahan tentang penghapusan sapi gaduhan. Sapi gaduhan tersebut dirincikan sebagai berikut:

Tahun	Sapi yg blm lunas (ekor)	Harga Beli (Rp)	Jumlah (Rp)	Sapi anak yg telah disetor (ekor)	Harga saat ini (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah Keseluruhan (Rp)
2002	14	3.000.000,00	42.000.000,00	230	2.500.000,00	575.000.000,00	617.000.000,00
2003	2	3.250.000,00	6.500.000,00	26	2.500.000,00	65.000.000,00	71.500.000,00
2004	43	3.500.000,00	150.500.000,00	29	2.500.000,00	72.500.000,00	223.000.000,00
2006	167	4.500.000,00	751.500.000,00	0	2.500.000,00	0,00	751.500.000,00
2007	7	5.175.000,00	36.225.000,00	0	2.500.000,00	0,00	36.225.000,00
2010	15	5.980.000,00	89.700.000,00	0	2.500.000,00	0,00	89.700.000,00
	248		1.076.425.000,00	285		712.500.000,00	1.788.925.000,00

- 2) Ganti rugi buka pemalangan aset instansi lain yang dicatat pada aset tanah senilai Rp50.000.000,00 merupakan pembayaran ganti rugi atas pemalangan tanah milik instansi lain yakni tanah milik Bulog senilai Rp30.000.000,00 dan tanah milik Kantor Pos senilai Rp20.000.000,00.
- 3) Reklasifikasi dari aset peralatan mesin senilai Rp2.176.387.628,00 yang direklasifikasi ke aset lain-lain terdiri dari:
 - a) Aset peralatan dan mesin sepeda motor Rp1.069.335.028,00 merupakan sisa hasil temuan BPK sesuai dengan LHP BPK RI Nomor 23.B/LHP/XIX.MAN/11/2012, tanggal 02 November 2012 yang sebagian sudah ditindaklanjuti;
 - b) Aset peralatan dan mesin sepeda motor senilai Rp60.000.000,00 merupakan aset milik pemerintah pusat yang belum dihibahkan ke pemerintah daerah namun sudah tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah yang kini dikuasai oleh Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - c) Aset peralatan dan mesin yang sudah rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi senilai Rp126.360.000,00;
 - d) Aset peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor yang

dipinjampakaikan kepada instansi lain namun masih tercatat dalam neraca senilai Rp920.692.600,00.

- 4) Aset yang tercatat sebagai aset jalan namun sesungguhnya bukan merupakan aset jalan adalah pembersihan lahan dan pengecatatan talud senilai Rp1.178.965.000,00.
- 5) Aset tetap lainnya berupa hewan ternak Kambing Etawa yang akan dihapuskan karena asetnya sudah tidak ada lagi (mati) senilai Rp639.144.000,00 pada Dinas Pertanian dan Peternakan.
- 6) Aset tak berwujud yang sudah tidak dipergunakan lagi dan akan dihapuskan senilai Rp10.015.650.400,00.
- 7) Aset dalam kondisi rusak berat/hilang/lainnya dan akan dihapus senilai Rp5.941.100.020,00.
- 8) Aset Gedung dan Bangunan yang sudah dibongkar dan akan dihapuskan senilai Rp305.991.667,00 merupakan Gedung Ruang Perawatan Anak pada RSUD Fakfak yang telah dibongkar dan dibangun kembali.
- 9) Aset Pasar Thumburuni yang akan dihapuskan senilai Rp18.138.800.000,00, dengan rincian SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	17.336.576.000,00
2	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	314.824.000,00
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	487.400.000,00
Jumlah		18.138.800.000,00

SK Penghapusan Aset Pasar Thumburuni sesungguhnya telah diterbitkan pada Tahun 2021, namun dalam SK tersebut tidak mencantumkan nilai penghapusannya sehingga masih tercatat sebagai aset lain-lain.

- 10) Aset tetap yang akan dihibahkan merupakan aset yang berasal dari belanja hibah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum dihibahkan kepada penerima senilai Rp6.208.319.360,00 dengan rician sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga	2.403.633.162,00
2	DPU(PR)2KP	3.749.288.784,00
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	14.263.722,00

No	SKPD	Nilai (Rp)
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	41.133.692,00
Jumlah		6.208.319.360,00

- a) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga yang dikerjakan pada tahun anggaran 2023, dan telah dimanfaatkan namun sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 belum terdapat BAST penyerahannya senilai Rp2.403.633.162,00. Sampai dengan laporan ini disusun belum ada BAST yang diterbitkan, yang terdiri dari:
- (1) Pekerjaan Pembangunan satu ruang laboratorium SMP PGRI Fakfak senilai Rp923.304.121,00.
 - (2) Pekerjaan Pembangunan Gedung sekolah PAUD Khalifah senilai Rp500.417.000,00.
 - (3) Pekerjaan Pembangunan dua rumah guru SD YPK SUM senilai Rp497.971.041,00.
 - (4) Pekerjaan Pembangunan Pagar SD YPK Werba senilai Rp481.941.000,00.
- b) DPU(PR)2KP senilai Rp3.749.288.784,00 terdiri dari:
- (1) Gedung Auditorium KOI senilai Rp2.668.975.331,00.
 - (2) Gedung Sekretariat Kantor KOI Rp931.111.693,00.
 - (3) Perencanaan Gedung Auditorium KOI senilai Rp112.000.110,00.
 - (4) Perencanaan Gedung Sekretariat KOI senilai Rp37.201.650,00.
- c) Dinas Kelautan dan Perikanan berupa Penyediaan Sarana Penunjang Pembudidayaan Ikan Air Tawar (Otsus Spesific Grant 1,25%) senilai Rp14.263.722,00.
- d) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupa Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp41.133.692,00.

- 11) Temuan kelebihan pembayaran pada LHP BPK TA 2023 senilai Rp871.369.299,50 yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai akhir tahun anggaran 2024 dan sampai dengan laporan ini disusun belum ada setoran kembali ke Kas Daerah. Kelebihan pembayaran ini terdiri dari:

No	Jenis Temuan	Nilai (Rp)
1	Kelebihan pembayaran pekerjaan Fisik TA 2023	462.069.298,50
2	Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas TA 2023	316.800.001,00

No	Jenis Temuan	Nilai (Rp)
3	Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial TA 2023	92.500.000,00
Jumlah		871.369.299,50

Tabel tersebut dirinci sebagai berikut:

- a) Kelebihan pembayaran pekerjaan Fisik TA 2023 yang harus disetorkan kembali ke Kas Daerah namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetor senilai Rp462.069.298,50. Sampai dengan laporan ini disusun belum ada penyetoran Kembali ke Kas Daerah. Kelebihan Pembayaran ini terdiri dari:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	1.465.292,17
2	Dinas Kesehatan	460.604.006,33
Jumlah		462.069.298,50

No.	Nama Pekerjaan	Kurang Volume (Rp)	Setoran Tahun 2024 (Rp)	Sisa Saldo (Rp)
Dinas Pendidikan				
1	Pembangunan 1 Ruang Laboratorium SMP PGRI Fakfak	6.701.000,00	6.701.000,00	0,00
2	Pembangunan Gedung Sekolah PAUD Khalifah	10.683.000,00	10.683.000,00	0,00
3	Pembangunan 2 Unit Rumah Guru SD YPK SUM	3.261.000,00	3.260.707,83	292,17
4	Pembangunan Pagar SD YPK Werba	17.759.000,00	16.294.000,00	1.465.000,00
Jumlah Kelebihan Pembayaran Fisik Dinas Pendidikan		38.404.000,00	36.938.707,83	1.465.292,17
Dinas Kesehatan				
1	Pembangunan Rumah Kopel Paramedis Puskesmas Kayauni Paket 1	4.485.000,00	4.485.000,00	0,00
2	Pembangunan Rumah Kopel Paramedis Puskesmas Kayauni Paket 2	6.397.000,00	6.397.000,00	0,00
3	Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas Kayauni Paket 1	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00
4	Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas Kayauni Paket 2	2.890.000,00	2.889.993,67	6,33
5	Pembangunan Puskesmas Kayauni	30.425.000,00	0,00	30.425.000,00
6	Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas Fakfak Timur Tengah Paket 1	502.000,00	502.000,00	0,00
7	Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas Fakfak Timur Tengah Paket 2	184.000,00	184.000,00	0,00

No.	Nama Pekerjaan	Kurang Volume (Rp)	Setoran Tahun 2024 (Rp)	Sisa Saldo (Rp)
8	Pembangunan Puskesmas Fakfak Timur Tengah	430.179.000,00	0,00	430.179.000,00
Jumlah Kelebihan Pembayaran Fisik Dinas Kesehatan		477.952.000,00	17.347.993,67	460.604.006,33
Dinas Pekerjaan Umum				
1	Pembangunan Jalan Desa Strategis Mumre - Siboru	73.218.000,00	73.218.000,00	0,00
2	Penanganan Longsegment Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi Lusiferi Jalan Kokas (No. Ruas 493)	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
3	Pemeliharaan Periodik Jalan Di Fakfak	73.731.000,00	73.731.000,00	0,00
4	Pembangunan Gedung Auditorium Kantor Organisasi Islam	4.824.000,00	4.824.000,00	0,00
5	Pekerjaan Tribun Utama (Kurang Bayar SDA Otsus)	2.947.000,00	2.947.000,00	0,00
6	Pekerjaan Ruang Terbuka Hijau Jalan Salasa Namudat	13.620.000,00	13.620.000,00	0,00
7	Pekerjaan Rehabilitasi Timbunan Talud Jl. DR Salasa Namudat	16.409.000,00	16.409.000,00	0,00
8	Pekerjaan Penataan Jalan Baru Fakfak (Kurang Bayar SDA Otsus)	70.319.000,00	70.319.000,00	0,00
9	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Siboru - S. Nanam - Teluk Patipi.	24.004.000,00	24.004.000,00	0,00
10	Penanganan Longsegment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Pala - Wagom -Torea (No. Ruas 426 DAK)	103.435.000,00	103.435.000,00	0,00
Jumlah Kelebihan Pembayaran Fisik Dinas Pekerjaan Umum		385.257.000,00	385.257.000,00	0,00
Dinas Perhubungan				
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Distrik Wartutin)	172.682.000,00	172.682.000,00	0,00
Jumlah Kelebihan Pembayaran Fisik Dinas Perhubungan		172.682.000,00	172.682.000,00	0,00
JUMLAH TOTAL		1.074.295.000,00	612.225.701,50	462.069.298,50

- b) Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas yang harus disetorkan kembali ke Kas Daerah pada TA 2023 namun sampai

dengan 31 Desember 2024 belum disetor senilai Rp316.800.001,00. Sampai dengan laporan ini disusun belum ada penyeteroran Kembali ke Kas Daerah. Kelebihan Pembayaran ini terdiri dari:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	DPUPR2KP	278.200.000,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	34.632.000,00
3	Sekretariat DPRD	3.968.001,00
Jumlah		316.800.001,00

No.	SKPD	Saldo Awal (Rp)	Setoran Tahun 2024 (Rp)	Sisa Saldo (Rp)
1	DPU(PR)2KP	471.980.000,00	193.780.000,00	278.200.000,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	34.632.000,00	0,00	34.632.000,00
3	Sekretariat DPRD	126.757.666,00	122.789.665,00	3.968.001,00
JUMLAH TOTAL		633.369.666,00	316.569.665,00	316.800.001,00

- (1) DPUPR2KP senilai Rp278.200.000,00 berupa Kelebihan Pembayaran uang transportasi pada belanja perjalanan dinas.
 - (2) Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp34.632.000,00 berupa Kelebihan Pembayaran uang transportasi pada belanja perjalanan dinas dan kelebihan pembayaran uang harian.
 - (3) Sekretariat DPRD senilai Rp3.968.001,00 berupa Kelebihan Pembayaran uang transportasi pada belanja perjalanan dinas dan kelebihan pembayaran uang representasi.
- c) Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial yang harus disetorkan kembali ke Kas Daerah pada TA 2023 namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetorkan senilai Rp92.500.000,00 merupakan temuan penyeteroran bansos ke mahasiswa yang tidak aktif kuliah pada TA 2023 dan harus dikembalikan ke kas daerah. Sampai dengan laporan ini disusun belum ada penyeteroran Kembali ke Kas Daerah.
- 12) Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Mbiah Pahi yang direklas ke aset lain-lain sesuai dengan Surat Pernyataan Bupati Fakfak Nomor: 900.1.13.2/488/BUP/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 senilai Rp14.343.243.599,33.
 - 13) Temuan kelebihan pembayaran pada LHP BPK TA 2024 senilai Rp6.396.982.015,21 yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai akhir tahun anggaran 2024 dan sampai dengan laporan ini disusun belum ada setoran kembali ke Kas Daerah. Kelebihan pembayaran ini terdiri dari:

No	Jenis Temuan	Nilai (Rp)
1	Kelebihan pembayaran pekerjaan Fisik TA 2024	3.505.735.630,81
2	Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa TA 2024	2.765.021.384,40
3	Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial TA 2024	62.225.000,00
4	Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga TA 2024	64.000.000,00
Jumlah		6.396.982.015,21

- a) Kelebihan pembayaran pekerjaan Fisik TA 2024 yang harus disetorkan kembali ke Kas Daerah namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetor senilai Rp3.505.735.630,81. Kelebihan Pembayaran ini terdiri dari:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	463.098.404,59
2	Dinas Kesehatan	409.114.043,81
3	RSUD	215.880.235,85
4	DPU(PR)2KP	2.370.514.760,61
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	12.972.972,96
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.827.397,99
7	BPKAD	25.327.815,00
Jumlah		3.505.735.630,81

No.	Nama Pekerjaan	Kurang Volume (Rp)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
1	Belanja Modal Kursi Pejabat	29.729.729,73
2	Belanja Modal AC	55.444.500,00
3	Belanja Modal Laptop	148.462.500,00
4	Belanja Modal Personal Komputer pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Bidang Pendidikan Dasar	6.298.890,00
5	Belanja Personal Komputer (Laptop) pada Sub Bidang Penatausahaan Barang dan Aset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	32.398.015,00
6	Belanja Modal Personal Komputer pada Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Tingkat SD/MI	19.067.500,00
7	Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Camera) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	5.566.077,00
8	Belanja Modal Handycam Untuk Kegiatan KTU pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	3.395.696,00
9	kelebihan pembayaran atas realisasi belanja honorarium dan belanja modal pada Dana BOSP SMP Negeri Bomberay	6.500.000,00
10	Pekerjaan Pembangunan 1 Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMP Yapis 2 Fakfak	2.345.741,39
11	Pekerjaan Pembangunan 1 Ruang Laboratorium Biologi Beserta Perabotnya SMKS YAPIS Fakfak (DAK Fisik Reguler SMA/SMK)	9.808.841,44
12	Pekerjaan Pembangunan 1 Ruang Laboratorium Bahasa Beserta	1.907.467,97

No.	Nama Pekerjaan	Kurang Volume (Rp)
	Perabotnya - SMKS YAPIS Fakfak (DAK Fisik Reguler SMA/SMK)	
13	Pekerjaan Pembangunan 1 Ruang Laboratorium Kimia Beserta Perabotnya – SMKS YAPIS Fakfak (DAK Fisik Reguler SMA/SMK)	38.482.450,71
14	Pekerjaan Pembangunan 3 Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya – SMKS YAPIS Fakfak (DAK Fisik Reguler SMA/SMK)	2.611.403,27
15	Pekerjaan Pembangunan Asrama Pelajar Fakfak (Sorong)	101.079.592,08
Jumlah Kelebihan Pembayaran Fisik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		463.098.404,59
Dinas Kesehatan		
1	Pengadaan Set Pemeriksaan Umum 3 Puskesmas Baru	11.427.027,00
2	Pengadaan Meubelair Puskesmas Arguni	4.181.000,00
3	Pekerjaan Pematangan Lahan dan Pembangunan Puskesmas Arguni	179.723.757,37
4	Pematangan Lahan dan Pembangunan Puskesmas Mbahamdandara	36.571.340,81
5	Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas Mbahamdandara	5.908.185,59
6	Pembangunan Rumah Paramedis Puskesmas Mbahamdandara Paket 1	17.413.500,99
7	Pembangunan Rumah Paramedis Puskesmas Mbahamdandara Paket 2 (DAK)	15.938.817,51
8	Pembangunan Rumah Paramedis Puskesmas Mbahamdandara Paket 3	16.122.267,83
9	Pembangunan Pagar Puskesmas Arguni (DAK)	10.024.943,11
10	Pembangunan Pagar Puskesmas Mbahamdandara	4.471.936,95
11	Pembangunan Pagar Puskesmas Wartutin	1.496.608,84
12	Pembangunan Rumah Paramedis Puskesmas Wartutin Paket 3	5.557.930,74
13	Pengawasan Pembangunan Rumah Paramedis PKM Wartutin (DAK)	26.023.200,00
14	Pembangunan Bak Air Puskesmas Arguni Paket 1	5.955.963,05
15	Pembangunan Bak Air Puskesmas Arguni 2	11.177.740,58
16	Pembangunan Bak Air Puskesmas Mbahamdandara Paket 2	5.949.565,21
17	Pembangunan Bak Air Puskesmas Mbahamdandara Paket 1	12.920.910,66
18	Pembangunan Bak Air Puskesmas Bomberay	6.693.850,00
19	Pembangunan Bak Air Puskesmas Wartutin Paket 2	13.641.992,73
20	Pembangunan Bak Air Puskesmas Wartutin Paket 1	17.913.504,84
Jumlah Kelebihan Pembayaran Fisik Dinas Kesehatan		409.114.043,81
RSUD		
1	Pengadaan Pemasangan Jaringan Wifi	1.086.156,00
2	Pembangunan Gedung Laundry	1.248.688,32
3	Pembangunan Gedung Farmasi RSUD	93.286.042,07
4	Pembangunan Gedung NICU	26.475.799,24
5	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Rumah Sakit	64.377.093,28
6	Pengadaan Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter	29.406.456,94
Jumlah Kelebihan Pembayaran Fisik RSUD		215.880.235,85
DPU(PR)2KP		
1	Alih Trase Jalan Tetar -Timar (Pasar Tetar ke Kampung Offie) Tahap II	34.314.783,71

No.	Nama Pekerjaan	Kurang Volume (Rp)
2	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan perpipaan di Kawasan Strategis (Fakfak Tengah) 1% BLOCKGRANT	16.916.593,40
3	Pekerjaan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Siboru - Sipatnamam - Teluk Patipi	507.224.759,97
4	Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Bts. Kota Fakfak – Siboru	228.970.906,75
5	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Kokas – Batufiafas – Patimburak	528.427.693,97
6	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Di Kampung Tanama RT.4 (1% BlockGrant)	185.354.094,60
7	Peningkatan/Rekonstruksi Ruas Jalan Provinsi Teluk Patipi (Kampung Adora – Us)	140.296.030,26
8	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan SP 7 - SP 2 (STA 0+000 s/d 0+168)	115.381.622,31
9	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan SP 7 - SP 2 (STA 0+168 s/d 0+380)	145.082.539,99
10	Peningkatan Jalan Di Kampung Pinang Agung	4.732.035,78
11	Pembangunan Jalan Kampung Sum - Patipi Pulau (DBH MIGAS OTSUS)	223.350.985,80
12	Rekonstruksi Jalan Tetar - Timar (DAU)	240.462.714,07
Jumlah Kelebihan Pembayaran Fisik DPU(PR)2KP		2.370.514.760,61
Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik		
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Videotron	12.972.972,96
Jumlah Kelebihan Pembayaran Fisik Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik		12.972.972,96
Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
1	Pekerjaan Pembangunan Pelataran Pasar SP 5 Bomberay	8.827.397,99
Jumlah Kelebihan Pembayaran Fisik Dinas Perindustrian dan Perdagangan		8.827.397,99
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
1	Pengadaan Belanja Modal Pekerjaan Peralatan Jaringan Server	25.327.815,00
Jumlah Kelebihan Pembayaran Fisik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		25.327.815,00

- b) Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa yang harus disetorkan kembali ke Kas Daerah pada TA 2024 namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetor senilai Rp2.765.021.384,40. Kelebihan Pembayaran ini terdiri dari:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	1.069.541.187,00
2	Puskesmas Fakfak	38.410.000,00
3	Puskesmas Sekban	30.570.097,00
4	Puskesmas Kokas	35.876.584,00
5	Puskesmas Werba	82.621.500,00
6	Puskesmas Bomberay	13.872.000,00

No	SKPD	Nilai (Rp)
7	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	220.804.508,00
8	BPKAD	82.215.000,00
9	Sekretariat DPRD	1.156.620.508,40
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34.490.000,00
Jumlah		2.765.021.384,40

(1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga senilai Rp1.069.541.187,00 terdiri dari:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas	1.062.041.187,00
2	Kelebihan pembayaran atas realisasi belanja honorarium	7.500.000,00
Jumlah		1.069.541.187,00

- (2) Puskesmas Fakfak senilai Rp38.410.000,00 berupa Kelebihan Pembayaran perjalanan dinas.
 - (3) Puskesmas Sekban senilai Rp30.570.097,00 berupa Kelebihan Pembayaran ATK.
 - (4) Puskesmas Kokas senilai Rp35.876.584,00 berupa Kelebihan Pembayaran ATK.
 - (5) Puskesmas Werba senilai Rp82.621.500,00 berupa kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.
 - (6) Puskesmas Bomberay senilai Rp13.872.000,00 berupa kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.
 - (7) BP4D senilai Rp220.804.508,00 berupa Kelebihan Pembayaran perjalanan dinas.
 - (8) BPKAD senilai Rp82.215.000,00 berupa kelebihan pembayaran atas Tenaga Ahli Supervisi Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Jarkomda.
 - (9) Sekretariat DPRD senilai Rp1.156.620.508,40 berupa Kelebihan Pembayaran perjalanan dinas.
 - (10) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp34.490.000,00 berupa Kelebihan Pembayaran perjalanan dinas.
- c) Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak yang harus disetorkan kembali ke Kas Daerah pada TA 2024 namun

sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetor senilai Rp62.225.000,00. Pembayaran ini terdiri dari:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Kelebihan pembayaran atas realisasi belanja hibah	16.725.000,00
2	Kelebihan pembayaran atas realisasi belanja bantuan sosial	45.500.000,00
Jumlah		62.225.000,00

- d) Kelebihan Pembayaran Belanja Tak Terduga senilai Rp64.000.000,00 pada BPKAD Kabupaten Fakfak yang harus disetorkan kembali ke Kas Daerah pada TA 2024 merupakan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan dan sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetor ke Kas Daerah.

e. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp(18.196.665.373,00)	Rp(17.008.409.717,00)

Sampai dengan 31 Desember 2024 saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Fakfak senilai Rp(18.196.665.373,00), merupakan akumulasi penyusutan Aset Lain – Lain pada SKPD berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	(3.900.000,00)
2	Dinas Kesehatan	(163.335.386,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(2.596.651.002,00)
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(94.397.325,00)
5	Dinas Perhubungan	(1.254.447.364,00)
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(22.713.808,00)
7	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	(78.933.333,00)
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(319.162.091,00)
9	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(3.577.500,00)
10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(1.136.854.486,00)
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(1.049.171.258,00)
12	Dinas Perkebunan	(19.666.875,00)
13	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	(1.837.500,00)
14	Sekretariat Daerah	(643.861.145,00)
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(10.457.161.702,00)
16	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	(39.863.642,00)
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(305.157.402,00)
Jumlah		(18.196.665.373,00)

Diantara akumulasi penyusutan aset lain-lain tersebut diatas terdapat akumulasi penyusutan aset Pasar Thumburuni senilai Rp(1.188.255.656,00)

yang direklas ke aset lain-lain karena akan dihapuskan dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(1.136.854.486,00)
2	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(28.687.362,00)
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(22.713.808,00)
Jumlah		(1.188.255.656,00)

f. Dana Transfer	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Treasury Deposit Facility (TDF)	Rp2.043.502.000,00	Rp35.155.534.000,00

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)* adalah Fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Sampai dengan 31 Desember 2024 saldo Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)* Pemerintah Kabupaten Fafak senilai Rp2.043.502.000,00.

5.3.2. Kewajiban	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp2.269.690.530,10	Rp191.282.066,00

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Fafak yang masih harus dibayar per 31 Desember 2024 senilai Rp2.269.690.530,10 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	94.328.597,00	13.222.789,00
Utang Belanja	2.040.602.656,10	43.300.000,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	134.759.277,00	134.759.277,00
Jumlah	2.269.690.530,10	191.282.066,00

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Fafak per 31 Desember 2024 senilai Rp94.328.597,00 yang merupakan utang iuran jaminan kesehatan yang merupakan kesalahan pembayaran iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan tidak sesuai kode akun.

2. Utang Belanja	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp2.040.602.656,10	Rp43.300.000,00

Jumlah utang belanja Pemerintah Kabupaten Fafak per 31 Desember 2024 senilai Rp2.040.602.656,10 yang terdiri dari:

- Utang Belanja Barang dan Jasa pada DPU(PR)2KP senilai Rp19.900.000,00 yaitu Pekerjaan Pengadaan Pipa di Danaweria pada CV. UGAR SEJAHTERA dengan Nomor Kontrak 02/PPK/Dnwr-fisik/DPUPR2KP-FF/XII/2022 yang pekerjaannya telah selesai 100% di tahun 2022 namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum dibayarkan.
- Utang pembayaran Bulog pada BPKAD senilai Rp1.335.797.478,10.
- Kekurangan potongan PFK atas PPU PPPK dan DPRD yang belum sesuai diperhitungkan dalam pembayaran gaji senilai Rp30.366.347,00 pada BPKAD.
- Kurang bayar utang BPJS PBU senilai Rp654.538.831,00 pada Dinas Kesehatan.

3. Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp134.759.277,00	Rp134.759.277,00

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Fafak per 31 Desember 2024 senilai Rp134.759.277,00 merupakan Utang Pengadaan Aset Tetap yang belum sempat terbayarkan sedangkan progres pekerjaan sudah 100% pada beberapa SKPD dengan mutasi penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo (Rp)
Saldo Awal	3.052.426.713,00
<i>Penambahan :</i>	
-	0,00
<i>Jumlah Penambahan</i>	0,00
<i>Pengurangan :</i>	
Pembayaran utang DPU(PR)2KP	2.917.667.436,00
<i>Jumlah Pengurangan</i>	2.917.667.436,00
Jumlah	134.759.277,00

Utang Pengadaan Aset Tetap terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	44.800.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan	89.959.277,00

No	Uraian	Saldo (Rp)
	Kawasan Pemukiman	
Jumlah		134.759.277,00

a. Utang Pengadaan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan

Utang Pengadaan Aset Tetap senilai Rp44.800.000,00 adalah sisa utang tahun 2018 merupakan belanja modal yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Sisa utang tersebut oleh pihak ketiga **tidak akan** ditagih lagi ke Pemerintah Kabupaten Fakfak, namun belum adanya pernyataan tertulis dari pihak ketiga sehingga masih dicatat ke dalam neraca. Utang tersebut akan dihapuskan apabila sudah ada pernyataan secara tertulis dari pihak ketiga yang menyatakan bahwa utang tersebut tidak akan ditagih lagi ke Pemerintah Kabupaten Fakfak.

b. Utang Pengadaan Aset Tetap pada Dinas PUPR2KP

Utang Pengadaan Aset Tetap pada Dinas PUPR2KP dari Tahun 2022 yang belum dibayarkan 100% padahal pekerjaan fisik sudah 100% senilai Rp89.959.277,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Pembayaran 2023 (Rp)	Pembayaran 2024 (Rp)	Sisa Utang (Rp)
1	Kekurangan pembayaran pekerjaan Perencanaan Pematangan Kuburan Umum pada DPUPR2KP yang belum dibayarkan 100% padahal pekerjaan fisik 100% pada tahun 2020.	39.800.000,00	0,00	0,00	39.800.000,00
2	sisa utang Pekerjaan pematangan lahan bandara siboru TA 2019 pada DPUPR2KP yang sudah selesai 100% di 31 Desember 2020 yang dibayarkan pada TA 2020. Namun ada kesalahan perhitungan pemotongan uang muka pada saat pembayaran progress 100% sehingga terjadi kekurangan pembayaran senilai Rp932.299.181,00. pada tahun 2021 telah dibayarkan dengan SP2D Nomor : 3847/SP2D-LS/PPKD/APBD/2021 tanggal 21 Desember 2021 senilai Rp932.299.000,00, sehingga masih terdapat sisa utang senilai Rp181,00	181,00	0,00	0,00	181,00
3	Tagihan 100% Atas Pekerjaan Optimalisasi SPAM IKK Teluk Patipi Kabupaten Fakfak Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. CAHAYA MBOYAN	1.120.169.032,00	1.120.169.032,00	0,00	0,00



No	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Pembayaran 2023 (Rp)	Pembayaran 2024 (Rp)	Sisa Utang (Rp)
4	Pembayaran Tagihan 100% atas Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kab. Fakfak pada CV. UGAR ABADI	695.730.000,00	695.730.000,00	0,00	0,00
5	Pembayaran Belanja Pengadaan Alat Angkutan Apung Bermotor Perahu Kasko Fiber Glass Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. CITTA FAJAR UTAMA	29.960.000,00	29.960.000,00	0,00	0,00
6	Pembayaran Belanja Pengadaan Alat Angkutan Apung Bermotor Mesin Jhonson Tempel Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. CITTA FAJAR UTAMA	58.818.000,00	58.818.000,00	0,00	0,00
7	Pembayaran Tagihan Pengawasan Pembangunan Pisanisasi Di Kampung Tarak Untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Fakfak pada CV. FAKTOR REKAYASA KONSULTAN	11.990.000,00	0,00	0,00	11.990.000,00
8	Pembayaran Tagihan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Sarana Penangkap Air (Catchment Area) Di Air Besar Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. MBAHAM TEKNIK KONSULTAN	40.000.000,00	39.999.588,00	0,00	412,00
9	Pembayaran Tagihan 100% Atas Pengawasan Renovasi Tangga TPA Kampung Buton Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. DARMA CITRA UTAMA	1.990.000,00	1.989.901,00	0,00	99,00
10	Pembayaran Tagihan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Di Distrik Karas Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada PT. INOVASI KONSULINDO RAYA	17.890.000,00	17.889.000,00	0,00	1.000,00
11	Pembayaran Tagihan Pengawasan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Di Distrik Furwagi (LPB, LPA dan LAPEN) Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. MITRA PATRIA KONSULTAN	156.700.000,00	156.700.000,00	0,00	0,00
12	Pembayaran Tagihan Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Tanama (DBH-SDA-OTSUS) Untuk	5.890.000,00	5.889.710,00	0,00	290,00



No	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Pembayaran 2023 (Rp)	Pembayaran 2024 (Rp)	Sisa Utang (Rp)
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Fakfak pada CV. DARMA CITRA UTAMA				
13	Pembayaran Tagihan Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan STIKIP Fakfak pada CV. DARMA CITRA UTAMA	9.490.000,00	9.490.000,00	0,00	0,00
14	Pembayaran Tagihan 100% Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Kampung Kinam (DBH-SDA-OTSUS) Untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Fakfak pada CV. KOMBIMUR	699.786.500,00	699.786.500,00	0,00	0,00
15	Pembayaran Tagihan Pengawasan Pembangunan Saluran Koramil-Magefa pada CV. DARMA CITRA UTAMA	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00
16	Pembayaran Tagihan Pengawasan Pembangunan Talud Rumah Negara Tahap II Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. DARMA CITRA UTAMA	4.000.000,00	3.999.871,00	0,00	129,00
17	Pembayaran Tagihan 100 % Atas Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Kantor Distrik Kramomongga Kokas (DBH-SDA-OTSUS) untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. DARMA CITRA UTAMA	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00
18	Pembayaran Pengawasan Pembangunan Talud GKI Klasis Kokas pada CV. DARMA CITRA UTAMA	14.850.000,00	0,00	0,00	14.850.000,00
19	Pembayaran Tagihan 100% Atas Pengawasan Pengecoran Jalan KOREM FAKFAK (DBH-SDA-OTSUS) Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. DARMA CITRA UTAMA	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00
20	Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Bersih Tanama Atas pada CV. Siara Konsultan	13.417.000,00	0,00	0,00	13.417.000,00
21	Pengawasan Saluran Kuburan Lusiperi pada CV. FAYA KUNTURA SENTOSA	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00
22	Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Di Kampung Mambunibuni CV. FAYA KUNTURA SENTOSA	19.750.000,00	19.749.834,00	0,00	166,00
23	Pengawasan Pembangunan Talud Rumah Negara	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00

No	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Pembayaran 2023 (Rp)	Pembayaran 2024 (Rp)	Sisa Utang (Rp)
24	Pengawasan Pembangunan Talud di Mambruk Dalam pada CV. DARMA CITRA UTAMA	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00
25	Pembayaran Pengawasan Pembangunan Saluran Pengadiliran Wagom (DBH-SDA-OTSUS) untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. DARMA CITRA UTAMA	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00
26	Pengawasan Pembuatan Jaringan sampah pada CV. DARMA CITRA UTAMA	3.996.000,00	3.996.000,00	0,00	0,00
Jumlah		3.007.626.713,00	2.917.667.436,00	0,00	89.959.277,00

5.3.3. Ekuitas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp2.710.686.884.141,01	Rp2.637.442.708.241,55

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Fakfak, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Fakfak.

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2024 tercatat senilai Rp2.710.686.884.141,01 mengalami kenaikan senilai Rp73.244.175.899,46 atau naik sebesar 2,78% jika dibandingkan dengan nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 yang hanya senilai Rp2.637.442.708.241,55.

5.3.4. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp2.712.956.574.671,11	Rp2.637.633.990.307,55

Jumlah kewajiban Kabupaten Fakfak Tahun 2024 senilai Rp2.269.690.530,10 yang keseluruhannya merupakan kewajiban jangka pendek; sedangkan jumlah ekuitas Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2024 senilai Rp2.710.686.884.141,01, sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.712.956.574.671,11. Mengalami kenaikan senilai Rp75.322.584.363,56 atau naik sebesar 2,86% jika dibandingkan dengan jumlah kewajiban dan ekuitas tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp2.637.633.990.307,55.

5.4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas

dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Transfer, dan Pos Luar Biasa.

Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Kode	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN – LO	1.370.824.468.935,42	1.339.229.636.871,05	31.594.832.064,37	2,36
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	22.000.995.161,42	47.635.366.024,45	(25.634.370.863,03)	(53,81)
7.1.1	Pajak Daerah – LO	9.207.423.481,42	9.973.841.753,86	(766.418.272,44)	(7,68)
7.1.2	Retribusi Daerah – LO	3.901.106.693,97	3.446.922.122,51	454.184.571,46	13,18
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	4.983.034.575,00	4.169.644.947,00	813.389.628,00	19,51
7.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	3.909.430.411,03	30.044.957.201,08	(26.135.526.790,05)	(86,99)
7.2	PENDAPATAN TRANSFER – LO	1.320.304.583.499,00	1.291.380.830.846,60	28.923.752.652,40	2,24
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	1.307.297.789.783,00	1.274.081.364.998,60	33.216.424.784,40	2,61
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	13.006.793.716,00	17.299.465.848,00	(4.292.672.132,00)	(24,81)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	28.518.890.275,00	213.440.000,00	28.305.450.275,00	13.261,55
7.3.1	Pendapatan Hibah - LO	926.058.000,00	213.440.000,00	712.618.000,00	333,87
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	27.592.832.275,00	0	27.592.832.275,00	0
8	BEBAN DAERAH	1.286.681.764.806,18	1.259.637.798.531,81	27.043.966.274,37	2,15
8.1	BEBAN OPERASI	1.006.053.368.552,66	1.039.777.520.611,75	(33.724.152.059,09)	(3,24)
8.1.1	Beban Pegawai	455.403.336.946,10	460.447.979.710,00	(5.044.642.763,90)	(1,10)
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	462.019.195.543,14	498.072.030.053,43	(36.052.834.510,29)	(7,24)
8.1.5	Beban Hibah	78.675.546.216,00	62.656.125.284,00	16.019.420.932,00	25,57
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	9.236.844.000,00	18.029.857.500,00	(8.793.013.500,00)	(48,77)
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	718.445.847,42	571.528.064,32	146.917.783,10	25,71
8.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	197.030.835.596,52	157.217.460.168,06	39.813.375.428,46	25,32
8.2.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	48.638.957.261,51	43.165.822.057,06	5.473.135.204,45	12,68
8.2.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.294.194.524,28	21.076.520.595,00	2.217.673.929,28	10,52
8.2.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	125.097.683.810,73	92.975.117.516,00	32.122.566.294,73	34,55

Kode	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.3	BEBAN TRANSFER	83.597.560.657,00	62.642.817.752,00	20.954.742.905,00	33,45
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	83.597.560.657,00	62.642.817.752,00	20.954.742.905,00	33,45
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		84.142.704.129,24	79.591.838.339,24	4.550.865.790,00	5,72
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	84.142.704.129,24	79.591.838.339,24	4.550.865.790,00	5,72
POS LUAR BIASA					
8.4.1	Beban Tak Terduga	12.401.499.000,00	13.669.273.920,00	(1.267.774.920,00)	(9,27)
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(12.401.499.000,00)	(13.669.273.920,00)	1.267.774.920,00	(9,27)
SURPLUS/DEFISIT-LO		71.741.205.129,24	65.922.564.419,24	5.818.640.710,00	8,83

5.4.1. KEGIATAN OPERASIONAL

1. Pendapatan Daerah– LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Realisasi Pendapatan – LO Pemerintah Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2024 senilai Rp1.370.824.468.935,42 mengalami kenaikan senilai Rp31.594.832.064,37 atau meningkat sebesar 2,36% dari Realisasi pendapatan – LO pada Tahun 2023 yang hanya senilai Rp1.339.229.636.871,05 yang terdiri dari:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	22.000.995.161,42	47.635.366.024,45	(25.634.370.863,03)	(53,81)
2	Pendapatan Transfer-LO	1.320.304.583.499,00	1.291.380.830.846,60	28.923.752.652,40	2,24
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	28.518.890.275,00	213.440.000,00	28.305.450.275,00	13.261,55
Jumlah		1.370.824.468.935,42	1.339.229.636.871,05	31.594.832.064,37	2,36

a. Pendapatan Asli Daerah – LO

Realisasi pendapatan asli daerah – LO Tahun 2024 senilai Rp22.000.995.161,42, mengalami penurunan senilai Rp25.634.370.863,03 atau turun 53,81% jika dibandingkan dengan saldo pendapatan asli daerah - LO tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp47.635.366.024,45 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Naik/Turun	%
1	Pajak Daerah-LO	9.207.423.481,42	9.973.841.753,86	(766.418.272,44)	(7,68)
2	Retribusi Daerah-LO	3.901.106.693,97	3.446.922.122,51	454.184.571,46	13,18
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	4.983.034.575,00	4.169.644.947,00	813.389.628,00	19,51

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Naik/Turun	%
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	3.909.430.411,03	30.044.957.201,08	(26.135.526.790,05)	(86,99)
Jumlah		22.000.995.161,42	47.635.366.024,45	(25.634.370.863,03)	(53,81)

1) Pajak Daerah – LO

Realisasi pendapatan pajak daerah – LO Tahun 2024 senilai Rp9.207.423.481,42 mengalami penurunan senilai Rp766.418.272,44 atau turun 7,68% jika dibandingkan dengan saldo Pajak Daerah - LO tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp9.973.841.753,86. Pendapatan pajak daerah – LO menurut objek pendapatan sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Naik/Turun	%
1	Pajak Hotel - LO	381.413.422,00	803.345.593,00	(421.932.171,00)	(52,52)
2	Pajak Restoran - LO	2.850.642.097,00	3.261.129.098,00	(410.487.001,00)	(12,59)
3	Pajak Hiburan - LO	31.313.319,00	19.786.365,00	11.526.954,00	58,26
4	Pajak Reklame - LO	10.175.000,00	125.436.500,00	(115.261.500,00)	(91,89)
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	3.205.423.867,00	2.449.118.928,00	756.304.939,00	30,88
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	2.896.000,00	5.858.320,00	(2.962.320,00)	(50,57)
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO	2.224.772.751,42	2.548.991.999,86	(324.219.248,44)	(12,72)
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	500.787.025,00	760.174.950,00	(259.387.925,00)	(34,12)
Jumlah		9.207.423.481,42	9.973.841.753,86	(766.418.272,44)	(7,68)

- **Perbedaan Pajak Reklame LRA dan Pajak Reklame - LO**

Pendapatan Reklame LRA sebesar Rp10.225.000,00 dan Pendapatan Reklame – LO sebesar Rp10.175.000,00. Terdapat selisih sebesar Rp.50.000,00 dikarenakan adanya pembayaran piutang pajak reklame tahun 2023 di tahun 2024, sehingga hanya dicatat pada Pendapatan Pajak Reklame LRA tidak dicatat pada Pendapatan Pajak Reklame – LO.

2) Retribusi Daerah – LO

Realisasi pendapatan retribusi daerah – LO Tahun 2024 senilai Rp3.901.106.693,97 mengalami kenaikan senilai Rp454.184.571,46 atau naik sebesar 13,18% jika dibandingkan dengan saldo Retribusi Daerah - LO tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp3.446.922.122,51. Pendapatan retribusi daerah – LO terdiri dari:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Naik/Turun	%
1	Retribusi Jasa Umum-LO	3.093.965.520,97	3.019.495.310,51	74.470.210,46	2,47

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Naik/Turun	%
2	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	805.141.173,00	427.426.812,00	377.714.361,00	88,37
3	Retribusi Jasa Usaha-LO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Jumlah		3.901.106.693,97	3.446.922.122,51	454.184.571,46	13,18

a) Retribusi Jasa Umum - LO

Jumlah retribusi jasa umum - LO Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2024 senilai Rp3.093.965.520,97 mengalami kenaikan senilai Rp74.470.210,46 atau naik sebesar 2,47% jika dibandingkan dengan saldo retribusi jasa umum - LO tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp3.019.495.310,51. Pendapatan retribusi jasa umum - LO terdiri dari:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Naik/Turun	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	152.767.436,38	149.494.001,51	3.273.434,87	2,19
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	2.482.216.084,59	2.354.138.309,00	128.077.775,59	5,44
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	70.090.000,00	59.520.000,00	10.570.000,00	17,76
4	Retribusi Los-LO	387.942.000,00	455.943.000,00	(68.001.000,00)	(14,91)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	950.000,00	400.000,00	550.000,00	137,50
Jumlah		3.093.965.520,97	3.019.495.310,51	74.470.210,46	2,47

b) Retribusi Perizinan Tertentu - LO

Jumlah retribusi perizinan tertentu - LO Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2024 senilai Rp805.141.173,00 mengalami kenaikan senilai Rp377.714.361,00 atau naik sebesar 88,37% jika dibandingkan dengan saldo retribusi perizinan tertentu - LO tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp427.426.812,00. Pendapatan retribusi perizinan tertentu - LO terdiri dari:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Naik/Turun	%
1	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan-LO	245.427.000,00	206.965.100,00	38.461.900,00	18,58
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	559.714.173,00	220.161.712,00	339.552.461,00	154,23
3	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	0,00	300.000,00	(300.000,00)	100
Jumlah		805.141.173,00	427.426.812,00	377.714.361,00	88,37

c) Retribusi Jasa Usaha - LO

Jumlah Retribusi Jasa Usaha - LO Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2024 senilai Rp2.000.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp2.000.000,00 karena pada tahun sebelumnya tidak ada realisasi pada Retribusi Jasa Usaha - LO. Retribusi Jasa Usaha - LO Kabupaten Fakfak tahun 2024 merupakan Retribusi Jasa Sewa Gedung Pemerintah.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO Tahun 2024 senilai Rp4.983.034.575,00, mengalami kenaikan senilai Rp813.389.628,00 atau naik sebesar 19,51% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp4.169.644.947,00. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Bank Papua.

4) Lain-lain PAD yang Sah – LO

Realisasi lain-lain PAD yang sah Tahun 2024 senilai Rp3.909.430.411,03, mengalami penurunan senilai Rp26.135.526.790,05 atau turun sebesar 86,99% jika dibandingkan dengan saldo lain-lain PAD yang sah - LO tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp30.044.957.201,08. Lain-lain PAD yang Sah – LO terdiri dari:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Naik/Turun	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	113.520.450,00	821.113.948,00	(707.593.498,00)	(86,17)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	465.253.163,00	419.936.445,00	45.316.718,00	10,79
3	Jasa Giro-LO	712.468.332,30	1.367.628.858,24	(655.160.525,94)	(47,90)
4	Pendapatan Bunga	0,00	40.360.756,00	(40.360.756,00)	(100)
5	Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain-LO	1.133.487.529,53	2.149.943.717,84	(1.016.456.188,31)	(47,28)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	802.987.911,20	558.901.800,00	244.086.111,20	43,67
7	Pendapatan dari Pengembalian-LO	681.713.025,00	419.227.472,00	262.485.553,00	62,61
8	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	0,00	24.265.211.409,00	(24.265.211.409,00)	(100)
Jumlah		3.909.430.411,03	30.044.957.201,08	(26.135.526.790,05)	(86,99)

a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO

Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan- LO Tahun 2024 senilai Rp113.520.450,00 mengalami penurunan senilai Rp707.593.498,00 atau turun sebesar 86,17% jika dibandingkan dengan saldo Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan- LO tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp821.113.948,00 yang bersumber dari hasil penjualan alat angkutan.

b) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO

Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan - LO Tahun 2024 senilai Rp465.253.163,00 mengalami kenaikan senilai Rp45.316.718,00 atau naik sebesar 10,79% jika dibandingkan dengan saldo Hasil pemanfaatan BMD - LO tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp419.936.445,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Naik/Turun	%
1	Hasil Sewa BMD-LO	172.060.000,00	42.300.000,00	129.760.000,00	306,76
2	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO	293.193.163,00	377.636.445,00	(84.443.282,00)	(22,36)
Jumlah		465.253.163,00	419.936.445,00	45.316.718,00	10,79

c) Pendapatan Jasa Giro - LO

Jumlah pendapatan jasa giro - LO Tahun 2024 senilai Rp712.468.332,30 mengalami penurunan senilai Rp655.160.525,94 atau turun sebesar 47,90% jika dibandingkan dengan saldo pendapatan jasa giro - LO tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp1.367.628.858,24 yang terdiri dari:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Naik/Turun	%
1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	647.388.770,00	1.305.512.475,00	(658.123.705,00)	(50,41)
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	59.712.241,30	57.411.995,24	2.300.246,06	4,01
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	104.577,00	175.603,00	(71.026,00)	(40,45)
4	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	5.262.744,00	4.528.785,00	733.959,00	16,21
Jumlah		712.468.332,30	1.367.628.858,24	(655.160.525,94)	(47,90)

d) Pendapatan Bunga – LO

Jumlah pendapatan bunga - LO Tahun 2024 senilai Rp0,00 mengalami penurunan senilai Rp40.360.756,00 atau turun sebesar 100% jika dibandingkan dengan saldo pendapatan bunga - LO tahun sebelumnya

yang tercatat senilai Rp40.360.756,00.

e) Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain-LO

Jumlah penerimaan komisi potongan, atau bentuk lain - LO Tahun 2024 senilai Rp1.133.487.529,53 mengalami penurunan senilai Rp1.016.456.188,31 atau turun sebesar 47,28% jika dibandingkan dengan saldo penerimaan komisi potongan, atau bentuk lain - LO tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp2.149.943.717,84 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Setoran pengembalian kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah	524.861.025,00
2	Setoran atas sisa pembayaran bantuan sosial insentif kasasi masjid, pendeta, guru ngaji, sekami dan sekolah minggu	63.000.000,00
3	Kelebihan atas setoran sisa UP	549.935,94
4	Kelebihan atas setoran sisa TU	651.097,00
5	Setoran Pengembalian Kelebihan Transferan dana BPJS Ketenagakerjaan kepada Pemerintah Kampung	61.258.611,58
6	Setoran atas selisih Tapera An. SSBP Cabang Fakfak	978.401,01
7	Setoran Pengembalian atas temuan BPK	2.879.120,00
8	Setoran Pengembalian Sisa Dana BOK TA 2022 pada Puskesmas Sekban yang disita Kejaksaan Negeri Fakfak	208.382.500,00
9	Setoran sisa Belanja Tidak Terduga (BTT) pada BPBD Kab. Fakfak TA 2023	1.050.000,00
10	Kesalahan setor sisa GU Dinas Kominfo	65.000,00
11	Setoran pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan transportasi pimpinan DPRD	30.000.000,00
12	Setoran pengembalian kelebihan pembayara tunjangan papua An. Haryati Lakembe pada Inspektorat Kab. Fakfak TA 2023	1.155.000,00
13	Setoran sisa pembayaran Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Bagian Kesra Sekretariat Daerah	431.500.000,00
14	Setoran pengembalian kelebihan pembayaran gaji pegawai tidak tetap TA 2023 pada SATPOL PP Kab. Fakfak	173.297,00
15	Salah setor pajak pusat ke RKUD oleh Inspektorat Kab. Fakfak	11.163.207,00
16	Penyesuaian Pendapatan LO Dana BOS Tahun 2024	112.390.000,00
17	Koreksi lebih saji Aset Lainnya atas kelebihan pembayaran TA 2023	(316.569.665,00)
Jumlah		1.133.487.529,53

f) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

Jumlah pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan-LO Tahun 2024 senilai Rp802.987.911,20 mengalami kenaikan senilai Rp244.086.111,20 atau naik sebesar 43,67% jika dibandingkan dengan saldo pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan-

LO tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp558.901.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
1	DPUPR2KP	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan penagangan longsegment (pemeliharaan rutin, berkala, peningkatan/rekonstruksi Lusiferi-Jalan Kokas) An. CV. Batufiafas Utama pada DPU(PR)2KP Kab. Fakfak TA 2023	12.279.000,00
2	DPUPR2KP	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan penanganan Longsegment (pemeliharaan Siboru - S. Nanam - Teluk patipi pada Dinas pupr An. CV ALMUKHALIS PRATAMA MANDIRI T.A 2023	215.687.000,00
3	DPUPR2KP	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pemeliharaan periodik jalan di Fakfak pada Dinas pupr An. CV DUTA SEJAHTERA T.A 2023	23.302.000,00
4	DPUPR2KP	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pemeliharaan periodik jalan Kabupaten Fakfak pada Dinas pupr An. CV ALMUKHALIS PRATAMA MANDIRI T.A 2023	20.281.000,00
5	DPUPR2KP	Setoran Denda Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Pembangunan Saluran Pengadilang Wagom An. CV Citra Binaya Mandiri pada Dinas DPUPR TA 2022	3.000.000,00
6	DPUPR2KP	Setoran Pengembalian kekurangan volume pekerjaan dan pengembalian denda keterlambatan pekerjaan an. CV. Cahaya Mboyan pada Dinas DPU(PR)2KP Kab. Fakfak TA 2022	18.600.000,00
7	DPUPR2KP	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan gedung auditorium kantor KOI An. CV Taruwara Martana pada Dinas DPU(PR)2KP Kab. Fakfak TA 2023	36.131.787,34
8	DPUPR2KP	Setoran pengembalian denda keterlambatan pekerjaan pembangunan tokoh masyarakat An. CV Syapma Indah pada Dinas DPU(PR)2KP Kab. Fakfak TA 2024	986.800,00
9	DPUPR2KP	Setoran kelebihan pembayaran pekerjaan rehab dan pengadaan mebeulair Diklat dan BLK An. CV. Karori Tangan Perkasa pada DPU(PR)2KP TA 2020	500,00
10	DPUPR2KP	Setoran Kekurangan Penerimaan atas Denda Keterlambatan Atas Pekerjaan Pembangunan Rehab Masjid Merapi, An. CV. RN pada DPU(PR)2KP Kab. Fakfak TA 2021	10.795.000,00
11	DPUPR2KP	Setoran Denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan sport center dan kuliner tahap 2 An. CV.Ghina Jaya Sulbarindo TA 2023 pada Dinas DPU(PR)2KP	12.257.000,00
12	DPUPR2KP	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan gedung auditorium kantor organisasi islam An. CV. Taruwara Martana TA 2023 pada Dinas DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	4.306.000,00
13	DPUPR2KP	Setoran kekurangan pekerjaan pembangunan gedung auditorium kantor organisasi islam An. CV. Taruwara Martana TA 2023 pada Dinas DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	4.824.000,00

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
14	DPUPR2KP	Setoran kekurangan volume atas pekerjaan Tribun Utama An. Merapi Jaya TA 2023 pada Dinas DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	2.947.000,00
15	DPUPR2KP	Setoran Kekurangan Volume atas pekerjaan penanganan longsement pemeliharaan rutin pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi lusiferi, jalan kokas An. CV Batufiafas TA 2023 pada DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	2.750.000,00
16	DPUPR2KP	Setoran kekurangan volume atas pekerjaan penanganan longsegment pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi siboru-s.nanam-teluk patipi An. CV. Almukhalis Pratama mandiri TA 2023 pada DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	24.004.000,00
17	DPUPR2KP	Setoran kekurangan volume atas pekerjaan pemeliharaan periodeik jalan di Fakfak An. CV. Duta Sejahtera TA 2023 pada Dinas DPU(PR)2KP	73.731.000,00
18	DPUPR2KP	Setoran pengembalian denda keterlambatan pekerjaan atas pembangunan Kantor Distrik Fakfak Timur Tengah An. CV. Taruwara Martana pada Dinas DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	24.460.000,00
19	DPUPR2KP	Setoran pengembalian denda keterlambatan pekerjaan atas pembangunan jalan Otoweri - Tomage Tahap 2 An. CV. Taruwara Martana pada Dinas DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	4.075.000,00
20	DPUPR2KP	Setoran kekurangan volume atas pekerjaan rehabilitasi timbunan talud jalan Dr. Salasa Namudat An. CV. Matadoors Selebes TA 2023 pada dinas DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	16.409.000,00
21	DPUPR2KP	Setoran kekurangan volume pekerjaan penataan jalan baru Fakfak An. CV. Aggaen Mutiara Gunung Ta 2023 pada Dinas DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	70.319.000,00
22	DPUPR2KP	Setoran kekurangan volume pekerjaan penataan jalan baru Fakfak An. CV. Aggaen Mutiara Gunung Ta 2023 pada Dinas DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	46.872.000,00
23	DPUPR2KP	Setoran denda keterlambatan penyelesaian atas pekerjaan ruang terbuka hijau Jalan Salasa Namudat An. CV. ADITYA KARYA KONSTRUKSI, pada DPU(PR)2KP Kab. Fakfak TA 2023	40.239.000,00
24	DPUPR2KP	Setoran Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Ruang Terbuka Hijau Jalan Salasa Namudat An. CV Aditya Karya Konstruksi pada Dinas PU(PR)2KP TA 2023	13.620.000,00
25	DPUPR2KP	Setoran Kekurangan Volume atas pekerjaan pembangunan jalan desa strategis Mumbre-Siboru An. CV.Fijar Jaya TA 2023 pada DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	10.000.000,00
26	DPUPR2KP	Setoran Denda Keterlambatan penyelesaian atas pekerjaan pembangunan jalan desa strategis Mumbre-Siboru An. CV.Fijar Jaya TA 2023 pada DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	10.000.000,00
27	DPUPR2KP	Setoran Keterlambatan atas pekerjaan penanganan longsegment (pemeliharaan rutin, berkala, peneingkatan /rekonstruksi) jalan pala-	10.000.000,00

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
		wagom-torea An. CV. Sinar Karya TA 2023 pada DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	
28	DPUPR2KP	Setoran Keterlambatan atas pekerjaan penanganan longsegment (pemeliharaan rutin, berkala, peneingkatan /rekonstruksi) jalan pala-wagom-torea An. CV. Sinar Karya TA 2023 pada DPU(PR)2KP Kab. Fakfak	10.000.000,00
29	DPUPR2KP	Setoran Denda Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Penanganan Longsegment Jalan Pala-Wagom-Torea An. CV Sinar Karya pada Dinas DPU(PR)2KP TA 2023	93.435.000,00
30	DPUPR2KP	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan penanganan longsegment Jalan Pala-Wagom-Torea An. CV Sinar Karya pada Dinas DPU(PR)2KP TA 2023	87.824.000,00
31	DPUPR2KP	Setoran Denda Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Strategis Mumre-Siboru An. CV Fijar Jaya pada Dinas DPU(PR)2KP TA 2023	20.000.000,00
32	DPUPR2KP	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan Jalan Desa Strategis Mumre-Siboru An. CV Fijar Jaya pada Dinas DPU(PR)2KP TA 2023	30.000.000,00
33	DPUPR2KP	Setoran Denda Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Strategis Mumre-Siboru An. CV Fijar Jaya pada Dinas DPU(PR)2KP TA 2023	43.218.000,00
34	DPUPR2KP	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan Jalan Desa Strategis Mumre-Siboru An. CV Fijar Jaya pada Dinas DPU(PR)2KP TA 2023	113.041.000,00
35	Dinas Kesehatan	Setoran Kekurangan Volume atas pekerjaan pembangunan rumah dokter Puskesmas Fakfak Timur Tengah An. CV. Sari Wani TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	183.434,48
36	Dinas Kesehatan	Setoran pengembalian kekurangan volume pembangunan rumah kopel paramedis puskesmas kayauni An. CV. Wagom Permata Abadi pada DINKES Kab. Fakfak TA 2023	4.484.707,99
37	Dinas Kesehatan	Setoran pengembalian keterlambatan denda pematangan lahan Puskesmas Fakfak Timur Tengah An. CV. Spesialisasi Teknik Tunggal pada DINKES Kab. Fakfak TA 2023	500.000,00
38	Dinas Kesehatan	Setoran Kekurangan Volume atas pekerjaan pematangan lahan Puskesmas Kayauni An. CV. Mbaham Sejahtera TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	6.365.538,00
39	Dinas Kesehatan	Setoran Kekurangan Volume atas pekerjaan pembangunan Bak Air Puskesmas Fakfak Timur Tengah An. CV. Putra Mas Leng TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	3.233.512,00
40	Dinas Kesehatan	Setoran Kekurangan Volume atas pekerjaan pembangunan rumah dokter Puskesmas Fakfak Timur Tengah An. CV. Sari Wani TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	502.000,00
41	Dinas Kesehatan	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pematangan lahan Puskesmas Kayauni An. CV.	462,00

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
		Mbaham Sejahtera TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	
42	Dinas Kesehatan	Setoran Kekurangan Volume atas pekerjaan pembangunan rumah dokter Puskesmas Fakfak Timur Tengah An. CV. Sari wani TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	565,52
43	Dinas Kesehatan	Setoran Kekurangan Volume atas pekerjaan pembangunan rumah Kopel Paramedis Puskesmas Kayauni An. CV. Syapma Indah TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	6.396.765,02
44	Dinas Kesehatan	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan Rumah Kopel Paramedis Puskesmas Kayauni An. CV. Syapma Indah TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	1.706.328,00
45	Dinas Kesehatan	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan bak air Puskesmas Fakfak Timur Tengah An. CV. Putra Mas Leng TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	488,00
46	Dinas Kesehatan	Setoran Kekurangan Volume atas pekerjaan pembangunan rumah Kopel Paramedis Puskesmas Fakfak Timur Tengah An. CV. Sariwani TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	292,01
47	Dinas Kesehatan	Setoran Kekurangan Volume atas pekerjaan pembangunan rumah dokter Puskesmas Kayauni An. CV. Sarawiki TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	2.890.000,00
48	Dinas Kesehatan	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan Rumah Kopel Paramedis Puskesmas Kayauni An. CV. Syapma Indah TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	237,98
49	Dinas Kesehatan	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan Rumah Kopel Paramedis Puskesmas Kayauni An. CV. Syapma Indah TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	672,00
50	Dinas Kesehatan	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan Bak Air Puskesmas Fakfak Timur Tengah An. CV. Yami Nua Nigi TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	1.212.513,00
51	Dinas Kesehatan	Setoran Pengembalian Kekurangan Volume atas pekerjaan pembangunan rumah Dokter Puskesmas Kayauni An. CV. Rehan Onim Jaya TA 2023 pada Dinkes Kab. Fakfak	2.889.993,67
52	Dinas Pendidikan	Setoran pengembalian kekurangan volume pekerjaan pembangunan 1 ruang laboratorium SMP PGRI Fakfak beserta isinya An. CV. Taruwara Martana	6.701.000,00
53	Dinas Pendidikan	Setoran Pengembalian Kekurangan Volume atas pekerjaan pembangunan gedung sekolah PAUD Khalifah Kab. Fakfak An. CV. Norma Jaya TA 2023 pada Diknas Kab. Fakfak	10.682.726,95
54	Dinas Pendidikan	Setoran Pengembalian Kekurangan Volume atas pekerjaan pembangunan 2 unit rumah Guru SD YPK SUM An. CV. Fijar Jaya TA 2023 pada Diknas Kab. Fakfak	3.260.707,83
55	Dinas Pendidikan	Setoran Pengembalian Kekurangan Volume atas pekerjaan pembangunan pagar SD YPK Werba Kab. Fakfak An. CV. Konstruksi Ufuk Timur TA 2023 pada Diknas Kab. Fakfak	16.294.000,00

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
56	Dinas Pendidikan	Setoran Pengembalian Kekurangan Volume atas pekerjaan pembangunan gedung sekolah PAUD Khalifah An. CV. Norma Jaya TA 2023 pada Diknas Kab. Fakfak	274,00
57	Dinas Perhubungan	Setoran Kekurangan Pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Pagar pengaman Jalan (Distrik Wartutin) An. CV Putra Balam Jaya	172.682.000,00
58	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Setoran denda keterlambatan pekerjaan pembangunan pasar sorpeha Distrik Fakfak Tengah TA 2023 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Fakfak	13.998.634,00
59	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan kios Cinderamata An. CV Ohnis Jaya pada Dinas PARBUD TA 2024	18.234.215,31
60	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Setoran denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan Menara Pandang An. CV Marapi Jaya pada Dinas PARBUD TA 2024	33.598.457,60
61	BPKAD	Koreksi lebih saji Aset Lainnya atas kelebihan pembayaran TA 2023	(612.225.701,50)
Jumlah			802.987.911,20

g) Pendapatan dari Pengembalian - LO

Jumlah pendapatan dari pengembalian - LO Tahun 2024 senilai Rp681.713.025,00, mengalami kenaikan senilai Rp262.485.553,00 atau naik sebesar 62,61% jika dibandingkan dengan jumlah saldo pendapatan dari pengembalian - LO tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp419.227.472,00 yang merupakan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.

Pendapatan dari Pengembalian LRA Rp678.837.383,00 dan pendapatan dari Pengembalian – LO Rp681.713.025,00 terdapat selisih sebesar Rp2.875.642,00 merupakan Piutang atas kelebihan setoran iuran Taspen yang dicatat pada Pendapatan dari Pengembalian – LO.

h) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO

Jumlah pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO Tahun 2024 senilai Rp0,00. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO pada Tahun 2024 tidak dianggarkan pada akun Lain-lain PAD yang Sah – LO namun dianggarkan dalam akun Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang

Sah-LO yaitu pada Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO. Uraian penjelasannya dapat dilihat pada akun Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO (halaman 221).

b. Pendapatan Transfer – LO

Realisasi pendapatan transfer – LO Tahun 2024 senilai Rp1.320.304.583.499,00, mengalami kenaikan senilai Rp28.923.752.652,40 atau naik sebesar 2,24% jika dibandingkan dengan jumlah saldo pendapatan transfer - LO tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp1.291.380.830.846,60 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.307.297.789.783,00	1.274.081.364.998,60	33.216.424.784,40	2,61
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	13.006.793.716,00	17.299.465.848,00	(4.292.672.132,00)	(24,81)
Jumlah		1.320.304.583.499,00	1.291.380.830.846,60	28.923.752.652,40	2,24

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Pendapatan transfer pemerintah pusat - LO Tahun 2024 senilai Rp1.307.297.789.783,00, mengalami kenaikan senilai Rp33.216.424.784,40 atau naik sebesar 2,61% jika dibandingkan dengan saldo pendapatan transfer pemerintah pusat - LO tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp1.274.081.364.998,60, terdiri dari:

No	Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
1	Dana Perimbangan – LO	1.096.904.420.299,00	993.887.808.664,60
2	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur – LO	210.393.369.484,00	280.193.556.334,00
Jumlah		1.307.297.789.783,00	1.274.081.364.998,60

a) Dana Perimbangan - LO

Dana perimbangan - LO Tahun 2024 senilai Rp1.096.904.420.299,00 mengalami kenaikan senilai Rp103.016.611.634,40 atau naik sebesar 10,37% jika dibandingkan dengan saldo dana perimbangan - LO tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp993.887.808.664,60 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	106.316.332.000,00	155.772.318.593,60
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	713.877.302.514,00	655.353.979.578,00

No	Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
	Umum (DAU)-LO		
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	185.599.668.432,00	101.638.056.848,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	91.111.117.353,00	81.123.453.645,00
Jumlah		1.096.904.420.299,00	993.887.808.664,60

b) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur - LO

Dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur - LO Tahun 2024 senilai Rp210.393.369.484,00 mengalami penurunan senilai Rp69.800.186.850,00 atau turun sebesar 24,91% jika dibandingkan dengan saldo dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur - LO tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp280.193.556.334,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
1	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat- LO	194.753.280.484,00	244.634.217.334,00
2	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat-LO	15.640.089.000,00	35.559.339.000,00
Jumlah		210.393.369.484,00	280.193.556.334,00

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

Pendapatan transfer antar daerah - LO Tahun 2024 senilai Rp13.006.793.716,00, mengalami penurunan senilai Rp4.292.672.132,00 atau turun sebesar 24,81% jika dibandingkan dengan saldo pendapatan transfer antar daerah - LO tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp17.299.465.848,00 dan merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	1.173.249.445,00	1.913.073.326,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	745.558.880,00	1.319.207.484,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	6.300.716.770,00	9.426.188.447,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	4.787.268.621,00	4.640.996.591,00
Jumlah		13.006.793.716,00	17.299.465.848,00

Pendapatan transfer antar daerah - LRA Rp19.280.041.467,00 dan

pendapatan transfer antar daerah – LO Rp13.006.793.716,00. Terdapat selisih sebesar Rp6.273.247.751,00 yang merupakan pelunasan piutang transfer bagi hasil pajak dari Provinsi Papua Barat yang tercatat di LRA namun tidak tercatat di LO dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal	Transfer di Tahun 2024	
			Tgl	Nilai
I	Triwulan II			
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	331.444.854,00	24-12-2024	331.444.854,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	243.564.806,00	24-12-2024	243.564.806,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.242.758.847,00	24-12-2024	2.242.758.847,00
II	Triwulan IV			
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	616.197.337,00	30-05-2024	616.197.337,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	307.850.610,00	30-05-2024	307.850.610,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.531.431.297,00	30-05-2024	2.531.431.297,00
Jumlah		6.273.247.751,00	-	6.273.247.751,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO Tahun 2024 senilai Rp28.518.890.275,00, mengalami kenaikan senilai Rp28.305.450.275,00 atau naik 13.261,55% jika dibandingkan dengan saldo lain-lain pendapatan yang sah - LO tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp213.440.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	926.058.000,00	213.440.000,00	712.618.000,00	333,87
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	27.592.832.275,00	0	27.592.832.275,00	0,00
Jumlah		28.518.890.275,00	213.440.000,00	28.305.450.275,00	13.261,55

1) Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO Tahun 2024 senilai Rp926.058.000,00, mengalami kenaikan senilai Rp712.618.000,00 atau naik sebesar 333,87%. jika dibandingkan dengan saldo pendapatan hibah tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp213.440.000,00 yang merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Fakfak.

2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO Tahun 2024 senilai Rp27.592.832.275,00. Tahun sebelumnya Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak dianggarkan namun komponennya yaitu pendapatan dana kapitasi JKN dan dana TDF termasuk ke dalam Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	25.073.033.337,00	24.267.844.204,00
2	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat – LO	2.519.798.938,00	0,00
Jumlah		27.592.832.275,00	24.267.844.204,00

a) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO

Jumlah pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)-LO Tahun 2024 senilai Rp25.073.033.337,00 mengalami kenaikan senilai Rp805.189.133,00 atau naik sebesar 3,32% jika dibandingkan dengan saldo pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)-LO tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp24.267.844.204,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Fasilitas Kesehatan/Instansi	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	98.400.000,00	98.002.642,00
2	Puskesmas Weri	209.630.512,00	208.048.675,00
3	Puskesmas Bomberay	359.077.347,00	227.355.355,00
4	Puskesmas Fakfak Kota	1.857.927.038,00	1.677.824.161,00
5	Puskesmas Fakfak Tengah	991.888.616,00	831.779.739,00
6	Puskesmas Werba	381.511.145,00	365.584.713,00
7	Puskesmas Sekban	1.029.345.453,00	771.953.544,00
8	Puskesmas Karas	202.286.097,00	212.342.307,00
9	Puskesmas Kokas	311.113.897,00	248.850.922,00
10	Puskesmas Kramongmongga	320.170.031,00	295.350.894,00
11	Puskesmas Degen	372.178.701,00	312.135.352,00
12	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	18.939.504.500,00	19.018.615.900,00
Jumlah		25.073.033.337,00	24.267.844.204,00

b) Pendapatan Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat - LO

Jumlah Pendapatan Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat - LO Tahun 2024 senilai Rp2.519.798.938,00 yang terdiri dari:

No	Fasilitas Kesehatan/Instansi	Nilai
1	Remunerasi TDF pada Rekening TDF-DBH TW 1 TA 2024	402.340.103,00
2	Remunerasi TDF pada Rekening TDF-DBH TW 2 TA 2024	73.956.835,00
3	Saldo Akhir TDF Tahun 2024	2.043.502.000,00
Jumlah		2.519.798.938,00

Pendapatan transfer ini sesungguhnya merupakan pendapatan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) namun tidak diklasifikasikan ke dalam DBH karena penganggarannya pada akun Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat.

2. Beban Daerah

Beban daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun 2024 senilai Rp1.286.681.764.806,18 mengalami kenaikan senilai Rp27.043.966.274,37 atau naik 2,15% jika dibandingkan dengan beban daerah tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp1.259.637.798.531,81 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Naik / (Turun)	%
1	Beban Operasi	1.006.053.368.552,66	1.039.777.520.611,75	(33.724.152.059,09)	(3,24)
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	197.030.835.596,52	157.217.460.168,06	39.813.375.428,46	25,32
3	Beban Transfer	83.597.560.657,00	62.642.817.752,00	20.954.742.905,00	33,45
Jumlah		1.286.681.764.806,18	1.259.637.798.531,81	27.043.966.274,37	2,15

a. Beban Operasi

Jumlah beban operasi Tahun 2024 senilai Rp1.006.053.368.552,66, mengalami penurunan senilai Rp33.724.152.059,09 atau turun sebesar 3,24% jika dibandingkan dengan saldo beban operasi tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp1.039.777.520.611,75 dengan rincian sebagai berikut:

4	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Naik / (Turun)	%
1	Beban Pegawai	455.403.336.946,10	460.447.979.710,00	(5.044.642.763,90)	(1,10)
2	Beban Barang dan Jasa	462.019.195.543,14	498.072.030.053,43	(36.052.834.510,29)	(7,24)
3	Beban Hibah	78.675.546.216,00	62.656.125.284,00	16.019.420.932,00	25,57
4	Beban Bantuan Sosial	9.236.844.000,00	18.029.857.500,00	(8.793.013.500,00)	(48,77)
5	Beban Penyisihan Piutang	718.445.847,42	571.528.064,32	146.917.783,10	25,71
Jumlah		1.006.053.368.552,66	1.039.777.520.611,75	(33.724.152.059,09)	(3,24)

1) Beban Pegawai

Beban pegawai Tahun 2024 adalah senilai Rp455.403.336.946,10, mengalami penurunan senilai Rp5.044.642.763,90 atau turun sebesar 1,10% jika dibandingkan dengan saldo beban pegawai tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp460.447.979.710,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	330.538.841.714,10	293.780.762.365,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	71.755.878.726,00	118.325.382.534,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	40.391.303.928,00	32.158.042.000,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	11.981.379.146,00	11.591.773.419,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	161.333.432,00	161.638.323,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	574.600.000,00	554.114.893,00
7	Beban Pegawai BOS	0,00	3.876.266.176,00
Jumlah		455.403.336.946,10	460.447.979.710,00

a) Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Beban gaji dan tunjangan ASN Tahun 2024 adalah senilai Rp330.538.841.714,10 mengalami kenaikan senilai Rp36.758.079.349,10 atau naik sebesar 12,51% jika dibandingkan dengan saldo beban gaji dan tunjangan ASN tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp293.780.762.365,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
1	Beban Gaji Pokok ASN	227.480.505.659,00	202.687.493.298,00
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	19.698.382.411,00	17.138.434.455,00
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	7.012.864.585,00	7.370.426.500,00
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	12.379.329.660,00	10.913.984.000,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.168.983.950,00	3.661.440.851,00
6	Beban Tunjangan Beras ASN	21.476.974.754,10	18.039.078.896,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.660.222.209,00	359.800.173,00
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	2.999.647,00	3.027.317,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.348.544.279,00	8.401.444.004,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	468.519.784,00	413.821.149,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.405.374.309,00	1.219.435.214,00
12	Beban Tunjangan Khusus	22.436.140.467,00	23.572.376.508,00
Jumlah		330.538.841.714,10	293.780.762.365,00

- Belanja gaji dan tunjangan ASN Tahun 2024 pada LRA sebesar Rp329.173.690.789,00 dan beban gaji dan tunjangan ASN Tahun 2024 pada LO adalah senilai Rp330.538.841.714,10. Terdapat selisih sebesar Rp1.365.150.925,10 merupakan utang Pemerintah Kabupaten Fakfak kepada Perum Bulog Cabang Fakfak yaitu kekurangan pembayaran pembelian beras PNS Kabupaten Fakfak.

b) Beban Tambahan Penghasilan ASN

Beban tambahan penghasilan ASN Tahun 2024 adalah senilai Rp71.755.878.726,00 mengalami penurunan senilai Rp46.569.503.808,00 atau turun sebesar 39,36% jika dibandingkan dengan saldo beban tambahan penghasilan ASN tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp118.325.382.534,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	71.714.515.254,00	114.777.018.399,00
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	41.363.472,00	3.548.364.135,00
Jumlah		71.755.878.726,00	118.325.382.534,00

c) Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN Tahun 2024 adalah senilai Rp40.391.303.928,00 mengalami kenaikan senilai Rp8.233.261.928,00 atau naik sebesar 25,60% jika dibandingkan dengan saldo beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp32.158.042.000,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
1	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	31.809.714.300,00	23.577.785.200,00
2	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	6.744.159.600,00	5.411.986.800,00
3	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	566.500.000,00	1.524.500.000,00
4	Beban Honorarium	1.298.810.000,00	1.643.770.000,00
5	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	(27.879.972,00)	0,00
Jumlah		40.391.303.928,00	32.158.042.000,00

d) Beban Gaji Dan Tunjangan DPRD

Beban gaji dan tunjangan DPRD Tahun 2024 adalah senilai Rp11.981.379.146,00 mengalami kenaikan senilai Rp389.605.727,00 atau naik sebesar 3,36% jika dibandingkan dengan saldo beban gaji dan tunjangan DPRD tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp11.591.773.419,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
1	Beban Uang Representasi DPRD	457.800.000,00	453.524.400,00
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	31.634.400,00	28.606.200,00
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	42.727.800,00	40.844.880,00
4	Beban Uang Paket DPRD	39.333.000,00	38.682.000,00
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	663.810.000,00	654.370.500,00
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	34.392.993,00	45.942.210,00
7	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	29.309.527,00	23.659.572,00
8	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.572.500.000,00	2.520.000.000,00
9	Beban Tunjangan Reses DPRD	300.000.000,00	419.659.572,00
10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	449.759.284,00	458.832.888,00
11	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.317.002.142,00	3.640.736.304,00
12	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.856.000.000,00	3.264.000.000,00
13	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	187.110.000,00	2.914.893,00
Jumlah		11.981.379.146,00	11.591.773.419,00

e) Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Beban gaji dan tunjangan KDH/WKDH Tahun 2024 adalah senilai Rp161.333.432,00 mengalami penurunan senilai Rp304.891,00 atau turun sebesar 0,19% jika dibandingkan dengan saldo beban gaji dan tunjangan KDH/WKDH tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp161.638.323,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	56.014.740,00	55.955.440,00
2	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00
3	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	796.620,00	724.200,00
4	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	732.552,00	1.191.803,00

No	Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
5	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.240,00	1.920,00
6	Beban luran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.241.600,00	5.241.600,00
7	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	102.960,00
8	Beban luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	153.360,00	140.400,00
Jumlah		161.333.432,00	161.638.323,00

f) Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Beban penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2024 adalah senilai Rp574.600.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp20.485.107,00 atau naik sebesar 3,70% jika dibandingkan dengan saldo beban penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp554.114.893,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	154.114.893,00
2	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	373.000.000,00	400.000.000,00
Jumlah		574.600.000,00	554.114.893,00

g) Beban Pegawai BOS

Beban pegawai BOS Tahun 2024 adalah senilai Rp0,00 mengalami penurunan senilai Rp3.876.266.176,00 atau turun sebesar 100% jika dibandingkan dengan saldo beban pegawai BOS tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp3.876.266.176,00 hal ini disebabkan karena pada Tahun 2024 beban pegawai BOS tidak dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak.

2) Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa Tahun 2024 adalah senilai Rp462.019.195.543,14, mengalami penurunan senilai Rp36.052.834.510,29 atau turun sebesar 7,24% jika dibandingkan dengan saldo beban barang dan jasa tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp498.072.030.053,43 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
1	Beban Barang	171.070.465.114,54	204.546.218.897,38
2	Beban Jasa	154.320.492.075,00	151.399.185.845,05
3	Beban Pemeliharaan	12.938.960.088,00	12.660.675.392,00

No	Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
4	Beban Perjalanan Dinas	89.405.994.348,60	105.853.741.758,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.754.386.420,00	6.447.712.100,00
6	Beban Barang Ekstra Komptable	462.944.830,00	1.239.423.287,00
7	Beban Barang dan Jasa BOS	14.557.004.379,00	10.492.306.778,00
8	Beban Barang dan Jasa BOSP	66.624.321,00	0,00
8	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	7.440.323.967,00	5.432.839.263,00
9	Beban Barang dan Jasa BLUD	2.000.000,00	(73.267,00)
Jumlah		462.019.195.543,14	498.072.030.053,43

a) Beban Barang

Beban barang Tahun 2024 adalah senilai Rp171.070.465.114,54 mengalami penurunan senilai Rp33.475.753.782,84 atau turun sebesar 16,37% jika dibandingkan dengan saldo beban barang tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp204.546.218.897,38 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
1	Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.333.516.129,00	1.664.888.495,00
2	Beban Bahan Kimia	22.357.051.733,42	1.377.896.289,00
3	Beban Bahan Bakar dan Pelumas	20.900.602.746,00	21.360.151.435,00
4	Beban Bahan/Bibit Tanaman	1.168.146.854,00	759.008.370,00
5	Beban Bahan/Bibit Ikan	0,00	25.000.000,00
6	Beban Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	325.129.835,00
7	Beban Bahan Lainnya	768.222.620,00	0,00
8	Beban Alat Tulis Kantor	7.261.377.535,00	3.936.554.392,00
9	Beban Kertas dan Cover	5.912.048.037,00	5.434.114.674,00
10	Beban Bahan Cetak	8.904.518.569,00	9.737.955.087,00
11	Beban Benda Pos	384.785.718,00	344.007.794,00
12	Beban Bahan Komputer	11.059.996,00	3.743.107.995,00
13	Beban Perabot Kantor	3.733.910.389,00	3.239.755.575,00
14	Beban Alat Listrik	716.210.570,00	670.313.848,00
15	Beban Perlengkapan Dinas	498.380.262,00	406.607.650,00
16	Beban Perlengkapan Pendukung Olahraga	157.507.500,00	1.359.405.153,00
17	Beban Suvenir/Cendera Mata	277.000.000,00	0,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.578.174.834,00	25.450.153.939,00
19	Beban Obat	5.047.420.221,34	(1.562.253.424,64)
20	Beban Obat-Obatan Lainnya	145.465.291,00	399.406.500,00
21	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan	37.559.120.417,78	64.738.419.403,02



No	Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
	kepada Masyarakat		
22	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	6.676.450.050,00	21.325.782.719,00
23	Beban Natura	4.695.989.050,00	7.532.852.338,00
24	Beban Pakan	0,00	329.656.200,00
25	Beban Makanan dan Minuman Rapat	18.603.422.472,00	18.686.983.366,00
26	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.545.676.938,00	5.251.760.492,00
27	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	321.428.000,00	448.776.000,00
28	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.375.582.071,00	2.685.676.021,00
29	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	607.168.000,00	1.068.464.000,00
30	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.701.533.500,00	7.022.099.098,00
31	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	44.000.000,00	33.300.000,00
32	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	122.975.000,00
33	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	60.000.000,00	0,00
34	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	11.000.000,00	11.000.000,00
35	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	140.680.000,00	518.849.840,00
36	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	310.890.000,00	753.781.500,00
37	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	63.492.710,00	13.492.710,00
38	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	118.500.000,00	191.852.000,00
39	Beban Pakaian Penyelamatan	0,00	45.701.676,00
40	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	724.476.000,00
41	Beban Pakaian Batik Tradisional	127.500.000,00	1.051.793.535,00
42	Beban Pakaian Olahraga	1.234.597.295,00	1.072.058.750,00
43	Beban Pakaian Paskibraka	0,00	436.388.956,00
44	Beban Pakaian Jas/Safari	0,00	17.980.000,00
45	Beban Komponen Peralatan	27.000.000,00	0,00
46	Beban Komponen Attachment	0,00	(542.662.350,00)
47	Beban Komponen Lainnya	0,00	(7.666.441.963,00)
48	Beban Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	68.600.000,00	0,00
49	Beban Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	243.221.000,00	0,00
50	Beban Peralatan Studio Gambar	219.946.500,00	0,00
51	Beban Personal Computer	116.879.918,00	0,00
52	Beban Peralatan Personal Computer	32.281.500,00	0,00
53	Beban Peralatan Komputer Lainnya	10.106.688,00	0,00
Jumlah		171.070.465.114,54	204.546.218.897,38

Belanja barang pada LRA sebesar Rp160.676.413.750,00 dan beban barang pada LO sebesar Rp171.070.465.114,54. Terdapat selisih sebesar Rp10.394.051.364,54 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
A	<i>Mutasi Penambahan pada LO</i>	
1	Beban Persediaan dari Persediaan Awal	26.904.103.147,42
2	Reklas Dari Aset Tetap	145.468.106,00
3	Reklas Dari Persediaan	15.375.461,00
	Jumlah Penambahan	27.064.946.714,42
B	<i>Mutasi Pengurangan pada LO</i>	
1	Beban Persediaan Ke Persediaan Akhir	(11.248.658.144,66)
2	Reklas ke Aset Tetap	(5.355.790.524,22)
3	Reklas ke Aset Lain-Lain	(66.446.681,00)
	Jumlah Pengurangan	(16.670.895.349,88)
	Jumlah	10.394.051.364,54

b) Beban Jasa

Beban jasa Tahun 2024 senilai Rp154.320.492.075,00 mengalami penurunan senilai Rp209.933.770,05 atau turun sebesar 0,14% jika dibandingkan dengan saldo beban jasa tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp151.399.185.845,05 yang terdiri dari:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	135.468.649.545,00	137.362.579.599,05
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	7.284.680.936,00	728.435.468,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.975.362.100,00	2.980.091.280,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.701.727.862,00	6.481.013.498,00
5	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	20.000.000,00	0,00
6	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	249.861.000,00	0,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	994.588.000,00
8	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	2.339.850.000,00	404.000.000,00
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.280.360.632,00	2.448.478.000,00
	Jumlah	154.320.492.075,00	151.399.185.845,05

c) Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Tahun 2024 senilai Rp12.938.960.088,00 mengalami kenaikan senilai Rp278.284.696,00 atau naik sebesar

2,20% jika dibandingkan dengan saldo beban pemeliharaan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp12.660.675.392,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.660.155.088,00	11.913.099.017,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	278.805.000,00	732.576.375,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigas	0,00	15.000.000,00
Jumlah		12.938.960.088,00	12.660.675.392,00

d) Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas Tahun 2024 senilai Rp89.405.994.348,60 mengalami penurunan senilai Rp16.447.747.409,40 atau turun sebesar 15,54% jika dibandingkan dengan saldo beban perjalanan dinas tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp105.853.741.758,00 yang merupakan beban perjalanan dinas dalam daerah.

e) Beban Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Tahun 2024 senilai Rp11.754.386.420,00 mengalami kenaikan senilai Rp5.306.674.320,00 atau naik sebesar 82,30% jika dibandingkan dengan saldo beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp6.447.712.100,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat	916.195.500,00	1.040.412.500,00
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat	10.838.190.920,00	5.407.299.600,00
Jumlah		11.754.386.420,00	6.447.712.100,00

f) Beban Barang Ekstra Komptable

Beban barang ekstra komptable Tahun 2024 senilai Rp462.944.830,00 mengalami penurunan senilai Rp776.478.457,00 atau turun sebesar 62,65% jika dibandingkan dengan saldo beban barang ekstra komptable tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp1.239.423.287,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Barang Ekstra Komptable Peralatan Mesin	462.944.830,00	1.236.054.287,00

2	Beban Barang Ekstra Komptable Aset Tetap Lainnya	0,00	3.369.000,00
Jumlah		462.944.830,00	1.239.423.287,00

g) Beban Barang dan Jasa BOS

Beban barang dan jasa BOS Tahun 2024 senilai Rp14.557.004.379,00 mengalami kenaikan senilai Rp4.064.697.601,00 atau naik sebesar 38,74 % jika dibandingkan dengan saldo beban barang dan jasa BOS tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp10.492.306.778,00 yang merupakan beban barang dan jasa pada penggunaan Dana BOS di Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri.

h) Beban Barang dan Jasa BOSP

Beban barang dan jasa BOSP Tahun 2024 senilai Rp66.624.321,00. Pada tahun 2023 tidak ada saldo untuk beban barang dan jasa BOSP karena tidak dianggarkan. Beban barang dan jasa BOSP tahun 2024 merupakan beban barang dan jasa penggunaan Dana BOS pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri dan Pendidikan Kesetaraan Negeri.

i) Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Beban barang dan jasa BOK Puskesmas Tahun 2024 senilai Rp7.440.323.967,00 mengalami kenaikan senilai Rp2.007.484.704,00 atau naik sebesar 36,95% jika dibandingkan dengan saldo beban barang dan jasa BOK Puskesmas tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp5.432.839.263,00 yang merupakan beban barang dan jasa pada penggunaan Dana BOK Puskesmas.

j) Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban barang dan jasa BLUD Tahun 2024 senilai Rp2.000.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp2.073.267,00 atau naik sebesar 2.829,74% jika dibandingkan dengan saldo beban barang dan jasa BLUD tahun sebelumnya senilai Rp(73.267,00) yang merupakan beban barang dan jasa pada Kantor Distrik Fakfak akibat kesalahan penganggaran TA 2024.

3) Beban Hibah

Beban hibah Tahun 2024 senilai Rp78.675.546.216,00, mengalami kenaikan senilai Rp16.019.420.932,000 atau naik sebesar 25,57% jika

dibandingkan dengan saldo beban hibah tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp62.656.125.284,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
1	Beban Hibah kepada BUMN	5.830.262.369,00	0,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	59.863.122.499,00	50.126.666.807,00
3	Beban Hibah Dana BOS	10.018.450.199,00	12.122.770.852,00
4	Beban Hibah Dana BOSP	2.606.065.799,00	0,00
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	357.645.350,00	406.687.625,00
Jumlah		78.675.546.216,00	62.656.125.284,00

a) Beban Hibah kepada BUMN

Beban hibah kepada BUMN Tahun 2024 senilai Rp5.830.262.369,00. Pada tahun 2023 tidak ada saldo untuk beban Hibah kepada BUMN. Beban hibah kepada BUMN Tahun 2024 merupakan iuran bantuan dari program JKN bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

b) Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Beban hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2024 senilai Rp59.863.122.499,00 mengalami kenaikan senilai Rp9.736.455.692,00 atau naik sebesar 19,42% jika dibandingkan dengan saldo beban hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp50.126.666.807,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	43.434.281.200,00	25.336.270.800,00
2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.897.616.646,00	0,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.833.830.435,00	24.823.293.421,00
4	Beban Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0,00	22.500.000,00
5	Beban Hibah kepada Organisasi	697.394.218,00	(55.397.414,00)

No	Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
	Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		
Jumlah		59.863.122.499,00	50.126.666.807,00

- Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada LO sebesar Rp43.434.281.200,00 dan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada LRA sebesar Rp43.451.006.200,00. Terdapat perbedaan sebesar Rp16.725.000,00 merupakan reklas dari aset tetap karena dihibahkan.
- Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada LO sebesar Rp13.683.092.804,00 dan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada LRA sebesar Rp13.163.284.928,00. Terdapat selisih sebesar Rp519.807.876,00 merupakan reklas dari aset tetap karena dihibahkan.
- Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada LO sebesar Rp697.394.218,00 dan Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada LRA sebesar Rp665.000.000,00. Terdapat selisih sebesar Rp32.394.218,00 merupakan reklas dari aset tetap karena dihibahkan.

c) Beban Hibah Dana BOS

Beban Hibah Dana BOS Tahun 2024 adalah senilai Rp10.018.450.199,00 mengalami penurunan senilai Rp2.104.320.653,00 atau turun sebesar 17,36% jika dibandingkan dengan saldo beban Hibah Dana BOS tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp12.122.770.852,00 merupakan beban hibah uang Dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan swasta (SD dan SMP Swasta).

d) Beban Hibah Dana BOSP

Beban Hibah Dana BOSP Tahun 2024 adalah senilai Rp2.606.065.799,00 mengalami kenaikan senilai Rp2.606.065.799,00

atau naik sebesar 100% jika dibandingkan dengan saldo beban Hibah Dana BOSP tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp0,00 merupakan beban hibah uang Dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan swasta (PAUD dan Pendidikan Kesetaraan swasta).

e) Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Beban hibah bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2024 adalah senilai Rp357.645.350,00 mengalami penurunan senilai Rp49.042.275,00 atau turun sebesar 12,06% jika dibandingkan dengan saldo beban hibah bantuan keuangan kepada partai politik tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp406.687.625,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai Politik	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
1	Partai Golkar	79.242.450,00	79.242.450,00
2	Partai Nasdem	50.733.225,00	50.733.225,00
3	Partai Kebangkitan Bangsa	44.112.325,00	0,00
4	Parta PDI Perjuangan	35.257.450,00	35.257.450,00
5	Partai Perindo	34.344.025,00	34.343.025,00
6	Partai PKS	33.717.975,00	77.830.300,00
7	Partai Gerindra	32.097.475,00	32.097.475,00
8	Partai Bulan Bintang	27.849.450,00	27.849.450,00
9	Partai Demokrat	20.290.975,00	20.290.975,00
10	Partai Hanura	0,00	26.263.675,00
11	PAN	0,00	22.779.600,00
Jumlah		357.645.350,00	406.687.625,00

4) Beban Bantuan Sosial

Jumlah beban bantuan sosial Tahun 2024 senilai Rp9.236.844.000,00, mengalami penurunan senilai Rp8.793.013.500,00 atau turun sebesar 48,77% jika dibandingkan dengan saldo beban bantuan sosial tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp18.029.857.500,00, yang merupakan bantuan sosial berupa uang kepada individu/perorangan.

5) Beban Penyisihan Piutang

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 senilai Rp718.445.847,42, mengalami kenaikan senilai Rp146.917.783,10 atau naik 25,71% jika dibandingkan dengan saldo Beban Penyisihan Piutang tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp571.528.064,32 yang terdiri dari:

No	Partai Politik	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
1	Beban Penyisihan Pajak Reklame	624.500,00	12.812,50
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	717.821.347,42	571.515.251,82
Jumlah		718.445.847,42	571.528.064,32

Perbedaan Penyisihan Piutang dan Beban Penyisihan Piutang dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Beban Penyisihan	Koreksi
1	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(160.500,00)	(785.000,00)	624.500,00	0,00
2	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(811.929.620,10)	(811.929.620,10)	0,00	0,00
3	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	(7.478.245.666,66)	(8.196.067.014,08)	717.821.347,42	0,00
4	Penyisihan Piutang Retribusi	(593.802.000,00)	(593.802.000,00)	0,00	0,00
5	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(643.825.289,50)	(634.761.639,00)	0,00	9.063.650,50
6	Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka	(226.267.501,75)	(226.267.501,75)	0,00	0,00
Jumlah		(9.754.230.578,01)	(10.463.612.774,93)	718.445.847,42	9.063.650,50

Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dikoreksi sebesar Rp9.063.650,50 karena mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya.

b. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah beban penyusutan dan amortisasi Tahun 2024 senilai Rp197.030.835.596,52, mengalami kenaikan senilai Rp39.813.375.428,46 atau naik sebesar 25,32% jika dibandingkan dengan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp157.217.460.168,06 yang terdiri dari:

No	Partai Politik	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	48.638.957.261,51	43.165.822.057,06
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.294.194.524,28	21.076.520.595,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	125.097.683.810,73	92.975.117.516,00
Jumlah		197.030.835.596,52	157.217.460.168,06

c. Beban Transfer

Jumlah beban Transfer Tahun 2024 senilai Rp83.597.560.657,00 yang merupakan beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa yaitu Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dari APBD, mengalami kenaikan senilai Rp20.954.742.905,00 atau naik sebesar 33,45% jika dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp62.642.817.752,00.

3. Beban Menurut Klasifikasi Organisasi

No	Nama SKPD	Beban Daerah Tahun 2024 (Rp)	Beban Daerah Tahun 2023 (Rp)	Naik/(Turun)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	308.549.649.503,25	291.336.047.202,96	17.213.602.300,29	5,91
2	Dinas Kesehatan	130.094.630.876,45	102.496.608.065,00	27.598.022.811,45	26,93
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	68.531.567.898,77	70.821.646.229,46	(2.290.078.330,69)	(3,23)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	181.943.901.934,10	172.174.850.061,00	9.769.051.873,10	5,67
5	Satuan Polisi Pamong Praja	9.170.259.135,00	11.240.125.383,00	(2.069.866.248,00)	(18,41)
6	Dinas Sosial	10.265.826.503,00	14.509.906.734,00	(4.244.080.231,00)	(29,25)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.347.679.982,00	7.558.787.638,00	(211.107.656,00)	(2,79)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.629.596.171,00	17.107.915.390,00	521.680.781,00	3,05
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	8.229.745.732,00	9.920.476.231,02	(1.690.730.499,02)	(17,04)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.297.182.424,00	7.866.602.681,00	(1.569.420.257,00)	(19,95)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	9.309.467.807,00	8.802.689.452,00	506.778.355,00	5,76
12	Dinas Perhubungan	12.503.278.499,38	18.471.675.802,00	(5.968.397.302,62)	(32,31)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	10.049.162.972,11	9.701.270.695,00	347.892.277,11	3,59
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.263.387.895,00	8.437.514.008,00	(2.174.126.113,00)	(25,77)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.420.058.639,00	7.763.514.080,00	(2.343.455.441,00)	(30,19)
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.089.770.748,00	5.995.398.593,00	(905.627.845,00)	(15,11)
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.476.696.771,00	31.059.014.219,05	(12.582.317.448,05)	(40,51)
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12.508.497.249,00	19.369.204.574,00	(6.860.707.325,00)	(35,42)
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	25.031.385.854,00	33.230.569.291,00	(8.199.183.437,00)	(24,67)
20	Dinas Perkebunan	8.310.554.821,00	10.308.951.465,00	(1.998.396.644,00)	(19,39)
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	12.138.355.933,00	11.104.281.772,00	1.034.074.161,00	9,31

22	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5.443.890.231,00	8.024.192.284,00	(2.580.302.053,00)	(32,16)
23	Sekretariat Daerah	80.496.877.467,00	100.560.657.025,00	(20.063.779.558,00)	(19,95)
24	Sekretariat DPRD	44.294.801.956,60	43.284.364.486,00	1.010.437.470,60	2,33
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	15.492.868.559,00	17.296.416.832,00	(1.803.548.273,00)	(10,43)
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	111.376.931.182,10	74.461.780.092,00	36.915.151.090,10	49,58
27	Badan Pendapatan Daerah	8.192.045.290,42	10.989.818.203,32	(2.797.772.912,90)	(25,46)
28	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.966.712.761,00	21.008.667.971,00	(6.041.955.210,00)	(28,76)
29	Inspektorat	15.745.881.655,00	12.487.635.161,00	3.258.246.494,00	26,09
30	Distrik Arguni	2.450.477.150,00	2.294.119.086,00	156.358.064,00	6,82
31	Distrik Pariwari	8.234.578.104,00	9.828.667.425,00	(1.594.089.321,00)	(16,22)
32	Distrik Fakfak	6.020.391.698,00	6.454.253.859,00	(433.862.161,00)	(6,72)
33	Distrik Wartutin	2.708.772.475,00	2.642.067.800,00	66.704.675,00	2,52
34	Distrik Mbahamdandara	2.232.790.930,00	2.458.448.061,00	(225.657.131,00)	(9,18)
35	Distrik Karas	3.637.312.297,00	4.051.794.812,00	(414.482.515,00)	(10,23)
36	Distrik Fakfak Barat	4.129.889.265,00	4.016.999.241,00	112.890.024,00	2,81
37	Distrik Kokas	4.944.345.306,00	5.069.806.624,00	(125.461.318,00)	(2,47)
38	Distrik Tomage	2.708.369.445,00	2.644.734.667,00	63.634.778,00	2,41
39	Distrik Fakfak Timur Tengah	2.943.506.756,00	3.025.228.493,00	(81.721.737,00)	(2,70)
40	Distrik Furwagi	2.580.132.116,00	2.740.985.555,00	(160.853.439,00)	(5,87)
41	Distrik Bomberay	2.522.950.216,00	2.854.069.443,00	(331.119.227,00)	(11,60)
42	Distrik Fakfak Timur	2.661.878.419,00	2.882.289.968,00	(220.411.549,00)	(7,65)
43	Distrik Kramongmongga	3.503.157.358,00	3.341.410.117,00	161.747.241,00	4,84
44	Distrik Kayauni	2.900.135.276,00	3.251.263.129,00	(351.127.853,00)	(10,80)
45	Distrik Fakfak Tengah	7.527.730.193,00	7.899.224.104,00	(371.493.911,00)	(4,70)
46	Distrik Teluk Patipi	4.005.577.449,00	4.111.188.800,00	(105.611.351,00)	(2,57)
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51.799.103.903,00	32.680.665.727,00	19.118.438.176,00	58,50
Jumlah		1.286.681.764.806,18	1.259.637.798.531,81	27.043.966.274,37	2,15

5.4.2. SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI

Jika dibandingkan antara realisasi pendapatan-LO Tahun 2024 senilai Rp1.370.824.468.935,42 dengan beban-LO Tahun 2024 senilai Rp1.286.681.764.806,18 maka Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun 2024 mengalami surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp84.142.704.129,24.

5.4.3. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan non operasional Tahun 2024 senilai Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO senilai Rp0,00.
2. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO senilai Rp0,00.
3. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO senilai Rp0,00.
4. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO senilai Rp0,00.

5.4.4. SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa senilai Rp87.230.444.129,24 mengalami kenaikan senilai Rp7.638.605.790,00 atau naik 9,60% jika dibandingkan dengan Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp79.591.838.339,24. Berikut adalah perhitungan Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa:

A	Surplus / Defisit Dari Operasi	84.142.704.129,24	
B	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	0,00	
C	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	84.142.704.129,24	C = A + B

5.4.5. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Saldo Pos Luar Biasa Tahun 2024 senilai Rp12.401.499.000,00, mengalami penurunan senilai (Rp1.267.774.920,00) atau turun 9,27% jika dibandingkan dengan saldo pos Luar Biasa tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp13.669.273.920,00 yang merupakan beban atas belanja tak terduga.

5.4.6. SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa Tahun 2024 senilai Rp(12.401.499.000,00) dengan perhitungan sebagai berikut:

A	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	0,00	
B	Pos Luar Biasa	12.401.499.000,00	
C	Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	(12.401.499.000,00)	C = A - B

5.4.7 SURPLUS/(DEFISIT) – LO

Berdasarkan realisasi Pendapatan – LO dan Beban tahun anggaran 2024 dihasilkan Surplus – LO senilai Rp74.828.945.129,24 dengan perhitungan sebagai berikut:

A	Pendapatan – LO	1.370.824.468.935,42	
B	Beban	1.286.681.764.806,18	
C	Surplus/(Defisit) Dari Operasi	84.142.704.129,24	C = A - B
D	Surplus/(Defisit) Dari Keg. Non Operasional	0,00	
E	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	84.142.704.129,24	E = C + D
F	Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa	(12.401.499.000,00)	
G	SURPLUS/(DEFISIT) – LO	71.741.205.129,24	G = E + F

5.5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang memberikan informasi arus masuk dan keluar kas dan setara kas pemerintah selama satu periode akuntansi serta saldo kas per tanggal pelaporan.

Laporan Arus Kas yang disajikan dalam Laporan Keuangan ini adalah LAK menurut SAP yang menggambarkan aliran kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non Anggaran yang terjadi di Bendaharawan Umum Daerah.

Ringkasan laporan arus kas Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

5.5.1. Laporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Fakfak selama Tahun 2024 senilai Rp325.224.429.049,50 dengan perincian sebagai berikut.

Arus Kas Masuk	Rp1.531.391.532.229,50
Arus Kas Keluar	Rp1.206.167.103.180,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp325.224.429.049,50

5.5.2. Laporan Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi pemerintah dan menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang.

Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Fakfak selama Tahun 2024 senilai Rp(296.392.612.826,08) dengan perincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk	Rp130.732.688,00
Arus Kas Keluar	Rp296.523.345.514,08
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp(296.392.612.826,08)

5.5.3. Laporan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran bruto yang tidak mempengaruhi anggaran.

Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Fakfak selama Tahun 2024 senilai Rp61.794.211,00 dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk	Rp107.816.095.223,00
----------------	----------------------

Arus Kas Keluar	Rp107.754.301.012,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp61.794.211,00

5.5.4. Kenaikan/(Penurunan) Kas

Kenaikan kas selama periode Tahun 2024 senilai Rp28.893.610.434,42 menunjukkan adanya surplus realisasi APBD Tahun 2024 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih besar dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan kenaikan kas adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	325.224.429.049,50
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(296.392.612.826,08)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	61.794.211,00
Jumlah		28.893.610.434,42

5.5.5. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas senilai Rp71.159.766.340,15 merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Fakfak yang ada di BUD per 31 Desember 2024. Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut:

Kenaikan / (Penurunan) Kas	28.893.610.434,42
Saldo Awal Kas	41.876.709.764,73
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) - diluar PFK	389.446.141,00
Saldo Akhir Kas	71.159.766.340,15

Saldo Akhir Kas terdiri dari :

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	62.431.935.254,06
2	Kas di Bendahara Penerimaan	602.673.719,09
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.778.290.005,00
4	Kas Dana BOSP	504.254.397,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.201.392.291,00
6	Kas di Bendahara BOK Puskesmas	2.249.774.533,00
7	Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) - diluar PFK	389.446.141,00
Jumlah		71.159.766.340,15

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Ekuitas Awal	2.637.442.708.241,55	2.619.756.353.397,81

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
SURPLUS/DEFISIT-LO	71.741.205.129,24	65.922.564.419,24
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi nilai persediaan	0,00	0,00
Selisih revaluasi aset tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas	(1.584.769.229,78)	(48.236.209.575,50)
EKUITAS AKHIR	2.707.599.144.141,01	2.637.442.708.241,55

Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Saldo awal ekuitas Tahun 2024 senilai Rp2.637.442.708.241,55 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2023.
2. Surplus/defisit – LO senilai Rp71.741.205.129,24 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun 2024.
3. Koreksi ekuitas Tahun 2024 senilai Rp(1.584.769.229,78) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
a	Saldo Awal	(48.236.209.576,50)
b	Penambahan	
1	Penyesuain Koreksi Ekuitas Awal	80.476.833.441,00
2	Koreksi Beban Pegawai karen pembayaran hutang gaji pegawai tahun 2023	23.400.000,00
3	Penyesuaian Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	9.063.650,50
4	Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	161.650.479,00
	Jumlah Penambahan	80.670.947.570,50
c	Pengurangan	
1	Penyesuain Koreksi Ekuitas Awal	32.240.623.865,00
2	Koreksi Kas Lainnya	486.867.541,71
3	Koreksi Saldo Tuntutan Ganti Rugi Bendahara Tahun 2024	2.000.000,00
4	Koreksi utang PFK karena kelebihan bayar iurang BPJS	3.000,00
5	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	1.266.612.817,57
6	Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek	23.400.000,00
	Jumlah Pengurangan	34.019.507.224,28
	Jumlah = a + b – c	(1.584.769.229,78)

4. Saldo akhir ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2024 senilai Rp2.707.599.144.141,01 sesuai dengan yang tercatat dalam Laporan Neraca Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2024.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

Pemerintah Kabupaten Fakfak adalah kabupaten yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Otonom di Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya.

6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Pemerintah Kabupaten Fakfak adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Fakfak, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Fakfak, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2022-2024.

6.3. Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Tahun 2024

Selama Tahun 2023 terjadi dua kali mutasi, rotasi dan promosi pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 45 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Fakfak. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berikut ini merupakan beberapa kesimpulan dari laporan keuangan.

1. Realisasi pendapatan daerah-LRA Tahun 2024 senilai Rp1.531.522.264.917,50 atau ekuivalen 98,28% dari target yang dianggarkan senilai Rp1.558.381.740.870,00. Realisasi ini mengalami kenaikan senilai Rp101.302.714.535,91 atau naik sebesar 7,08% dari jumlah realisasi tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp1.430.219.550.381,59.
2. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 senilai Rp1.500.365.448.694,08 atau ekuivalen 93,89% dari target yang dianggarkan senilai Rp1.597.995.247.846,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp5.656.393.826,71 atau turun sebesar 0,38% dari jumlah realisasi tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp1.506.021.842.520,79.
3. Realisasi Transfer Ke Desa Tahun 2024 senilai Rp205.718.335.657,00 atau ekuivalen 101,39% dari target yang dianggarkan senilai Rp202.904.759.031,00. Realisasi ini mengalami kenaikan senilai Rp21.756.472.905,00 atau naik sebesar 11,83% dari jumlah realisasi tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp183.961.862.752,00.
4. Realisasi penerimaan pembiayaan dari penggunaan SiLPA tahun lalu senilai Rp41.938.506.975,73 dan pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2024 senilai Rp2.325.000.000,00, sehingga pembiayaan netto senilai Rp39.613.506.975,73.
5. Total pendapatan daerah – LO Tahun 2024 senilai Rp1.370.824.468.935,42. Terjadi kenaikan senilai Rp31.594.832.064,37 atau naik sebesar 2,36% dari jumlah Pendapatan - LO Tahun 2023 yang hanya senilai Rp1.339.229.636.871,05.
6. Total beban daerah Tahun 2024 senilai Rp1.286.681.764.806,18. Terjadi kenaikan senilai

- Rp27.043.966.274,37 atau naik sebesar 2,15% dibandingkan jumlah beban daerah Tahun 2023 yang hanya senilai Rp1.259.637.798.531,81.
7. Aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2024 senilai Rp2.709.868.834.671,11 mengalami kenaikan senilai Rp75.234.844.363,56 atau naik sebesar 2,74% dari saldo yang disajikan per 31 Desember 2023 yang hanya senilai Rp2.637.633.990.307,55.
 8. Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2024 senilai Rp2.269.690.530,10, terjadi kenaikan senilai Rp2.078.408.464,10 atau naik sebesar 1.086,57% dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2023 yang hanya senilai Rp191.282.066,00.
 9. Saldo Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2024 senilai Rp2.707.442.708.141,01, terjadi kenaikan senilai Rp70.156.435.899,46 atau naik 2,66% dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2023 yang hanya senilai Rp2.637.442.708.241,55.
 10. Saldo Awal Ekuitas Kabupaten Fakfak Tahun 2024 senilai Rp2.637.442.708.241,55, dan saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2024 senilai Rp2.707.599.144.141,01, sehingga terjadi kenaikan senilai Rp70.156.435.899,46 atau naik sebesar 2,66%.

Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar di atas, maka pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2024 pada umumnya berjalan lancar dan telah mencapai target kinerja keuangan dan pertanggungjawaban anggaran yang telah ditetapkan. Namun perlu dipahami, di samping hasil-hasil yang telah dicapai, masih terdapat juga kekurangan dan hambatan yang kesemuanya itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Kabupaten Fakfak.


BURATI FAKFAK
SAMAUN DAHLAN, S.Sos, M.AP